2025
LAPORAN KINERJA

Pemerintah Kota Pariaman





Jalan Imam Bonjol Nomor 44 Pariaman
(0751) 92202
@bagian_organisasi_kotapariaman
bagianorganisasikotapariaman

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
INSPEKTORAT
Jl. Rohana Kudus No. 44 Taratak, Kota Pariaman
Telp./Fax. (0751) 91557

16 April 2026

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LKjIP PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Pariaman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu Kami, masih terdapat kondisi atau hal - hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pariaman, 30 April 2026
Inspektur Kota Pariaman

INSPEKTUR
KOTA PARIAMAN

AFWANDI,S.STP.M.SI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19[illegible]199810 1 001.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Pariaman Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pariaman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kota Pariaman Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024–2026 serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja sasaran strategis daerah, tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, serta efektivitas pemanfaatan sumber daya dalam mencapai target pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pariaman pada masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi, pengambilan kebijakan, serta media informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Pariaman, 01 Mei 2026

Wali Kota Pariaman,



Yota Balad

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kota Pariaman Tahun 2025. Kota Pariaman memiliki 19 (Sembilan Belas) Sasaran Strategis dengan total 26 (dua puluh enam) indikator kinerja dan 26 (dua puluh enam) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 26 (dua puluh enam) target tersebut Kota Pariaman bisa dikatakan berhasil, dengan rata-rata capaian keseluruhan indikator sebesar 95,33%, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Target dengan realisasi di atas 100% sebanyak 10 indikator.
2) Target dengan realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator
3) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 14 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kota Pariaman tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan 1

Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing	Angka Harapan Lama Sekolah	14,82	14,80	99.86%
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	11,46	11,32	98,77%
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	74,37	74,62	100,34%
	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada	10,5	10,3	101,9%

	balita			
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan	14,146 (Ribu/Rp)	14,261 (Ribu/Rp)	100,81%
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,45	60,14*	104,68%
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,70	98,11*	99.40

Keterangan:

**Realisasi menggunakan pengukuran tahun 2024*

Tujuan 2

Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	16,14%	16,09%	99,69%
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	17,76	17,36	97,74%
Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	Persentase Pertumbuhan *Spending of Money*	3,5%	0,25%	7.14%

Meningkatnya iklim usaha dan investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	2.8%	6.5%	232.14%
Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	3,76	3,83	98,17%
Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,54%	5,16%	86,34%
Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,8003	0,8003	100%

Tujuan 3

Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kota	70,01 (BB)	61,56 (B)	87,93%
	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	100%
Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks SPBE	3.51 (Sangat Baik)	4.18 (Sangat Baik)	119.08%
	Indeks Profesional ASN	85,96 (Tinggi)	85,40 (Tinggi)	99.34%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,52 (A)	3,10 (B-)	68,58%
	Indeks Kepuasan	86,20	89,55	103,89%

	Masyarakat (IKM)			

Tujuan 4

Terwujudnya Kota Pariaman Layak Huni

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	64,74	64,83	101,13%
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,97	72,07	103%
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	89,08%	71,67%	80,45%
	Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	19,09 Ha	0,16 Ha	0,83%
Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Mitigasi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	48	50	104 %
Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan keamanan masyarakat.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	72,06%	60%	83,26%

Realisasi APBD Kota Pariaman Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp620.430.914.949 atau 94,61%, sedangkan belanja daerah sebesar Rp598.455.933.818 atau 91,30% dari anggaran.

Pelaksanaan APBD menghasilkan surplus sebesar Rp21.974.981.130 dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp21.683.513.842.

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,71%. Nilai tersebut berada dalam rentang -20% sampai dengan 20%, sehingga termasuk dalam kategori efisiensi. Selanjutnya diperoleh Nilai Efisiensi (NE) sebesar 51,78, yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025 telah berjalan secara cukup efisien.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 2
1.3 Gambaran Umum 3
1.4 Analisis Isu-isu Strategis 9
1.5 Sistematika Laporan 15
BAB II PERENCANAAN 16
2.1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 16
2.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025 21
2.3 Program dan Anggaran Tahun 2025 25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 35
A. Capaian Kinerja Organisasi 35
1. Pengukuran Kinerja 35
2. Analisis Capaian Kinerja 39
1) Angka Harapan Lama Sekolah 39
2) Angka Rata-rata lama sekolah 52
3) Angka Usia Harapan Hidup 68
4) Prevalensi *Stunting* 81
5) Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan 96
6) Indeks Pemberdayaan Gender 113
7) Indeks Pembangunan Gender 128
8) Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB 139
9) Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB 152
10) Persentase Pertumbuhan *Spending of Money* 169
11) Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi 181
12) Angka Kemiskinan 191
13) Tingkat Pengangguran Terbuka 217
14) Indeks Desa Membangun 243

15) Nilai Evaluasi AKIP 257
16) Opini BPK terhadap LKPD 280
17) Indeks SPBE 295
18) Indeks Profesionalitas ASN 312
19) Indeks Pelayanan Publik 335
20) Indeks Kepuasan Masyarakat 352
21) Indeks Infrastruktur Daerah 363
22) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 374
23) Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni 393
24) Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani 417
25) Indeks Ketahanan Daerah 430
26) Indeks Ketentraman dan Ketertiban 442
B. Realisasi Anggaran 453
C. Penghargaan 461
BAB IV PENUTUP 463
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1 Keselarasan Tujuan RPD dengan Misi RPJPD 17
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 18
2.3 Perubahan Kota Pariaman Tahun 2025 23
2.4 Program dan Anggaran Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut adanya pengelolaan kinerja yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai wujud pelaksanaan prinsip *good governance*. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penerapan SAKIP bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada hasil.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Pariaman kepada pemangku kepentingan atas pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta pemanfaatan sumber daya yang telah dialokasikan selama Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Kota Pariaman Tahun 2025 berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, antara lain Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024–2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja, serta rencana kerja tahunan. Dengan berpedoman pada dokumen perencanaan tersebut, laporan ini menyajikan keterkaitan yang jelas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Selain sebagai instrumen pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Kota Pariaman Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana evaluasi terhadap tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan

perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan serta pelaksanaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Laporan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai media pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai capaian kinerja Pemerintah Kota Pariaman dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Melalui laporan ini, diharapkan dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 memiliki maksud dan tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

A. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Pariaman atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan sasaran, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Selain itu, penyusunan laporan kinerja dimaksudkan sebagai wujud penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi kinerja secara terukur dan akuntabel atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah selama Tahun Anggaran 2025.
2. Menilai tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024–2026.
3. Menjadi sarana evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
4. Mengidentifikasi permasalahan, hambatan, serta faktor pendukung dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah.
5. Menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, perbaikan perencanaan, dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya.
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

1.3 Gambaran Umum Kota Pariaman

A. Pembentukan Kota Pariaman

Kota Pariaman adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pesisir pantai barat Pulau Sumatera. Kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.

B. Kondisi Pemerintahan

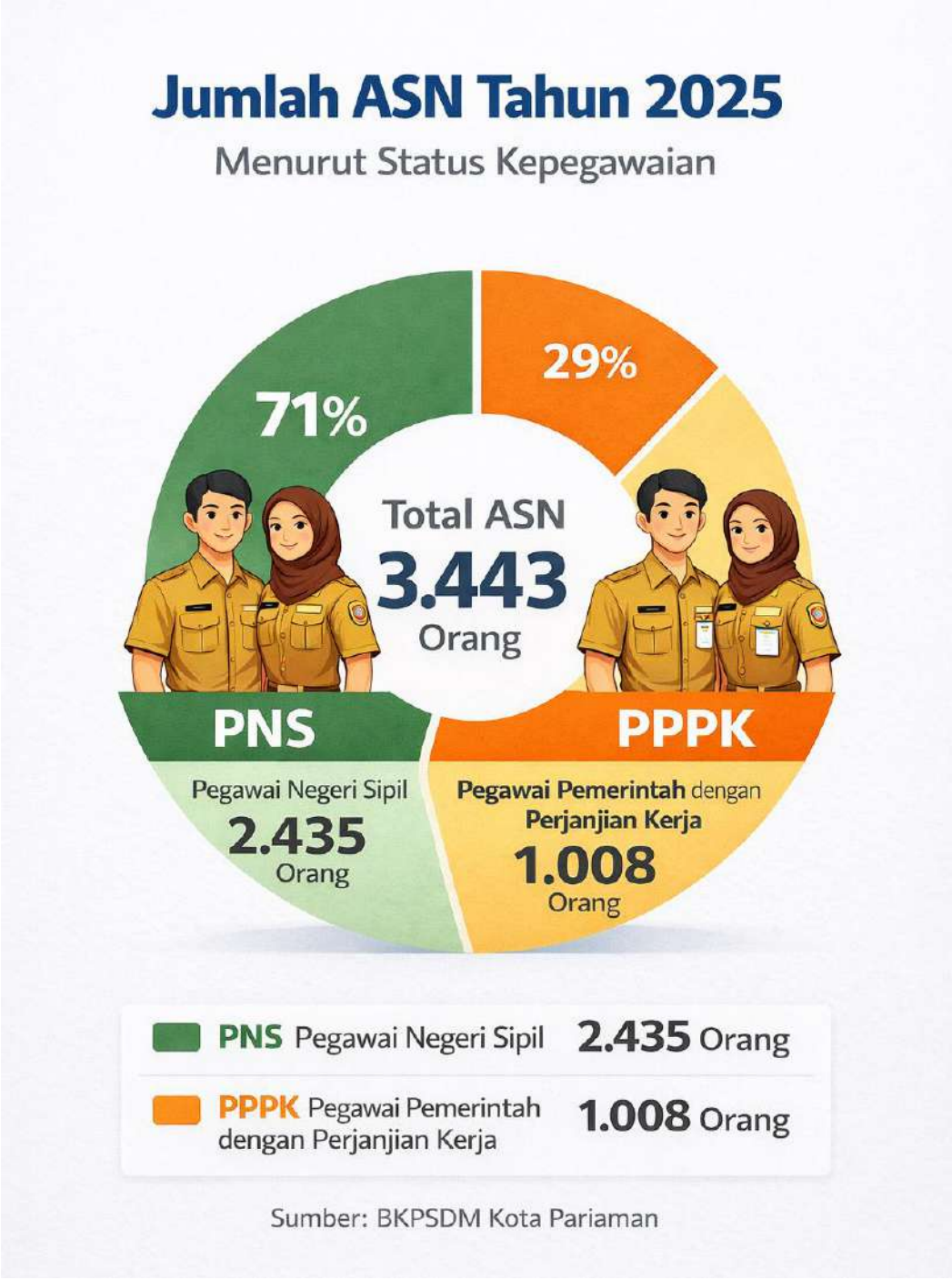
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Tipe B.
b. Sekretariat DPRD Tipe C.
c. Inspektorat Tipe B.
d. Dinas Daerah:
    1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe B.

2) Dinas Kesehatan Tipe B.
3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tipe B.
4) Dinas Sosial Tipe C.
5) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A.
6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe C.
7) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B.
8) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe B.
9) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B.
10) Dinas Perindust rian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Tipe B.
11) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A.
12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C.
13) Dinas Perhubungan Tipe C.
14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C.
15) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C.
16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C.

e. Badan Daerah:
   1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A.
   2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe B.
   3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C.
   4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A.
f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
g. Kecamatan Pariaman Tengah Tipe A.
h. Kecamatan Pariaman Utara Tipe A.
i. Kecamatan Pariaman Selatan Tipe A.
j. Kecamatan Pariaman Timur Tipe A.

7. Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman
   1) Jumlah ASN menurut Status Kepegawaian (PNS dan PPPK)



Berdasarkan data yang bersumber dari BKPSDM Kota Pariaman, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 3.443 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 2.435 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1.008 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

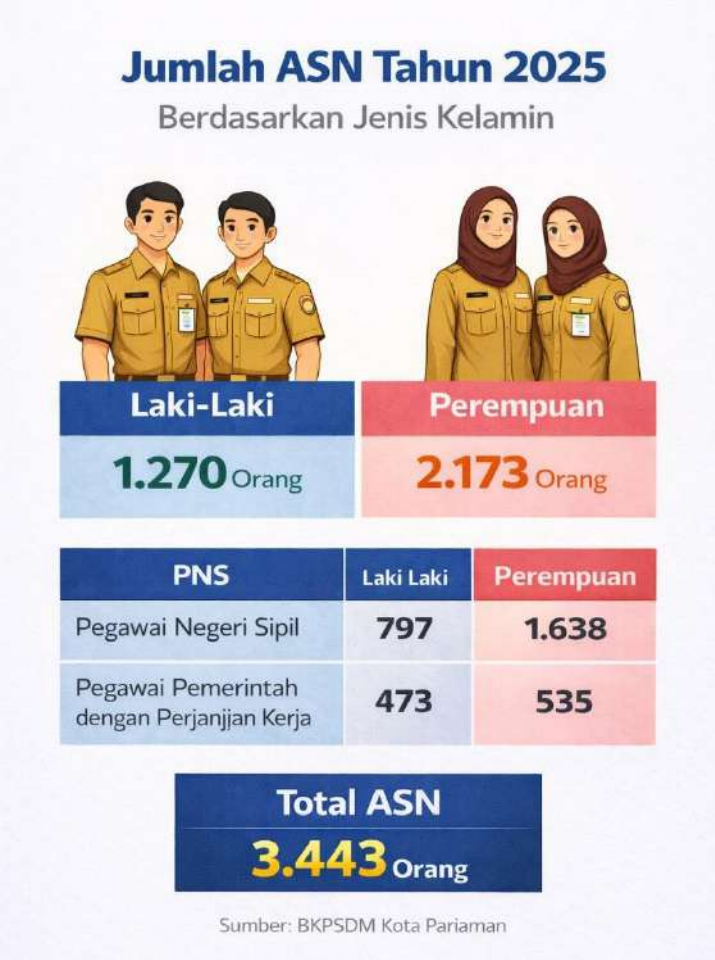
Secara proporsional, ASN dengan status PNS mendominasi sebesar sekitar 71%, sedangkan PPPK berkontribusi sekitar 29% dari total ASN. Komposisi ini menunjukkan bahwa PNS masih menjadi tulang

punggung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelaksanaan fungsi manajerial, administratif, dan pelayanan publik yang bersifat berkelanjutan.

Di sisi lain, proporsi PPPK yang relatif signifikan mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas sumber daya aparatur melalui pemenuhan kebutuhan tenaga profesional dan teknis tertentu, terutama pada sektor pelayanan dasar. Keberadaan PPPK juga menunjukkan upaya penyesuaian terhadap kebutuhan organisasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap tuntutan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, komposisi ASN Tahun 2025 tersebut menunjukkan keseimbangan antara stabilitas aparatur tetap (PNS) dan dukungan tenaga berbasis kontrak kerja (PPPK). Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan prinsip manajemen ASN yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

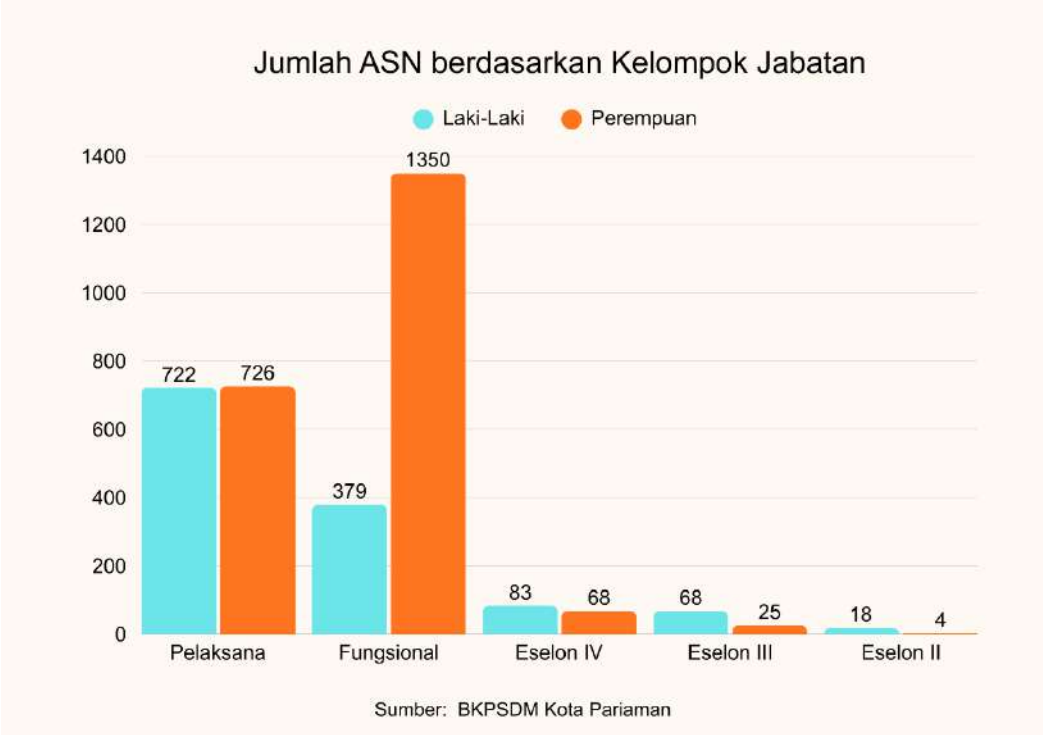
2) Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin



3) Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir



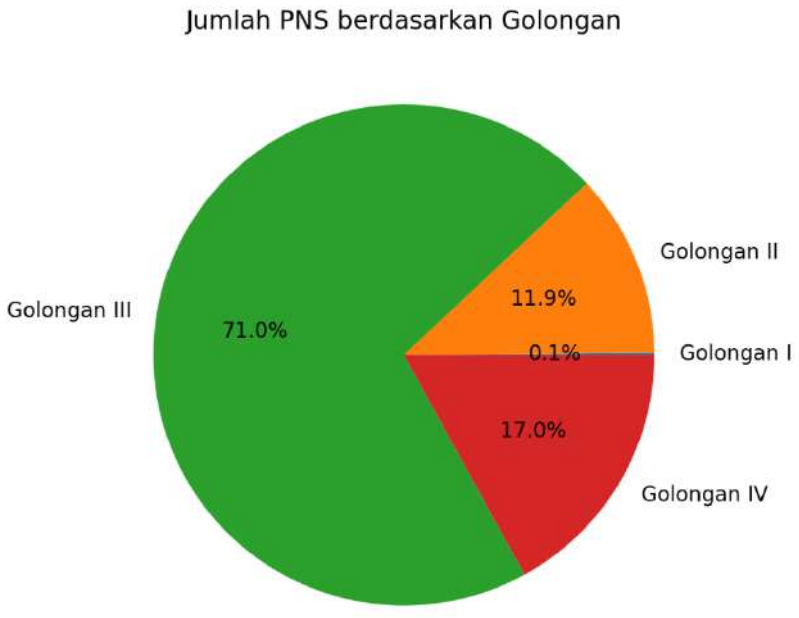
4) Jumlah ASN berdasarkan Kelompok Jabatan



Sumber: BKPSDM Kota Pariaman

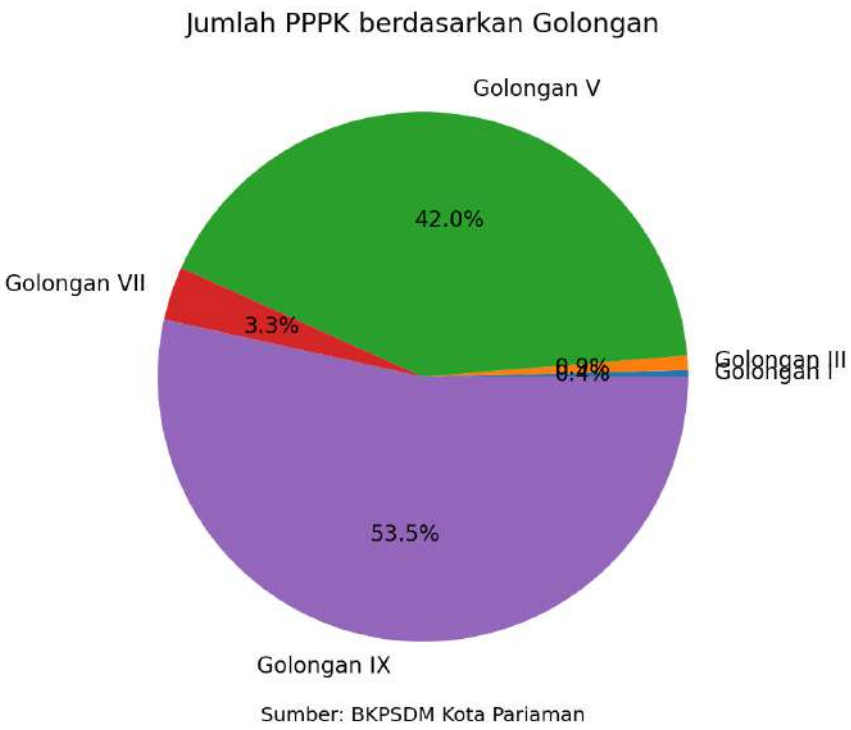
5) Jumlah ASN berdasarkan Golongan

a. PNS



Sumber: BKPSDM Kota Pariaman

b. PPPK



Sumber: BKPSDM Kota Pariaman

1.4 Analisis Isu-isu Strategis

Berdasarkan pengkajian dan penelaahan terhadap dokumen perencanaan dan kebijakan kebijakan di atas baik sektoral, regional, nasional maupun internasional, maka isu-isu strategis RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Produktivitas sektor pariwisata yang masih rendah

   Potensi permasalahan pembangunan daerah dalam pengembangan wisata di kawasan pesisir yang berkelanjutan di Kota Pariaman, umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

   Kondisi saat ini yang dihadapi Pemerintah Kota Pariaman dalam mengoptimalkan pembangunan kawasan pesisir untuk wisata adalah:

   1) Potensi obyek pariwisata pantai dan pariwisata pesisir yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan belum tersedianya infrastruktur dasar yang memadai dan sarana prasarana pariwisata lainnya. Selain itu juga belum dilakukan promosi yang maksimal terhadap potensi wisata pesisir di Kota Pariaman.

2) Belum diprioritaskannya pembangunan wisata pada kawasan pesisir yang berbasis bencana gempa dan tsunami oleh pemerintah kota Pariaman, karena pembangunan kawasan pesisir yang berbasis pada bahaya bencana gempa dan tsunami belum disikapi secara optimal oleh sektor terkait.
3) Belum berkembangnya sistem informasi yang dapat memberikan akses pada informasi produk unggulan, pasar, dan teknologi. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam penggunaan teknologi ini menjadi salah satu kendala dan pemicu adanya eksploitasi sumber daya pesisir yang merusak potensi lestari dan berdampak negatif bagi lingkungan. Belum tertatanya sistem kelembagaan dan manajemen yang belum terkelola dengan baik untuk pengelolaan pengembangan wisata pada kawasan pesisir yang terpadu, dan berkelanjutan, dalam memberikan dukungan kepada peningkatan daya saing produk dan kawasan yang dikembangkan.

Dilihat dari isu permasalahan dalam pengelolaan pengembangan wisata pada kawasan pesisir Kota Pariaman yang sedang terjadi saat ini, maka diperlukan *smart solution* untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu:

1) Kebijakan pengelolaan dan pembangunan kawasan pesisir di Kota Pariaman sebaiknya dilakukan dengan Co-Management dimana pengelolaan ini melibatkan unsur-unsur dari pemerintah (*goverment based management*) baik Pemerintah Kota maupun OPD terkait yang kemudian bekerja sama dengan masyarakat lokal (*community based management*) serta investor (*private sector*) yang berwawasan lingkungan sebagai sumber pendanaan dalam membiayai pembangunan sarana atau fasilitas penunjang kawasan wisata pesisir di Kota Pariaman.
2) Pemanfaatan wilayah pesisir dan laut ini juga seharusnya dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) wilayah tersebut.

Beberapa permasalahan pada bidang pariwisata yaitu:

1. Belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif.
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Pariaman masih kecil.
3. Jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan belum menunjukan performa yang sesuai dengan potensinya.

Kondisi yang menjadi akar masalah masih belum optimalnya perkembangan pariwisata, yaitu:

1. Terbatasnya atraksi di destinasi wisata yang menekan lama kunjung wisatawan.
2. Belum terinternalisasinya nilai-nilai *hospitality* di masyarakat.
3. Belum maksimalnya analisa pasar wisatawan, branding dan aktivitas promosi.
4. Belum berkembangnya produk ekonomi kreatif lokal

2. Belum Optimalnya Kualitas Pendidikan

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dasar merupakan kewajiban pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan Kota Pariaman sebagai Kota Pendidikan, maka peningkatan kualitas baik dari sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik, siswa maupun lulusan, menjadi sebuah keharusan. Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Pariaman telah memenuhi target pencapaian. Masalah yang perlu ditanggulangi adalah terkait akses untuk pendidikan PAUD dan sarana dan prasarana Sekolah SD yang belum memadai serta distribusi tenaga pendidik yang berkualitas belum merata.

Seiring dengan hal tersebut pemerintah daerah diharapkan juga mampu mengakomodir perubahan preferensi masyarakat dalam memilih sekolah dengan muatan agama dan karakter. Fenomena yang terjadi adalah tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak ke sekolah swasta dengan muatan agama dan karakter. Sementara muatan pendidikan agama dan karakter di Kota Pariaman Tahun 2024-2026 pendidikan dasar negeri dirasakan masih rendah. Ditambah lagi dengan banyaknya siswa terutama Sekolah SMP yang berasal dari luar Kota Pariaman, di satu sisi ini menjadi sebuah alasan yang menguatkan bahwa pendidikan di Kota Pariaman lebih baik dibandingkan daerah sekitar. Kondisi ini perlu diatasi dengan pembenahan tata kelola sekolah dan pemerataan kualitas dan kuantitas dari sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang diterima di setiap sekolah. Perbaikan ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pada peningkatan proses belajar dan mutu lulusan. Dengan demikian, maka peningkatan kualitas layanan pendidikan perlu menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan pembangunan terkait pengembangan Sumber Daya Manusia ke depan.

Hal lain yang juga harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah adalah upaya fasilitasi terhadap perkembangan Perguruan Tinggi yang ada di Kota Pariaman. Keberadaan perguruan tinggi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas Bagi masyarakat Pariaman (*multiplier effect*) baik dari segi peningkatan kualitas manusia, peningkatan taraf ekonomi dan sosial budaya.

Isu Optimalisasi kualitas pendidikan ini juga sejalan dengan isu yang ada di tingkat Provinsi Sumatera Barat terkait dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang juga merupakan jawaban atas isu Nasional berupa pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas dan peningkatan kualitas pembelajaran. Terkait peran pemuda dan olah raga dalam mendukung terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas fisik sudah tidak diragukan lagi. Selain bermanfaat jasmani, olahraga juga berperan dalam pengembangan karakter bangsa. Olahraga mampu melahirkan kebiasaan yang baik seperti jujur, disiplin, sportif, tanggung jawab dan kerja sama. Walaupun bidang olah raga memiliki alat ukur yang jelas dalam pencapaian prestasi dan keberhasilannya, namun tak bisa dipungkiri pembangunan olah raga di Kota Pariaman masih menemui hambatan dan keterbatasan. Persoalan pembinaan terhadap bibit–bibit atlet berprestasi yang masih belum terarah seperti; sistem rekruitmen calon atlet, pembibitan, pembinaan pada cabang olah raga, sampai pada peningkatan prestasi.

1. Belum optimalnya Kualitas dan layanan Kesehatan masyarakat.

   Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan pelayanan dasar salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain melalui peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Pariaman termasuk masyarakat miskin. Pembangunan kesehatan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

   Pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta meningkatnya kearifan budaya lokal. Peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, rasa aman dan tentram serta adil dalam segala bidang; penguatan karakter berbasis kearifan lokal, penguatan nilai-nilai kebangsaan dan budi pekerti; pelestarian dan pengembangan seni budaya.

3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

   Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan krusial di Kota Pariaman mengingat terdapat 5,20% penduduk Kota Pariaman yang terkategorikan miskin pada tahun 2017 menurut BPS. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan krusial di kawasan perkotaan termasuk Kota Pariaman.

4. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

   Prioritas utama Kota Pariaman dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kota Pariama dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data.

   Fokus Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman terkait dengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas SPIP maupun tingkat *leveling* kapabilitas APIP, meningkatkan integritas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi fokus lain dari pembenahan reformasi dan birokrasi di Kota Pariaman. Peningkatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya adalah peningkatan pelayanan publik melalui penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi

informasi yang terpadu (*smart city*); pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas dengan pembangunan Mall Pelayanan Publik.

5. Peningkatan Tata Ruang Dan Kualitas Lingkungan Hidup

   Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup mencakup ketersediaan produk hukum pengaturan tata ruang (RTRW, RDTRK, zonasi) yang dapat dijadikan acuan dalam membangun ruang kota, peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ruang dan daya dukung lingkungan.

6. Peningkatan Infrastruktur yang Tangguh, modern, dan Berkelanjutan serta Mitigasi Bencana.

   Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan mengandung pengertian di mana pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang serta mampu merespon perubahan situasi yang terjadi. Pembangunan infrastruktur menyangkut kinerja pelayanan infrastruktur kota yang baik dengan tetap memerhatikan kualitas lingkungan hidup, sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas serta meningkatnya ketangguhan bencana.

7. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19

   Struktur perekonomian daerah Kota Pariaman yang didominasi oleh sektor pertanian, sektor konstruksi dan industri pengolahan, walaupun disadari sektor pertanian dari tahun sebelumnya mengalami kontribusi yang sedikit menurun yang disebabkan karena mulai menaiknya sektor Perdagangan, Jasa dan Pariwisata. Pada satu sisi sektor ini memberikan dampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain perekonomian yang didominasi oleh sektor konstruksi dan industri pengolahan strukturnya relatif lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya dan potensi lokal berupa usaha

mikro dan koperasi harus lebih ditingkatkan produktifitasnya agar dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian daerah.

1.5 Sistematika Laporan

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum terkait latar belakang penyusunan, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum Kota Pariaman, Analisis Isu-isu Strategis dan Sistematika Laporan

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan mengenai Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Program dan Anggaran Tahun 2025

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini disajikan informasi terkait analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan langkah-langkah untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kota Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Tujuan dan Sasaran yang terkandung dalam dokumen RPD ini berpedoman pada visi dan misi serta sasaran pokok yang termuat pada dokumen RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025.

Dalam RPD Kota Pariaman 2024-2026 disebutkan Visi pembangunan Kota Pariaman yaitu “Mewujudkan Pariaman Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa di Wilayah Pesisir Barat Sumatera Menuju Masyarakat Madani”. dengan 5 (empat) misi pembangunan meliputi:

1. Meningkatkan Kualitas SDM dan Derajat Sosial Masyarakat;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan rasa tertib dan aman dalam kehidupan beragama dan bernegara;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan daerah.

Selanjutnya, dalam RPD Kota Pariaman 2024-2026 Kota Pariaman juga ditetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang mengacu kepada tujuan pada dokumen RPJPD Kota Pariaman 2025-2025, yaitu:

1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas
2. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat
3. Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel
4. Terwujudnya Kota Pariaman layak huni

Tabel 2.1
Keselarasan Tujuan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026
dengan Misi RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025

Tujuan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026		Misi RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025	
Tujuan 1	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas	Misi 1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan derajat sosial masyarakat
Tujuan 2	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat	Misi 2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan
Tujuan 3	Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Misi 3	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan
Tujuan 4	Terwujudnya Kota Pariaman layak huni	Misi 4	Mewujudkan rasa tertib dan aman dalam kehidupan beragama dan bernegara
		Misi 5	Mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan daerah

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 19 (sembilan belas) sasaran strategis yang merupakan kondisi rill yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Pariaman pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Adapun keselarasan tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta indikator kinerja, serta target akhir periode 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026 Pemerintah Kota Pariaman

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Target 2025	Target 2026 (Akhir Periode)
Tujuan 1: Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	77,88	78,15	78,42
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing	Angka Harapan Lama Sekolah	14,73 Tahun	14,79 Tahun	14,85 Tahun
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,22 Tahun	11,46 Tahun	11,72 Tahun
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	71,31 Tahun	71,71 Tahun	72,21 Tahun
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	15,7%	12,8%	10,3%
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan	13.814	14.146	14.478
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55,25	57,45	59,55
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99,28	99,50	99,72

Tujuan 2: Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,25%	5,45%	5,65%
	Gini Rasio (Indeks Gini)	0,255	0,250	0,245
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,91%	16,14%	16,37%
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	17,95%	17,96%	17,97%
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	Persentase Pertumbuhan *Spending of Money*	3%	3,5%	4%
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya iklim usaha dan investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	2,6%	2,8%	3%
Sasaran Strategis 5: Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	3,92%	3,76%	3,55%
Sasaran Strategis 6: Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,72%	4,54%	4,10%
Sasaran Strategis 7: Meningkatnya kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7874	0,8003	0,8133

Tujuan 3: Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks RB	65,65 (B)	70,05 (BB)	74,25 (BB)
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kota	65,15 (B)	70,01 (BB)	75,25 (BB)
	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	Indeks SPBE	2,7	2,85	3
	Indeks Profesional ASN	85,96 (Tinggi)	85,96 (Tinggi)	85,96 (Tinggi)
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,51 (Pelayanan Prima)	4,52 (Pelayanan Prima)	4,53 (Pelayanan Prima)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,15 (Baik)	86,20 (Baik)	88,35 (Baik)
Tujuan 4: Terwujudnya Kota Pariaman layak huni	Indeks Kota Layak Huni (Liveable City)	63,25%	65,15%	68,40%
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	64,25%	66,15%	68,25%
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,02	57,70	58,08%
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Perumahan dan	Persentase Perumahan dan Permukiman	84,15	85,10	86,25%

Permukiman Layak Huni	Layak Huni			
	Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani (Ha)	25,05Ha	19,62Ha	64,4 Ha
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Mitigasi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	46	48	52
Sasaran Strategis 5: Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	69,15%	72,06%	75,01%

2.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025

Perencanaan kinerja merupakan tahapan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Kota Pariaman menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai instrumen pengendalian dan komitmen kinerja tahunan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kota Pariaman disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024–2026, yang menjadi pedoman pembangunan daerah pada masa transisi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. RPD tersebut memuat arah kebijakan pembangunan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta prioritas pembangunan daerah guna menjamin kesinambungan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai turunan dari RPD Tahun 2024–2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berfungsi menerjemahkan sasaran strategis daerah ke dalam target kinerja tahunan yang operasional dan terukur. Dokumen ini menjadi dasar bagi kepala perangkat daerah dalam menetapkan indikator kinerja utama, target capaian, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Perjanjian Kinerja Kota Pariaman Tahun 2025 pada awalnya telah ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2025, yaitu tanggal 10 Maret 2025. Namun demikian, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja dimungkinkan untuk dilakukan revisi atau penyesuaian apabila terjadi kondisi tertentu, antara lain:

a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran; dan
c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat signifikan terhadap proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Sehubungan dengan adanya dinamika pelaksanaan pembangunan daerah dan penyesuaian kebijakan pada tahun berjalan, Pemerintah Kota Pariaman kemudian melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2025. Perubahan tersebut dilakukan untuk memastikan keselarasan antara target kinerja dengan kondisi aktual pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pengukuran kinerja tetap relevan, akuntabel, dan mencerminkan capaian kinerja yang sesungguhnya.

Melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta perubahannya, Pemerintah Kota Pariaman menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta mendorong pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Sebagai bentuk konkret komitmen Pemerintah Kota Pariaman dalam memastikan keterukuran pencapaian sasaran pembangunan daerah serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 disusun dengan memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target capaian, serta dukungan program dan anggaran yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024–2026.

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan ini menjadi dasar pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun berjalan, sekaligus sebagai instrumen pertanggungjawaban atas capaian kinerja Pemerintah Kota Pariaman kepada masyarakat.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Pariaman Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Pariaman Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	KET
1	Meningkatnya Kualitas Manusia yang Berdaya Saing	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,82	14,82	Tetap
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,46	11,46	Tetap
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	74,37	74,37	Tetap
		Prevalensi Stunting	%	10,5%	10,5%	Tetap
3	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	Pendapatan Perkapita yang disesuaikan	Rp (Ribu)	14.146	14.146	Tetap
4	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	57,45	57,45	Tetap
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	98,70	98,70	Tetap
5	Meningkatnya Kontribusi Sektor	% Kontribusi Sektor	%	16,14%	16,14%	Tetap

	Perdagangan Terhadap PDRB	Perdagangan terhadap PDRB				
6	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	% Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	17,96%	17,76%	Turun
7	Meningkatnya Produktifitas Sektor Pariwisata	% Pertumbuhan Spending of Money	%	3,5%	3,5%	Tetap
8	Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi	% Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	2,8%	2,8%	Tetap
9	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	3,76%	3,76%	Tetap
10	Menurunnya Angka Penganguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,54%	4,54%	Tetap
11	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,8118	0,8003	Turun
12	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	70,01 (BB)	70,01 (BB)	Tetap
		Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	Tetap
13	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks SPBE	Indeks	3,51	3,51	Tetap
		Indeks Profesional ASN	Indeks	85,96	85,96	Tetap
14	Meningkatnya	Indeks	Indeks	4,52	4,52	Tetap

	Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan Publik				
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,20	86,20	Tetap
15	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah	%	66,15%	64,74%	Turun
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks	69,97	69,97	Tetap
17	Meningkatnya Kualitas Perumahan & Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan Permukiman Layak Huni	%	89,08%	89,08%	Tetap
		Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	Ha	19,09	19,09	Tetap
18	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	48	48	Tetap
19	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Indeks Keamanan dan Ketertiban	%	72,06%	72,06%	Tetap

2.3 Program dan Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Program dan Anggaran Tahun 2025, yang terdiri dari 121 (seratus dua puluh satu) program dan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.4

Program dan Anggaran Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025

No	Program	Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp410,105,019,744	Rp404,481,103,885	-Rp5,623,915,859
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp7,451,525,824	Rp7,466,326,727	Rp14,800,903
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp811,957,045	Rp543,030,029	-Rp268,927,016
4	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp12,940,893,489	Rp13,792,969,332	Rp852,075,843
5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp860,784,750	Rp626,145,000	-Rp234,639,750
6	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp236,010,000	Rp104,994,000	-Rp131,016,000
7	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp947,300,622	Rp724,105,972	-Rp223,194,650
8	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp430,671,409	Rp183,334,610	-Rp247,336,799
9	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp370,397,100	Rp215,089,400	-Rp155,307,700
10	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp91,020,587,152	Rp89,934,728,113	-Rp1,085,859,039
11	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp557,919,394	Rp768,965,194	Rp211,045,800
12	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp1,529,302,250	Rp2,076,263,680	Rp546,961,430
13	Program Kepegawaian Daerah	Rp2,094,912,750	Rp1,481,051,100	-Rp613,861,650
14	Program Penanggulangan	Rp1,410,865,831	Rp1,409,327,450	-Rp1,538,381

	Bencana			
15	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp952,403,666	Rp919,792,831	-Rp32,610,835
16	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp36,997,200	Rp29,797,200	-Rp7,200,000
17	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp30,000,000	Rp982,500	-Rp29,017,500
18	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp495,999,666	Rp479,838,416	-Rp16,161,250
19	Program Pemasaran Pariwisata	Rp249,999,754	Rp186,263,840	-Rp63,735,914
20	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp14,999,316	Rp5,815,000	-Rp9,184,316
21	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp53,000,000	Rp68,503,100	Rp15,503,100
22	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp0	Rp23,867,000	Rp23,867,000
23	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp27,610,931,692	Rp29,775,454,192	Rp2,164,522,500
24	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp10,000,000	Rp7,850,000	-Rp2,150,000
25	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp177,767,000	Rp327,951,500	Rp150,184,500
26	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp1,729,542,300	Rp1,352,872,500	-Rp376,669,800
27	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp200,000,000	Rp150,000,000	-Rp50,000,000
28	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp28,353,901,543	Rp28,832,185,411	Rp478,283,868

29	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp25,000,000	Rp537,493,000	Rp512,493,000
30	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp451,410,000	Rp429,960,000	-Rp21,450,000
31	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp114,135,808	Rp243,960,900	Rp129,825,092
32	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp46,881,000	Rp166,300,000	Rp119,419,000
33	Program Perlindungan Perempuan	Rp157,635,400	Rp201,835,400	Rp44,200,000
34	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp36,843,000	Rp71,843,000	Rp35,000,000
35	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp8,615,000	Rp3,662,500	-Rp4,952,500
36	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp348,036,750	Rp303,854,600	-Rp44,182,150
37	Program Pengendalian Penduduk	Rp98,664,000	Rp158,664,000	Rp60,000,000
38	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp1,617,024,000	Rp1,528,224,000	-Rp88,800,000
39	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp1,604,695,000	Rp1,545,395,000	-Rp59,300,000
40	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp316,550,000	Rp159,215,500	-Rp157,334,500
41	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp10,000,000	Rp3,193,000	-Rp6,807,000
42	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp11,240,000	Rp4,676,750	-Rp6,563,250
43	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp700,000,000	Rp379,050,000	-Rp320,950,000
44	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp590,251,040	Rp490,311,940	-Rp99,939,100

45	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp157,000,000	Rp93,655,000	-Rp63,345,000
46	Program Peyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp1,588,820,415	Rp889,162,165	-Rp699,658,250
47	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp345,094,900	Rp524,997,000	Rp179,902,100
48	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp358,398,401	Rp285,122,541	-Rp73,275,860
49	Program Pengendalian dan Penangulangan Bencana Pertanian	Rp129,519,900	Rp58,397,400	-Rp71,122,500
50	Program Penyuluhan Pertanian	Rp172,469,392	Rp253,140,700	Rp80,671,308
51	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp177,850,000	Rp116,475,000	-Rp61,375,000
52	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp70,600,000	Rp298,163,500	Rp227,563,500
53	Program Hubungan Industrial	Rp64,239,500	Rp263,668,200	Rp199,428,700
54	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp25,000,000	Rp2,000,000	-Rp23,000,000
55	Program Promosi Penanaman Modal	Rp105,000,000	Rp27,890,000	-Rp77,110,000
56	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp204,129,750	Rp77,343,500	-Rp126,786,250
57	Program Pemberdayaan Sosial	Rp122,674,750	Rp155,039,750	Rp32,365,000
58	Program Rehabilitasi Sosial	Rp524,253,000	Rp8,963,459,880	Rp8,439,206,880
59	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp96,251,600	Rp125,287,600	Rp29,036,000
60	Program Penanganan Bencana	Rp126,700,000	Rp117,803,250	-Rp8,896,750

61	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp25,204,334	Rp35,695,544	Rp10,491,210
62	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp49,197,500	Rp59,710,000	Rp10,512,500
63	Program Pengembangan UMKM	Rp37,400,500	Rp182,990,260	Rp145,589,760
64	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp313,748,600	Rp473,746,000	Rp159,997,400
65	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp15,840,000	Rp5,820,000	-Rp10,020,000
66	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp12,936,000	Rp1,743,500	-Rp11,192,500
67	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp43,075,000	Rp35,529,500	-Rp7,545,500
68	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp286,370,000	Rp657,191,500	Rp370,821,500
69	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp35,444,000	Rp13,376,500	-Rp22,067,500
70	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp27,650,000	Rp9,151,500	-Rp18,498,500
71	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp0	Rp76,000,000	Rp76,000,000
72	Program Penataan Desa	Rp3,000,000	Rp2,214,400	-Rp785,600
73	Program Administrasi Pemerintah Desa	Rp357,475,578	Rp307,210,228	-Rp50,265,350
74	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp1,732,820,500	Rp1,862,574,500	Rp129,754,000
75	Program Pembinaan	Rp1,146,500,000	Rp1,122,243,750	-Rp24,256,250

	Perpustakaan			
76	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp0	Rp10,665,000	Rp10,665,000
77	Program Pengelolaan Arsip	Rp388,432,500	Rp160,601,500	-Rp227,831,000
78	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp108,993,500	Rp21,514,500	-Rp87,479,000
79	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp1,124,099,250	Rp1,318,678,750	Rp194,579,500
80	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp1,876,579,708	Rp1,784,554,442	-Rp92,025,266
81	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp81,899,863	Rp4,670,500	-Rp77,229,363
82	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp75,999,864	Rp21,289,000	-Rp54,710,864
83	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp1,092,029,750	Rp832,236,000	-Rp259,793,750
84	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp183,475,000	Rp223,972,000	Rp40,497,000
85	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp223,220,500	Rp355,785,000	Rp132,564,500
86	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp1,866,507,000	Rp1,705,305,497	-Rp161,201,503
87	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp791,113,250	Rp996,169,000	Rp205,055,750
88	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp100,000,000	Rp150,000,000	Rp50,000,000
89	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp31,006,532,000	Rp4,643,151,500	-Rp26,363,380,500
90	Program Pengembangan	Rp50,000,000	Rp19,641,000	-Rp30,359,000

	Jasa Konstruksi			
91	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp247,480,000	Rp270,055,500	Rp22,575,500
92	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp125,000,000	Rp58,432,750	-Rp66,567,250
93	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp4,246,480,073	Rp5,869,261,214	Rp1,622,781,141
94	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp305,334,700	Rp262,780,075	-Rp42,554,625
95	Program Pengembangan Perumahan	Rp53,000,000	Rp33,128,000	-Rp19,872,000
96	Program Kawasan Pemukiman	Rp60,212,000	Rp52,465,750	-Rp7,746,250
97	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp1,450,000,000	Rp1,270,000,000	-Rp180,000,000
98	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp239,070,000	Rp209,299,500	-Rp29,770,500
99	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp0	Rp280,361,500	Rp280,361,500
100	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp944,769,130	Rp1,263,392,435	Rp318,623,305
101	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp859,969,824	Rp1,286,012,610	Rp426,042,786
102	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp73,700,310	Rp70,661,652	-Rp3,038,658
103	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan	Rp35,000,000	Rp30,800,000	-Rp4,200,000

	Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			
104	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp64,769,900	Rp176,745,900	Rp111,976,000
105	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp5,050,000	Rp3,545,000	-Rp1,505,000
106	Program Pengelolaan Persampahan	Rp3,381,450,170	Rp7,397,827,631	Rp4,016,377,461
107	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp2,312,561,053	Rp2,683,113,060	Rp370,552,007
108	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp1,501,666,120	Rp2,479,342,880	Rp977,676,760
109	Program Pendaftaran Penduduk	Rp239,146,000	Rp244,868,000	Rp5,722,000
110	Program Pencatatan Sipil	Rp3,000,000	Rp3,000,000	Rp0
111	Program Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Rp3,000,000	Rp33,000,000	Rp30,000,000
112	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp3,000,000	Rp3,000,000	Rp0
113	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp765,914,330	Rp857,821,250	Rp91,906,920
114	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp1,031,840,000	Rp1,007,640,200	-Rp24,199,800
115	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp75,858,000	Rp12,330,000	-Rp63,528,000

116	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp335,655,000	Rp426,349,500	Rp90,694,500
117	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp424,592,950	Rp549,481,781	Rp124,888,831
118	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp1,619,589,832	Rp1,637,217,492	Rp17,627,660
119	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp1,056,594,990	Rp1,134,765,149	Rp78,170,159
120	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Rp2,014,000	Rp1,414,000	-Rp600,000
121	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp70,784,000	Rp67,607,050	-Rp3,176,950
Jumlah		Rp665,680,718,682	Rp651,217,003,808	-Rp14,463,714,874

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

1. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\boldsymbol{Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%}$$

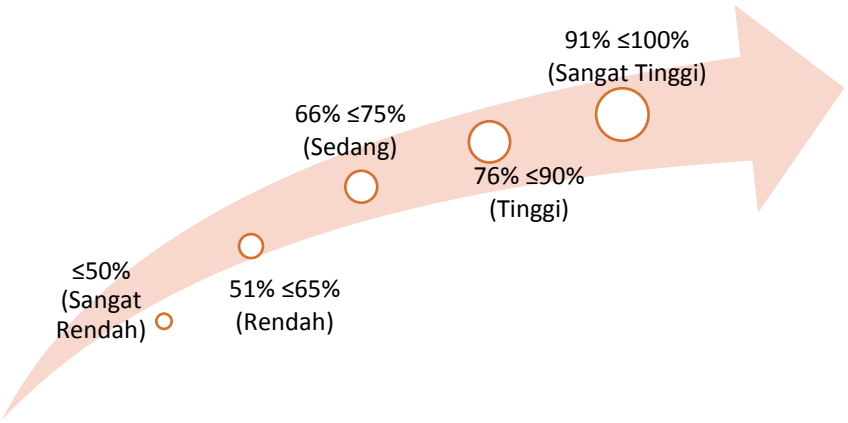
2. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\boldsymbol{Capaian = \frac{((2 \text{ x Target}) - \text{Realisasi})}{Target} \times 100\%}$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Wali Kota Pariaman Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Pemerintah Kota Pariaman merupakan kinerja tahun ke-2 pada periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 95,33% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing	Angka Harapan Lama Sekolah	14,82	14,80	99.86%
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	11,46	11,32	98,77%
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	74,37	74,62	100,34%
	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat	10,5	10,3	101,9%

	pendek) pada balita			
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan	14,146 (Ribu/Rp)	14,261 (Ribu/Rp)	100,81%
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,45	60,14*	104,68%
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,70	98,11*	99.40
Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	16,14%	16,09%	99,69%
Sasaran Strategis 6: Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	17,76	17,36	97,74%
Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	Persentase Pertumbuhan *Spending of Money*	3,5%	0,25%	7.14%
Sasaran Strategis 8: Meningkatnya iklim usaha dan investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi	2.8%	6.5%	232.14%

	Investasi			
Sasaran Strategis 9: Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	3,76	3,83	98,17%
Sasaran Strategis 10: Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,54%	5,16%	86,34%
Sasaran Strategis 11: Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,8003	0,8003	100%
Sasaran Strategis 12: Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kota	70,01 (BB)	61,56 (B)	87,93%
	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	100%
Sasaran Strategis 13: Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks SPBE	3.51 (Sangat Baik)	4.18 (Sangat Baik)	119.08%
	Indeks Profesional ASN	85,96 (Tinggi)	85,40 (Tinggi)	99.34%
Sasaran Strategis 14: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,52 (A)	3,10 (B-)	68,58%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,20	89,55	103,89%
Sasaran Strategis 15: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	64,74	64,83	101,13%
Sasaran Strategis 16:	Indeks	69,97	72,07	103%

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			
Sasaran Strategis 17: Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	89,08%	71,67%	80,45%
	Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani (Ha)	19,09 Ha	0,16 Ha	0,83%
Sasaran Strategis 18: Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Mitigasi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	48	50	104 %
Sasaran Strategis 19: Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan keamanan masyarakat.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	72,06%	60%	83,26%

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1) Angka Harapan Lama Sekolah

Saat ini sistem pendidikan Indonesia belum mencapai kondisi yang optimal, namun jika menapak tilas 10 tahun ke belakang, sistem pendidikan Indonesia perlahan mengalami perbaikan, terutama dalam harapan lama sekolah.

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang di mana angka ini menunjukkan

peluang anak usia tujuh tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

Harapan lama sekolah penduduk Indonesia terus bertumbuh, hingga pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia di atas 7 tahun ke atas menyentuh angka 12 tahun. Pasca tahun 2022, harapan lama sekolah masih terus mengalami pertumbuhan, pada tahun 2023 harapan lama sekolah bertumbuh ke angka 14,61 tahun, hingga pada tahun 2025 rata-rata lama sekolah untuk penduduk di 14,80 tahun.

Jika dilihat secara keseluruhan, harapan lama sekolah memang terus mengalami perbaikan, namun Indonesia masih memiliki PR besar dalam memastikan pemerataan akses pendidikan. Hal tersebut digambarkan dengan adanya provinsi yang rata-rata lama sekolahnya masih jauh tertinggal dibandingkan angka rata-rata nasional.

Penetapan target indikator AKIP Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024–2026. Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 14,80, target Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2025 yang sebelumnya ditetapkan dalam RPD sebesar 14,79 mengalami penyesuaian menjadi 14,82. Penyesuaian ini dilakukan karena realisasi capaian tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Bedaya Saing				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Angka Harapan Lama Sekolah	14,82	14,81	99.86%	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator Angka Harapan Lama Sekolah, diketahui bahwa target tahun 2025 ditetapkan sebesar 14,82 tahun, sedangkan realisasi

yang dicapai adalah sebesar 14,81 tahun. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 99,93 persen dan termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Pariaman dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan telah berjalan dengan sangat baik. Meskipun realisasi masih sedikit di bawah target yang ditetapkan, selisih yang terjadi sangat kecil yaitu 0,01 tahun, sehingga secara umum indikator ini dapat dikatakan hampir sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Tingginya capaian indikator ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah di bidang pendidikan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesempatan masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih lama. Upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah juga turut mendukung peningkatan angka harapan lama sekolah di Kota Pariaman.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
14,61	14,79	14,80	14,81	100,34%	100,61%	100,47%	99,93%

Berdasarkan data realisasi indikator Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pariaman dalam empat tahun terakhir, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2022, realisasi tercatat sebesar 14,61 tahun dengan capaian kinerja 100,34 persen. Selanjutnya pada tahun 2023, realisasi meningkat cukup signifikan menjadi 14,79 tahun dengan capaian 100,61 persen, yang menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Pada tahun 2024, realisasi kembali mengalami peningkatan menjadi 14,80 tahun dengan capaian kinerja 100,47 persen, sehingga

indikator ini masih mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara itu pada tahun 2025, realisasi mencapai 14,81 tahun dengan capaian kinerja 99,93 persen, yang berarti realisasi hanya sedikit berada di bawah target.

Secara keseluruhan, perkembangan angka harapan lama sekolah di Kota Pariaman menunjukkan tren yang positif dan relatif stabil dari tahun ke tahun. Meskipun kenaikan yang terjadi tidak terlalu besar setiap tahunnya, peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam akses dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.

Dengan tren peningkatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa berbagai kebijakan dan program Pemerintah Kota Pariaman di bidang pendidikan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ke depan, upaya peningkatan angka harapan lama sekolah perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, pemerataan akses pendidikan, serta dorongan kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
14,81	14,85	99.73%

Berdasarkan tabel perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2026 pada indikator Angka Harapan Lama Sekolah, diketahui bahwa realisasi tahun 2025 mencapai 14,81 tahun, sedangkan target akhir RPD yang harus dicapai pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 14,85 tahun. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target akhir RPD mencapai 99,73 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Pariaman dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah sudah berada sangat dekat dengan target akhir yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Selisih antara realisasi tahun 2025 dengan target akhir RPD hanya sebesar 0,04 tahun, sehingga

menunjukkan bahwa upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kota Pariaman telah berjalan dengan cukup baik.

Secara keseluruhan, capaian yang hampir mendekati target akhir RPD ini memberikan gambaran bahwa indikator angka harapan lama sekolah di Kota Pariaman berada pada jalur yang tepat (on track) untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
14,81	13,30	111.35%

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi indikator Angka Harapan Lama Sekolah antara Kota Pariaman dan tingkat nasional pada tahun 2025, diketahui bahwa realisasi Kota Pariaman mencapai 14,81 tahun, sedangkan rata-rata nasional berada pada angka 13,30 tahun. Dengan demikian, capaian Kota Pariaman terhadap rata-rata nasional mencapai 111,35 persen.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa angka harapan lama sekolah di Kota Pariaman berada di atas rata-rata nasional, yang mengindikasikan bahwa akses dan kesempatan masyarakat untuk menempuh pendidikan di Kota Pariaman relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kondisi nasional. Hal ini juga mencerminkan bahwa berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam meningkatkan kualitas dan akses layanan pendidikan, termasuk dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan masyarakat hingga jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini menjadi indikator bahwa pembangunan sumber daya manusia di Kota Pariaman melalui sektor pendidikan telah berjalan dengan baik.

Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap perlu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut melalui

penguatan program pendidikan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga keunggulan dibandingkan rata-rata nasional dapat terus dipertahankan.

2) Perbandingan dengan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi 2025	Realisasi Provinsi Sumbar 2025	Capaian
14,81	14,31	103.49

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi indikator Angka Harapan Lama Sekolah antara Kota Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025, diketahui bahwa realisasi Kota Pariaman mencapai 14,81 tahun, sedangkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 14,31 tahun. Dengan demikian, capaian Kota Pariaman terhadap rata-rata provinsi mencapai 103,49 persen.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa angka harapan lama sekolah di Kota Pariaman lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat akses dan kesempatan masyarakat Kota Pariaman untuk memperoleh pendidikan relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota di tingkat provinsi.

Capaian ini juga mencerminkan bahwa berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat. Upaya peningkatan akses pendidikan, dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan, serta program-program yang mendorong masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi turut berkontribusi terhadap capaian tersebut.

Ke depan, Pemerintah Kota Pariaman diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini melalui penguatan kebijakan dan program di bidang pendidikan, sehingga

kualitas sumber daya manusia di Kota Pariaman terus mengalami peningkatan dan tetap berada di atas rata-rata provinsi.

3) Perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Peringkat	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)
1	Kota Padang	16,58
2	Kota Padang Panjang	15,74
3	Kota Bukittinggi	15,29
4	Kabupaten Tanah Datar	15,06
5	Kota Payakumbuh	14,79
6	Kota Pariaman	14,81
7	Kota Solok	14,59
8	Kabupaten Agam	14,26
9	Kabupaten Padang Pariaman	14,21
10	Kota Sawahlunto	13,89
11	Kabupaten Pasaman Barat	13,73
12	Kabupaten Solok	13,66
13	Kabupaten Pasaman	13,60
14	Kabupaten Lima Puluh Kota	13,53
15	Kabupaten Pesisir Selatan	13,38
16	Kabupaten Kepulauan Mentawai	13,17
17	Kabupaten Solok Selatan	13,08
18	Kabupaten Dharmasraya	13,02
19	Kabupaten Sijunjung	12,99

Sumber: Pariaman dalam Angka 2026

Berdasarkan data Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2025 pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, terlihat adanya perbedaan capaian antar daerah. Beberapa daerah menunjukkan capaian yang cukup tinggi, sementara sebagian daerah lainnya masih berada di bawah rata-rata provinsi.

Daerah dengan capaian Harapan Lama Sekolah tertinggi adalah Kota Padang dengan nilai 16,58 tahun, diikuti oleh Kota

Padang Panjang sebesar 15,74 tahun, dan Kota Bukittinggi sebesar 15,29 tahun. Tingginya capaian pada kota-kota tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan serta kesempatan masyarakat untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi relatif lebih baik dibandingkan daerah lainnya.

Sementara itu, Kota Pariaman memiliki capaian Harapan Lama Sekolah sebesar 14,81 tahun, yang menempatkannya pada peringkat ke-5 dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang berada pada angka 14,31 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akses dan kesempatan masyarakat Kota Pariaman dalam memperoleh pendidikan relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar daerah di provinsi tersebut.

Di sisi lain, beberapa daerah masih memiliki nilai harapan lama sekolah yang relatif lebih rendah, seperti Dharmasraya (13,02 tahun), Solok Selatan (13,08 tahun), dan Kepulauan Mentawai (13,17 tahun). Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam akses dan kesempatan pendidikan antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat.

Secara keseluruhan, posisi Kota Pariaman yang berada di kelompok lima besar kabupaten/kota dengan harapan lama sekolah tertinggi menunjukkan bahwa berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ke depan, upaya peningkatan kualitas dan akses pendidikan perlu terus dilakukan agar capaian tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

   Faktor-faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan, yaitu:

   1) Meningkatkan mutu sekolah negeri baik SD ataupun SMP sehingga tidak kalah bersaing dengan sekolah – sekolah swasta yang ada di Kota Pariaman atau yang ada di luar Kota Pariaman.

2) Melengkapi kekurangan sarana dan prasarana yang ada di sekolah negeri (TK, SD dan SMP).
3) Meningkatkan pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Hambatan/ Permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1) Perhitungan Angka harapan lama sekolah adalah penduduk usia 7 tahun ke atas dan kewenangan Dinas Pendidikan Kota Pariaman hanya sampai SMP, maka diperlukan anggaran yang besar untuk mendukung capaian indikator ini.
2) Adanya penduduk Kota Pariaman yang sudah menamatkan pendidikan tinggi merantau keluar Kota Pariaman.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka memajukan kualitas pelayanan Pendidikan di Kota Pariaman sebagai berikut :

1) Pendidikan Gratis 12 tahun Sebelum tahun 2017 Kota Pariaman telah melaksanakan Program Wajib Belajar 12 tahun, dimana semua peserta didik yang bersekolah di SD, SMP dan SMA/ SMK Negeri Kota Pariaman tidak dipungut biaya Uang Sekolah/ SPP/ Uang Komite. Akan tetapi semenjak pindahnya kewenangan Pendidikan Menengah ke Provinsi (tahun 2017), maka SMA dan SMK yang berada di Kota Pariaman memungut uang komite kepada siswa. Pada tahun 2019 melalui program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman periode 2018 – 2023 dan berlanjut periode 2025, Pemerintah Kota Pariaman memberikan Bantuan Keuangan Khusu kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar siswa yang berasal dari Kota Pariaman tidak lagi dipungut uang komite. Sehingga Pendidikan gratis 12 tahun (Wajib Belajar 12 tahun) tetap terlaksana di Kota Pariaman.
2) Satu Keluarga Satu Sarjana Satu Keluarga Satu Sarjana juga merupakan salah satu program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman periode 2018 – 2025. Program ini merupakan 60 pemberian beasiswa kepada mahasiswa Kota Pariaman yang berasal dari keluarga kurang mampu. Siswa/i Kota Pariaman yang

berasal dari keluarga kurang mampu (terdata di DTKS) mengikuti seleksi akademik yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama. Perguruan Tinggi tersebut merupakan Perguruan Tinggi yang melaksanakan Pendidikan Vokasi seperti : Politeknik Negeri Padang, Politeknik ATI Padang, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman, Politeknik Pelayaran Sumbar. Untuk diluar Provinsi adalah Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Program Vokasi Telkom University, Politeknik Pekerjaan Umum. Diharapkan mahasiswa tersebut setalah tamat cepat mendapatkan pekerjaan dan membantu meringankan beban orang tua. Siswa/i Kota Pariaman yang lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi tersebut di berikan beasiswa berupa Uang Pendidikan dan Uang Bulanan. Apabila mahasiswa tersebut mendapatkan nilai dibawah 2,75 maka mereka tidak diberikan beasiswa dan apabila disemester berikutnya nilai mereka 2,75 keatas maka diberikan Kembali beasiswa. Apabila mahasiswa tersebut berhenti atau mengundurkan diri, maka mereka akan mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pariaman.






Sebagai upaya perbaikan, strategi/langkah-langkah yang diambil untuk meningkat kinerja dimasa mendatang adalah:

1) Meningkatkan mutu sekolah negeri baik SD ataupun SMP sehingga tidak kalah bersaing dengan sekolah – sekolah swasta yang ada di Kota Pariaman atau yang ada di luar Kota Pariaman.
2) Melengkapi kekurangan sarana dan prasarana yang ada di sekolah negeri (TK, SD dan SMP).
3) Meningkatkan pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan. menyusun Standar Operasional Prosedur publikasi laporan kinerja perangkat daerah.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Manusia yang Berdaya Saing					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Angka Harapan Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp15.287.150	0	0%	Tidak Menunjang

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Manusia yang Berdaya Saing” dengan indikator kinerja utama Angka Harapan Lama Sekolah, Pemerintah Kota Pariaman melaksanakan Program Pengelolaan Pendidikan. Program ini direncanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.287.150.

Namun demikian, berdasarkan data pelaksanaan tahun 2025, program tersebut tidak terealisasi secara anggaran, sehingga tingkat realisasi anggaran tercatat sebesar Rp0 dengan capaian program 0 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan yang direncanakan dalam program tersebut belum terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, capaian indikator Angka Harapan Lama Sekolah tetap menunjukkan hasil yang baik pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan angka harapan lama sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh program yang dilaksanakan oleh satu perangkat daerah saja, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kebijakan pendidikan secara umum, dukungan program pendidikan dari pemerintah pusat dan provinsi, serta partisipasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan.

Selain itu, peningkatan angka harapan lama sekolah juga dapat dipengaruhi oleh program-program pendidikan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya serta kebijakan pemerintah daerah yang mendukung akses pendidikan bagi masyarakat.

Ke depan, diperlukan peningkatan perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih terarah agar program yang direncanakan dapat terealisasi secara optimal dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap peningkatan angka harapan lama sekolah di Kota Pariaman. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi antar perangkat daerah, peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan masyarakat hingga jenjang yang lebih tinggi.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Manusia yang Berdaya Saing						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Angka Harapan Lama Sekolah	Rp15.287.150	0	99.86%	99,86%	100%	Efisien

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE} = \frac{(\mathbf{15.287.150} \times \mathbf{99,86\%}) - \mathbf{0}}{\mathbf{15.287.150}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{TE} = \mathbf{99,86\%}$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%
- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

TE=99,86%>20%$\boldsymbol{NE} = \mathbf{50} + \left(\frac{\mathbf{8,38}}{\mathbf{20}} \times \mathbf{50}\right)$

NE=100%

Analisis efisiensi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada indikator Angka Harapan Lama Sekolah dalam sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Manusia yang Berdaya Saing*. Berdasarkan data yang tersedia, pagu anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut sebesar Rp15.287.150, namun pada tahun berjalan tidak terdapat realisasi anggaran (Rp0). Meskipun demikian, capaian kinerja indikator tetap tinggi yaitu 99,86 persen.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan formulasi efisiensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, diperoleh Tingkat Efisiensi sebesar 99,86 persen. Nilai tersebut kemudian dikonversi menjadi Nilai Efisiensi sebesar 100, sehingga kinerja penggunaan sumber daya pada indikator ini termasuk dalam kategori efisien.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian indikator Angka Harapan Lama Sekolah tidak sepenuhnya bergantung pada penggunaan anggaran pada program yang dianalisis, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti dukungan kebijakan pendidikan, program lintas sektor, serta partisipasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, capaian indikator juga dapat dipengaruhi oleh dampak dari pelaksanaan program-program pendidikan pada tahun sebelumnya.

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Saat ini sistem pendidikan Indonesia belum mencapai kondisi yang optimal, namun jika menapak tilas 10 tahun ke belakang, sistem pendidikan Indonesia perlahan mengalami perbaikan, terutama dalam rata-rata lama sekolah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia di usia 15 tahun ke atas hanya sebesar 8,32 tahun, yang artinya pada tahun 2015 rata-rata penduduk Indonesia di atas 15 tahun hanya bersekolah hingga kelas 2 SMP.

Seiring berjalannya waktu rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia terus bertumbuh, hingga pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia di atas 15 tahun menyentuh angka 9 tahun. Pasca tahun 2022, rata-rata lama sekolah masih terus mengalami pertumbuhan, pada tahun 2023 rata-rata lama sekolah bertumbuh ke angka 9,13 tahun, hingga pada tahun 2024 rata-rata lama sekolah untuk penduduk di atas 15 tahun menyentuh titik tertinggi yaitu, 9,22 tahun.

Jika dilihat secara keseluruhan, rata-rata lama sekolah memang terus mengalami perbaikan, namun Indonesia masih memiliki PR besar dalam memastikan pemerataan akses pendidikan. Hal tersebut

digambarkan dengan adanya provinsi yang rata-rata lama sekolahnya masih jauh tertinggal dibandingkan angka rata-rata nasional.

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Peningkatan rata-rata lama sekolah mengindikasikan perbaikan tingkat pendidikan penduduk suatu daerah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dihitung dengan menjumlahkan tahun yang dihabiskan penduduk dalam pendidikan formal, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk. Data tersebut diperoleh dari BPS Kota Pariaman dengan hasil Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Pariaman tahun 2025 adalah 11,32 yang setara dengan kelas 2 SMA.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Bedaya Saing				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Angka Rata-rata Lama Sekolah	11,46	11,32	98,77%	Sangat Tinggi

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi pada indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dalam Sasaran Strategis 1 yaitu *Meningkatnya Kualitas Manusia yang Berdaya Saing*, ditetapkan target sebesar 11,46 tahun dengan realisasi sebesar 11,32 tahun. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 98,77 persen dan termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan kesempatan pendidikan telah berjalan dengan cukup efektif. Meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, selisih antara target dan realisasi relatif kecil yaitu sebesar 0,14 tahun,

sehingga secara umum kinerja pada indikator ini dapat dinilai sangat baik.

Tingginya capaian indikator Angka Harapan Lama Sekolah mencerminkan bahwa masyarakat memiliki peluang yang semakin baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai program pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan, seperti penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, dukungan pembiayaan pendidikan, serta berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan partisipasi sekolah.

Namun, masih terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi belum optimalnya pencapaian target, antara lain kondisi sosial ekonomi masyarakat, kesenjangan akses pendidikan di beberapa wilayah, serta faktor lain yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan guna mendukung peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun-tahun mendatang.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada indikator Angka Harapan Lama Sekolah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
10,78	10,79	11,06	11,32	99,8%	98,09%	98,57%	98,77%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja selama tahun 2022–2025, indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Pariaman menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten. Nilai realisasi meningkat dari 10,78 tahun pada tahun 2022 menjadi 11,32 tahun pada tahun 2025, atau mengalami kenaikan

sebesar 0,54 tahun dalam periode empat tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Pariaman semakin lama menempuh pendidikan formal.

Jika dilihat dari capaian kinerja terhadap target, seluruh capaian pada periode tersebut berada pada kisaran 98–100 persen, yaitu 99,8 persen pada tahun 2022, 98,09 persen pada tahun 2023, 98,57 persen pada tahun 2024, dan 98,77 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sedikit fluktuasi dalam capaian persentase terhadap target, secara umum kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah masih berada pada kategori sangat tinggi dan relatif stabil.

Secara tren tahunan, peningkatan realisasi paling signifikan terjadi pada periode 2023–2024, dimana nilai RLS meningkat dari 10,79 tahun menjadi 11,06 tahun. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan keberlanjutan pendidikan masyarakat, sehingga rata-rata lama pendidikan penduduk semakin mendekati jenjang pendidikan menengah atas. Bahkan secara regional, capaian RLS Kota Pariaman tergolong cukup baik karena berada di atas rata-rata provinsi dan nasional, yang menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah lainnya.

Meskipun realisasi menunjukkan tren meningkat, capaian terhadap target belum mencapai 100 persen dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan penduduk usia 25 tahun ke atas yang pada masa lalu memiliki tingkat pendidikan lebih rendah, serta mobilitas penduduk yang melanjutkan pendidikan di luar daerah. Selain itu, perhitungan indikator ini juga dipengaruhi oleh struktur pendidikan penduduk secara keseluruhan sehingga perubahan nilainya cenderung terjadi secara bertahap.

Secara keseluruhan, perkembangan indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pariaman selama tahun 2022–2025 menunjukkan tren yang positif dan stabil, dengan peningkatan yang konsisten setiap tahun. Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan pemerintah daerah

dalam meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pendidikan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Pariaman.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
11,32	11,72	96,58%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RPD tahun 2026 pada indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), tercatat realisasi pada tahun 2025 sebesar 11,32 tahun, sementara target akhir yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah adalah sebesar 11,72 tahun. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target akhir RPD mencapai 96,58 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa hingga tahun 2025 kinerja indikator Angka Harapan Lama Sekolah telah mendekati target akhir periode perencanaan daerah. Selisih antara realisasi tahun 2025 dengan target akhir RPD sebesar 0,40 tahun menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2026.

Secara umum, capaian sebesar 96,58 persen menunjukkan bahwa arah kebijakan dan program pembangunan di bidang pendidikan telah berjalan pada jalur yang tepat dalam mendukung peningkatan akses dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini juga sejalan dengan tren peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan perkembangan yang positif.

Namun demikian, untuk mencapai target akhir RPD pada tahun 2026 diperlukan penguatan berbagai program dan kebijakan yang mendukung peningkatan partisipasi pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Selain itu, upaya peningkatan pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta dukungan pembiayaan pendidikan bagi masyarakat perlu terus diperkuat.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan capaian indikator Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun berikutnya dapat terus meningkat sehingga target akhir RPD yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
11,32	9,07	124,80%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Pariaman tahun 2025 dengan realisasi nasional tahun 2025, terlihat bahwa kinerja Kota Pariaman berada di atas rata-rata nasional. Realisasi HLS Kota Pariaman tercatat sebesar 11,32 tahun, sedangkan rata-rata nasional sebesar 9,07 tahun. Dengan demikian, tingkat capaian Kota Pariaman terhadap angka nasional mencapai 124,80 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat harapan masyarakat Kota Pariaman untuk menempuh pendidikan formal relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa akses dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan di Kota Pariaman tergolong baik, serta mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan dan program pembangunan di bidang pendidikan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Tingginya capaian tersebut juga menunjukkan adanya dukungan dari berbagai faktor, antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, serta berbagai program pemerintah daerah yang mendorong peningkatan partisipasi sekolah. Program bantuan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta dukungan kebijakan pendidikan menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap tingginya angka harapan lama sekolah di Kota Pariaman.

Meskipun capaian Kota Pariaman telah melampaui rata-rata nasional, upaya peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan tetap perlu terus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih, serta memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, perbandingan dengan capaian nasional menunjukkan bahwa kinerja pembangunan pendidikan di Kota Pariaman berada pada kondisi yang sangat baik, serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

2) Perbandingan dengan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi 2025	Realisasi Provinsi Sumbar 2025	Capaian
11,32	9,77	115.86%

Berdasarkan tabel perbandingan antara capaian Rata-rata Lama Sekolah Kota Pariaman dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, diketahui bahwa realisasi Kota Pariaman mencapai 11,32 tahun, sedangkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 9,77 tahun. Dengan demikian, tingkat capaian Kota Pariaman terhadap rata-rata provinsi mencapai 115,86 persen.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Pariaman berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk Kota Pariaman relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penduduk di tingkat provinsi.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa berbagai kebijakan dan program Pemerintah Kota Pariaman di bidang pendidikan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program-program yang mendorong masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi

turut berkontribusi terhadap meningkatnya rata-rata lama sekolah di Kota Pariaman.

Dengan capaian yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi, Kota Pariaman menunjukkan kinerja yang baik dalam pembangunan sektor pendidikan. Ke depan, upaya peningkatan kualitas dan akses pendidikan perlu terus diperkuat agar capaian tersebut dapat dipertahankan serta terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

3) Perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Peringkat	Kabupaten/Kota	HLS 2025 (Tahun)
1	Kota Padang	16,58
2	Kota Padang Panjang	15,74
3	Kota Bukittinggi	15,29
4	Kota Payakumbuh	14,79
5	Kota Pariaman	14,81
6	Kota Solok	14,59
7	Kabupaten Tanah Datar	15,06
8	Kabupaten Agam	14,26
9	Kabupaten Padang Pariaman	14,21
10	Kabupaten Pasaman Barat	13,73
11	Kabupaten Solok	13,66
12	Kabupaten Pasaman	13,60
13	Kabupaten Lima Puluh Kota	13,53
14	Kabupaten Pesisir Selatan	13,38
15	Kabupaten Kepulauan Mentawai	13,17
16	Kabupaten Solok Selatan	13,08
17	Kabupaten Dharmasraya	13,02
18	Kabupaten Sijunjung	12,99
19	Kota Sawahlunto	13,89

Sumber: Pariaman dalam Angka 2026

Berdasarkan data Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2025 pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, terlihat adanya variasi

nilai HLS antar daerah. HLS menggambarkan lamanya waktu yang diharapkan akan ditempuh oleh anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan formal pada masa yang akan datang.

Dari hasil pengurutan nilai HLS, Kota Padang menempati posisi tertinggi dengan nilai 16,58 tahun, diikuti oleh Kota Padang Panjang (15,74 tahun) dan Kota Bukittinggi (15,29 tahun). Tingginya nilai HLS pada daerah perkotaan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap layanan pendidikan relatif lebih baik serta didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih lengkap.

Sementara itu, Kota Pariaman memiliki nilai HLS sebesar 14,81 tahun, yang menempatkannya pada kelompok menengah atas di antara kabupaten/kota di Sumatera Barat. Nilai ini juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 14,31 tahun, sehingga menunjukkan bahwa peluang anak usia sekolah di Kota Pariaman untuk menempuh pendidikan relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi.

Jika dibandingkan dengan kota lain di Sumatera Barat, nilai HLS Kota Pariaman masih berada di bawah beberapa kota seperti Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh, namun masih lebih tinggi dibandingkan Kota Solok dan Kota Sawahlunto. Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang masyarakat Kota Pariaman untuk melanjutkan pendidikan sudah cukup baik, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar dapat lebih mendekati daerah dengan capaian tertinggi.

Secara umum, daerah perkotaan cenderung memiliki nilai HLS yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten karena faktor akses pendidikan, ketersediaan fasilitas pendidikan, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan perlu terus dilakukan agar harapan lama sekolah masyarakat dapat terus meningkat dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Pariaman.

Kota lain di Sumatera Barat, capaian RLS Kota Pariaman masih berada di bawah beberapa kota dengan capaian tertinggi seperti Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Padang, dan Kota Solok. Meskipun demikian, nilai RLS Kota Pariaman masih lebih tinggi dibandingkan Kota Payakumbuh dan Kota Sawahlunto, sehingga menunjukkan posisi yang cukup kompetitif di antara wilayah perkotaan di Sumatera Barat.

Secara umum, wilayah kota cenderung memiliki nilai RLS yang lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ketersediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, akses pendidikan yang lebih mudah dijangkau, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang relatif lebih tinggi. Kondisi tersebut juga terlihat pada dominasi kota dalam peringkat lima besar nilai RLS di Sumatera Barat.

Dengan demikian, capaian RLS Kota Pariaman yang berada pada peringkat ke-5 di tingkat provinsi menunjukkan bahwa kualitas pendidikan masyarakat di daerah tersebut sudah cukup baik dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, masih terdapat peluang peningkatan agar capaian RLS Kota Pariaman dapat semakin mendekati daerah dengan nilai tertinggi di provinsi, khususnya melalui peningkatan partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan, yaitu:

1) Meningkatkan mutu sekolah negeri baik SD ataupun SMP sehingga tidak kalah bersaing dengan sekolah – sekolah swasta yang ada di Kota Pariaman atau yang ada di luar Kota Pariaman.
2) Melengkapi kekurangan sarana dan prasarana yang ada di sekolah negeri (TK, SD dan SMP)
3) Menyediakan sarana dan prasana seperti GOR dan Lapangan Olahraga untuk masyarakat dalam kegiatan kepemudaan dan olahraga.

4) Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemuda di wilayah untuk kegiatan kepemudaan, seperti memberi pelatihan berwirausaha, dan sejenisnya.

Hambatan/ Permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1) Perhitungan Angka rata - rata lama sekolah adalah penduduk usia 25 tahun keatas dan kewenangan Dinas Pendidikan Kota Pariaman hanya sampai SMP, maka diperlukan anggaran yang besar untuk mendukung capaian indikator ini.
2) Adanya penduduk Kota Pariaman yang sudah menamatkan pendidikan tinggi merantau keluar Kota Pariaman.

Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pariaman untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka memajukan kualitas pelayanan Pendidikan di Kota Pariaman sebagai berikut :

1) Pendidikan Gratis 12 tahun Sebelum tahun 2017 Kota Pariaman telah melaksanakan Program Wajib Belajar 12 tahun, dimana semua peserta didik yang bersekolah di SD, SMP dan SMA/ SMK Negeri Kota Pariaman tidak dipungut biaya Uang Sekolah/ SPP/ Uang Komite. Akan tetapi semenjak pindahnya kewenangan Pendidikan Menengah ke Provinsi (tahun 2017), maka SMA dan SMK yang berada di Kota Pariaman memungut uang komite kepada siswa. Pada tahun 2019 melalui program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman periode 2018 – 2023 dan berlanjut periode 2025, Pemerintah Kota Pariaman memberikan Bantuan Keuangan Khusu kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar siswa yang berasal dari Kota Pariaman tidak lagi dipungut uang komite. Sehingga Pendidikan gratis 12 tahun (Wajib Belajar 12 tahun) tetap terlaksana di Kota Pariaman.
2) Satu Keluarga Satu Sarjana Satu Keluarga Satu Sarjana juga merupakan salah satu program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman periode 2018 – 2025. Program ini merupakan 60 pemberian beasiswa kepada mahasiswa Kota Pariaman yang berasal dari keluarga kurang mampu. Siswa/i Kota Pariaman yang berasal dari keluarga kurang mampu (terdata di DTKS) mengikuti

seleksi akademik yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama. Perguruan Tinggi tersebut merupakan Perguruan Tinggi yang melaksanakan Pendidikan Vokasi seperti : Politeknik Negeri Padang, Politeknik ATI Padang, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman, Politeknik Pelayaran Sumbar. Untuk diluar Provinsi adalah Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Program Vokasi Telkom University, Politeknik Pekerjaan Umum. Diharapkan mahasiswa tersebut setalah tamat cepat mendapatkan pekerjaan dan membantu meringankan beban orang tua. Siswa/i Kota Pariaman yang lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi tersebut di berikan beasiswa berupa Uang Pendidikan dan Uang Bulanan. Apabila mahasiswa tersebut mendapatkan nilai dibawah 2,75 maka mereka tidak diberikan beasiswa dan apabila disemester berikutnya nilai mereka 2,75 keatas maka diberikan Kembali beasiswa. Apabila mahasiswa tersebut berhenti atau mengundurkan diri, maka mereka akan mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pariaman.

Langkah-langkah/strategi yang diambil untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang sebagai berikut:

1) Meningkatkan mutu sekolah negeri baik SD ataupun SMP sehingga tidak kalah bersaing dengan sekolah – sekolah swasta yang ada di Kota Pariaman atau yang ada di luar Kota Pariaman.
2) Melengkapi kekurangan sarana dan prasarana yang ada di sekolah negeri (TK, SD dan SMP).
3) Menyediakan sarana dan prasana seperti GOR dan Lapangan Olahraga untuk masyarakat dalam kegiatan kepemudaan dan olahraga.
4) Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemuda di wilayah untuk kegiatan kepemudaan, seperti memberi pelatihan berwirausaha, dan sejenisnya. Kami berharap Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun 2026 dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, dan

semoga bermanfaat untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.







6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Manusia yang Berdaya Saing					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.755.475.000	2.678.688.000	97,21%	Menunjang
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.065.760.000	3.065.760.000	100%	Menunjang
	Program Pengelolaan Pendidikan	20.991.250	10.875.000	51,81%	Tidak Menunjang

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Manusia yang Berdaya Saing” dengan indikator kinerja utama Angka Rata-rata Lama Sekolah, Pemerintah Kota Pariaman melaksanakan beberapa program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan layanan pendidikan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki alokasi anggaran sebesar Rp2.755.475.000 dengan realisasi sebesar Rp2.678.688.000 atau mencapai 97,21 persen. Tingginya tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa program ini telah dilaksanakan secara optimal dan memberikan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan. Oleh karena itu, program ini dinilai menunjang pencapaian indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah.

Selanjutnya, Program Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki anggaran sebesar Rp3.065.760.000 dengan realisasi sebesar Rp3.065.760.000 atau mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan sangat baik sehingga mampu mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan, termasuk program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Dengan demikian, program ini juga dinilai menunjang pencapaian indikator kinerja.

Sementara itu, Program Pengelolaan Pendidikan memiliki anggaran sebesar Rp20.991.250 dengan realisasi sebesar Rp10.875.000 atau tingkat capaian 51,81 persen. Rendahnya tingkat realisasi pada program ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan angka rata-rata lama sekolah, sehingga dikategorikan tidak menunjang secara langsung pencapaian indikator kinerja.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program yang mendukung indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan bahwa sebagian besar program telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran strategis. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan program pendidikan, khususnya pada kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan akses pendidikan dan keberlanjutan pendidikan

masyarakat, agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah di Kota Pariaman.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Manusia yang Berdaya Saing						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Angka Rata-ata Lama Sekolah	Rp5.842.226.250	Rp5.755.323.000	115.86%	17,34%	93,35	Efisien

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE} = \frac{(\mathbf{5.842.226.250} \times \mathbf{1,1586}) - \mathbf{880.654.366}}{\mathbf{5.842.226.250}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{TE} = \mathbf{17,34\%}$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%
- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

Nilai Efisiensi = $\mathbf{50} + \left(\frac{\boldsymbol{TE}}{\mathbf{20}} \times \mathbf{50}\right)$

$\boldsymbol{NE} = \mathbf{50} + \left(\frac{\mathbf{17,34\%}}{\mathbf{20}} \times \mathbf{50}\right)$

NE= $\mathbf{93,35}$

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan anggaran mampu mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara besaran anggaran yang digunakan dengan capaian kinerja yang diperoleh, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja.

Berdasarkan data yang tersedia, indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah memiliki pagu anggaran sebesar Rp5.842.226.250 dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.755.323.000, serta capaian kinerja sebesar 115,86 persen. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus tingkat efisiensi, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 17,34 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja dapat diraih dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dibandingkan dengan potensi kebutuhan anggaran yang dihitung berdasarkan capaian kinerja.

Selanjutnya, tingkat efisiensi tersebut dikonversikan ke dalam nilai efisiensi dengan menggunakan formulasi konversi yang berlaku. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai efisiensi sebesar 93,35. Nilai ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah tergolong sangat efisien, karena capaian kinerja yang diperoleh cukup tinggi dengan tingkat penyerapan anggaran yang relatif optimal.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan

Angka Rata-Rata Lama Sekolah telah dilakukan secara efektif dan efisien. Meskipun demikian, ke depan perlu terus dilakukan peningkatan kualitas perencanaan program, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta penajaman kegiatan yang secara langsung berdampak pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Upaya tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan capaian kinerja sekaligus menjaga efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kota Pariaman.

3) Angka Usia Harapan Hidup

Salah satu indikator yang digunakan sebagai barometer kualitas pembangunan sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM antara lain ditentukan oleh Usia Harapan Hidup, sehingga peningkatan Usia Harapan Hidup akan meningkatkan IPM. Usia Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x.

Usia harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar. Semakin tingginya umur harapan hidup di Indonesia menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan..

Meski demikian, usia harapan hidup ini berbeda pada tiap daerah dan negara. Usia harapan hidup ini mencakup berbagai parameter yang menjelaskan derajat kesehatan suatu daerah. Beberapa parameternya secara kuantitatif adalah angka kematian bayi, angka kematian anak dibawah 5 tahun, Sedangkan parameter kualitatif seperti jenis kelamin, genetik, akses ke pelayanan kesehatan, kebersihan lingkungan, diet, nutrisi, gaya hidup dan tingkat kriminalitas.

Peningkatan Usia Harapan Hidup ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan kesehatan, baik dalam hal fasilitas, aksesibilitas, maupun program kesehatan preventif seperti kampanye hidup sehat dan imunisasi. Usia Harapan Hidup yang tinggi di Kota Pariaman juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin menikmati umur panjang dengan kualitas hidup yang lebih baik, yang sejalan dengan

upaya untuk meningkatkan pembangunan manusia secara keseluruhan di Kota Pariaman

Berdasarkan data Statistik Indonesia Tahun 2025, negara yang memiliki usia harapan hidup paling tinggi adalah Hongkong sebesar 85,6 Tahun dan yang terendah adalah Negara Nigeria yaitu 54,6 tahun. Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara, negara yang memiliki usia harapan hidup tertinggi adalah Singapura yaitu 83,9 tahun. Di Indonesia sendiri , menurut data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2025, Angka Usia Harapan Hidup tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 84,15 tahun dan yang terendah yaitu Provinsi Papua Pegunungan sebesar 54,43 tahun. Sedangkan untuk Indonesia rata-rata harapan hidup adalah 75,02 tahun. Provinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi merupakan daerah yang memiliki angka harapan hidup yang paling tinggi yaitu 75,62 Tahun dan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 71,21 tahun. Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri umur harapan hidup adalah 74,37 tahun. Untuk Kota Pariaman Usia harapan hidup pada Tahun 2025 adalah 74,62 tahun. Lebih tinggi dari umur harapan hidup Provinsi Sumatera Barat. Terjadi peningkatan di banding pada tahun 2024 tapi masih di bawah umur harapan hidup Nasional.

Pemerintah Kota Pariaman melalui DP3AKB Kota Pariaman berperan sebagai faktor pendukung dalam meningkatkan Usia Harapan Hidup yakni melaksanakan Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi secara rutin setiap bulannya serta memberikan KIE pada PUS untuk bisa merencanakan kehamilan dan mewujudkan Keluarga yang berkualitas, sehat dan sejahtera.

Tujuan utama program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia adalah mengendalikan pertambahan jumlah penduduk, membatasi angka kelahiran, dan mengatur jarak kelahiran untuk mewujudkan keluarga yang sehat, kecil, bahagia, dan sejahtera. Program ini juga bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan kesadaran penggunaan alat kontrasepsi. Berikut rincian tujuan KB secara umum dan khusus:

1. Tujuan Utama dan Jangka Panjang
    - Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk: Menyeimbangkan kebutuhan dengan jumlah penduduk.
    - Membentuk Keluarga Sehat Sejahter :Mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sesuai dengan kemampuan ekonomi
    - Meningkatkan Kualitas Keluarga: Mendorong pola asuh anak yang baik dan kecukupan ASI
2. Tujuan Terkait Kesehatan (Ibu dan Anak)
    - Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB): menunjukkan kehamilan yang jaraknya terlalu dekat atau tidak diinginkan.
    - Pencegahan Kehamilan Berisiko: Menghindari kehamilan pada usia terlalu muda (dibawah 20 tahun) atau terlalu tua (diatas 35 tahun).
    - Menjaga Reproduksi Kesehatan: Mengurangi risiko kesehatan seperti hipertensi, preeklamsia, dan komplikasi persalinan.
3. Tujuan Sosial dan Ekonomi
    - Pengaturan Jarak Kelahiran: Memberi kesempatan ibu untuk memulihkan dan perhatian yang maksimal pada anak.
    - Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi: Membantu perencanaan keluarga jumlah anak sesuai kemampuan ekonomi, sehingga meningkatkan kualitas hidup.
    - Acara Pernikahan Dini: Menekan angka pernikahan di usia yang terlalu muda.

Melalui program KB, masyarakat diharapkan dapat merencanakan kehamilan dengan lebih baik menggunakan metode kontrasepsi yang sesuai (pil, suntik, IUD, implan). Dalam mendukung Pencapaian Indikator Usia Harapan Hidup ini Pemerintah Kota Pariaman melaksanakan Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi di seluruh Klinik KB secara rutin setiap bulannya, dan diprioritaskan pada Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang seperti IUD, Implant, MOW dan MOP

Penetapan target Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024–2026.

Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 74,37, target tahun 2025 yang sebelumnya ditetapkan dalam RPD sebesar 71,71 mengalami penyesuaian menjadi 74,37. Penyesuaian ini dilakukan karena realisasi capaian tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Angka Usia Harapan Hidup	74,37	74,62	100,34%	Sangat Tinggi

Pada tahun 2025, indikator Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pariaman ditargetkan sebesar 74,37 tahun, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 74,62 tahun. Dengan demikian tingkat capaian kinerja mencapai 100,34 persen dari target yang telah ditetapkan dengan kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tergolong sangat baik, karena realisasi indikator berhasil melampaui target yang direncanakan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta akses masyarakat terhadap layanan kesehatan telah memberikan hasil yang positif. Peningkatan usia harapan hidup mencerminkan adanya perbaikan kondisi kesehatan masyarakat secara umum, yang dapat dilihat dari meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, perbaikan status gizi masyarakat, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Selain itu, peningkatan usia harapan hidup juga dipengaruhi oleh berbagai program pembangunan di bidang kesehatan dan kependudukan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti

peningkatan pelayanan kesehatan dasar di fasilitas kesehatan, program kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta pelaksanaan program keluarga berencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan keluarga.

Meskipun capaian indikator usia harapan hidup pada tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan, upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peningkatan usia harapan hidup dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga kualitas hidup masyarakat Kota Pariaman semakin baik dan mampu mendukung pencapaian pembangunan manusia yang lebih optimal di masa yang akan datang.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
73,98	74,20	74,37	74,62	104,37%	104,24%	104,29%	100,34%

Berdasarkan data realisasi indikator Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pariaman dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 realisasi UHH tercatat sebesar 73,98 tahun, kemudian meningkat menjadi 74,20 tahun pada tahun 2023, 74,37 tahun pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 74,62 tahun pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Kota Pariaman secara umum mengalami perbaikan yang cukup baik.

Jika dilihat dari sisi capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, pada tahun 2022 tingkat capaian kinerja sebesar 104,37%, pada tahun 2023 sebesar 104,24%, dan pada tahun 2024 sebesar 104,29%, yang berarti realisasi kinerja pada ketiga tahun tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu pada tahun 2025 tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 100,34%, yang juga menunjukkan bahwa realisasi indikator masih berada di atas target

yang ditetapkan meskipun persentase capaian sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, tren peningkatan nilai Usia Harapan Hidup ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, serta berbagai program kesehatan lainnya telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Pariaman. Capaian tersebut juga mencerminkan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang dilakukan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
74,62	72,21	103.33%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2026, indikator Usia Harapan Hidup (UHH) menunjukkan capaian yang sangat baik. Realisasi UHH pada tahun 2025 tercatat sebesar 74,62 tahun, sedangkan target akhir RPD yang ditetapkan sebesar 72,21 tahun. Dengan demikian tingkat capaian terhadap target akhir RPD mencapai 103,33 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Pariaman dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah melampaui target yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Realisasi yang lebih tinggi dari target akhir RPD ini mengindikasikan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan usia harapan hidup.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
74,62	74,47	100.20%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi indikator Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pariaman dengan capaian tingkat nasional pada tahun 2025, terlihat bahwa capaian daerah berada pada kondisi yang relatif sebanding dengan rata-rata nasional. Realisasi UHH Kota Pariaman pada tahun 2025 tercatat sebesar 74,62 tahun, sedangkan realisasi UHH nasional pada tahun yang sama sebesar 74,47 tahun. Dengan demikian tingkat capaian terhadap nilai nasional mencapai 100,20 persen, data tersebut di ambil dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Berita Resmi Statistik (BRS) No. 104/11/Th. XXVIII, 5 November 2025.*

Capaian tersebut menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Kota Pariaman berada pada tingkat yang baik dan bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, akses terhadap fasilitas kesehatan, serta pelaksanaan program promotif dan preventif di bidang kesehatan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, pencapaian usia harapan hidup yang berada di atas rata-rata nasional juga mencerminkan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat Kota Pariaman secara umum berada pada tingkat yang cukup baik dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional.

2) Perbandingan dengan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi 2025	Realisasi Provinsi Sumbar 2025	Capaian
74,62	74,69	99.90%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi indikator Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pariaman dengan capaian Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025, diketahui bahwa realisasi UHH Kota Pariaman tercatat sebesar 74,62 tahun, sedangkan realisasi UHH Provinsi Sumatera Barat sebesar 74,69 tahun. Dengan demikian tingkat capaian Kota Pariaman terhadap capaian provinsi sebesar 99,90 persen.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian usia harapan hidup Kota Pariaman berada pada tingkat yang hampir setara dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat, meskipun masih sedikit berada di bawah capaian provinsi dengan selisih sekitar 0,07 tahun. Selisih yang relatif kecil tersebut menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kota Pariaman secara umum berada pada kondisi yang baik dan sejalan dengan capaian pembangunan kesehatan di tingkat provinsi.

Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3) Perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Peringkat	Kabupaten/Kota	UHH 2025 (Tahun)
1	Kota Bukittinggi	76,06
2	Kota Padang	75,59
3	Kota Payakumbuh	75,54
4	Kota Solok	75,30
5	Kota Padang Panjang	74,86

6	Kabupaten Agam	74,63
7	Kota Pariaman	74,62
8	Kabupaten Tanah Datar	74,35
9	Kabupaten Dharmasraya	74,34
10	Kota Sawahlunto	74,21
11	Kabupaten Padang Pariaman	74,04
12	Kabupaten Pesisir Selatan	73,68
13	Kabupaten Lima Puluh Kota	73,64
14	Kabupaten Sijunjung	73,30
15	Kabupaten Pasaman Barat	73,17
16	Kabupaten Solok Selatan	72,77
17	Kabupaten Pasaman	72,76
18	Kabupaten Solok	72,82
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	71,40

Sumber: Pariaman dalam Angka 2026

Berdasarkan data Angka Harapan Hidup kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, Kota Pariaman memiliki usia harapan hidup sebesar 74,62 tahun. Nilai tersebut menempatkan Kota Pariaman pada kelompok daerah dengan capaian menengah ke atas dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat.

Jika dibandingkan dengan daerah dengan capaian tertinggi, yaitu Kota Bukittinggi sebesar 76,06 tahun, maka usia harapan hidup Kota Pariaman masih lebih rendah sekitar 1,44 tahun. Sementara itu jika dibandingkan dengan daerah dengan capaian terendah yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 71,40 tahun, usia harapan hidup Kota Pariaman lebih tinggi sekitar 3,22 tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kota Pariaman berada pada kondisi yang relatif baik dan berada pada kisaran rata-rata atas di tingkat provinsi. Capaian tersebut mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan usia harapan hidup di Kota Pariaman adalah :

1. Kemudahan akses pelayanan kesehatan di Kota Pariaman. Artinya fasilitas pelayanan kesehatan mudah dijangkau oleh masyarakat tanpa kesulitan.
2. Adanya Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Kota Pariaman kepada masyarakatnya.
3. Puskesmas dan Rumah Sakit di Kota Pariaman yang telah terakreditasi PARIPURNA sehingga melaksanakan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Pariaman sudah sesuai standar.
4. Puskesmas se Kota Pariaman sudah menerapkan pelayanan secara terintegrasi berupa puskesmas Integrasi Layanan Primer (ILP).
5. Pelayanan KB sudah dilaksanakan secara rutin di Klinik KB yang teregistrasi dengan SIGA.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 adalah

1. Meningkatkan edukasi, promosi dan pendidikan kesehatan kepada masyarakat baik di posyandu, puskesmas, Rumah Sakit, Sekolah dan tempat lainnya
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi dengan puskesmas Terintegrasi dengan menyediakan sarana prasarana yang lengkap
3. Melakukan MOU MOW MOP dengan RS Dr. M. Yamin Kota Pariaman

Strategi yang akan di lakukan di tahun berikutnya:

1. Meningkatkan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat.
2. Membudayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
3. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan.
4. Meningkatkan mutu pelayanan KB di fasilitas kesehatan.
5. Memberikan pelayanan gratis pemasangan alat kontrasepsi pada PUS.

6. Melakukan skrining kesehatan pada semua kelompok umur secara berkala.
7. Ketersediaan alat obat kontrasepsi, serta prasarana yang lengkap pada setiap Klinik KB.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp390.829.000	Rp364.719.000	93,32%	Menunjang
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp17.426.572.953	Rp17.117.085.789	98,22%	Menunjang

Berdasarkan hasil analisis terhadap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Angka Usia Harapan Hidup (UHH), terdapat dua program utama yang berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yaitu Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) serta Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) memiliki total anggaran sebesar Rp390.829.000 dengan realisasi sebesar Rp364.719.000 atau tingkat serapan anggaran sebesar 93,32 persen. Program ini berperan dalam menunjang pencapaian indikator UHH melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana, penyediaan alat dan obat kontrasepsi, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam merencanakan keluarga yang sehat dan berkualitas. Meskipun

kontribusinya bersifat tidak langsung, program ini memiliki dampak penting dalam menurunkan risiko kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas kesehatan keluarga.

Sementara itu, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat memiliki anggaran yang jauh lebih besar yaitu sebesar Rp17.426.572.953 dengan realisasi sebesar Rp17.117.085.789 atau tingkat serapan anggaran sebesar 98,22 persen. Program ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan usia harapan hidup melalui penyediaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, serta pelaksanaan upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, kedua program tersebut dikategorikan menunjang pencapaian indikator kinerja, dengan tingkat serapan anggaran yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tingginya realisasi anggaran juga mencerminkan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan usia harapan hidup di Kota Pariaman.

Namun, masih diperlukan upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan program, khususnya dalam memperkuat sinergi antar program serta meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga dampak yang dihasilkan terhadap peningkatan usia harapan hidup dapat lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Rp17.817.401.953	Rp17.481.804.789	100,34 %	2,22%	55,55	Efisien

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE} = \frac{(\mathbf{17.817.401.953} \times \mathbf{1,0034}) - \mathbf{17.481.804.789}}{\mathbf{17.817.401.953}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{TE} = \mathbf{2,22\%}$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%
- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

$$\boldsymbol{NE} = \mathbf{50} + \left(\frac{\mathbf{2,22\%}}{\mathbf{20}} \times \mathbf{50}\right)$$

NE=55,55%

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 2,22 persen dengan nilai efisiensi sebesar 55,55, yang termasuk dalam kategori

efisien. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah mampu mendukung pencapaian kinerja yang melebihi target secara optimal, dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan pagu yang tersedia.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan secara cukup efektif dan efisien, dimana capaian kinerja yang tinggi dapat diraih tanpa harus menghabiskan seluruh anggaran yang dialokasikan. Ke depan, efisiensi ini perlu dipertahankan dengan tetap menjaga kualitas pelaksanaan program dan kegiatan agar dampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat semakin optimal.

4) Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi serius pada anak yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah rata-rata atau anak sangat pendek serta tubuhnya tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai usianya dan berlangsung dalam waktu lama. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia. Juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunted, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreatifitas di usia-usia produktif.

Prevalensi stunting adalah persentase balita yang mengalami stunting (tinggi badan menurut umur berada di bawah standar) dibandingkan dengan jumlah seluruh balita yang diukur pada suatu wilayah dan periode tertentu. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dapat dipengaruhi oleh:

a. asupan gizi yang tidak cukup
b. infeksi berulang
c. pola asuh yang kurang optimal
d. sanitasi dan akses air bersih yang buruk
e. faktor sosial ekonomi keluarga

Dalam pengukuran kesehatan masyarakat, stunting ditentukan berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) yang berada di bawah -2 standar deviasi (SD) dari standar pertumbuhan anak yang ditetapkan oleh World Health Organization. Secara umum, indikator prevalensi stunting digunakan untuk menggambarkan tingkat masalah gizi kronis pada balita di suatu daerah.

Tujuan penggunaan indikator prevalensi stunting dalam LAKIP pemerintah daerah antara lain:

1. Mengukur tingkat permasalahan gizi kronis pada balita Indikator ini menunjukkan seberapa besar proporsi balita yang mengalami gangguan pertumbuhan di wilayah tersebut.
2. Menilai keberhasilan program penurunan stunting Digunakan untuk mengevaluasi efektivitas berbagai program intervensi gizi, kesehatan, sanitasi, dan perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
3. Menjadi dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan Data prevalensi stunting membantu pemerintah daerah dalam menentukan prioritas program dan alokasi sumber daya.
4. Memantau pencapaian target pembangunan kesehatan Indikator ini menjadi bagian dari target nasional percepatan penurunan stunting yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan Penurunan stunting berkontribusi pada peningkatan kemampuan kognitif, produktivitas, dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

Prevalensi stunting dihitung dengan membandingkan jumlah balita yang mengalami stunting dengan jumlah seluruh balita yang diukur dalam suatu wilayah dan periode tertentu.

$$\text{Prevalensi Stunting (\%)} = \frac{\text{Jumlah balita stunting}}{\text{Jumlah seluruh balita yang diukur}} \times \mathbf{100}\%$$

Keterangan:

- Jumlah balita stunting = jumlah balita dengan status tinggi badan menurut umur (TB/U) < -2 standar deviasi berdasarkan standar pertumbuhan anak dari World Health Organization
- Jumlah seluruh balita yang diukur = total balita yang dilakukan pengukuran tinggi badan dan umur pada periode pengukuran.

Kategori penilaian indikator bersifat semakin rendah nilai prevalensi stunting maka kinerja dinilai semakin baik, karena menunjukkan keberhasilan upaya pencegahan dan penurunan jumlah balita stunting di daerah. Penilaian terhadap indikator prevalensi stunting tidak dilakukan oleh satu instansi saja, karena indikator ini merupakan indikator kinerja daerah yang bersifat lintas sektor.

Data prevalensi stunting biasanya diperoleh dari:

1. Aplikasi e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
2. Survei kesehatan nasional seperti SSGI (Survei Status Gizi Indonesia)

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Prevalensi Stunting	10,5	10,3	101,9%	Sangat Tinggi

Sumber: EPPGMB

Capaian indikator prevalensi stunting tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik karena realisasi sebesar 10,3% berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 10,5%. Berdasarkan perhitungan capaian indikator, kinerja ini mencapai 101,9% sehingga termasuk dalam kategori sangat baik. Capaian ini diperoleh berdasarkan data dari e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) Tahun 2025.

Berdasarkan data e-PPGBM Tahun 2025, prevalensi stunting di Kota Pariaman menunjukkan variasi antar wilayah kerja puskesmas. Wilayah kerja Puskesmas Pariaman memiliki jumlah balita stunting sebanyak 140 balita dengan prevalensi sekitar 6,97%, yang merupakan salah satu angka terendah di Kota Pariaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemantauan pertumbuhan balita serta intervensi gizi di wilayah tersebut berjalan cukup baik.

Di wilayah kerja Puskesmas Kurai Taji, tercatat 86 balita stunting dengan prevalensi sekitar 14,85%, yang merupakan angka tertinggi dibandingkan wilayah puskesmas lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut masih memerlukan perhatian dan penguatan intervensi dalam percepatan penurunan stunting.

Wilayah kerja Puskesmas Naras juga menunjukkan angka yang relatif tinggi dengan 124 balita stunting atau sekitar 13,15%, diikuti oleh Puskesmas Sikapak dengan 72 balita stunting atau sekitar 12,29%, serta Puskesmas Kampung Baru Padusunan dengan 71 balita stunting atau sekitar 11,29%.

Sementara itu, wilayah kerja Puskesmas Air Santok mencatat 58 balita stunting dengan prevalensi sekitar 10,21%, dan Puskesmas Marunggi sebanyak 52 balita stunting dengan prevalensi sekitar 9,87%.

Perbedaan capaian antar wilayah kerja puskesmas tersebut menunjukkan adanya variasi kondisi sosial, ekonomi, pola asuh, serta cakupan intervensi kesehatan dan gizi di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan intervensi yang lebih terfokus pada wilayah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi melalui peningkatan pendampingan keluarga berisiko stunting, optimalisasi pelayanan posyandu, serta penguatan koordinasi lintas sektor di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Data e-PPGBM merupakan surveilans gizi yang bersumber dari laporan rutin penimbangan balita di posyandu yang diinput oleh petugas kesehatan ke dalam aplikasi e-PPGBM. Setiap bulan, data tersebut dimanfaatkan oleh kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai dasar pelaksanaan pendampingan kepada sasaran secara by name by address di desa wilayah kerjanya. Pendampingan yang

dilakukan oleh kader TPK kemudian dievaluasi dan ditindaklanjuti melalui forum Mini Lokakarya di tingkat kecamatan, serta melalui rapat koordinasi dan evaluasi tingkat kota oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (PPPS).

Selain kontribusi intervensi gizi spesifik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan pertumbuhan balita, serta intervensi gizi lainnya, upaya pendampingan keluarga dan koordinasi lintas sektor tersebut juga merupakan bentuk intervensi gizi sensitif yang dilaksanakan oleh Dinas P3AKB. Sinergi antara intervensi spesifik dan sensitif ini menunjukkan bahwa pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kota Pariaman berjalan secara efektif, terintegrasi, dan kolaboratif.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
9	10,5	10,5	10,3	146,42%	116%	133%	101,9%

Berdasarkan data capaian indikator prevalensi stunting selama periode 2022–2025, terlihat bahwa kinerja Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya penurunan stunting menunjukkan tren yang relatif stabil dan tetap berada pada kategori baik. Pada tahun 2022, realisasi prevalensi stunting tercatat sebesar 9% dengan capaian kinerja 146,42%, yang menunjukkan bahwa realisasi jauh lebih baik dari target yang ditetapkan.

Pada tahun 2023, realisasi prevalensi stunting meningkat menjadi 10,5% dengan capaian kinerja sebesar 116%. Meskipun terjadi peningkatan angka prevalensi dibandingkan tahun sebelumnya, capaian kinerja masih berada di atas target yang ditetapkan sehingga kinerja tetap dinilai baik.

Selanjutnya pada tahun 2024, realisasi prevalensi stunting tetap berada pada angka 10,5% dengan capaian kinerja 133%, yang

menunjukkan adanya perbaikan dalam pencapaian target indikator dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025, realisasi prevalensi stunting tercatat sebesar 10,3%, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan 2024. Dengan capaian kinerja sebesar 101,9%, indikator ini masih berada di atas target yang ditetapkan sehingga menunjukkan bahwa kinerja penurunan stunting di Kota Pariaman tetap berjalan dengan baik.

Secara keseluruhan, capaian indikator prevalensi stunting selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting di Kota Pariaman telah berjalan secara konsisten. Meskipun terjadi fluktuasi pada nilai prevalensi stunting, capaian kinerja setiap tahunnya tetap berada di atas 100%, yang berarti target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dan sinergi berbagai pihak dalam mendukung program percepatan penurunan stunting di Kota Pariaman.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
10,3	10,3	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2025, realisasi prevalensi stunting Kota Pariaman sebesar 10,3%. Nilai tersebut sama dengan target akhir RPD tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 10,3%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Pariaman dalam percepatan penurunan stunting telah berjalan dengan baik dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sebelum periode target berakhir. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai intervensi yang dilakukan secara terpadu, baik melalui intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif, seperti peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan pertumbuhan balita, perbaikan sanitasi lingkungan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Dengan tercapainya target akhir RPD tersebut, Pemerintah Kota Pariaman diharapkan dapat mempertahankan bahkan menurunkan kembali angka prevalensi stunting pada tahun-tahun berikutnya melalui penguatan program konvergensi percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
15,7	19,8	126,1%

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting nasional pada tahun 2025 tercatat sebesar 19,8%, sedangkan realisasi prevalensi stunting Kota Pariaman sebesar 15,7%.

Jika dibandingkan dengan angka nasional tersebut, prevalensi stunting di Kota Pariaman lebih rendah sebesar 4,1 poin persentase dari rata-rata nasional. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja Kota Pariaman terhadap angka nasional mencapai 126,1%, yang menunjukkan bahwa kondisi stunting di Kota Pariaman lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Perlu diketahui bahwa data prevalensi stunting tingkat nasional tidak tersedia dalam sistem e-PPGBM, karena e-PPGBM merupakan sistem pencatatan dan pelaporan gizi berbasis pelayanan yang digunakan untuk pemantauan rutin di tingkat daerah. Oleh karena itu, untuk keperluan perbandingan dengan tingkat nasional digunakan data SSGI yang merupakan survei resmi nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman telah memberikan hasil yang cukup baik. Namun demikian, berbagai program intervensi gizi spesifik dan sensitif

tetap perlu diperkuat agar prevalensi stunting dapat terus menurun pada tahun-tahun mendatang.

2) Perbandingan dengan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi 2025	Rata-rata Stunting di Prov. Sumbar 2025	Capaian
10,3	10,3	100%

Sumber : Aplikasi e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)

Berdasarkan tabel perbandingan, realisasi prevalensi stunting Kota Pariaman tahun 2025 sebesar 10,3%, sementara rata-rata prevalensi stunting Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang sama juga sebesar 10,3%. Dengan demikian, tingkat capaian Kota Pariaman terhadap rata-rata provinsi mencapai 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi prevalensi stunting di Kota Pariaman berada pada tingkat yang sama dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Capaian tersebut menggambarkan bahwa upaya penurunan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman telah berjalan sejalan dengan kinerja penanganan stunting di tingkat provinsi.

Realisasi 2025	Rata-rata Stunting di Prov. Sumbar 2025	Capaian
15,7	23,6%	133,5%

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat sebesar 23,6%, sedangkan prevalensi stunting Kota Pariaman sebesar 15,7%.

Jika dibandingkan dengan angka provinsi tersebut, prevalensi stunting di Kota Pariaman lebih rendah sebesar 7,9 poin persentase dari rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi stunting di Kota Pariaman lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi.

Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa berbagai upaya percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman melalui intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif telah memberikan dampak positif terhadap

perbaikan status gizi balita. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan pertumbuhan balita secara rutin di posyandu, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung perbaikan gizi masyarakat.

3) Perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (e-PPGBM)

No	Kabupaten/Kota	Prevalensi (%)
1	Kota Payakumbuh	2,59
2	Kota Padang	2,65
3	Kota Sawahlunto	5,58
4	Kab. Pesisir Selatan	7,25
5	Kab. Dharmasraya	7,26
6	Kab. Padang Pariaman	9,35
7	Kota Padang Panjang	9,40
8	Kota Solok	9,71
9	Kota Pariaman	10,33
10	Kota Bukittinggi	11,55
11	Kab. Lima Puluh Kota	12,76
12	Kab. Solok Selatan	12,93
13	Kab. Agam	12,95
14	Kab. Pasaman Barat	13,79
15	Kab. Tanah Datar	14,71
16	Kab. Sijunjung	15,37
17	Kab. Solok	15,62
18	Kab. Pasaman	18,29
19	Kab. Kepulauan Mentawai	23,34

Sumber : Aplikasi e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)

Berdasarkan data prevalensi stunting kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, terdapat variasi yang cukup signifikan antar daerah. Prevalensi stunting terendah tercatat di Kota Payakumbuh sebesar 2,59%, diikuti Kota Padang sebesar 2,65%

dan Kota Sawahlunto sebesar 5,58%. Sementara itu, prevalensi stunting tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 23,34%, diikuti Kabupaten Pasaman sebesar 18,29% dan Kabupaten Solok sebesar 15,62%.

Kota Pariaman memiliki prevalensi stunting sebesar 10,33%, yang menempatkannya pada peringkat ke-9 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Nilai ini juga sama dengan rata-rata prevalensi stunting Provinsi Sumatera Barat sebesar 10,33%, sehingga menunjukkan bahwa kondisi stunting di Kota Pariaman berada pada tingkat rata-rata provinsi.

Secara umum, daerah perkotaan di Sumatera Barat cenderung memiliki prevalensi stunting yang lebih rendah dibandingkan sebagian kabupaten. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor akses pelayanan kesehatan, kondisi sosial ekonomi, serta cakupan program intervensi gizi yang relatif lebih baik di wilayah perkotaan. Meskipun demikian, upaya penurunan stunting di Kota Pariaman tetap perlu terus ditingkatkan agar prevalensinya dapat lebih rendah dari rata-rata provinsi pada tahun-tahun mendatang.

Perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (SSGI)

No	Kabupaten/Kota	Stunting (%)
1	Kota Pariaman	15,7
2	Kota Payakumbuh	16,4
3	Kota Bukittinggi	16,8
4	Kota Solok	18,6
5	Kota Padang Panjang	19,0
6	Kota Sawahlunto	20,0
7	Kab. Dharmasraya	20,5
8	Kota Padang	20,6
9	Kab. Solok Selatan	21,5
10	Kab. Kep. Mentawai	24,9
11	Kab. Pesisir Selatan	26,2
12	Kab. Lima Puluh Kota	26,5

13	Kab. Pasaman Barat	26,6
14	Kab. Padang Pariaman	26,6
15	Kab. Tanah Datar	26,9
16	Kab. Agam	27,0
17	Kab. Sijunjung	28,2
18	Kab. Pasaman	29,1
19	Kab. Solok	29,5

Sumber: Survei kesehatan nasional seperti SSGI (Survei Status Gizi Indonesia)

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kota Pariaman memiliki prevalensi stunting sebesar 15,7%, yang merupakan nilai terendah di antara 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, beberapa kabupaten memiliki prevalensi stunting yang jauh lebih tinggi, seperti Kabupaten Solok sebesar 29,5%, Kabupaten Pasaman sebesar 29,1%, dan Kabupaten Sijunjung sebesar 28,2%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kondisi stunting antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, beberapa kota lainnya juga memiliki prevalensi yang relatif lebih rendah, seperti Kota Payakumbuh (16,4%), Kota Bukittinggi (16,8%), dan Kota Solok (18,6%), namun masih lebih tinggi dibandingkan Kota Pariaman. Dengan demikian, capaian Kota Pariaman dalam penurunan stunting dapat dikatakan lebih baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai upaya percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman telah memberikan hasil yang positif. Meskipun demikian, upaya penanganan stunting tetap perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar prevalensi stunting dapat terus menurun dan mempertahankan posisi yang lebih baik di tingkat provinsi.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

   Faktor Keberhasilan:

   1) Pelaksanaan Program Bangga Kencana melalui penguatan Kampung Keluarga Berkualitas yang menjadi wadah integrasi kegiatan pembangunan keluarga dan intervensi lintas sektor di tingkat wilayah.
   2) Optimalisasi peran kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R, dan UPPKA) dalam penyampaian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada keluarga sasaran.
   3) Pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga yang mendorong peningkatan pengetahuan keluarga terkait kesehatan reproduksi, pengasuhan, dan pemenuhan gizi keluarga.
   4) Penguatan koordinasi melalui mekanisme operasional Program Bangga Kencana seperti Rakorcam, Rakordes, dan Mini Lokakarya dalam mendukung sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di tingkat lapangan.
   5) Ketersediaan data keluarga berisiko stunting yang mendukung penentuan sasaran intervensi secara lebih terarah.

   Kendala yang Dihadapi:

   1) Kontribusi program DP3AKB terhadap penurunan prevalensi stunting bersifat tidak langsung sehingga capaian indikator juga dipengaruhi oleh intervensi sektor kesehatan dan kondisi sosial ekonomi keluarga.
   2) Kualitas pelaksanaan pendampingan dan kegiatan kelompok di tingkat lapangan.
   3) Perubahan perilaku keluarga dalam pola asuh dan pemenuhan gizi memerlukan waktu dan pendampingan berkelanjutan.
   4) Pemanfaatan data keluarga berisiko stunting belum sepenuhnya optimal dalam perencanaan intervensi berbasis sasaran prioritas.

Solusi:

1) Penguatan kualitas pendampingan keluarga berisiko stunting melalui peningkatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga dan kader IMP.
2) Optimalisasi pemanfaatan data keluarga berisiko stunting sebagai dasar perencanaan kegiatan dan penentuan sasaran prioritas.
3) Peningkatan intensitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada keluarga sasaran melalui kelompok kegiatan Bangga Kencana.
4) Penguatan koordinasi dan konvergensi program lintas perangkat daerah melalui Mini Lokakarya.
5) Penguatan advokasi kepada stakeholders dan mitra kerja untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.

6) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Prevalensi Stunting	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp1.041.195.000	Rp1.015.095.000	97,49%	Menunjang
	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp1.373.400.000	Rp1.372.200.000	99,91%	Menunjang
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp2.189.570.150	Rp1.974.869.698	90,20%	Menunjang

Berdasarkan hasil analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja prevalensi stunting, terdapat tiga program

utama yang seluruhnya berkontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan capaian anggaran sebesar 97,49% berperan dalam mendukung penurunan stunting melalui penguatan Program Bangga Kencana, peningkatan kapasitas kader, serta penguatan koordinasi di tingkat lapangan. Program ini berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku keluarga terkait kesehatan reproduksi, pengasuhan anak, dan perencanaan keluarga yang merupakan faktor penting dalam pencegahan stunting.

Selanjutnya, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) menunjukkan capaian anggaran yang sangat tinggi yaitu 99,91%. Program ini berkontribusi secara langsung melalui kegiatan pemantauan dan pendampingan keluarga berisiko stunting, sehingga intervensi yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif dalam menurunkan faktor risiko stunting di tingkat keluarga.

Sementara itu, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat memiliki capaian anggaran sebesar 90,20% dan merupakan program dengan peran paling langsung dalam penanganan stunting. Melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan pertumbuhan balita, serta intervensi gizi spesifik, program ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

Secara keseluruhan, ketiga program tersebut menunjukkan kinerja yang baik dan saling melengkapi melalui pendekatan konvergensi antara intervensi gizi spesifik dan sensitif. Hal ini menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator prevalensi stunting. Namun demikian, optimalisasi pelaksanaan program, khususnya pada sektor kesehatan, masih perlu ditingkatkan agar dampak intervensi dapat lebih maksimal pada periode berikutnya.

7) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Prevalensi Stunting	Rp4.604.165.150	Rp4.362.164.698	101,9%	7,16%	67,90	Efisien

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE} = \frac{(\mathbf{4.604.165.150} \times \mathbf{1,019}) - \mathbf{4.362.164.698}}{\mathbf{4.604.165.150}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{TE} = \mathbf{7,16\%}$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%
- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

$$NE = 50 + \left(\frac{7,16\%}{20} \times 50\right)$$

$NE = 67,90$

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada indikator kinerja prevalensi stunting, diperoleh Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 7,16% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 67,90. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung penurunan stunting telah dilaksanakan secara efisien.

Efisiensi ini tercermin dari realisasi anggaran sebesar Rp4.362.164.698 yang lebih rendah dibandingkan pagu anggaran sebesar Rp4.604.165.150, namun capaian kinerja tetap mampu melampaui target dengan capaian sebesar 101,9%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan output dan outcome yang maksimal.

Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran juga dipengaruhi oleh sinergi pelaksanaan program yang mencakup intervensi gizi spesifik dan sensitif, seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan pertumbuhan balita, serta pendampingan keluarga berisiko stunting. Pendekatan konvergensi ini memungkinkan pencapaian hasil yang lebih efektif dengan penggunaan sumber daya yang relatif lebih hemat.

5) Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar tertentu (misal: 2012=100). Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas (dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan). Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Indikator Pengeluaran per kapita yang disesuaikan menggambarkan tingkat kesejahteraan dan kemampuan daya beli penduduk di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) secara riil tanpa pengaruh inflasi, sering diukur dalam ribu rupiah per orang per tahun.

Penetapan target indikator pengeluaran per kapita di Kota Pariaman mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	14,146 (Ribu/Rp)	14,261 (Ribu/Rp)	100,81%	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan, diketahui bahwa target tahun 2025 ditetapkan sebesar 14,146 ribu rupiah, sedangkan realisasi kinerja berdasarkan publikasi Hasil Long Form SP2020 yang diterbitkan oleh BPS Kota Pariaman tahun 2025 tercatat sebesar 14,261 ribu rupiah. Dengan kondisi tersebut, tingkat capaian kinerja yang diperoleh adalah 100,81%, sehingga termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Capaian ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Kota Pariaman mengalami peningkatan dan telah melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencerminkan membaiknya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, yang dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, serta stabilitas harga kebutuhan pokok. Dengan demikian, kinerja pada sasaran strategis meningkatnya daya beli masyarakat dapat dinilai berhasil dicapai secara optimal pada tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
13,150	13,355	13,784	14,261	97,04%	95,39%	99,78%	100,81%

Berdasarkan perbandingan realisasi indikator Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Kota Pariaman dalam beberapa tahun terakhir, terlihat bahwa nilai realisasi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 realisasi tercatat sebesar 13,150 ribu rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 13,355 ribu rupiah. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 13,784 ribu rupiah, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 14,261 ribu rupiah.

Dari sisi capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan, pada tahun 2022 capaian kinerja sebesar 97,04 persen, kemudian menurun menjadi 95,39 persen pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 capaian kinerja mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 99,78 persen, dan pada tahun 2025 berhasil melampaui target dengan capaian 100,81 persen.

Secara umum, peningkatan realisasi indikator ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Kota Pariaman terus mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Capaian kinerja yang semakin mendekati bahkan melampaui target menunjukkan bahwa berbagai upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, pengembangan usaha masyarakat, serta peningkatan kesempatan kerja mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
14.261	14.478	98,50%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026

pada indikator Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan, diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 berdasarkan publikasi Hasil Long Form SP2020 yang diterbitkan oleh BPS Kota Pariaman tercatat sebesar 14,261 ribu rupiah, sedangkan target akhir RPD tahun 2026 ditetapkan sebesar 14,478 ribu rupiah. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target akhir RPD telah mencapai 98,50 persen, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja sudah berada pada kategori sangat baik dan mendekati target yang telah ditetapkan.

Selisih antara realisasi tahun 2025 dengan target akhir RPD relatif kecil, sehingga peluang untuk mencapai bahkan melampaui target pada akhir periode perencanaan masih cukup terbuka. Realisasi indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya stabilitas harga kebutuhan pokok, peningkatan kesempatan kerja, serta pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, untuk memastikan tercapainya target pada akhir tahun 2026, pemerintah daerah perlu terus menjaga stabilitas harga (inflasi), memperluas lapangan kerja, serta mendorong peningkatan produktivititas sektor ekonomi masyarakat, khususnya melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta peningkatan produktivitas sektor pertanian dan sektor ekonomi produktif lainnya yang menjadi penopang utama perekonomian masyarakat Kota Pariaman.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Rata-rata Nilai Pengeluaran per kapita Kab/Kota seluruh Indonesia Tahun 2025	Capaian
14,261 (Ribu/Rp)	12,802 (Ribu/Rp)	111,40%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja indikator Pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan rata-rata nasional kabupaten/kota se-Indonesia, diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 14,261 (Ribu/Rp), sedangkan rata-rata nilai

pengeluaran per kapita kabupaten/kota secara nasional pada tahun 2025 sebesar 12,802 (Ribu/Rp). Dengan demikian, tingkat capaian yang diperoleh sebesar 111,40%.

Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Pariaman berada di atas rata-rata nasional, dan sekaligus menggambarkan tingkat kesejahteraan dan kemampuan daya beli penduduk Kota Pariaman cukup baik.

2) Perbandingan dengan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi 2025	Realisasi Provinsi Sumbar 2025	Capaian
14.261 (Ribu/Rp)	12.041 (Ribu/Rp)	118,44%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja indikator Pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan capaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diketahui bahwa realisasi kienerja Pemerintah Kota Pariaman pada tahun 2025 sebesar 14,261 (Ribu/Rp), sedangkan realisasi pengeluaran per kapita yang disesuaikan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 sebesar 12,041 (Ribu/Rp). Dengan demikian, tingkat capaian yang diperoleh sebesar 118,44%.

Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja sangat baik dan berada di atas capaian Provinsi dan beberapa Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat. Dengan begitu, dapat diartikan bahwa upaya dan setiap program/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman sudah cukup baik dan optimal dalam meningkatkan pengeluaran per kapita masyarakat.

Namun demikian, diharapkan Pemerintah Kota Pariaman dapat menyusun strategi-strategi untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pengeluaran per kapita di tahun-tahun selanjutnya.

3) Perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Peringkat	Kabupaten/Kota	Nilai (Ribu/Rp)
1	Kota Padang	15.957

2	Kota Bukittinggi	14.579
3	Kota Payakumbuh	14.536
4	Kota Pariaman	14.261
5	Kota Solok	13.504
6	Kota Padang Panjang	12.148
7	Kabupaten Dharmasraya	12.604
8	Kabupaten Padang Pariaman	12.089
9	Kabupaten Sijunjung	11.829
10	Kabupaten Tanah Datar	11.552
11	Kabupaten Solok Selatan	11.542
12	Kota Sawahlunto	11.501
13	Kabupaten Solok	11.318
14	Kabupaten Agam	11.034
15	Kabupaten Lima Puluh Kota	10.917
16	Kabupaten Pesisir Selatan	10.633
17	Kabupaten Pasaman Barat	10.231
18	Kabupaten Pasaman	9.518
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	7.451

Sumber: Pariaman dalam Angka 2026

Berdasarkan perbandingan nilai Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, terlihat bahwa kota-kota besar di Sumatera Barat mendominasi posisi dengan nilai tertinggi. Kota Padang menempati peringkat pertama dengan nilai sebesar 15.957 ribu rupiah, diikuti oleh Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan umumnya memiliki aktivitas ekonomi yang lebih berkembang, tingkat pendapatan masyarakat yang relatif lebih tinggi, serta akses yang lebih baik terhadap sektor perdagangan dan jasa.

Kota Pariaman berada pada peringkat ke-4 dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan nilai 14.261 ribu rupiah, yang menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat Kota Pariaman tergolong tinggi dan berada di atas sebagian besar

daerah lainnya di provinsi tersebut. Posisi ini juga menempatkan Kota Pariaman sebagai salah satu daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif baik di tingkat provinsi.

Sementara itu, beberapa kabupaten dengan nilai lebih rendah umumnya merupakan daerah yang memiliki struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer seperti pertanian dan perkebunan, serta keterbatasan akses terhadap pusat perdagangan dan jasa. Perbedaan struktur ekonomi dan tingkat urbanisasi tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi variasi nilai pengeluaran per kapita antar daerah.

Secara umum, posisi Kota Pariaman yang berada pada kelompok daerah dengan nilai pengeluaran per kapita tinggi di Sumatera Barat menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah dan berbagai program pemberdayaan masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

   Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam keberhasilan pencapaian Pengeluaran per kapita Kota Pariaman Tahun 2025 adalah :

   1) Mendukung peningkatan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan akses mudah terhadap pembiayaan, perizinan, pelatihan usaha, dan pasar.
   2) Menurunkan angka Pengangguran, dengan menyiapkan para pencari kerja yang siap pakai dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja maka dilakukan upaya peningkatan kapasitas dan keterampilan para pencari kerja melalui program pelatihan-pelatihan dengan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga penyelenggara pelatihan kerja.
   3) Pemberian bantuan sosial seperti bantuan tunai atau program keluarga harapan, yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat berpendapatan rendah.

4) Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2025 mengatur tentang pengalokasian dan pembagian alokasi dana desa kepada setiap desa tahun anggaran 2025.

Dokumentasi kegiatan:



Pemberian bantuan bibit lele di kolam



Bantuan bibit nila pada perairan umum (Restocking)




Pelatihan Bahasa Jepang di Padang




Pelatihan Bahasa Jepang di UNAS PASIM Sukabumi



Pelatihan Crew Kapal Pesiar di UNAS PASIM Sukabumi



Pelatihan Bahasa Jerman untuk Program Ausbildung di UNAS PASIM Sukabumi





Hambatan/kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Pengeluaran per kapita Kota Pariaman Tahun 2025 adalah :

1) Ketidakselarasan Program Antar Perangkat Daerah.
2) Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya.
3) Pendidikan dan Keterampilan yang Terbatas.
4) Resistensi terhadap Perubahan (terutama yang berkaitan dengan digitalisasi layanan).
5) Ketergantungan pada Sektor Tertentu (terhadap sektor pertanian).

Strategi yang akan ditargetkan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka mencapai target akhir periode RPD Kota Pariaman :

1) Meningkatkan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2) Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru.
3) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan usaha (produksi) masyarakat.
4) Memberikan fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan Usaha menengah, Usaha kecil, dan Usaha mikro (UMKM).
5) Pembentukan Pusat layanan usaha terhadap pengembangan usaha masyarakat.

Indikator Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan merupakan salah satu dari tiga komponen utama pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota ini, yang merepresentasikan dimensi Standar Hidup Layak.

Sebagai kota otonom yang terus berkembang, IPM Kota Pariaman telah menembus angka 81,27 (kategori Sangat Tinggi). Keberhasilan stabilitas dan peningkatan daya beli masyarakat di Kota Pariaman didorong oleh beberapa faktor spesifik lokal berikut:

1) Denyut Ekonomi Sektor Pariwisata dan Kuliner (Multiplier Effect)

Kota Pariaman secara konsisten memposisikan diri sebagai kota tujuan wisata pantai dan budaya di Sumatera Barat (seperti Pantai Gandoriah, Pantai Kata, Pulau Angso Duo, dan pesona tradisi Hoyak Tabuik).

- Dampak ke Pengeluaran: Sektor pariwisata yang hidup memicu tumbuhnya sektor penunjang seperti perhotelan, transportasi lokal, industri kerajinan, dan kuliner khas (seperti Nasi Sek). Sektor informal dan UMKM yang bergerak di bidang ini mendapatkan aliran pendapatan langsung (cash inflow), yang kemudian langsung menaikkan rata-rata konsumsi rumah tangga mereka.

2) Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur Logistik

Sebagai kota pesisir yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman dan terhubung kuat dengan Kota Padang, infrastruktur memegang peranan vital.

- Dampak ke Pengeluaran: Akses kereta api (KA Sibinuang/Pariaman Ekspres) serta perbaikan jalur darat membuat mobilitas barang dan orang menjadi sangat murah. Efisiensi logistik ini berhasil menjaga stabilitas harga barang di pasar lokal Pariaman. Ketika inflasi lokal terkendali, daya beli riil masyarakat tidak tergerus, sehingga nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan tetap tinggi.

3) Struktur Demografi: Angka Beban Ketergantungan yang Rendah

Berdasarkan data kependudukan, Kota Pariaman memiliki persentase penduduk usia produktif (15–64 tahun) yang dominan, sementara angka beban ketergantungan (dependency ratio) berada di level yang relatif rendah (kisaran 52%).

- Dampak ke Pengeluaran: Proporsi penduduk yang bekerja jauh lebih besar dibanding penduduk yang ditanggung (anak-anak dan lansia). Secara matematis, saat formula pembagi pengeluaran per kapita dihitung per rumah tangga, pendapatan yang dihasilkan oleh anggota keluarga produktif mampu menyokong standar konsumsi yang lebih layak bagi seluruh anggota keluarga.

4) Keberhasilan Menekan Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kota Pariaman tergolong rendah di Sumatera Barat, yaitu berada di angka 3,83%.

- Dampak ke Pengeluaran: Pengeluaran per kapita yang disesuaikan sangat sensitif terhadap ketimpangan. Dengan kecilnya populasi kelompok masyarakat di bawah garis kemiskinan ekstrem, jurang pengeluaran antarpenduduk tidak terlalu lebar. Hal ini menjaga angka Gini Ratio Pariaman tetap stabil di kategori ketimpangan sedang (~0,302), yang berarti distribusi daya beli masyarakat relatif merata.

5) Efek Dominan Tingginya Derajat Pendidikan dan Kesehatan

Pemerintah Kota Pariaman memiliki rekam jejak kebijakan sosial yang kuat, seperti jaminan pendidikan (program Saga Saja - Satu Keluarga Satu Sarjana) dan cakupan kesehatan daerah.

- Dampak ke Pengeluaran: Ketika biaya pendidikan tinggi dan fasilitas kesehatan dasar dijamin atau disubsidi oleh pemerintah daerah, alokasi anggaran rumah tangga masyarakat Pariaman tidak habis untuk biaya darurat medis atau sekolah. Finansial keluarga menjadi lebih longgar, sehingga masyarakat memiliki keleluasaan untuk membelanjakan uangnya pada barang non-makanan yang meningkatkan kualitas hidup (seperti perbaikan hunian, gawai, transportasi, atau tabungan produktif).

Keberhasilan pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kota Pariaman merupakan cerminan dari perekonomian kota jasa dan wisata yang tumbuh, didukung oleh belanja publik pemerintah daerah yang tepat sasaran dalam meringankan beban dasar hidup (pendidikan & kesehatan) warganya.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Beli Masyarakat					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Pengeluaran Per kapita yang Disesuaikan	Program Pengembangan UMKM	Rp182.990.260	Rp175.972.500	96,16%	Menunjang
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Rp386.532.000	Rp380.149.500	98,35%.	Menunjang
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp889.162.165	Rp529.825.165	59,59%	Tidak Menunjang
	Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Rp159.215.500	Rp145.057.038	91,11%	Menunjang
	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp93.655.000	Rp67.305.000	71,86%	Menunjang
	Program Penyuluh Pertanian	Rp7.610.700	Rp7.610.700	100%	Menunjang
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp298.163.500	Rp183.114.500	61,41%	Menunjang

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Daya Beli Masyarakat” dengan indikator kinerja utama Pengeluaran per kapita yang disesuaikan, Pemerintah Kota Pariaman melaksanakan beberapa program yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan realisasi anggaran, diketahui bahwa tingkat kontribusi masing-masing program terhadap pencapaian indikator kinerja menunjukkan hasil yang bervariasi.

Program Pengembangan UMKM dengan Pagu Anggaran sebesar Rp182.990.260 dengan realisasi sebesar Rp175.972.500 atau dengan capaian realisasi 96,16%. Tingginya tingkat realisasi

menunjukkan bahwa program ini merupakan program yang menunjang pencapaian indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp386.532.000 dengan realisasi sebesar Rp380.149.500 atau dengan capaian realisasi 98,35%. Capaian realisasi yang sangat tinggi juga menunjukkan bahwa program ini merupakan program yang menunjang pencapaian indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan Pagu Anggaran sebesar Rp889.162.165 dengan realisasi sebesar Rp529.825.165 atau dengan capaian realisasi 59,59%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian program ini dikategorikan sebagai program yang belum sepenuhnya menunjang pencapaian kinerja.

Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp159.215.500 dengan realisasi sebesar Rp145.057.038 atau dengan capaian realisasi 91,11%. Tingginya tingkat capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan sangat optimal. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dapat dikategorikan sebagai program yang menunjang pencapaian indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp93.655.000 dengan realisasi sebesar Rp67.305.000 atau dengan capaian realisasi 71,86%. Capaian dari program yang tidak terlalu tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal. Namun demikian, program ini masih dapat dikategorikan sebagai program yang menunjang pencapaian kinerja.

Program Penyuluh Pertanian dengan Pagu Anggaran sebesar Rp7.610.700 dengan realisasi sebesar Rp7.610.700 atau dengan capaian realisasi 100%. Tingginya tingkat capaian realisasi menunjukkan bahwa program ini telah berjalan dengan sangat optimal.

Oleh karena itu, program penyuluh pertanian dapat dikategorikan sebagai program yang sangat menunjang pencapaian indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Program Penempatan Tenaga Kerja dengan Pagu Anggaran sebesar Rp298.163.500 dengan realisasi sebesar Rp183.114.500 atau dengan capaian realisasi 61,41%. Capaian dari program yang tidak terlalu tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal. Namun demikian, program ini masih dapat dikategorikan sebagai program yang menunjang pencapaian kinerja.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp2.000.000 dengan realisasi sebesar Rp2.000.000 atau dengan capaian realisasi 100%. Meskipun anggaran dari program ini tidak terlalu besar, namun dari segi capaian realisasinya sudah sangat baik. Program pengembangan iklim penanaman modal dapat dikategorikan sebagai program yang sangat menunjang pencapaian indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp77.343.500 dengan realisasi sebesar Rp53.187.000 atau dengan capaian realisasi 68,77%. Capaian dari program yang tidak terlalu tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal. Namun demikian, program ini masih dapat dikategorikan sebagai program yang menunjang pencapaian kinerja.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator Pengeluaran per kapita yang disesuaikan didukung secara signifikan oleh beberapa program yang berkaitan langsung dalam membantu peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Kota Pariaman. Sementara itu, untuk beberapa program dengan capaian realisasi rendah hingga sedang masih diperlukan evaluasi agar pengeluaran per kapita yang disesuaikan dapat ditingkatkan.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Rp2,096,672,625	Rp1,544,221,403	100,81%	27,16%	100%	Efisien

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE} = \frac{(\mathbf{2.096.672.625} \times \mathbf{100,81\%}) - \mathbf{1.544.221.403}}{\mathbf{2.096.672.625}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{TE} = \mathbf{27,16\%}$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%
- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

$$\mathbf{TE} = \mathbf{27,16\%} > \mathbf{20\%}$$

$$NE = \mathbf{93,35}$$

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan anggaran yang digunakan mampu mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara besaran anggaran yang direalisasikan dengan capaian kinerja yang diperoleh, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, indikator Pengeluaran per kapita yang disesuaikan memiliki capaian kinerja sebesar 100,81 persen. Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp2,096,672,625 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1,544,221,403.

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 27,16 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pencapaian kinerja dapat diraih dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan anggaran yang seharusnya sesuai capaian kinerja.

Selanjutnya, berdasarkan asumsi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, tingkat efisiensi yang >20% maka nilai efisiensi yang dihasilkan adalah sebesar 100%. Tingkat efisiensi indikator Pengeluaran per kapita yang disesuaikan adalah sebesar 27,16 persen dan menghasilkan nilai efisiensi sebesar 100 persen, dimana dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan sumber daya pada kategori efisien.Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan anggaran mampu mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara besaran anggaran yang digunakan dengan capaian kinerja yang diperoleh, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja.

6. Indeks Pemberdayaan Gender

Indikator komposit yang mengukur partisipasi aktifaktif perempuan dibandingkan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG mengevaluasi sejauh mana perempuan memiliki akses dan keterwakilan yang setara dalam parlemen, posisis manajerial serta

kontribusi pendapatan. IDG bertujuan menilai ketimpangan gender dalam peran sosial dan politik, dimana nili IDG yang tinggi menunjukkan tingkat pemberdayaan perempuan yang lebih baik.

Penetapan target indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024–2026, yang selanjutnya dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025. Berdasarkan dokumen tersebut, target capaian IDG Kota Pariaman Tahun 2025 ditetapkan sebesar 57,45.

Penetapan target tersebut mempertimbangkan kondisi dan capaian indikator pada tahun sebelumnya, serta dinamika pembangunan yang diperkirakan mempengaruhi peningkatan pemberdayaan perempuan. Tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan Pemilihan Umum, sehingga diharapkan terjadi peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam bidang politik, khususnya dalam keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Dalam penetapan target ini juga mempertimbangkan capaian IDG Kota Pariaman Tahun 2023 sebesar 53,91, serta memperhatikan target akhir Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 59,55. Dengan mempertimbangkan tren capaian sebelumnya dan peluang peningkatan partisipasi perempuan pada momentum politik nasional, maka target IDG Tahun 2025 ditetapkan secara bertahap dan realistis untuk mendukung pencapaian target akhir pembangunan daerah. Penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IDG) dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat digunakan untuk:

1. Mengetahui partispasi aktif laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan;
2. Mengetahui perkembangan capaian indeks pemberdayaan gender;
3. Memberikan gambaran peran aktif perempuan dalam partisipasi politik, ekonomi dan pengambilan keputusan;
4. Memberikan gambaran peran aktif perempuan dan kehidupan ekonomi;
5. Memanfaatkan sebagai pedoman untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan pembangunan yang responsive gender;

6. Sebagai alat monitoring hasil pembangunan berbasis gender.

Indikator Indeks Pemberdayaan Gender sebagai berikut:

Dimensi	Indikator
Keterwakilan di parlemen	Proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan
Pengambilan keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja professional dan teknisi laki-laki dan perempuan
Distribusi pendapatan	Upah buruh non pertanian, laki-laki dan perempuan

IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu, keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga professional dan sumbangan pendapatan perempuan. IDG juga difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.

Cara penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender:

IDG : 1/3 (Ipar+IDM+Lin-Dist)
Ipar : Indeks Keterwakilan di Parlemen
IDM : Indeks pengambilan keputusan
Lin-Dist : Indeks distribusi pendapatan

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,45	60,14*	104,68%	Sangat Tinggi

*: Realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pariaman menunjukkan kinerja yang sangat baik. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 57,45, sedangkan realisasi yang dicatat sebesar 60,14, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 104,68% dan termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Perlu disampaikan bahwa capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2025 secara resmi belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu, realisasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja ini masih mengacu pada hasil pengukuran Tahun 2024, dimana Kota Pariaman memperoleh nilai 60,14. Nilai tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yang sebesar 53,91.

Peningkatan nilai IDG tersebut mencerminkan adanya perkembangan positif dalam upaya pemberdayaan perempuan di Kota Pariaman, khususnya dalam aspek partisipasi perempuan di bidang ekonomi, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Untuk capaian Tahun 2025, terdapat peluang yang cukup besar untuk mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh adanya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yang merupakan salah satu dari tiga indikator penyusun Indeks Pemberdayaan Gender. Pada periode DPRD Kota Pariaman Tahun 2019–2024, keterwakilan perempuan tercatat sebanyak 1 orang anggota DPRD, sedangkan pada periode 2024–2029 meningkat menjadi 2 orang anggota DPRD perempuan. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan nilai IDG Kota Pariaman pada pengukuran berikutnya.

Ke depan, Pemerintah Kota Pariaman akan terus mendorong peningkatan partisipasi dan peran perempuan dalam berbagai sektor pembangunan melalui penguatan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), peningkatan kapasitas perempuan, serta perluasan akses perempuan terhadap berbagai peluang pembangunan. Dengan langkah tersebut diharapkan capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kota

Pariaman dapat terus meningkat dan berkontribusi terhadap terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan gender.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
52,62	53,91	60,14	60,14*	-	-	108,85%	104,68%

Berdasarkan data realisasi kinerja selama beberapa tahun terakhir, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pariaman menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2022, nilai IDG tercatat sebesar 52,62, kemudian meningkat menjadi 53,91 pada Tahun 2023. Selanjutnya pada Tahun 2024 nilai IDG mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 60,14.

Peningkatan yang terjadi pada Tahun 2024 menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pemberdayaan perempuan di Kota Pariaman, khususnya dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, pengambilan keputusan, serta keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Untuk Tahun 2025, realisasi kinerja yang digunakan masih mengacu pada hasil pengukuran Tahun 2024, yaitu sebesar 60,14, karena nilai IDG Tahun 2025 secara resmi belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan menggunakan nilai tersebut, tingkat capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan sebesar 57,45 mencapai 104,68%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Sementara itu, pada Tahun 2024 tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 108,85%, yang juga menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Perlu dijelaskan bahwa capaian kinerja untuk periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 pada tabel capaian tidak seluruhnya dapat ditampilkan, karena indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator baru yang mulai digunakan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024–2026. Oleh karena itu, pengukuran capaian kinerja terhadap target

indikator ini baru dapat dilakukan sejak indikator tersebut ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Secara umum, tren peningkatan nilai IDG dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam mendorong pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan telah memberikan hasil yang positif.

Ke depan, Pemerintah Kota Pariaman akan terus memperkuat berbagai kebijakan dan program yang mendukung peningkatan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender agar tren peningkatan nilai IDG dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
60,14*	59,55	100.99%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024–2026, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan hasil yang sangat baik. Realisasi yang digunakan pada Tahun 2025 sebesar 60,14, sedangkan target akhir RPD Tahun 2026 ditetapkan sebesar 59,55. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target akhir RPD telah mencapai 100,99%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa nilai IDG Kota Pariaman telah melampaui target akhir yang ditetapkan dalam dokumen RPD, meskipun periode perencanaan masih berlangsung hingga Tahun 2026. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya Pemerintah Kota Pariaman dalam mendorong pemberdayaan perempuan, peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta pelaksanaan pengarusutamaan gender telah memberikan hasil yang positif.

Namun demikian, perlu dijelaskan bahwa realisasi nilai IDG Tahun 2025 masih menggunakan hasil pengukuran Tahun 2024, karena nilai IDG Tahun 2025 secara resmi belum dirilis oleh Badan Pusat

Statistik (BPS). Oleh karena itu, nilai tersebut masih bersifat sementara dan akan diperbarui setelah data resmi dirilis.

Capaian yang telah melampaui target akhir RPD ini juga menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan dalam indikator penyusun IDG, salah satunya peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif pada periode DPRD Kota Pariaman Tahun 2024–2029, yang meningkat dari 1 orang perempuan pada periode sebelumnya menjadi 2 orang perempuan. Kondisi ini berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan nilai IDG pada pengukuran berikutnya.

Ke depan, Pemerintah Kota Pariaman akan terus mempertahankan dan meningkatkan berbagai program yang mendukung pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga capaian indikator ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada periode pembangunan selanjutnya.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
60,14*	77,62*	77.48%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pariaman Tahun 2025 dengan capaian nasional, terlihat bahwa nilai IDG Kota Pariaman masih berada di bawah rata-rata nasional. Realisasi IDG Kota Pariaman tercatat sebesar 60,14, sedangkan capaian IDG nasional sebesar 77,62, sehingga tingkat capaian Kota Pariaman terhadap nilai nasional adalah sebesar 77,48%.

Perbedaan nilai tersebut menunjukkan bahwa meskipun capaian IDG Kota Pariaman telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja daerah, namun jika dibandingkan dengan capaian nasional masih terdapat kesenjangan yang perlu menjadi perhatian. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan pemberdayaan perempuan di Kota

Pariaman masih perlu terus diperkuat agar dapat lebih mendekati rata-rata capaian nasional.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut antara lain masih terbatasnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi formal, serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor pembangunan.

Namun demikian, terdapat perkembangan positif yang dapat menjadi modal peningkatan nilai IDG ke depan. Salah satunya adalah meningkatnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Pariaman, dari 1 orang pada periode 2019–2024 menjadi 2 orang pada periode 2024–2029. Peningkatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan indikator penyusun IDG pada pengukuran berikutnya.

Ke depan, Pemerintah Kota Pariaman akan terus memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, meningkatkan kapasitas serta peran perempuan dalam bidang ekonomi dan politik, serta memperluas akses perempuan terhadap berbagai peluang pembangunan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai IDG Kota Pariaman sehingga kesenjangan dengan capaian nasional dapat semakin diperkecil.

2) Perbandingan dengan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi 2025	Realisasi Provinsi Sumbar 2025	Capaian
60,14*	70,47*	85,34%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pariaman Tahun 2025 dengan capaian Provinsi Sumatera Barat, terlihat bahwa capaian Kota Pariaman masih berada di bawah rata-rata provinsi. Realisasi IDG Kota Pariaman tercatat sebesar 60,14, sedangkan capaian IDG Provinsi Sumatera Barat sebesar 70,47, sehingga tingkat capaian Kota Pariaman terhadap capaian provinsi adalah sebesar 85,34%.

3) Perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Peringkat	Kabupaten/Kota	IDG 2025*
1	Kota Bukittinggi	83,53
2	Kota Padang Panjang	75,62
3	Kota Payakumbuh	68,75
4	Pasaman	68,72
5	Kota Solok	65,38
6	Kota Padang	63,38
7	Pasaman Barat	63,37
8	Agam	63,63
9	Kota Sawahlunto	62,49
10	Tanah Datar	60,69
11	Solok	60,23
12	Kota Pariaman	60,14
13	Sijunjung	57,58
14	Pesisir Selatan	55,72
15	Lima Puluh Kota	51,45
16	Dharmasraya	50,22
17	Solok Selatan	50,47
18	Kepulauan Mentawai	49,59
19	Padang Pariaman	48,05

Sumber: Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2024 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, terlihat adanya variasi capaian nilai IDG antar daerah. Nilai IDG tertinggi dicapai oleh Kota Bukittinggi dengan nilai 83,53, diikuti oleh Kota Padang Panjang sebesar 75,62, dan Kota Payakumbuh sebesar 68,75. Tingginya nilai IDG pada beberapa kota tersebut menunjukkan tingkat partisipasi perempuan yang relatif tinggi dalam kegiatan ekonomi, pengambilan keputusan, serta keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Sementara itu, beberapa daerah masih memiliki nilai IDG yang relatif lebih rendah, seperti Padang Pariaman dengan nilai

48,05, Kepulauan Mentawai sebesar 49,59, dan Dharmasraya sebesar 50,22. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam pemberdayaan perempuan di beberapa wilayah yang memerlukan perhatian dan upaya peningkatan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender.

Untuk Kota Pariaman, nilai IDG Tahun 2024 tercatat sebesar 60,14. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, Kota Pariaman berada pada peringkat ke-12 dari 19 kabupaten/kota. Nilai tersebut masih berada di bawah beberapa daerah lain, khususnya kota-kota besar di Sumatera Barat, namun secara umum telah menunjukkan capaian yang cukup baik dan berada pada kelompok menengah.

Meskipun demikian, tren peningkatan nilai IDG Kota Pariaman dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Dengan adanya peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Pariaman pada periode 2024–2029, serta penguatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, diharapkan nilai IDG Kota Pariaman dapat terus meningkat dan secara bertahap mendekati bahkan melampaui rata-rata provinsi pada tahun-tahun mendatang.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

   Upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender antara lain :

   1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan politik, melalui pelibatan perempuan dalam lembaga legislatif, organisasi masyarakat, forum musyawarah pembangunan, serta kepengurusan kelembagaan daerah ;
   2. Mendorong keterwakilan perempuan pada jabatan strategis dan posisi pengambil kebijakan, baik di lingkungan pemerintahan, lembaga pendidikan, organisasi sosial, maupun sektor swasta ;

3. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh perangkat daerah melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender ;
4. Peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, keterampilan kerja, literasi digital, dan penguatan ekonomi keluarga ;
5. Pengembangan usaha ekonomi perempuan, seperti pembinaan UMKM perempuan, kelompok usaha bersama, industri rumah tangga, dan akses permodalan usaha ;
6. Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan dan informasi, termasuk sosialisasi hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak ;
7. Penguatan kelembagaan perempuan dan anak, seperti Forum PUSPA, organisasi perempuan, kelompok perempuan desa/kelurahan, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan daerah ;
8. Mendorong partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan, melalui keterlibatan aktif pada Musrenbang, forum konsultasi publik, dan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat;
9. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pencapaian indikator IDG, karena variabel pembentuk IDG tidak hanya berasal dari perangkat daerah yang menangani pemberdayaan perempuan, tetapi juga sektor pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, sosial, dan pemerintahan ;
10. Sosialisasi dan advokasi kesetaraan gender kepada masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan aparatur pemerintah guna meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.
11. Pemberian penghargaan dan apresiasi kepada lembaga, kelompok, maupun individu yang mendukung pemberdayaan perempuan dan pelaksanaan pembangunan responsif gender di Kota Pariaman.

Beberapa kendala Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Nilai IDG Kota Pariaman Tahun 2025 adalah:

1. Kurang informasi dari BPS terkait indikator dan juga acuan penilaian dari IDG.
2. Masih ada stigma masyarakat yang menyebutkan bahwa perempuan adalah ibu rumah tangga murni, sehingga banyak perempuan yang mengurungkan niat untuk berkarya dalam ketiga aspek tersebut.
3. Masih rendahnya kesempatan bagi perempuan dalam berkreasi.
4. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perempuan dalam memimpin suatu organisasi.

Nilai IDG supaya ideal tentu membutuhkan upaya-meningkatkan Nilai IDG Kota Pariaman Tahun mendatang, terutama sekali Pelaksanaan pelatihan PUG/PPRG bagi OPD dan pelatihan politik perempuan masyarakat. Pelaksanaan PUG dan pelatihan politik ditahun 2025 sendiri walaupun sudah menjadi tuntutan dan arahan Kementrian dan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Namun Kota Pariaman justru tidak melaksanakan sosialisai di tahun 2025 dan tidak menganggarkan kegiatan tersebut. Fasilitasi kegiatan yang dilakukan adalah berupa fasilitasi dharmawanita saja dan sejuh ini belum mencapai sasaran masyarakat.

Upaya/Strategi yang akan di lakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman ditahun selanjutnya

1. Pembuatan kebijakan tentang pengarusutaman gender.
2. Pelatihan peningkatan partisipasi perempuan kepala keluarga dalam bidang ekonomi.
3. Penguatan OPD dalam penganggaran yang responsif gender.
4. Mendorong kebijakan peningkatan perempuan dalam posisi manajerial.
5. Mengupayakan pelaksanaan PUG dalam rencana strategis Kota dan Dinas (Perubahan).

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Program Pengarusutamaan gender dan program pemberdayaan Perempuan	166.300.000	95.307.553	57,31%	Menunjang

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Kota Pariaman melaksanakan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan serta memperkuat implementasi pengarusutamaan gender di daerah.

Pada Tahun 2025, program tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp166.300.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp95.307.553 atau 57,31% dari total anggaran yang tersedia. Realisasi anggaran yang belum optimal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh kegiatan yang direncanakan dalam program tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 dilakukan melalui fasilitasi kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) yang diarahkan untuk memberikan edukasi kepada perempuan, khususnya terkait peningkatan peran perempuan dalam bidang politik serta mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan. Meskipun kegiatan ini belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara luas, diharapkan anggota organisasi perempuan yang tergabung dalam DWP dan GOW dapat menjadi agen penggerak di lingkungan dan wilayahnya masing-masing. Melalui peran tersebut diharapkan perempuan di tingkat masyarakat dapat semakin

berdaya, baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun dalam peningkatan keterlibatan perempuan dalam posisi manajerial dan pengambilan keputusan.

Dilihat dari keterkaitannya dengan pencapaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), kegiatan yang dilaksanakan tersebut masih memberikan kontribusi dalam menunjang pencapaian indikator kinerja, meskipun belum secara optimal. Hal ini disebabkan karena kegiatan yang dilaksanakan masih bersifat terbatas pada lingkup organisasi perempuan dan belum secara langsung menjangkau masyarakat secara luas. Dengan demikian, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui perluasan sasaran kegiatan, peningkatan kapasitas perempuan di tingkat masyarakat, serta penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada perangkat daerah di tahun-tahun mendatang.

Ke depan, diperlukan perencanaan program dan penganggaran yang lebih optimal agar kegiatan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pariaman.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	166.300.000	95.307.553	104,68%	47,37%	100	Sangat Efisien

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100}\%$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE} = \frac{(\mathbf{166.300.000} \times \mathbf{1,0468}) - \mathbf{95.307.553}}{\mathbf{166.300.000}} \times \mathbf{100}\%$$

$$\boldsymbol{TE} = \mathbf{47,37}\%$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%
- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

$$\boldsymbol{NilaiEfisiensi} = \mathbf{50} + \left(\frac{\boldsymbol{TE}}{\mathbf{20}} \times \mathbf{50}\right)$$

Nilai Efisiensi = $\text{TE} \geq 20\% \rightarrow \text{Nilai Efisiensi} = 100$

Efisiensi anggaran pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 47,37%. Berdasarkan konversi nilai efisiensi, nilai tersebut berada di atas batas maksimum 20%, sehingga nilai efisiensi dikategorikan sangat efisien dengan skor 100. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang diperoleh mampu melampaui target dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah dari pagu yang tersedia.

7. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia, meliputi kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak dengan melihat perbedaan pencapaian antara laki-laki dan perempua. IPG bertujuan mengevaluasi kesetaraan gender dengan membandingkan komponen IPM (IPM Laki-laki dan perempuan) untuk mengurangi ketimpangan gender di daerah. IPG menunjukkan sejauh mana perempuan memperoleh akses, manfaat yang setara dengan laki-laki dalam pembangunan. Semakin mendekati angka 100 dimaknai kesenjangan pembangunan antara perempun dan laki-laki semakin kecil atau semakin setara.

Secara umum dihitung dengan rumus:

$$\boldsymbol{IPG = \frac{IPM\ Perempuan}{IPM\ Laki - Laki} \times 100}$$

Interpretasi Nilai IPG

- IPG = 100 → pembangunan laki-laki dan perempuan setara
- IPG < 100 → perempuan tertinggal dibanding laki-laki
- IPG > 100 → perempuan lebih unggul dari laki-laki (jarang terjadi)

Beberapa tujuan pengukuran IPG yaitu:

a) Mengetahui ketimpangan gender dalam pembangunan
b) Menjadi dasar perumusan kebijakan kesetaraan gender
c) Memantau kemajuan pembangunan perempuan

Penetapan target indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024–2026, yang selanjutnya dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025. Berdasarkan dokumen tersebut, target capaian IPG Kota Pariaman Tahun 2025 ditetapkan sebesar 98,70. Sampai dengan laporan ini disusun, data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2025 belum dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,70	98,11*	99.40	Sangat Tinggi

*: Realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun 2024

Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada Sasaran Strategis 4 ditetapkan dengan target sebesar 98,70 pada Tahun 2025. Berdasarkan data yang tersedia, realisasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah 98,11, yang merupakan hasil penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, mengingat data IPG tahun 2025 belum dipublikasikan secara resmi. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan mencapai 99,40 persen dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak telah berjalan relatif efektif dalam mendukung peningkatan kesetaraan gender di Kota Pariaman. Nilai IPG yang mendekati angka 100 mengindikasikan bahwa kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan relatif kecil, khususnya pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Meskipun realisasi indikator belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, selisih capaian yang relatif kecil menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang responsif gender telah berada pada jalur yang tepat. Ke depan, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada aspek peningkatan kualitas hidup perempuan dan akses terhadap kesempatan ekonomi, perlu terus

dilakukan guna menjaga konsistensi peningkatan nilai IPG pada periode pembangunan berikutnya.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
98,64	98,07	98,11	98,11*	-	-	98.82%	99.40

Berdasarkan data realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Pariaman dalam beberapa tahun terakhir, terlihat bahwa nilai IPG menunjukkan kecenderungan relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. Pada tahun 2022 realisasi IPG tercatat sebesar 98,64, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 98,07. Selanjutnya pada tahun 2024 nilai IPG kembali mengalami peningkatan menjadi 98,11.

Untuk tahun 2025, realisasi yang digunakan dalam laporan ini masih menggunakan hasil pengukuran tahun 2024 sebesar 98,11, karena data IPG tahun 2025 belum dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan perhitungan terhadap target kinerja yang ditetapkan, tingkat capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 99,40 persen, yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan gender di Kota Pariaman berada pada kategori sangat tinggi.

Secara umum, nilai IPG yang selalu berada pada kisaran di atas 98 menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kota Pariaman relatif kecil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesempatan dalam peningkatan standar hidup layak telah relatif seimbang dibandingkan dengan laki-laki.

Meskipun demikian, fluktuasi nilai IPG dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesetaraan gender masih perlu terus diperkuat melalui penguatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai sektor pembangunan serta peningkatan sinergi antar perangkat daerah yang berkontribusi

terhadap peningkatan indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan capaian IPG pada tahun-tahun mendatang.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
98,11*	99,72	98.38%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Pariaman Tahun 2025 dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026, diketahui bahwa realisasi yang digunakan dalam laporan ini sebesar 98,11, yang merupakan hasil pengukuran tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), karena data IPG tahun 2025 belum dipublikasikan secara resmi.

Sementara itu, target akhir RPD Tahun 2026 ditetapkan sebesar 99,72. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target akhir RPD mencapai 98,38 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan gender di Kota Pariaman telah berada pada tingkat yang cukup baik, meskipun masih terdapat selisih terhadap target akhir yang telah ditetapkan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
98,11*	91,85*	106.81%

Berdasarkan perbandingan antara Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Pariaman dengan IPG Nasional, diketahui bahwa nilai IPG Kota Pariaman yang digunakan dalam laporan ini sebesar 98,11, yang merupakan hasil pengukuran tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mengingat data IPG tahun 2025 belum dipublikasikan. Demikian pula, nilai IPG Nasional sebesar 91,85 juga merupakan data tahun 2024.

Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa nilai IPG Kota Pariaman lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, dengan tingkat capaian sebesar 106,81 persen. Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan gender dalam pembangunan manusia di Kota Pariaman relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi nasional.

Nilai IPG Kota Pariaman yang mendekati angka 100 mengindikasikan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan di Kota Pariaman telah memiliki akses yang relatif baik terhadap berbagai aspek pembangunan, terutama pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mendorong pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesetaraan gender di daerah. Ke depan, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah serta peningkatan program yang mendukung kualitas hidup perempuan tetap diperlukan guna mempertahankan dan meningkatkan capaian IPG Kota Pariaman pada tahun-tahun mendatang.

2) Perbandingan dengan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi 2025	Realisasi Provinsi Sumbar 2025	Capaian
98,11*	95,25	103%

Berdasarkan perbandingan antara Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Pariaman dengan IPG Provinsi Sumatera Barat, diketahui bahwa nilai IPG Kota Pariaman yang digunakan dalam laporan ini sebesar 98,11, yang merupakan hasil pengukuran tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mengingat data IPG tahun 2025 belum dipublikasikan. Sementara itu, nilai IPG Provinsi Sumatera Barat sebesar 95,25 juga merupakan data tahun 2024.

Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa nilai IPG Kota Pariaman lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat, dengan tingkat capaian sebesar 103 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesetaraan gender dalam

pembangunan manusia di Kota Pariaman relatif lebih baik dibandingkan dengan capaian di tingkat provinsi.

3) Perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Peringkat	Kabupaten/Kota	IPG 2025*
1	Kota Payakumbuh	98,93
2	Kota Bukittinggi	98,66
3	Kota Padang Panjang	98,23
4	Kota Pariaman	98,11
5	Kabupaten Tanah Datar	97,48
6	Kabupaten Agam	97,09
7	Kota Solok	96,90
8	Kabupaten Solok	96,22
9	Kabupaten Pesisir Selatan	95,83
10	Kota Sawahlunto	95,73
11	Kabupaten Solok Selatan	95,53
12	Kabupaten Lima Puluh Kota	94,86
13	Kabupaten Sijunjung	94,39
14	Kota Padang	94,04
15	Kabupaten Padang Pariaman	93,92
16	Kabupaten Pasaman	92,91
17	Kabupaten Pasaman Barat	90,32
18	Kabupaten Kepulauan Mentawai	90,13
19	Kabupaten Dharmasraya	89,71

Sumber: BPS

Berdasarkan data tersebut, Kota Pariaman berada pada peringkat ke-4 dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan nilai IPG sebesar 98,11. Posisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan gender di Kota Pariaman termasuk sangat baik dan berada pada kelompok daerah dengan capaian tertinggi di provinsi.

Nilai IPG Kota Pariaman juga lebih tinggi dibandingkan sebagian besar kabupaten/kota lainnya, sehingga mencerminkan

bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak di Kota Pariaman telah berkembang cukup baik.

Namun, dibandingkan dengan daerah dengan capaian tertinggi seperti Kota Payakumbuh (98,93) dan Kota Bukittinggi (98,66), nilai IPG Kota Pariaman masih memiliki selisih yang relatif kecil. Oleh karena itu, penguatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial perlu terus dilakukan untuk meningkatkan capaian IPG pada masa mendatang.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

Penyebab Kegagalan pencapaian target:

Memperhatikan indikator pembentuk IPG yakni kesehatan (umur harapan hidup), pendidikan (rata-rata/harapan lama sekolah), dan ekonomi (pengeluaran per kapita disesuaikan). Perhitungan BPS mencatat IPM Laki-laki 81,42 dan IPM Perempuan 80,49, walaupun secara rinci belum dapat digambarkan perhitungan BPS namun, Angka diatas dapat digambarkan bahwa selisihnya diharapkan tidak terlalu besar. Indikator lain dapat digambarkan harapan lama sekolah perempuan lebih lama dari pada laki-laki, laki-laki cendrung cepat putus sekolah atau bekerja. Sementara umur harapan hidup juga lebih lama perempuan dibandingkan laki-laki. Dan perkapita lebih banyak disumbangkan laki-laki. Kecendrungan nilai IPG yang rendah karena perempuan lebih dominan pada angka lama sekolah. Namun setelah berkeluarga lebih cendrung pasiif karena budaya patriaki.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman, sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam meningkatkan masing-masing indikator.
2. Ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan perilaku hidup sehat untuk meningkatkan angka harapan hidup.

3. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk melakukan pendataan angka putus sekolah dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang memberikan pelatihan keterampilan (khusus untuk anak korban kekerasan yang putus sekolah).

Upaya/Strategi yang akan di lakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman ditahun selanjutnya terus berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menjadi penentu dari ketiga dimensi tersebut, yaitu :

1. Dimensi Kesehatan
   - Meningkatkan akses layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan Posyandu, Puskesmas, dan pelayanan kesehatan terpadu ;
   - Memperkuat program pencegahan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif berbasis keluarga ;
   - Melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon pengantin secara berkelanjutan ;
   - Meningkatkan pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin ;
   - Memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi perempuan dan kelompok rentan;
   - Meningkatkan kampanye pencegahan perkawinan usia anak dan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan ;
   - Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan kesehatan perempuan dan anak.
2. Dimensi Pendidikan
   - Meningkatkan program bantuan pendidikan bagi anak perempuan dari keluarga kurang mampu ;
   - Memperkuat upaya pencegahan perkawinan usia anak melalui edukasi keluarga dan masyarakat ;
   - Mendorong program pendidikan kesetaraan dan kejar paket bagi perempuan putus sekolah ;
   - Meningkatkan akses pelatihan keterampilan, literasi digital, dan pendidikan vokasi bagi perempuan ;
   - Memperluas sosialisasi pentingnya pendidikan perempuan sampai jenjang tinggi ;

- Mendorong sekolah ramah anak dan ramah gender untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif ;
- Memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi perempuan sesuai kebutuhan kerja.

3. Dimensi Standar Hidup Layak/Ekonomi
   - Meningkatkan pelatihan kewirausahaan perempuan berbasis kebutuhan pasar dan digitalisasi usaha ;
   - Memperluas akses perempuan terhadap bantuan modal usaha, koperasi, dan pembiayaan UMKM ;
   - Mendorong peningkatan keterampilan kerja perempuan melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi ;
   - Membuka akses pemasaran produk UMKM perempuan melalui platform digital dan kemitraan usaha ;
   - Mendorong dunia usaha menerapkan kesempatan kerja dan sistem pengupahan yang lebih setara gender ;
   - Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis potensi lokal ;
   - Memfasilitasi perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan untuk memperoleh dukungan ekonomi produktif ;
   - Mendorong pengembangan ekonomi kreatif perempuan dan usaha rumah tangga berbasis teknologi.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Program Pengarusutamaan gender dan program pemberdayaan Perempuan	166.300.000	95.307.553	57,31%	Menunjang
	Program pemenuhan hak anak pada	3.662.500	3.662.500	100%	Menunjang

	kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak				

Pencapaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 4 yaitu Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh beberapa program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait. Program tersebut berperan sebagai program penunjang terhadap pencapaian indikator karena berkaitan dengan peningkatan kapasitas perempuan, penguatan kelembagaan, serta pemenuhan hak anak yang menjadi bagian dari upaya pembangunan yang responsif gender.

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp166.300.000 dan realisasi Rp95.307.553 atau 57,31 persen termasuk dalam kategori menunjang pencapaian kinerja. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, termasuk fasilitasi organisasi perempuan dan Dharma Wanita. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mendorong implementasi pengarusutamaan gender di daerah.

Sementara itu, Program Pemenuhan Hak Anak pada kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dengan anggaran Rp3.662.500 dan realisasi 100 persen juga termasuk menunjang pencapaian kinerja. Program ini dilaksanakan melalui fasilitasi forum anak dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas hidup anak. Walaupun fokusnya pada pemenuhan hak anak, program ini tetap mendukung terciptanya lingkungan sosial yang lebih inklusif dan responsif gender.

Secara keseluruhan, kedua program tersebut menunjang pencapaian indikator pembangunan gender, meskipun kontribusinya bersifat tidak langsung. Hal ini karena nilai indeks pembangunan gender juga sangat dipengaruhi oleh capaian indikator pada sektor lain

seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang pelaksanaannya melibatkan perangkat daerah lain. Oleh karena itu, peningkatan nilai indikator memerlukan sinergi lintas sektor agar upaya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dapat berjalan lebih optimal.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	169.962.500	98.970.053	99,40%	41,17%	100	Efisien

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%}$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE = \frac{(169.962.500 \times 99,40\%) - 98.970.053}{169.962.500} \times 100\%}$$

$$\boldsymbol{TE = 41,17\%}$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%

- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Nilai Efisiensi = $\text{TE} \geq 20\% \rightarrow \text{Nilai Efisiensi} = 100$

Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada program yang mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG), diketahui bahwa total pagu anggaran sebesar Rp169.962.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp98.970.053, serta capaian kinerja sebesar 99,40 persen. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus tingkat efisiensi, diperoleh Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 41,17 persen.

Berdasarkan ketentuan konversi nilai efisiensi, apabila nilai TE ≥ 20 persen, maka Nilai Efisiensi (NE) ditetapkan sebesar 100. Dengan demikian, tingkat efisiensi pelaksanaan program yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut termasuk dalam kategori sangat efisien.

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja yang tinggi dapat diperoleh dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah dari pagu yang tersedia. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga mampu mendukung pencapaian kinerja pembangunan gender di daerah dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal.

8. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Indikator Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya peran sektor perdagangan dalam struktur perekonomian Kota Pariaman. Indikator ini menunjukkan sejauh mana aktivitas perdagangan mampu memberikan nilai tambah terhadap total PDRB daerah.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dihitung berdasarkan data PDRB menurut lapangan usaha yang dipublikasikan oleh Badan Pusat

Statistik (BPS) Kota Pariaman melalui publikasi Pariaman Dalam Angka. Dalam klasifikasi PDRB, sektor perdagangan termasuk dalam kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menjadi salah satu dari 17 lapangan usaha dalam struktur PDRB.

Perhitungan indikator ini dilakukan dengan membandingkan nilai tambah bruto sektor perdagangan terhadap total nilai PDRB Kota Pariaman pada tahun yang sama. Semakin besar persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, maka semakin besar pula peran sektor tersebut dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah.

Tujuan pengukuran indikator ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan sektor perdagangan sebagai salah satu sektor strategis dalam perekonomian daerah. Selain itu, indikator ini juga digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan perdagangan, peningkatan daya saing pelaku usaha, serta perluasan akses pasar bagi produk lokal.

Melalui indikator ini, Pemerintah Kota Pariaman dapat memantau perkembangan sektor perdagangan dari tahun ke tahun serta mengevaluasi efektivitas berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah. Dengan demikian, peningkatan kontribusi sektor perdagangan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan aktivitas usaha masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja.

Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dihitung dengan membandingkan nilai tambah bruto sektor perdagangan dengan total PDRB Kota Pariaman pada tahun yang sama.

Rumus Perhitungan Indikator:

$$\text{Kontribusi Sektor Perdagangan} = \frac{\text{PDRB Sektor Perdagangan}}{\text{Total PDRB}} \times \mathbf{100}\%$$

Keterangan:

- PDRB Sektor Perdagangan = Nilai tambah bruto sektor *Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor* pada tahun tertentu.

- Total PDRB = Total nilai PDRB seluruh lapangan usaha pada tahun yang sama.

Data yang digunakan dalam perhitungan indikator ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman melalui publikasi Pariaman Dalam Angka Tahun 2026 yang memuat data PDRB menurut lapangan usaha. Berdasarkan data yang diperoleh dari publikasi *Pariaman Dalam Angka Tahun 2026* yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman, persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pariaman pada Tahun 2025 tercatat sebesar 16,09%. Sementara itu, target yang telah ditetapkan pada tahun yang sama adalah sebesar 16,14%, sehingga tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 99,69%. Dengan demikian, capaian kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada Tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan, dengan selisih sebesar 0,05 poin persentase antara target dan realisasi.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	16,14%	16,09%	99,69%	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Sasaran Strategis 5 yaitu meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, indikator Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB pada Tahun 2025 memiliki target sebesar 16,14%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 16,09%. Dengan demikian tingkat capaian kinerja mencapai 99,69% dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Meskipun capaian indikator belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, selisih antara target dan realisasi relatif kecil yaitu sebesar 0,05 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

sektor perdagangan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Pariaman masih berada pada kondisi yang cukup baik dan stabil.

Capaian ini juga menggambarkan bahwa sektor perdagangan masih menjadi salah satu sektor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah. Berbagai aktivitas perdagangan baik pada skala usaha mikro, kecil, maupun menengah terus memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi daerah.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi (%)				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
15,45	15,47	15,62	16,09	100,12%	99,23%	98,17%	99,69%

Berdasarkan data realisasi indikator Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Pariaman dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tren peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Pada tahun 2022 realisasi kontribusi sektor perdagangan tercatat sebesar 15,45%, kemudian meningkat menjadi 15,47% pada tahun 2023, 15,62% pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 16,09% pada tahun 2025.

Peningkatan realisasi tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan masih menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah. Pertumbuhan ini juga mencerminkan adanya perkembangan aktivitas perdagangan masyarakat serta dukungan berbagai program pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan usaha perdagangan dan UMKM.

Dari sisi capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan, pada tahun 2022 indikator ini mampu melampaui target dengan capaian sebesar 100,12%. Pada tahun 2023 capaian kinerja tercatat sebesar 99,23%, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 98,17%. Selanjutnya pada tahun 2025 capaian kembali meningkat menjadi 99,69%, meskipun masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan.

Secara umum, perkembangan capaian indikator ini menunjukkan bahwa kinerja sektor perdagangan di Kota Pariaman relatif stabil dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, walaupun pada beberapa tahun terakhir target belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi perekonomian daerah, inflasi, serta perubahan daya beli masyarakat yang turut mempengaruhi aktivitas perdagangan.

Dengan melihat tren peningkatan realisasi kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tersebut, diharapkan pada tahun-tahun mendatang sektor perdagangan dapat terus berkembang sehingga mampu meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah serta mencapai target yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
16,09%	16,37%	98.28%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, realisasi Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Pariaman tercatat sebesar 16,09%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 16,37%, maka tingkat capaian terhadap target akhir tersebut mencapai 98,28%.

Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pariaman telah mendekati target akhir yang telah direncanakan dalam dokumen RPD. Selisih antara realisasi tahun 2025 dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 0,28 poin persentase, yang menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan kinerja sektor perdagangan agar target akhir dapat tercapai secara optimal.

Capaian yang hampir mencapai target akhir ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan masih memiliki peranan penting dalam mendukung struktur perekonomian daerah. Namun demikian, peningkatan kontribusi sektor perdagangan masih perlu terus didorong melalui penguatan aktivitas perdagangan, peningkatan daya saing

pelaku usaha, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dengan melihat capaian tersebut, Pemerintah Kota Pariaman melalui perangkat daerah terkait perlu terus melakukan berbagai upaya strategis dalam meningkatkan aktivitas perdagangan dan memperluas akses pasar, sehingga kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dapat meningkat dan mampu mencapai target akhir yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Pariaman.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
16,09%	-	-

Berdasarkan hasil penelusuran data, tidak ditemukan data pembanding secara nasional yang secara spesifik menyajikan persentase kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB daerah dalam format yang sebanding dengan indikator yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pariaman.

Hal ini disebabkan karena pada tingkat nasional, data yang tersedia umumnya disajikan dalam bentuk kontribusi sektor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, bukan dalam bentuk perbandingan langsung dengan indikator kinerja daerah. Sebagai gambaran, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB nasional berada pada kisaran ±13%, sehingga sektor ini merupakan salah satu sektor utama dalam struktur perekonomian Indonesia.

Dengan adanya perbedaan basis pengukuran tersebut, maka perbandingan secara langsung antara capaian daerah dengan nasional tidak dapat dilakukan secara apple to apple. Oleh karena itu, analisis kinerja indikator lebih relevan dilakukan melalui:

- perbandingan antar daerah (kabupaten/kota/provinsi), dan
- analisis tren capaian dari tahun ke tahun.

Meskipun tidak tersedia pembanding nasional yang sepadan, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pariaman sebesar 16,09% menunjukkan bahwa sektor perdagangan tetap memiliki peranan penting dalam perekonomian daerah dan sejalan dengan karakteristik struktur ekonomi nasional yang juga ditopang oleh sektor perdagangan.

2) Perbandingan dengan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi 2025	Realisasi Provinsi Sumbar 2025	Capaian
16,09%	16,65%	96,63%

Berdasarkan hasil perbandingan antara capaian indikator Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Pariaman dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, diketahui bahwa realisasi Kota Pariaman sebesar 16,09%, sedangkan realisasi Provinsi Sumatera Barat sebesar 16,65%. Dengan demikian, tingkat capaian Kota Pariaman terhadap provinsi sebesar 96,63%.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pariaman masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat, dengan selisih sebesar 0,56 poin persentase. Hal ini mengindikasikan bahwa peran sektor perdagangan dalam struktur perekonomian Kota Pariaman belum sekuat rata-rata daerah di tingkat provinsi.

Perbedaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain struktur ekonomi Kota Pariaman yang masih didominasi oleh sektor lain seperti pertanian dan jasa, serta belum optimalnya aktivitas perdagangan dan distribusi barang dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan.

Capaian sebesar 96,63% menunjukkan bahwa kinerja sektor perdagangan Kota Pariaman relatif mendekati capaian provinsi, sehingga masih memiliki potensi untuk ditingkatkan. Upaya peningkatan kontribusi sektor perdagangan perlu terus dilakukan

melalui penguatan UMKM, peningkatan daya saing pelaku usaha, serta pengembangan pasar dan jaringan distribusi.

3) Perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)
1	Bukittinggi	34,30
2	Kota Solok	25,77
3	Payakumbuh	25,13
4	Padang Panjang	18,24
5	Padang	17,80
6	Pariaman	16,09

Berdasarkan perbandingan kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB beberapa kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, terlihat bahwa Kota Bukittinggi memiliki kontribusi tertinggi yaitu sebesar 34,30%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan merupakan sektor utama yang menopang perekonomian Kota Bukittinggi sebagai salah satu pusat perdagangan di Sumatera Barat.

Selanjutnya Kota Solok dan Kota Payakumbuh juga memiliki kontribusi sektor perdagangan yang cukup tinggi yaitu masing-masing 25,77% dan 25,13%, yang menunjukkan bahwa sektor perdagangan memiliki peran penting dalam struktur ekonomi daerah tersebut.

Sementara itu Kota Padang Panjang dan Kota Padang memiliki kontribusi sektor perdagangan yang berada pada tingkat menengah yaitu 18,24% dan 17,80%.

Di sisi lain, Kota Pariaman memiliki kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 16,09%, yang merupakan nilai terendah dibandingkan kota-kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kota Pariaman masih didominasi oleh sektor lain di luar perdagangan.

Meskipun demikian, sektor perdagangan di Kota Pariaman masih memiliki peluang untuk terus berkembang melalui peningkatan aktivitas perdagangan lokal, penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta pengembangan pasar dan jaringan distribusi barang. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pariaman pada tahun-tahun mendatang.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

   Faktor pendukung indikator persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2025 adalah :

   1. Event

      Event-event yang diadakan oleh pemerintah kota pariaman seperti car free night, pesta Pantai dan event lainnya memunculkan pedagang baru baik lama maupun baru sehingga memicu pertumbuhan pedagang, selaras dengan kenaikan pdrb disektor perdagangan.

   2. Inflasi dan stabilitas harga yang terjaga

      Pemerintah kota pariaman rutin melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi dengan instansi terkait agar harga barang-barang pokok dan barang penting terjaga. Dinas Perindagkop dan UKM juga melakukan pemantauan harga dengan langsung terjun ke pasar.

   3. Pariwisata

      Kunjungan wisatawan secara signifikan meningkatkan permintaan pada perdagangan eceran, kuliner, dan cenderamata. Didukung dengan pariwisata Pantai nan elok, pariwisata kota pariaman menjadi magnet dalam mendatangkan wisatawan untuk membelanjakan uangnya di Pariaman.

   4. Kelancaran logistik

      Infrastruktur jalan, Pelabuhan dan bandara menjadi kunci dalam lancarnya distribusi logistik. Kota pariaman berada dekat dengan bandara dan juga Pelabuhan, serta didukung dengan infrastruktur yang mumpuni, sehingga memangkas biaya distribusi. Kelancaran

distribusi barang dari produsen ke pedagang dan konsumen jadi lebih cepat.

Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2025 adalah :

1. Pertumbuhan sektor unggulan tidak sepenuhnya sesuai dengan proyeksi.

   Perekonomian Kota Pariaman masih ditopang oleh sektor pertanian, perikanan, perdagangan, kontruksi, transportasi dan jasa. Jika satu sektor tumbuh sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan maka akan berpengaruh terhadap PDRB.
2. Daya beli masyarakat menurun

   Konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB. Daya beli masyarakat Kota Pariaman dilaporkan menurun yang dipicu oleh cuaca ekstrem, bencana hidrometrologi yang melumpuhkan aktivitas ekonomi serta kenaikan harga komoditas pangan (terjadi inflasi) yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun.
3. Realisasi belanja daerah (APBD)

   Belanja pemerintah berperan sebagai stimulus ekonomi daerah. Jika realisasi belanja tidak optimal atau terjadi keterlambatan proyeksi fisik dampak nya lagsung terasa pada nilai ekonomi. Kota Pariaman menjadi daerah terdampak kebijakan efisien anggaran oleh pemerintah pusat, sehingga banyak kegiatan atau proyek pemerintah Kota Pariaman yang terhambat pelaksanaannya karena kurangnya anggaran.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam meningkatkan persentase sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2025 adalah :

1. Melakukan pemberian peralatan masak dan peralatan pembuatan minuman.
2. Melakukan pelatihan, pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku umkm dan pelaku industri kecil menengah secara rutin.

3. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap koperasi yang ada di Kota Pariaman untuk mendukung usaha masyarakat dibidang permodalan.

Beberapa kendala/ hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pariaman Tahun 2025 adalah:

1. Belum adanya data base pelaku UMKM dan IKM yang terupdate setiap tahunnya.
2. Tidak bisa melakukan intervensi terhadap harga pasar.
3. Kurangnya perencanaan yang disusun.
4. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Beberapa upaya/strategi yang akan ditargetkan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2025 untuk mencapai target hasil 16,14 % sesuai dengan Target Kota Pariaman Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memunculkan kegiatan pendataan data base pelaku UMKM dan IKM.
2. Memonitoring harga pasar setiap hari dan mengusulkan operasi pasar jika diperlukan ke pemerintah provinsi.
3. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	5.820.000	3.058.000	52,54%	Menunjang

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian indikator kinerja Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB didukung

oleh Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Program ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar sehingga aktivitas perdagangan dapat berjalan dengan baik dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pada Tahun 2025, program tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp5.820.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.058.000 atau sebesar 52,54% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran yang belum optimal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam program tersebut belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Program stabilisasi harga ini dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan harga kebutuhan pokok dan barang penting di pasar secara rutin, yang kemudian dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sebagai bahan pengendalian inflasi daerah. Kegiatan ini memiliki peran dalam menjaga kestabilan harga di pasar sehingga dapat mendukung kelancaran aktivitas perdagangan.

Namun demikian, rendahnya tingkat realisasi anggaran menunjukkan bahwa dukungan program terhadap pencapaian indikator kinerja belum optimal, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan sektor perdagangan terhadap PDRB masih terbatas. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi capaian indikator yang belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, program tersebut tetap memberikan dukungan terhadap pencapaian indikator kinerja, namun diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta optimalisasi pemanfaatan anggaran agar program dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mendorong aktivitas perdagangan dan meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pariaman pada tahun-tahun berikutnya.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Persentase	5.820.000	3.058.000	99,69%	47,15%	100	Efisien

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB						

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE} = \frac{(\mathbf{5.820.000} \times \mathbf{99,69\%}) - \mathbf{3.058.000}}{\mathbf{5.820.000}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{TE} = \mathbf{47,15\%}$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%
- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

Nilai Efisiensi = $47{,}15\% \geq 20\% \rightarrow \text{Nilai Efisiensi} = 100$

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi terhadap pelaksanaan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan

Barang Penting, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 47,15%. Nilai tersebut berada di atas batas maksimum efisiensi yang ditetapkan yaitu 20%, sehingga berdasarkan ketentuan konversi nilai efisiensi, program ini memperoleh nilai efisiensi sebesar 100 atau termasuk dalam kategori sangat efisien.

Tingkat efisiensi yang tinggi ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja program dapat diperoleh dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pagu anggaran yang tersedia. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.058.000 dari pagu anggaran Rp5.820.000, program ini tetap mampu mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,69%.

Hal tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan program telah dilakukan secara efisien dalam memanfaatkan sumber daya anggaran yang tersedia. Meskipun demikian, optimalisasi pelaksanaan kegiatan tetap perlu dilakukan agar penggunaan anggaran dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan aktivitas perdagangan dan kontribusinya terhadap PDRB Kota Pariaman pada tahun-tahun berikutnya.

9. Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Penghitungan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB bertujuan untuk mengetahui tingkat kontribusi pendapatan masyarakat dari sektor pertanian terhadap total PDRB dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja sektor pertanian yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Penghitungan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB adalah sebagai berikut.

$$\text{Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB} = \frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Pertanian}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$$

Data jumlah kontribusi PDRB sektor pertanian diperoleh dari jumlah kontribusi PDRB sub sektor pertanian yaitu:

1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu
3. Perikanan

Penetapan target indikator Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024–2026, target awal yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kota Pariaman Tahun 2025 sebesar 17,76% namun mengalami penyesuaian pada Perjanjian Kinerja Perubahan menjadi 17,36%.

Berdasarkan hasil penghitungan BPS Kota Pariaman, Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Tahun 2025 sebesar 17,36 dengan capaian 97,74%. Hasil ini tertuang dalam Pariaman Dalam Angka Tahun 2026.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	17,76	17,36	97,74%	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil analisis perbandingan kinerja pada indikator Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB, Bahwa target yang ditetapkan Pada Tahun 2025 sebesar 17,76 sedangkan realisasi tahun 2025 Berdasarkan Publikasi Kota Pariaman Dalam Angka yang diterbitkan secara tahunan oleh BPS sebesar 17,36. Dengan demikian, tingkat Capaian Kinerja yang diperoleh adalah 97,74% termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitatif kinerja telah mendekati target yang ditetapkan, namun belum bisa mencapai maupun melampui target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Hasil Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB tahun 2025, menunjukkan bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang mengakibatkan belum tercapainya target yang telah ditetapkan. Beberapa masalah tersebut antara lain Terjadinya serangan hama wereng terhadap tanaman padi sehingga mengakibatkan petani terancam Gagal Panen, penurunan populasi ternak sapi dikarenakan adanya kekhawatiran para peternak terhadap penyakit menular pada sapi yaitu PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), dan penurunan produksi perikanan akibat cuaca buruk dan ahli fungsi lahan.

Adanya perbedaan antara target dan realisasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah bersama para stakeholder untuk mengatasi masalah sehingga dapat tercapainya peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi (%)				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
17,73	17,67	17,38	17,36	95,47%	94,64%	96,82%	97,74%

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB dalam beberapa tahun terakhir, bisa dilihat bahwa realisasi kinerja dari tahun 2022 sampai 2025 mengalami penurunan. Pada Tahun 2022 Realisasi sebesar 17,73% mengalami penurunan pada Tahun 2023 yaitu menjadi 17,67% dan pada Tahun 2024 menjadi 17,38%, untuk tahun 2025 menjadi 97,74%.

Penurunan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dikarenakan Pariaman merupakan daerah perkotaan yang mengalami perubahan struktur ekonomi dan perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan/ kawasan terbangun seperti perumahan, industri sehingga berdampak pada produksi pertanian di Kota Pariaman. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui LP2B (Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan) untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian agar tidak beralih fungsi menjadi pemukiman. Selain itu ada beberapa permasalahan yang mengakibatkan penurunan produksi pertanian seperti adanya serangan hama wereng yang menyerang tanaman padi, adanya kasus penyakit menular pada hewan ternak sapi yaitu PMK dan cuaca buruk.

Dari sisi capaian kinerja bisa dilhat bahwa capaian pada tahun 2022 sebesar 95,47%. Kemudian menurun menjadi 94,64% pada tahun 2023, meningkat kembali pada tahun 2024 yaitu 96,82% dan pada tahun 2025 sebesar 97,74%. Berdasarkan capaian tahun 2025, menandakan bahwa realisasi sudah hampir mencapai target yang telah ditetapkan.

Penurunan nilai realisasi persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari tahun 2022 sampai tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor pertanian mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman serta gangguan dari hama penyakit dan cuaca buruk, oleh karena itu diharapkan langkah perbaikan yang lebih terarah dan konsisten agar capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya dapat kembali meningkat serta mencapai target yang ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
17,36	17,77	97,69%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja indikator Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD), diketahui bahwa realisasi kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 17,36% Sementara itu, target akhir kinerja pada periode perencanaan mengalami penyesuaian Pada dokumen RENSTRA Dinas Pertanian Pangan Perikanan Tahun 2024-2026, target akhir periode untuk Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ditetapkan sebesar 17,77%. Diketahui bahwa capaian kinerja mencapai 97,69%.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja dan target akhir periode, terdapat gap capaian kinerja sebesar 0,41%. Perbedaan antara realisasi dan target tersebut dapat dipengaruhi oleh alih fungsi lahan pertanian seperti pemukiman, industri atau jasa. Dengan demikian diharapkan adanya perbaikan dalam penyusunan perencanaan kedepannya yang memfokuskan pertanian perkotaan, mengingat bahwa Kota Pariaman merupakan wilayah perkotaan yang notabenenya memiliki lahan terbatas.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

   1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Kontribusi terhadap PDB Nasional 2025	Capaian
17,36	14,35	120,97%

Berdasarkan perbandingan dengan tingkat nasional, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Pariaman pada tahun 2025 tercatat sebesar 17,36%. Sementara itu, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDB nasional pada tahun 2025 sebesar 14,35%.

Jika dibandingkan dengan tingkat nasional, kontribusi sektor pertanian di Kota Pariaman lebih tinggi sebesar 3,01 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kota Pariaman masih memiliki ketergantungan yang relatif lebih besar terhadap sektor pertanian dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian, realisasi Kota Pariaman mencapai 120,97% dibandingkan dengan kontribusi sektor pertanian pada tingkat nasional. Nilai capaian yang berada di atas 100% ini menunjukkan bahwa peran sektor pertanian dalam perekonomian Kota Pariaman masih lebih dominan dibandingkan dengan struktur ekonomi nasional.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor strategis dalam mendukung perekonomian daerah, baik dalam menciptakan nilai tambah

maupun sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Namun demikian, tingginya kontribusi sektor pertanian juga dapat menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah masih relatif terkonsentrasi pada sektor primer, sehingga diperlukan upaya penguatan sektor-sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan pariwisata untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

2) Perbandingan dengan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi 2025	Realisasi Provinsi Sumbar 2025	Capaian
17,36	21,79	79,67%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja indikator Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kota Pariaman dengan realisasi persentase kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat, diketahui bahwa realisasi kinerja Kota Pariaman sebesar 17,36%, sedangkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 sebesar 21,79%. Dengan demikian tingkat capaian perbandingan Kota Pariaman terhadap Provinsi Sumatera Barat mencapai 79,67%, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja Provinsi Sumatera Barat masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Pariaman.

Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja Kota Pariaman masih berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di Provinsi Sumatera Barat masih memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan struktur perekonomian daerah.

Sektor pertanian menjadi salah satu penopang perekonomian baik bagi Kota Pariaman maupun Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat memiliki wilayah kabupaten dengan ketersediaan lahan pertanian yang relatif luas, sehingga sektor pertanian menjadi sektor unggulan dalam menggerakkan perekonomian daerah dengan kontribusi sebesar 21,79% terhadap PDRB. Sementara itu, Kota Pariaman sebagai wilayah perkotaan

memiliki keterbatasan luas lahan pertanian sehingga kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB relatif lebih kecil. Selain itu, sektor pertanian di Kota Pariaman juga menghadapi beberapa tantangan seperti kondisi cuaca yang tidak menentu, serangan hama tanaman, serta penyakit pada ternak yang dapat mempengaruhi produktivitas sektor pertanian.

Dengan demikian, perbandingan antara Kota Pariaman dengan Provinsi Sumatera Barat dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Pariaman dalam menyusun langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah, khususnya dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, sehingga kinerja sektor pertanian dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

3) Perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)
1.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	48,04%
2.	Kabupaten Pasaman	46,18%
3.	Kabupaten Pasaman Barat	40,25%
4.	Kabupaten Pesisir Selatan	36,54%
5.	Kabupaten Solok	33,27%
6.	Kabupaten Lima Puluh Kota	31,45%
7.	Kabupaten Agam	28,26%
8.	Kabupaten Solok Selatan	28,20%
9.	Kabupaten Sijunjung	27,79%
10.	Kabupaten Dharmasraya	27,47%
11.	Kabupaten Tanah Datar	27,18%
12.	Kabupaten Padang Pariaman	20,20%
13.	Kota Pariaman	17,36%
14.	Kota Sawahlunto	9,03%
15.	Kota Payakumbuh	5,56%

16.	Kota Padang Panjang	4,99%
17.	Kota Solok	4,97%
18.	Kota Padang	4,95%
19.	Kota Bukittinggi	1,04%

Berdasarkan perbandingan kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, diketahui bahwa Kota Pariaman memiliki kontribusi sebesar 17,36%. Nilai ini menempatkan Kota Pariaman pada peringkat ke-13 dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Kontribusi sektor pertanian tertinggi terdapat pada Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 48,04%, diikuti oleh Kabupaten Pasaman sebesar 46,18% dan Kabupaten Pasaman Barat sebesar 40,25%. Tingginya kontribusi sektor pertanian di wilayah tersebut menunjukkan bahwa struktur perekonomian daerah masih sangat didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian.

Sementara itu, beberapa daerah perkotaan di Sumatera Barat memiliki kontribusi sektor pertanian yang relatif lebih rendah, seperti Kota Sawahlunto (9,03%), Kota Payakumbuh (5,56%), Kota Padang Panjang (4,99%), Kota Solok (4,97%), Kota Padang (4,95%), dan Kota Bukittinggi (1,04%). Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian wilayah perkotaan lebih didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, kontribusi sektor pertanian di Kota Pariaman berada pada kategori menengah, lebih rendah dibandingkan sebagian besar kabupaten yang memiliki wilayah pertanian luas, namun masih lebih tinggi dibandingkan beberapa kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Kota Pariaman merupakan wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan pertanian, sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan produktivitas, efisiensi, dan nilai

tambah sektor pertanian agar peran sektor ini tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam mendukung perekonomian Kota Pariaman.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

No	Kendala/hambatan penyebab tidak tercapainya target	Solusi/ upaya yang dilakukan
1	Alih Fungsi Lahan Produktif pertanian menjadi kawasan non-pertanian seperti perumahan, industri	Penyusunan Dokumen LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang menetapkan, memetakan, dan melindungi lahan pertanian sawah agar tidak dialihfungsikan menjadi lahan non Pertanian.
2	Serangan Hama Wereng terhadap sawah di Kota Pariaman mencapai 28 ha dan terancam gagal panen	• Melaksanakan Gerdal (Gerakan Pengendalian) dengan melakukan penyemprotan pestisida untuk menekan hama wereng dan mencegah gagal panen • Memberikan bantuan benih padi dengan mengganti varietas padi seperti IR 42 dan Cisokan menjadi jenis Inpari dikarenakan varietas padi ini dinilai relatif efektif untuk mengatasi hama wereng
3	Kelangkaan pupuk di Kota Pariaman	• Melakukan dan pengawasan terhadap teknis pendistribusiyan penyaluran pupuk bersubsidi dari kios sampai ke tangan petani
4	Ketakutan peternak pada Kasus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang	• Melaksanakan vaksinasi kepada sapi dan kerbau • Melakukan sosialisasi dan

	menyerang hewan ternak sapi	pembinaan kepada peternak dalam memastikan ternak yang dibeli sehat • Penyediaan obat-obatan untuk hewan ternak. • Melaksanakan program IB (inseminasi Buatan) untuk meningkatkan populasi hewan ternak
5	Faktor ekonomi yang menyebabkan peternak menjual hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga	Pemberian bantuan hewan ternak ayam kepada KK miskin dan telah memiliki kandang untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui sektor peternakan
6	Cuaca buruk dan bencana hidrometeorologi	• Melakukan pendataan atas kerugian dari bencana hidrometeorologi dan berkoordinasi ke pusat untuk mendapatkan bantuan pasca bencana.



Peninjauan Lahan sawah yang terdampak hama wereng



Cuaca Buruk mengakibatkan sarana dan prasarana perikanan mengalami kerusakan

Meskipun Kota Pariaman belum berhasil mencapai target, Pariaman Memiliki nilai realisasi tertinggi dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Faktor keberhasilan dalam pencapaian target Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kota Pariaman, antara lain:

1. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Mengoptimalkan pencapaian target dengan penyaluran bantuan benih serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung baik melalui APBD maupun bekerja sama dengan Pemerintah Pusat untuk memanfaatkan dana pusat untuk peningkatan produksi pertanian di Kota Pariaman.
2. Melaksanakan pendampingan dan penyuluhan kepada para petani, peternak, nelayan dan pembudidaya guna meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia.
3. Optimalisai Lahan tidur dengan melakukan pemanfaatan dan pengalihan lahan tidak produktif menjadi kawasan pertanian untuk memperluas area tanam.
4. Melakukan Pengendalian hama dengan rutin seperti pelaksanaan Gerdal di daerah yang terdampak dan melakukan mitigasi dan pendampingan agar luasan serangan tidak bertambah.
5. Optimalisasi Program pemanfaatan perkarangan pangan lestari di tingkat desa melalui KWT yang ada di Kota Pariaman untuk memperkuat kemandirian pangan keluarga.

Sebagai upaya perbaikan, terdapat beberapa hal yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Pada Tahun selanjutnya, antara lain:

1. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya.
2. Peningkatan kualitas analisis kinerja, terutama pada aspek perbandingan target dan realiasasi , serta analisis faktor keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja.
3. Melaksanakan percepatan penyusunan dokumen LP2B yang dapat digunakan untuk menetapkan dan melindungi lahan pertanian produktif agar tidak beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian
4. Melaksanakan Pembinaan dan sosialisasi pada para stackeholder seperti petani, peternak, nelayan dan pembudidaya guna meningkatkan produktivitas pembangunan sektor pertanian.
5. Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan dan dan pelaksanaan program, sehingga laporan kinerja tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mencerminkan capaian kinerja sesungguhnya.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	159.215.500	145.057.038	91,11%	Menunjang
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	3.193.000	2.926.000	91,64%	Menunjang

	Program Pengawasan Keamanan Pangan	4.676.750	4.666.750	99,79%	Menunjang
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	379.050.000	366.301.300	96.64%	Menunjang
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	269.112.500	265.016.250	98.48%	Menunjang
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	93.655.000	67.305.000	71.86%	Menunjang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.569.368.481	13.960.924.940	95,82%	Menunjang
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	889.162.165	529.825.165	59,59%	Tidak Menunjang
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	524.997.000	201.321.453	38,35%	Tidak Menunjang
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan	222.607.208	220.127.208	98,89%	Menunjang

	Kesehatan Masyarakat Veteriner				
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	58.397.400	58.397.400	100%	Menunjang
	Program Penyuluhan Pertanian	7.610.700	7.610.700	100%	Menunjang

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategi " Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB" dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB, Kota Pariaman melaksanakan beberapa program yang berkaitan dengan peningkatan produksi pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan realisasi anggaran, diketahui bahwa tingkat kontribusi masing-masing program terhadap pencapaian indikator kinerja menunjukkan hasil yang bervariasi.

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 379.050.000 dengan realisasi sebesar RP. 366.301.300 atau capaian 96,64%. Program ini memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan sasaran strategis ini melalui sektor produksi perikanan tangkap. Tinggi nya tingkat capaian yang diperoleh oleh program ini menunjukkan bahwa program menunjang pencapaian indikator Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 269.112.500 dengan realisasi sebesar Rp. 265.016.250 dengan capaian 98,48%. Program ini memiliki keterkaitan

langsung dengan peningkatan sasaran strategis ini melalui sektor produksi perikanan budidaya. Tingginya tingkat capaian yang diperoleh oleh program ini menunjukkan bahwa program menunjag pencapaian indikator Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB.

Program Pengelolaan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 93.655.000 dengan realisasi sebesar Rp. 67.305.000 dengan capaian 71.86%. program ini memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan sasaran strategis ini melalui sektor produksi perikanan. tingginya tingkat capaian yang diperoleh oleh program ini menunjukkan bahwa program menunjang pencapaian indikator persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 14.569.368.481 dengan realisasi sebesar Rp. 13.960.924.940 dengan capaian 95,82%. Program ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan sasaran strategis ini melalui sektor produksi perikanan. Program ini menjamin ketersediaan anggaran, dokumen perencanaan yang baik dan pemenuhan kebutuhan kapasitas Pegawai. Sehingga penguatan pada sektor penunjang secara tidak langsung menjadi kunci utama dalam peningkatan kotribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian memiliki Anggaran sebesar Rp. 889.162.165 dengan realisasi sebesar Rp. 529.825.165 dan Capaian pada program ini adalah sebesar Rp. 59,59%. Capaian tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah terlaksana namun ada beberapa perencanaan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan beberapa faktor. Sehingga program ini belum mampu sepenuhnya sebagai penunjang pencapaian kinerja.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian memiliki Anggaran sebesar Rp. 524.997.000 dengan realisasi sebesar Rp. 201.321.453 dan Capaian pada program ini adalah sebesar Rp. 38,35%. Rendahnya Capaian tersebut menunjukkan bahwa

pelaksanaan program belum berjalan optimal dan belum dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu program ini belum dapat menunjang pencapaian kinerja secara optimal.

Program Pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner memiliki anggaran sebesar Rp. 222.607.208 dengan realisasi sebesar Rp. 220.127.208 dan tingkat capaian 98,89%. Tingginya capaian tersebut mengindikasikan bahwa program tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 58.397.400 dan realisasi Kinerja sebesar Rp. 58.397.400 dengan tingkat capaian 100%. Tingginya tingkat capaian program ini menunjukkan bahwa pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sudah berjalan optimal, sehingga program tersebut memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja.

Program Penyuluhan Pertanian memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 7.610.700 dan realisasi Rp. 7.610.700 dengan tingkat capaian 100%. Tinggi nya capaian program tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan lancar.

Secara keseluruhan, pencapaian Indikator Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB telah didukung secara signifikan oleh 10 dari 12 program yang terlaksana pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan. Sementara itu 2 Program dengan capaian yang cukup rendah hingga sedang mesih perlu dilaksanakan penajaman kegiatan, peningkatan efektivitas pelaksanaan serta penguatan fokus pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas kinerja.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Persentase	17.181.045.703,98	15.829.479.204	97,86%	5,75%	64,325%	Efisien

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB						

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE} = \mathbf{5,73\%}$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%
- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

Nilai Efisiensi = $\mathbf{50} + \left(\frac{\boldsymbol{TE}}{\mathbf{20}} \times \mathbf{50}\right)$

$$\boldsymbol{NE} = \mathbf{50} + \left(\frac{\mathbf{5,73\%}}{\mathbf{20}} \times \mathbf{50}\right)$$

NE= $\mathbf{64,32}$

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB, diperoleh Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 5,73%. Nilai tersebut kemudian dikonversikan menjadi Nilai Efisiensi sebesar 64,32% yang berada pada kategori efisien.

Nilai efisiensi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja telah dilakukan secara cukup efisien. Hal ini terlihat dari realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan pagu anggaran yang tersedia, namun tetap mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 97,88% dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sumber daya yang digunakan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Efisiensi ini juga mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sektor pertanian telah dilaksanakan dengan pengelolaan anggaran yang cukup baik, sehingga output dan outcome yang diharapkan dapat dicapai tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran yang tersedia. Meskipun demikian, upaya peningkatan efektivitas program dan kegiatan tetap perlu dilakukan agar capaian kinerja dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

10. Persentase Pertumbuhan Spending of Money

Analisis pola pengeluaran wisatawan (spending of money) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi kontribusi sektor pariwisata terhadap aktivitas ekonomi daerah. Pola pengeluaran ini menggambarkan distribusi belanja wisatawan selama melakukan kunjungan ke suatu destinasi, yang secara tidak langsung memberikan dampak terhadap berbagai sektor usaha yang terkait dengan industri pariwisata.

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\%\ \text{Pertumbuhan Spending of Money} = \frac{\text{Total uang yang dibelanjakan wisatawan pada tahun berjalan} - \text{Total uang yang dibelanjakan wisatawan pada tahun sebelumnya}}{\text{Total uang yang dibelanjakan wisatawan pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman pada tahun 2025, rata-rata pengeluaran wisatawan selama berkunjung tercatat sebesar Rp297.990 per kunjungan.

Pengeluaran tersebut terdiri dari beberapa komponen utama yaitu akomodasi, transportasi, konsumsi, pembelian souvenir, permainan atau wahana wisata, serta pengeluaran lainnya.

Dari komposisi pengeluaran tersebut diketahui bahwa sektor konsumsi merupakan komponen pengeluaran terbesar dengan nilai sebesar Rp96.800 atau 32,48 persen dari total pengeluaran wisatawan. Besarnya proporsi pengeluaran pada sektor konsumsi menunjukkan bahwa aktivitas wisata memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan usaha kuliner lokal, baik yang dikelola oleh pelaku usaha kecil, menengah, maupun sektor jasa makanan dan minuman lainnya.

Komponen pengeluaran berikutnya adalah transportasi dengan nilai sebesar Rp60.100 atau 20,17 persen dari total pengeluaran wisatawan. Persentase ini menunjukkan bahwa mobilitas wisatawan dalam mengakses berbagai destinasi wisata di wilayah Kota Pariaman relatif tinggi sehingga sektor jasa transportasi memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung kelancaran aktivitas pariwisata.

Selanjutnya, pengeluaran pada sektor akomodasi tercatat sebesar Rp53.275 atau 17,88 persen dari total pengeluaran wisatawan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian wisatawan melakukan kunjungan lebih dari satu hari (stay over visitor), yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap perkembangan usaha penyedia jasa penginapan seperti hotel, homestay, maupun penginapan berbasis masyarakat.

Pada sektor souvenir atau oleh-oleh, pengeluaran wisatawan tercatat sebesar Rp47.560 atau 15,96 persen dari total pengeluaran. Persentase ini menunjukkan bahwa produk kerajinan dan oleh-oleh khas daerah memiliki daya tarik bagi wisatawan serta memberikan peluang bagi pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif di daerah.

Sementara itu, pengeluaran pada sektor permainan atau wahana wisata tercatat sebesar Rp24.555 atau 8,24 persen dari total pengeluaran wisatawan. Persentase yang relatif lebih kecil ini dapat menjadi indikasi bahwa variasi atraksi wisata berbayar masih perlu ditingkatkan guna memperkaya pengalaman wisatawan serta meningkatkan nilai belanja wisatawan selama berada di destinasi.

Adapun pengeluaran pada kategori lain-lain tercatat sebesar Rp15.700 atau 5,27 persen dari total pengeluaran wisatawan, yang umumnya mencakup berbagai kebutuhan tambahan seperti biaya parkir, tiket fasilitas pendukung, maupun pengeluaran kecil lainnya selama melakukan aktivitas wisata.

Secara umum, struktur pengeluaran wisatawan di Kota Pariaman menunjukkan bahwa sektor kuliner, transportasi, dan akomodasi menjadi komponen utama dalam aktivitas ekonomi pariwisata daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan sektor-sektor tersebut memiliki peran strategis dalam meningkatkan dampak ekonomi dari aktivitas pariwisata.

Oleh karena itu, penguatan kualitas layanan kuliner, peningkatan kapasitas usaha akomodasi, pengembangan produk ekonomi kreatif, serta penambahan variasi atraksi wisata perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan kepariwisataan daerah guna meningkatkan nilai belanja wisatawan dan memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

$$\%\ \text{Pertumbuhan}\ \textit{Spending of Money} = \frac{\mathbf{297.990 - 297.255}}{\mathbf{297.255}} \times \mathbf{100\%} = \mathbf{0,25\%}$$

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Pertumbuhan *Spending of Money*	3,5%	0,25%	7.14%	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel perbandingan kinerja, target persentase pertumbuhan *spending of money* pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 3,5%, sedangkan realisasi yang dicapai hanya sebesar 0,25%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 7,14% dan termasuk dalam kategori sangat rendah.

Rendahnya capaian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara target yang ditetapkan dengan realisasi di lapangan. Meskipun terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan, namun peningkatan tersebut relatif sangat kecil sehingga belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan nilai belanja wisatawan belum berjalan optimal. Rendahnya realisasi pertumbuhan *spending of money* juga mencerminkan bahwa daya tarik destinasi, variasi atraksi wisata, serta lama tinggal wisatawan masih belum cukup kuat untuk mendorong peningkatan pengeluaran secara signifikan.

Selain itu, capaian yang sangat rendah ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti penurunan jumlah kunjungan wisatawan, keterbatasan aksesibilitas, serta belum optimalnya pengembangan produk wisata dan ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan pengeluaran wisatawan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi (%)				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1,93%	0,2%	0,3%	0,25%	42,88%	5,71%	10%	7.14%

Berdasarkan data realisasi dan capaian kinerja tahun 2022–2025, terlihat bahwa kinerja indikator persentase pertumbuhan *spending of money* mengalami fluktuasi dan cenderung berada pada tingkat yang rendah.

Realisasi kinerja pada tahun 2022 tercatat sebesar 1,93% dengan capaian 42,88%, yang menunjukkan kinerja relatif lebih baik dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan, dimana realisasi hanya sebesar 0,2% dengan capaian 5,71%.

Pada tahun 2024, realisasi sedikit meningkat menjadi 0,3% dengan capaian 10%, namun peningkatan tersebut belum signifikan dan masih berada pada kategori rendah. Selanjutnya pada tahun 2025, realisasi kembali menurun menjadi 0,25% dengan capaian 7,14%, yang menunjukkan bahwa kinerja indikator ini belum stabil dan belum menunjukkan tren peningkatan yang konsisten.

Secara keseluruhan, tren realisasi menunjukkan bahwa pertumbuhan *spending of money* berada pada level yang sangat rendah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan pengeluaran wisatawan belum berjalan optimal dan belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja.

Sementara itu, capaian kinerja juga menunjukkan tren yang menurun dibandingkan tahun 2022, meskipun sempat mengalami sedikit perbaikan pada tahun 2024. Namun, capaian pada tahun 2025 kembali mengalami penurunan, sehingga memperlihatkan bahwa target yang ditetapkan masih belum dapat dicapai secara optimal.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
0,25%	4%	6,25%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RPD tahun 2026, terlihat bahwa realisasi indikator persentase pertumbuhan *spending of money* sebesar 0,25%, masih jauh di bawah target akhir yang ditetapkan sebesar 4%. Tingkat capaian terhadap target akhir RPD tersebut baru mencapai 6,25%.

Rendahnya capaian ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara kondisi kinerja saat ini dengan target yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Dengan capaian yang masih sangat rendah, diperlukan upaya percepatan yang signifikan agar target akhir RPD dapat tercapai.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan *spending of money* belum berjalan optimal, baik dari sisi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan maupun peningkatan nilai belanja per wisatawan.

Jika tidak dilakukan intervensi yang lebih kuat dan terarah, maka target akhir sebesar 4% berpotensi sulit untuk dicapai.

Selain itu, rendahnya realisasi juga mencerminkan bahwa daya tarik destinasi wisata, variasi produk wisata, serta kualitas layanan pendukung belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan pengeluaran wisatawan secara signifikan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
0,25%	-	-

Berdasarkan data yang tersedia, realisasi indikator persentase pertumbuhan *spending of money* Kota Pariaman pada tahun 2025 adalah sebesar 0,25%. Namun demikian, tidak terdapat data pembanding yang sejenis baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota lainnya.

Hal ini disebabkan karena indikator *spending of money* belum menjadi indikator yang terstandarisasi secara nasional maupun regional, serta metode pengukuran dan sumber data yang digunakan dapat berbeda-beda pada masing-masing daerah. Selain itu, penghitungan indikator ini umumnya berbasis pada survei atau asumsi lokal yang tidak selalu dilakukan secara seragam di setiap wilayah.

Dengan demikian, realisasi indikator *spending of money* Kota Pariaman tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota lainnya.

Meskipun tidak tersedia data pembanding eksternal, capaian indikator ini tetap dapat dievaluasi secara internal dengan membandingkan terhadap target yang telah ditetapkan serta tren kinerja dari tahun ke tahun, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan kinerja sektor pariwisata di Kota Pariaman.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

Dalam upaya pencapaian target peningkatan pengeluaran wisatawan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1) Keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas transportasi
Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya perjalanan menuju destinasi wisata serta menurunkan minat kunjungan wisatawan.
2) Terbatasnya atraksi wisata berbayar dan wahana rekreasi
Kurangnya variasi aktivitas wisata menyebabkan wisatawan memiliki pilihan terbatas untuk melakukan pengeluaran tambahan selama berkunjung.
3) Ketersediaan dan kualitas akomodasi yang belum optimal
Hal ini berdampak pada rendahnya lama tinggal (*length of stay*) wisatawan, sehingga pengeluaran wisatawan menjadi terbatas.
4) Promosi pariwisata yang belum maksimal
Pemanfaatan platform digital dan penguatan branding destinasi masih belum optimal dalam menarik wisatawan.
5) Belum terintegrasinya paket wisata
Kurangnya integrasi antar destinasi dan layanan wisata menyebabkan wisatawan tidak memiliki banyak pilihan aktivitas selama kunjungan.

Selain kendala internal, terdapat pula faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi capaian kinerja, yaitu:

1) Faktor eksternal (force majeure)
Seperti perubahan cuaca dan potensi bencana alam yang berdampak pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan.
2) Fluktuasi daya beli masyarakat
Kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil mempengaruhi kemampuan wisatawan dalam melakukan pengeluaran.
3) Kurangnya inovasi produk wisata
Produk wisata yang kurang variatif dan inovatif belum mampu meningkatkan minat belanja wisatawan.

4) Belum optimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya masih perlu ditingkatkan.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman telah dan akan melakukan beberapa upaya strategis, yaitu:

1) Meningkatkan lama tinggal wisatawan (*length of stay*) melalui penyusunan paket wisata terintegrasi.
2) Mendorong peningkatan belanja wisatawan (*tourist spending*) melalui pengembangan produk ekonomi kreatif dan kuliner khas daerah.
3) Mengembangkan dan diversifikasi atraksi wisata, termasuk wisata budaya, bahari, dan event pariwisata.
4) Meningkatkan kualitas promosi pariwisata, terutama melalui media digital dan kerja sama dengan pelaku industri pariwisata.
5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata, termasuk akomodasi dan fasilitas pendukung.

Untuk mendukung pencapaian sasaran peningkatan pengeluaran wisatawan, dilaksanakan program dan kegiatan berikut:

1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
   - Penataan dan revitalisasi kawasan objek wisata unggulan
   - Pembangunan dan pengembangan wahana rekreasi
   - Peningkatan sarana dan prasarana destinasi
2) Program Pemasaran Pariwisata
   - Pelaksanaan event/festival budaya dan pariwisata
   - Promosi digital melalui media sosial dan platform pariwisata
   - Kerja sama promosi dengan travel agent dan stakeholder terkait
3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
   - Pembinaan dan pelatihan pelaku UMKM
   - Pengembangan produk souvenir khas daerah
   - Peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal
4) Program Peningkatan Aksebilitas Pariwisata
   - Fasilitasi kerjasama transportasi wisata

- Integrasi layanan transportasi dengan destinasi wisata

5) Program Pengembangan SDM Pariwisata
   - Pelatihan dan sertifikasi pelaku pariwisata
   - Peningkatan kapasitas pengelola destinasi

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
% Pertumbuhan *Spending of Money*	Program Penunjang Urusan Pemerintah	5.466.464.828	5.025.478.933	91,23%	Menunjang
	Program Pengembangan Kebudayaan	919.792.831	883.041.976	96%	Menunjang
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	29.797.200	29.797.200	100%	Menunjang
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	982.500	982.500	100%	Menunjang
	Program Pengelolaan Permuseuman	23.867.000	23.042.000	96,54%	Menunjang
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	479.838.416	443.592.102	91,83%	Menunjang
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melaui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekakyaan	5.815.000	890.000	15,31%	Tidak Menunjang

	Intelektual				
	Program Pemasaran Pariwisata	186.263.840	174.932.174	93,96%	Menunjang
	Progam Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	68.503.100	1.590.000	2,32%	Tidak Menunjang

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sasaran Strategis 7 yaitu meningkatnya produktivitas sektor pariwisata, sebagian besar program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman telah memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian indikator persentase pertumbuhan *spending of money*. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat realisasi anggaran pada beberapa program utama yang tergolong menunjang, seperti Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi sebesar 91,23%, Program Pengembangan Kebudayaan sebesar 96%, Program Pengembangan Kesenian Tradisional dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang mencapai 100%, serta Program Pengelolaan Permuseuman sebesar 96,54%. Selain itu, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dan Program Pemasaran Pariwisata juga menunjukkan realisasi yang tinggi masing-masing sebesar 91,83% dan 93,96%.

Program-program tersebut secara umum telah berkontribusi dalam meningkatkan daya tarik destinasi wisata, memperkuat promosi pariwisata, serta mendukung pengembangan sektor budaya dan ekonomi lokal. Namun demikian, meskipun realisasi anggaran relatif tinggi, dampaknya terhadap peningkatan nilai *spending of money* masih belum optimal.

Di sisi lain, terdapat beberapa program yang dinilai belum menunjang pencapaian kinerja, yaitu Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan realisasi sebesar 15,31%, serta Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang

hanya terealisasi sebesar 2,32%. Rendahnya realisasi pada program-program tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan belum berjalan optimal, sehingga belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pengeluaran wisatawan.

Padahal, program yang berkaitan dengan ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai tambah produk wisata serta mendorong peningkatan belanja wisatawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar program telah berjalan baik dari sisi penyerapan anggaran, namun belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan hasil atau *outcome*, khususnya dalam mendorong peningkatan *spending of money*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program belum sepenuhnya selaras dengan capaian indikator kinerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pengeluaran wisatawan serta peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar lebih berfokus pada hasil yang ingin dicapai.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
% Pertumbuhan Spending of Money	Rp7.181.324.715	Rp6.583.346.885	7,14%	−84,54 %	0	Tidak Efisien

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE} = \frac{(\mathbf{7.181.324.715} \times \mathbf{0,0714}) - \mathbf{6.583.346.8850}}{\mathbf{7.181.324.715}} \boldsymbol{x}\ \mathbf{100}\%$$

$$\boldsymbol{TE} = -\mathbf{84,54}\%$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%
- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Nilai Efisiensi = $-84{,}54\% < -20\% \rightarrow \text{Nilai Efisiensi} = 0$

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi, diperoleh nilai sebesar -84,54%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran masih sangat rendah. Dengan mengacu pada ketentuan konversi nilai efisiensi, dimana tingkat efisiensi kurang dari -20% dikategorikan memiliki nilai efisiensi sebesar 0, maka nilai efisiensi pada indikator ini adalah 0 atau termasuk dalam kategori tidak efisien.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran belum mampu menghasilkan capaian kinerja yang optimal. Meskipun realisasi anggaran tergolong tinggi, namun capaian kinerja indikator persentase pertumbuhan *spending of money* hanya mencapai 7,14%, sehingga output yang dihasilkan belum sebanding dengan besarnya sumber daya yang telah digunakan.

Rendahnya tingkat efisiensi ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (*outcome*), melainkan masih cenderung berfokus pada penyerapan anggaran (*output*). Selain itu, terdapat beberapa program yang memiliki realisasi rendah dan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pengeluaran wisatawan.

Dengan demikian, diperlukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran, serta penguatan pada kegiatan yang secara langsung berdampak terhadap peningkatan *spending of money*. Upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran menjadi penting agar sumber daya yang tersedia dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

11. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi

Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur perkembangan dan dinamika investasi di daerah dari tahun ke tahun. Indikator ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kemudahan berusaha, serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di wilayah Kota Pariaman.

Pertumbuhan realisasi investasi dihitung dengan membandingkan nilai realisasi investasi pada tahun berjalan dengan nilai realisasi investasi pada tahun sebelumnya. Peningkatan persentase pertumbuhan menunjukkan adanya peningkatan aktivitas penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Target Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan daerah, dengan mempertimbangkan capaian realisasi investasi pada tahun sebelumnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, serta kebijakan nasional di bidang penanaman modal. Penetapan target ini juga selaras dengan upaya

Pemerintah Kota Pariaman dalam mendukung percepatan investasi melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha, serta penguatan promosi potensi investasi daerah.

Realisasi investasi Kota Pariaman Tahun 2025 diperoleh dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Data tersebut kemudian diolah dan diverifikasi untuk memastikan akurasi dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dibandingkan dengan realisasi investasi tahun sebelumnya, capaian realisasi investasi Tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif, yang mengindikasikan bahwa kebijakan dan program fasilitasi penanaman modal yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif. Pencapaian ini juga menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Pariaman untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal serta memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.

Rumus

$$\text{Persentase Pertumbuhan: } = \frac{\text{Realisasi Investasi Tahun Sekarang} - \text{Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya}}{\text{Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	2.8%	6.5%	232.14%	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut, indikator Persentase Pertumbuhan Investasi pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 2.8 %. Adapun realisasi pertumbuhan investasi yang dicapai sebesar 6,5 %, yang dihitung berdasarkan perbandingan realisasi

investasi Tahun 2025 terhadap realisasi investasi Tahun 2024 sebagai tahun dasar.

Realisasi investasi Kota Pariaman pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp 53,8 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi investasi Tahun 2024, realisasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan nilai investasi yang berdampak pada pertumbuhan realisasi investasi secara positif.

Dengan realisasi pertumbuhan sebesar 6,5 persen tersebut, capaian indikator Persentase Pertumbuhan Investasi mencapai 232.14 persen dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan realisasi investasi pada Tahun 2025 melampaui target yang direncanakan.

Tingginya capaian kinerja ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan program penanaman modal yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif, khususnya melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha serta pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, termasuk pendampingan dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) baik melalui kegiatan jemput bola maupun pendampingan di kantor bagi pelaku usaha yang mengalami kendala.

Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Pariaman untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja penanaman modal secara berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun-tahun berikutnya.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi (%)				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
-22,07	-0,11	-3,16	6,5	-4.597%	-23,40	-121,53	232,14%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi pertumbuhan investasi pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,5%, sedangkan target akhir yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026 sebesar 3%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja telah mencapai 216,67% dari target akhir RPD.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja pertumbuhan investasi telah melampaui target yang ditetapkan. Secara substansial, target akhir RPD untuk indikator ini telah tercapai lebih awal dari periode yang direncanakan. Kondisi ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan strategi peningkatan investasi yang telah dilaksanakan, serta menunjukkan terjaganya iklim investasi yang kondusif di daerah.

Ke depan, diperlukan upaya untuk menjaga konsistensi kinerja serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan investasi agar tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.Perkembangan kinerja Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Kota Pariaman dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Berdasarkan data realisasi kinerja, pada Tahun 2022 pertumbuhan investasi tercatat sebesar -22,07%, yang menunjukkan adanya penurunan realisasi investasi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama, capaian kinerja tercatat sebesar -4.597%, yang mengindikasikan bahwa realisasi pertumbuhan investasi jauh berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2023, kondisi pertumbuhan investasi mulai menunjukkan perbaikan meskipun masih berada pada angka negatif, yaitu sebesar -0,11% dengan capaian kinerja sebesar -23,40%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi investasi masih belum sepenuhnya mampu mencapai target yang direncanakan.

Selanjutnya pada Tahun 2024, pertumbuhan realisasi investasi kembali mengalami penurunan dengan realisasi sebesar -3,16% dan capaian kinerja sebesar -121,53%, yang menunjukkan bahwa realisasi investasi masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Namun demikian, pada Tahun 2025 terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Realisasi pertumbuhan investasi tercatat sebesar 6,5%, dengan capaian kinerja mencapai 232,14% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penanaman modal pada Tahun 2025 tidak hanya mengalami perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi juga berhasil melampaui target yang direncanakan.

Secara umum, tren kinerja selama periode 2022–2025 menunjukkan bahwa meskipun pada beberapa tahun sebelumnya pertumbuhan investasi mengalami penurunan, namun pada Tahun 2025 terjadi pemulihan dan peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim usaha dan investasi, seperti peningkatan pelayanan perizinan berusaha, fasilitasi investasi, serta pendampingan kepada pelaku usaha, mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan realisasi investasi di Kota Pariaman.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
6.5%	3 %	216,67%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi pertumbuhan investasi pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,5%, sedangkan target akhir yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026 sebesar 3%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja telah mencapai 216,67% dari target akhir RPD.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja pertumbuhan investasi telah melampaui target yang ditetapkan. Secara substansial, target akhir RPD untuk indikator ini telah tercapai lebih awal dari periode yang direncanakan. Kondisi ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan strategi peningkatan investasi yang telah dilaksanakan, serta menunjukkan terjaganya iklim investasi yang kondusif di daerah.

Ke depan, diperlukan upaya untuk menjaga konsistensi kinerja serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan investasi agar tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
6.5%	12,7 %	51,18%

Berdasarkan perbandingan realisasi pertumbuhan investasi Tahun 2025 dengan capaian tingkat nasional, diketahui bahwa realisasi daerah sebesar 6,5%, sementara capaian nasional mencapai 12,7%. Dengan demikian, tingkat capaian daerah terhadap nasional adalah sebesar 51,18%.

Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi daerah masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan strategi promosi, peningkatan kemudahan perizinan, serta optimalisasi potensi unggulan daerah guna mendorong peningkatan realisasi investasi agar lebih kompetitif dan mampu mendekati bahkan melampaui capaian nasional. Kedepan, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan investasi sehingga kesenjangan dengan capaian nasional dapat diminimalkan.

2) Perbandingan dengan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi 2025	Realisasi Provinsi Sumbar 2025	Capaian
6.5%	2,60 %	250%

Berdasarkan data realisasi investasi Provinsi Sumatera Barat, nilai investasi tahun 2025 sebesar Rp16,18 triliun, meningkat dari tahun 2024 sebesar Rp15,77 triliun, sehingga pertumbuhan investasi provinsi tercatat sebesar 2,60%.

Sementara itu, pertumbuhan investasi Kota Pariaman pada tahun 2025 mencapai 6,5%. Dengan demikian, laju pertumbuhan investasi Kota Pariaman berada di atas rata-rata pertumbuhan Provinsi Sumatera Barat, yaitu mencapai 250% dibandingkan pertumbuhan provinsi Sumatera Barat atau sekitar 2,5 kali lebih tinggi.

Capaian ini menunjukkan bahwa secara persentase pertumbuhan, kinerja investasi Kota Pariaman tergolong progresif dan kompetitif di tingkat provinsi. Kondisi tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan daerah dalam mendorong peningkatan investasi serta optimalisasi potensi unggulan daerah. Ke depan,

diperlukan upaya untuk mempertahankan tren pertumbuhan ini agar tetap berkontribusi signifikan terhadap capaian investasi di tingkat provinsi maupun nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

Keberhasilan pencapaian target pertumbuhan investasi Tahun 2025 tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Pelaksanaan promosi investasi pada tahun 2025 telah dilakukan melalui 5 media informasi dan promosi, yaitu Facebook, Instagram, YouTube, Website, dan SIPOPEI. Jumlah media promosi tersebut bertambah dibanding tahun sebelumnya yang hanya menggunakan 4 media, sehingga penyebaran informasi potensi dan peluang investasi daerah menjadi lebih luas dan mudah diakses oleh calon investor.
2. Adanya inovasi KOPI (Kartu Potensi Investasi) yang mempermudah calon investor memperoleh informasi potensi investasi secara cepat, akurat, dan terintegrasi melalui barcode/QR code.
3. Pendampingan aktif kepada pelaku usaha dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga meningkatkan kepatuhan pelaporan dan ketepatan data realisasi investasi.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian investasi pada tahun berikutnya, beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Penguatan promosi investasi secara langsung (offline) melalui kegiatan temu mitra (business matching), forum investasi, dan promosi potensi unggulan daerah.
2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada pelaku usaha terkait tata cara dan kewajiban penyampaian LKPM guna meningkatkan kualitas pelaporan investasi.
3. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan percepatan proses administrasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ramah investor.

4. Penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pertumbuhan investasi Kota Pariaman dapat terus meningkat secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya iklim usaha dan investasi					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.000.000	2.000.000	100%	Menunjang
	Program Promosi Penanaman Modal	27.890.000	22.523.000	80,75%	Menunjang

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif” dengan indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Investasi, Pemerintah Kota Pariaman melaksanakan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Promosi Penanaman Modal.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal memiliki pagu anggaran sebesar Rp2.000.000 dengan realisasi sebesar Rp2.000.000 atau capaian 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan dalam program telah terlaksana sesuai dengan perencanaan dan memberikan kontribusi langsung dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan demikian, program ini dikategorikan sebagai program yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja.

Sementara itu, Program Promosi Penanaman Modal memiliki pagu anggaran sebesar Rp27.890.000 dengan realisasi sebesar Rp22.523.000 atau capaian sebesar 80,75 persen. Tidak tercapainya

realisasi 100 persen disebabkan oleh adanya pembatalan kegiatan promosi investasi Manggaleh Babelok yang direncanakan akan diselenggarakan di Kota Medan. Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya kondisi bencana, sehingga sebagian anggaran tidak dapat direalisasikan. Meskipun demikian, secara umum program promosi tetap memberikan kontribusi dalam memperkenalkan potensi daerah dan menarik minat investor, sehingga tetap dikategorikan sebagai program yang menunjang pencapaian sasaran strategis.

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, direncanakan adanya penambahan pagu anggaran pada Program Pengendalian Penanaman Modal, mengingat program ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan realisasi investasi. Kegiatan dalam program ini meliputi pengawasan pelaksanaan penanaman modal, fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha, serta pelaksanaan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait tata cara penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui sistem OSS. Penguatan fungsi pengendalian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, memperbaiki kualitas data investasi, serta mendorong peningkatan realisasi investasi secara berkelanjutan.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya iklim usaha dan investasi						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	29.890.000	24.523.000	326,5%	37,96%	100	Persentase Peningkatan Investasi

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100}\%$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE} = \frac{(\mathbf{29.890.000}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{1.2}) - \mathbf{24.523.000}}{\mathbf{29.890.000}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100}\%$$

$$\boldsymbol{TE} = \mathbf{37,96}\%$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%
- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

Nilai Efisiensi = $37{,}96\% \geq 20\% \rightarrow \text{Nilai Efisiensi} = 100$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, indikator Persentase Peningkatan Investasi memiliki capaian kinerja sebesar 326,5 persen. Namun sesuai ketentuan perhitungan efisiensi, capaian kinerja yang digunakan dibatasi maksimal sebesar 120 persen.

Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp29.890.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp24.523.000.Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 37,96 persen. Selanjutnya setelah dikonversi ke dalam skala 0–100, diperoleh nilai efisiensi sebesar 100, yang termasuk dalam kategori sangat efisien.

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian peningkatan investasi yang sangat tinggi dapat diraih dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan program dinilai sangat efisien dalam mendukung terwujudnya iklim investasi yang kompetitif.

12. Angka Kemiskinan

Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan adalah indikator penting dalam analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Berdasarkan indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa ada penduduk dengan pendapatan terendah, dan sebagian dari mereka tergolong miskin karena penghasilan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Menurut BPS, penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata -r ata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dibagi menjadi dua kategori, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Ada perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan di perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kalori per kapita per hari, sementara GKNM mencakup kebutuhan sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Penduduk di atas garis kemiskinan dianggap tidak miskin (sejahtera), yaitu mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran bulanan di atas garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kota Pariaman terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, nilai rata-rata pengeluaran per kapita adalah Rp.480.028/kapita/bulan, meningkat menjadi Rp.495.386/kapita/bulan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, garis kemiskinan terus meningkat menjadi Rp.522.932/kapita/bulan, kemudian meningkat lagi di tahun 2023 dan 2024 masing- masing menjadi Rp576.455/kapita/bulan dan Rp609.286/kapita/bulan serta di tahun 2025 menjadi Rp. Pada tahun 2025 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, garis kemiskinan di Kota Pariaman tercatat sebesar Rp634.304,00 per kapita per bulan.

Menghitung angka kemiskinan melibatkan beberapa langkah, dimulai dengan menentukan garis kemiskinan, yaitu pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, lalu membandingkannya

dengan pengeluaran per kapita penduduk, dan menghitung persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Berikut adalah langkah-langkah lebih detail:

1. Menentukan Garis Kemiskinan (GK):
    a. Kebutuhan Pokok:

    Garis kemiskinan (GK) adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, yaitu kebutuhan makanan (setara 2100 kkal/kapita/hari) dan kebutuhan non-makanan.

    b. Pengeluaran Minimum:

    GK mencakup pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan dan non-makanan, yang digunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa yang dianggap miskin.

    c. Metode BPS:

    Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk mengumpulkan data pengeluaran dan harga komoditas untuk menghitung GK.
2. Menghitung Pengeluaran Per Kapita:
    a. Pengeluaran Total: Hitung total pengeluaran yang dilakukan oleh setiap rumah tangga.
    b. Pengeluaran Per Kapita: Bagi total pengeluaran rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga untuk mendapatkan pengeluaran per kapita.
3. Menentukan Penduduk Miskin:
    a. Membandingkan dengan GK: Bandingkan pengeluaran per kapita setiap individu dengan garis kemiskinan (GK).
4. Penduduk Miskin: Jika pengeluaran per kapita seseorang di bawah GK, maka orang tersebut dianggap miskin.
5. Menghitung Persentase Penduduk Miskin:
    a. Rumus: Persentase penduduk miskin dihitung dengan membagi jumlah penduduk miskin dengan jumlah total penduduk, lalu dikalikan 100%.
    b. Rumus Matematis: (Jumlah penduduk miskin / Jumlah total penduduk) x 100%.

6. Indikator Tambahan:
    a. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1): Menunjukkan rata-rata selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan.
    b. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2): Menunjukkan rata-rata selisih kuadrat pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan.
7. Head Count Index (HCI-P0): Persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

    Contoh:
    a. Jika garis kemiskinan adalah Rp 263.301 per bulan (setara 2100 kkal/hari), dan seorang memiliki pengeluaran per kapita Rp 200.000 per bulan, maka orang tersebut dianggap miskin.
    b. Jika dari 100 orang, 20 orang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan, maka persentase penduduk miskin adalah 20%.

Data pengeluaran per kapita yang disesuaikan dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan penjelasan:

1. Susenas merupakan sumber data rata-rata pengeluaran per kapita setahun dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota.
2. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP).
3. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah.
4. Pengeluaran per kapita memberikan gambaran tingkat daya beli masyarakat.
5. Pengeluaran per kapita dapat dipengaruhi oleh pendapatan perkapita yang dihasilkan masyarakat.
6. Pengeluaran per kapita digunakan untuk mengukur standar hidup manusia.
7. Pengeluaran per kapita menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk.

8. Semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, angka kemiskinan Kota Pariaman pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,83 persen. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,43 persen poin dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 4,26 persen. Penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta menggambarkan bahwa berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 10 Menurunnya Angka Kemiskinan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Angka Kemiskinan	3,76	3,83	98,17%	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator penurunan angka kemiskinan , diketahui bahwa pada target Tahun 2025 ditetapkan sebesar 3.76%, sedangkan realisasi kinerja berada pada Tahun 2025 adalah 3.83%. Berdasarkan kondisi tersebut, tingkat capaian kinerja yang diperoleh untuk menurunkan angka kemiskinan Kota Pariaman sudah mencapai 98, 17 %.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja penurunan kemiskinan telah mendekati target dengan tingkat efektivitas sebesar 98,17%, meskipun belum sepenuhnya mencapai sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Secara umum, kondisi ini mencerminkan konsistensi Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan strategi pengentasan kemiskinan melalui:

1) Penguatan program perlindungan sosial yang tepat sasaran
2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal
3) Dukungan terhadap UMKM dan ekonomi kreatif
4) Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas SDM

Adapun faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pencapaian target antara lain dinamika ekonomi makro, tekanan inflasi terhadap kebutuhan pokok, serta kerentanan kelompok masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
4.13%	4.20%	4.26%	3.83%	94,10%	80%	91,32%	98,17%

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja angka kemiskinan Kota Pariaman selama periode tahun 2022–2025, terlihat bahwa persentase angka kemiskinan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 angka kemiskinan tercatat sebesar 4,13 persen, kemudian meningkat menjadi 4,20 persen pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 4,26 persen pada tahun 2024. Selanjutnya pada tahun 2025 angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 3,83 persen.

Dari sisi capaian kinerja, pada tahun 2022 capaian tercatat sebesar 94,10 persen, kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 80 persen. Pada tahun 2024 capaian kembali meningkat menjadi 91,32 persen, dan pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 98,17 persen.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi peningkatan angka kemiskinan pada periode 2022–2024, namun pada tahun 2025 pemerintah daerah berhasil menurunkan angka kemiskinan secara cukup signifikan. Hal ini juga tercermin dari meningkatnya capaian kinerja pada tahun 2025 yang berada pada kategori sangat tinggi, sehingga menunjukkan adanya perbaikan dalam efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Pariaman.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
3.83%	3.55%	92,11%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026, indikator angka kemiskinan menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 tercatat sebesar 3,83 persen, sedangkan target akhir RPD tahun 2026 ditetapkan sebesar 3,55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan pada tahun 2025 masih berada di atas target akhir yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja menggunakan metode indikator yang bersifat negatif (semakin rendah nilai indikator menunjukkan kinerja yang semakin baik), diperoleh tingkat capaian sebesar 92,11 persen. Nilai capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja penurunan angka kemiskinan sudah mendekati target yang ditetapkan dalam RPD, meskipun masih diperlukan upaya yang lebih optimal untuk mencapai target akhir pada tahun 2026.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

   1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
3.83	8.25	215%

Dengan capaian angka 3,83 yang dicapai Kota Pariaman, tingkat kemiskinan Kota Pariaman berada jauh di bawah rata-rata nasional. Selisih sebesar 4,42 poin ini menggambarkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman relatif lebih baik dibandingkan rata-rata kondisi nasional.

Capaian sebesar 215 persen menunjukkan bahwa kinerja penanggulangan kemiskinan di Kota Pariaman melampaui dua kali lipat dibandingkan posisi nasional secara proporsional. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan daerah dalam mengendalikan dan menurunkan angka kemiskinan melalui pendekatan yang terintegrasi, meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi produktif, serta intervensi terfokus pada wilayah kantong kemiskinan.

Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa meskipun secara nasional masih terdapat tantangan struktural seperti ketimpangan

ekonomi, inflasi, dan kerentanan sektor informal, Kota Pariaman mampu menjaga stabilitas sosial ekonomi daerah secara lebih terkendali.

2) Perbandingan dengan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi 2025	Realisasi Provinsi Sumbar 2025	Capaian
3.83	5.35	140%

Secara substantif, angka kemiskinan Kota Pariaman yang lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat mengindikasikan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman relatif lebih baik. Selisih sebesar 1,52 poin menunjukkan adanya keunggulan kinerja daerah dalam upaya pengendalian dan penurunan kemiskinan.

Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pariaman, antara lain melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berbasis pemberdayaan ekonomi, serta penanganan wilayah kantong kemiskinan secara lebih terfokus. Selain itu, karakteristik wilayah Kota Pariaman yang lebih kecil dan terkonsentrasi dibanding kabupaten/kota lain di Sumatera Barat memungkinkan intervensi program lebih terarah dan terukur.

Meskipun demikian, capaian ini tetap perlu dipertahankan secara konsisten dengan memperhatikan dinamika ekonomi regional dan nasional. Tantangan seperti inflasi, fluktuasi harga kebutuhan pokok, serta kerentanan kelompok miskin terhadap guncangan ekonomi tetap harus diantisipasi agar keunggulan relatif terhadap rata-rata provinsi dapat terus dijaga.

Secara keseluruhan, posisi Kota Pariaman yang berada di bawah rata-rata kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan menjadi indikator positif bagi keberlanjutan pembangunan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

3) Perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Realisasi 2025 (%)
1	Kota Sawahlunto	2.72
2	Kota Solok	2.91
3	Kota Padang	3.63
4	Kabupaten Tanah Datar	3.59
5	Kota Bukittinggi	3.78
6	Kota Pariaman	3.83
7	Kabupaten Dharmasraya	4.61
8	Kota Payakumbuh	4.95
9	Kota Padang Panjang	4.97
10	Kabupaten Sijunjung	5.15
11	Kabupaten Padang Pariaman	5.86
12	Kabupaten Agam	5.97
13	Kabupaten Lima Puluh Kota	6.01
14	Kabupaten Pasaman	6.02
15	Kabupaten Pasaman Barat	6.03
16	Kabupaten Solok	6.52
17	Kabupaten Pesisir Selatan	6.52
18	Kabupaten Solok Selatan	6.00
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	13.22

Berdasarkan perbandingan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, Kota Pariaman mencatat angka kemiskinan sebesar 3,83 persen. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat, angka tersebut tergolong relatif rendah. Dari total 19 kabupaten/kota, Kota Pariaman berada pada peringkat ke-6 dengan angka kemiskinan terendah.

Beberapa daerah dengan tingkat kemiskinan lebih rendah dari Kota Pariaman antara lain Kota Sawahlunto (2,72 persen), Kota Solok (2,91 persen), Kabupaten Tanah Datar (3,59 persen), Kota Padang (3,63 persen), dan Kota Bukittinggi (3,78 persen). Sementara itu, sebagian besar kabupaten lainnya memiliki tingkat

kemiskinan yang lebih tinggi dari Kota Pariaman, bahkan terdapat daerah dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 13,22 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Pariaman relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar daerah di Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah memberikan dampak yang cukup positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, upaya penurunan angka kemiskinan tetap perlu terus ditingkatkan agar Kota Pariaman dapat mencapai target pembangunan daerah serta mempertahankan bahkan meningkatkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang rendah di Provinsi Sumatera Barat.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

No	Kendala/Hambatan	Solusi/Upaya yang dilakukan
1.	Kerentanan Kelompok Miskin Ekstrem Pada level kemiskinan yang sudah relatif rendah (di bawah 5 persen), sebagian besar yang tersisa adalah kelompok miskin ekstrem dan rumah tangga rentan. Kelompok ini sangat sensitif terhadap guncangan ekonomi seperti kenaikan harga bahan pokok, sakit, kehilangan pekerjaan, atau penurunan pendapatan sektor informal.	• penguatan perlindungan sosial adaptif agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, khususnya bagi rumah tangga miskin ekstrem. • Meningkatkan pemberdayaan ekonomi produktif berbasis potensi lokal • pendampingan intensif dan kolaborasi lintas sector semakin diperkuat.

2.	Fluktuasi Harga dan Tekanan Inflasi Kenaikan harga kebutuhan pokok dan komponen Garis Kemiskinan dapat menyebabkan rumah tangga yang sebelumnya berada sedikit di atas garis kemiskinan kembali masuk kategori miskin. Kondisi ini membuat penurunan angka kemiskinan menjadi lebih sulit dipertahankan secara konsisten.	• Penguatan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pangan • Perlindungan Sosial Adaptif yang responsif terhadap kenaikan harga • Penguatan Daya Beli melalui Peningkatan Pendapatan melalui Program pemberdayaan UMKM, penguatan sektor perdagangan kecil, serta dukungan bagi nelayan dan pelaku usaha mikro di Kota Pariaman. • Pengembangan Ketahanan Pangan Rumah Tangga • Monitoring dan Evaluasi Berkala •
3.	Dominasi Sektor Informal Sebagian masyarakat Kota Pariaman bekerja pada sektor informal seperti perdagangan kecil, nelayan, dan buruh harian dengan pendapatan yang tidak tetap. Ketidakstabilan pendapatan ini menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan peningkatan kesejahteraan.	• Penguatan Akses Permodalan dan Legalitas Usaha • Peningkatan Keterampilan dan Diversifikasi Usaha • Penguatan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan

4.	Keterbatasan Anggaran dan Ruang Fiskal Daerah Kemampuan fiskal daerah yang terbatas membatasi perluasan program pemberdayaan dan perlindungan sosial. Intervensi harus dilakukan secara selektif dan sangat tepat sasaran agar tetap efektif.	• Penguatan Perencanaan Berbasis Data dan Prioritas • Integrasi dan Sinkronisasi Program Lintas Perangkat • Fokus pada Program Berdampak Tinggi *(High Impact Program)* seperti seperti pemberdayaan UMKM produktif, pelatihan keterampilan kerja, serta intervensi peningkatan pendapatan keluarga.
5.	Akurasi dan Dinamika Data Kemiskinan Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cepat menuntut pemutakhiran data secara berkala. Ketidaksesuaian data dapat memengaruhi ketepatan sasaran program dan efektivitas intervensi.	• Penguatan Pemanfaatan DTSEN dan Verifikasi serta Validasi di tingkat desa/keluarahan secara berkala.
6.	Kemiskinan Struktural dan Multidimensi Sebagian rumah tangga miskin menghadapi persoalan kompleks seperti rendahnya pendidikan, keterbatasan keterampilan, akses kerja terbatas, serta beban tanggungan tinggi. Kondisi ini memerlukan intervensi jangka panjang dan lintas sektor.	• Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan • Penguatan Pelatihan dan Sertifikasi Keterampilan • Perluasan Akses Kerja dan Usaha Produktif • Penguatan Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Sosial • Pendekatan Terpadu Berbasis Keluarga



Wali Kota Pariaman, Yota Balad secara langsung menyerahkan seragam sekolah gratis di SDN 07 Batang Kabuang, Kecamatan Pariaman Timur, Rabu (20/8/2025).



Wali Kota Pariaman Launching Program SAGA SAJA Plus



BPU lewat JKK dan JKM



Pemko Pariaman Apresiasi Pemerintah Pusat serahkan Bantuan Perbaikan Rumah Rusak akibat bencana hidrometeorologi

Faktor keberhasilan terhadap implementasi pengentasan kemiskinan di Kota Pariaman dapat dilihat melalui aspek:

1. Menurunnya Persentase Penduduk Miskin

   Tren angka kemiskinan di Kota Pariaman menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir hingga mencapai 3,83 persen pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan bahwa berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan mulai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Adanya Pemulihan dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat

   Pulihnya sektor perdagangan, UMKM, jasa, dan pariwisata turut mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Dukungan pemerintah melalui pemberdayaan ekonomi dan pengembangan

usaha masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menekan angka kemiskinan.

3. Adanya Penguatan Program Perlindungan Sosial

   Adanya optimalisasi bantuan sosial, jaminan kesehatan menyeluruh, bantuan pangan bagi masyarakat, serta dukungan bagi masyarakat rentan mampu menjaga daya beli masyarakat.

4. Adanya Peningkatan Ketepatan Sasaran Data Kemiskinan

   Pemanfaatan data kemiskinan yang lebih akurat dan terintegrasi membantu pemerintah dalam menentukan sasaran penerima program bantuan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, intervensi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Strategi yang akan dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan pada masa yang akan datang:

1. Indikator Pendidikan

   Program dan tujuan serta hasil yang ingin dicapai berkaitan Dengan indikator pendidikan antara lain:

   1) Program SAGA SAJA adalah program yang memberikan bantuan pembiayaan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar daerah. Melalui program ini, pemerintah kota berharap setiap keluarga di Pariaman memiliki minimal satu anggota yang mengenyam pendidikan tinggi, sehingga dapat menjadi penggerak perubahan dan peningkatan taraf hidup keluarga. SAGA SAJA tidak hanya memberikan bantuan secara finansial, tetapi juga menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi vokasi dan politeknik negeri, seperti Politeknik Negeri Padang, Politeknik ATI Padang, dan kampus-kampus lainnya, untuk menyalurkan peserta program secara langsung melalui jalur kemitraan. Dengan pendekatan ini, lulusan program SAGA SAJA diarahkan untuk memiliki keahlian vokasional dan daya saing tinggi di dunia kerja. Pada Tahun 2025 dan 2025, Program SAGA SAJA bertransformasi menjadi Program SAGA

SAJA PLUS. SAGA SAJA (Satu Keluarga Satu Sarjana) PLUS bertujuan Memberikan bantuan keuangan bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana. PLUS dari Program SAGA SAJA ini adalah :

a. Kuliah sambil mendapatkan pendidikan life skill yang di fasilitasi pemerintah daerah serta memperkuat program PLS di SKB PNF (sanggar kegiatan Belajar), seperti pelatihan Menjahit, tata rias, Kerajinan, otomotif, tata boga, tata busana, elektronika, digital skill.
b. Kuliah di perguruan tinggi dalam daerah tanpa meninggalkan aktivitas di keluarga(bekerja serta masih dapat membantu orang tua) sehingga tidak membebani keluarga selama melaksanakan perkuliahan(biaya kos, biaya hidup).
c. Perputaran APBD (keuangan daerah) yang di alokasikan untuk SAGA SAJA juga beredar dan dapat di manfaatkan masyarakat Kota Pariaman.

Manfaat Program ini adalah:

a. Meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu, mendorong generasi muda untuk berprestasi, dan mengurangi kesenjangan sosial- ekonomi.
b. Program ini dilakukan dalam bentuk bantuan perkuliahan bagi keluarga miskin agar mereka bisa kuliah tanpa meninggalkan aktivitas di keluarga(bekerja serta masih dapat membantu orang tua)
c. Memberdayakan perguruan tinggi lokal dengan menampung program SAGA SAJA PLUS.

2) Program pengembangan Kurikulum, dimana melalui program pengembangan kurikulum ini di harapkan dapat menghasilkan sebuah tujuan dimana terwujudnya pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas dari segi kualitas. Terwujudnya pendidikan berkualitas berefek pada Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

3) Program bimbingan belajar Sekolah Kedinasan untuk keluarga tidak mampu. Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak, kita dapat bersama-sama mewujudkan impian anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk meraih pendidikan yang lebih baik. program unggulan yang dapat diakomodir Pemerintah Daerah adalah;
   a. Kelas Bimbingan Intensif
      Mengadakan kelas bimbingan belajar gratis di sekolah-sekolah atau pusat pendidikan lokal yang difasilitasi oleh pemerintah.
   b. Mentorship dan Pembinaan Karakter
      Menyediakan program mentorship yang melibatkan alumni Sekolah Kedinasan atau profesional dari berbagai bidang.
   c. Beasiswa dan Bantuan Pendidikan
      Menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu yang berhasil lolos seleksi.
   d. Pelatihan Soft Skills
      Menyelenggarakan pelatihan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan kerja sama tim.
4) Program Pengelolaan Pendidikan, melalui program ini diharapkan angka putus sekolah di Kota Pariaman kedepan semakin berkurang sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan sumber daya manusia di Kota Pariaman.
5) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui program Membentuk Guru Unggul. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk penguatan pendidikan kearifan lokal dan agama Islam. Fasilitasi bagi guru yang mengajar kedua bidang tersebut sangat penting untuk memastikan mereka memiliki kompetensi

yang memadai dan memahami nilai-nilai yang diajarkan. Program yang akan dilakukan adalah:

a. Fasilitasi Guru Pendidikan Kearifan Lokal dan pendidikan Agama Islam dalam Program PPG
b. Fasilitasi MGMP Pada setiap jenjang pendidikan

   Fasilitasi guru dalam pendidikan kearifan lokal dan agama Islam melalui Program PPG adalah langkah strategis untuk menciptakan pendidikan yang berkarakter dan berkelanjutan. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan guru dapat memberikan pengajaran yang berkualitas dan relevan, membentuk generasi yang menghargai nilai-nilai lokal dan religius.

2. Indikator Kesehatan

   Program dan tujuan serta hasil yang ingin dicapai berkaitan Dengan indikator kesehatan yang berkorelasi langsung dengan kemiskinan, antara lain:

   1) Pelayanan Kesehatan Gratis dan Memaksimalkan fungsi RDS (Rumah Desa Sehat) Rumah Singgah dan Panti Rehabilitasi (RUMAH HARAPAN). Program ini merupakan Komitmen Pemerintah memberikan pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas kepada masyarakat, dengan memaksimalkan fungsi Rumah Desa Sehat, Rumah Singgah, dan Panti Rehabilitasi. Melalui fasilitas ini diharapkan mampu untuk memberikan layanan kesehatan terpadu, rehabilitasi, serta tempat perlindungan sementara bagi mereka yang membutuhkan. Dengan dukungan tenaga medis profesional dan fasilitas yang lengkap, Pemerintah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lingkungan yang sehat, dan membantu pemulihan mereka yang membutuhkan perawatan lebih lanjut. Berikut beberapa fasilitas kesehatan yang ditawarkan dalam program ini:

      a. Program Rehabilitasi Medis dan Sosial
      b. Penyuluhan Kesehatan dan Gaya Hidup Sehat
      c. Program Ibu dan Anak

d. Layanan Konseling dan Psikoterapi
e. Pendampingan Hukum dan Advokasi
f. Program Pemulihan Fisik dan Medis
g. Rumah Aman dan Perlindungan Sementara
h. Edukasi dan Pencegahan Kekerasan Seksual
i. Layanan Pendampingan Keluarga

2) Program Jaminan Kesehatan untuk memastikan bahwa seluruh penduduk, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa terbebani oleh biaya. Dalam pelaksanaannya, Jamkesda Kota Pariaman bersinergi dengan program nasional seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, guna mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) secara menyeluruh.
3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, melalui program ini permasalahan terkait stunting di Kota Pariaman dapat teratasi serta permasalahan terkait angka harapan hidup Kota Pariaman makin meningkat.
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, melalui program ini di harapkan dapat menjawab empat permasalahan pada bidang kesehatan, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Gizi buruk, dan Angka Harapan Hidup Kota Pariaman. Dengan adanya program peningkatan kapasitas SDM di bidang kesehatan ini diharapkan peningkatan SDM serta pemahaman akan pentingnya kesehatan sampai tingkat masyarakat terkecil dapat merubah prilaku di masayarakat betapa pentingnya penerapan pola hidup sehat.
5) Progam Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, melalui program ini bertujuan peningkatan usia harapan hidup yang berdampak pada hasil menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya gizi buruk serta yang tidak kalah

penting adalah meningkatnya jumlah angka harapan hidup di Kota Pariaman.

6) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, program ini memiliki tujuan Peningkatan cakupan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan serta peningkatan usia harapa hidup. Hal ini berkaitan dengan menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, gizi buruk semakin turun, dan angka harapan hidup semakin naik. Dengan peningkatan pembiayaan dan jaminan kesehatan serta peningkatan pemberdayaan di masyarakat dapat menciptakan kemandirian masarakat sampai tingkat basis terkecil dalam rangka peningkatan pemahaman di bidang kesehatan.

3. Indikator Ketenagakerjaan

Pada sektor ketenagakerjaan memiliki masalah besar terkait persentase pengangguran terbuka di Kota Pariaman tahun 2024 yaitu sebesar 5.32%. Oleh karena itu diperlukan solusi berupa program kerja di setiap organisasi perangkat daerah yang terkait langsung dengan masalah pengangguran, yakni;

1) Program Pusat Kreativitas Keluarga: Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga. Program ini adalah program Memberdayakan setiap rumah tangga yang tidak mampu dengan keterampilan dan dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

   Program ini bertujuan untuk memberdayakan setiap rumah tangga dengan keterampilan dan dukungan yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha kecil berbasis rumah. Inisiatif ini dirancang untuk menciptakan lapangan kerja mandiri, meningkatkan perekonomian lokal, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar secara efektif. Dengan fokus pada usaha yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, program ini diharapkan mampu mendorong kreativitas dan kemandirian ekonomi setiap keluarga, sekaligus memperkuat jejaring usaha mikro yang saling mendukung.

beberapa program yang bisa diusulkan dalam konsep "Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga":

a. Pelatihan Keterampilan Usaha:
b. Bantuan Modal Usaha
c. Pendampingan Bisnis
d. Program E-Commerce dan Digital Marketing
e. Pengadaan Peralatan Produksi
f. Akses Pasar dan Pameran Produk
g. Program Ramah Lingkungan
h. Sertifikasi Produk dan Legalitas Usaha
i. Koperasi atau Kelompok Usaha
j. Program Insentif Pajak

2) Program Perencanaan Tenaga Kerja bertujuan meningkatkan persentase pemenuhan perencanaan tenaga kerja, sehingga dapat menghasilkan peningkatan tenaga kerja yang terampil dan mandiri serta penyediaan tenaga kerja yang mampu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang ada saat ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan tenaga kerja yang terampil dan bersertifikat sehingga dapat berdaya saing dengan tenaga kerja di luar Kota Pariaman. Atas dasar tujuan tersebut dapat meningkatkan tenaga kerja terampil dan mandiri serta tenaga kerja yang mampu melek teknologi.
3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian merupakan program yang di rancang bertujuan untuk Persentase pemenuhan perencanaan tenaga kerja, Persentase pemenuhan tenaga kerja bersertifikasi, persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan latihan perkoperasian, menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan beberapa tujuan tersebut dapat merumuskan beberapa hasil diantaranya peningkatan pertumbuhan usaha UMKM yang dapat menyerap tenaga kerja, peningkatan tenaga kerja yang terampil dan mandiri, serta tersedianya tenaga kerja yang mampu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.

4. Indikator Perumahan dan Kawasan Permukiman

   Berangkat dari permasalahan masih adanya penduduk yang menggunakan sanitasi yang tidak layak, masih terdapat masyarakat dengan air minum yang tidak layak dan masih adanya unit rumah yang tidak layak huni, program dan tujuan yang ingin dicapai untuk indikator ini adalah;

   1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA),
   2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,
   3) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional,
   4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah,
   5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

   Dengan adanya program-program dalam penanganan mengenai permasalahan di bidang tersebut kedepan dapat meningkatkan dan mengatasi segala permaslahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Pariaman. Secara keseluruhan 5 program pemerintah tersebut dapat menjawab seluruh permasalahan sehingga tahun berikutnya permasalahan makin berkurang dan teratasi.

5. Indikator Ketahanan Pangan

   Terdapat permasalahan besar dalam ketahanan pangan yaitu tingkat konsumsi masyarakat dan nilai skor pola pangan harapan (PPH). Merujuk pada dua permasalahan tersebut berikut beberapa program pemerintah diharapkan dapat mengatasi atau mengurangi dampak dari masalah tersebut yang dihasilkan dari pemenuhan tujuan program tersebut diantaranya;

   1) Tercapainya ketahanan pangan yang mampu menopang kebutuhan masyarakat,
   2) Tumbuhnya Indeks Ketahanan Pangan,
   3) Tercapainya pemenuhan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian,dan
   4) Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang memadai.

6. Konvergensi Program Lintas Pemangku Kepentingan

   Upaya untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi untuk mendorong program penanggulangan kemiskinan yang inovatif dan berkelanjutan di Kota Pariaman pada tahun 2026 dilakukan dengan mengidentifikasi peran dari lintas pemangku kepentingan. Pemetaan peran tersebut utamanya difokuskan pada tiga klaster program yang meliputi pengurangan beban pengeluaran, peningkatan produktivitas dan pendapatan, serta pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Angka Kemiskinan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	902.105.000	901.505.000	100	Menunjang
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	1.177.562.000	1.149.652.000	98	Menunjang
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	386.532.000	380.149.500	98	Menunjang
	Program Perencanaan dan Pembangunan	638.809.500	293.527.795	46	Menunjang

	Industri				
	Program Pengembangan UMKM	365.980.520	351.945.000	96	Menunjang
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	22.210.000	15.825.000	71	Menunjang
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	116.475.000	9.575.000	8	Menunjang
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	13.259.379.300	13.049.511.849	98	Menunjang
	Program Penempatan Tenaga Kerja	233.095.000	130.051.000	56	Menunjang
	Program Hubungan Industrial	250.659.200	173.841.400	69	Menunjang
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	93.818.250	93.818.250	100	Menunjang
	Program	484.966.165	224.530.000	46	Menunjan

	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				g
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	379.050.000	366.301.300	97	Menunjang
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	269.112.500	263.616.250	98	Menunjang
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	95.516.000	23.020.000	24	Menunjang
	Program Pemberdayaan Sosial	155.039.750	128.567.550	83	Menunjang
	Program Rehabilitasi Sosial	441.727.000	408.420.000	92	Menunjang
	Program Pengelolaan Pendidikan	7.899.724.760	7.412.764.010	94	Menunjang
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	322.587.000	179.678.237	56	Menunjang
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.804.881.000	2.678.688.000	96	Menunjang

	Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	983.894.000	885.880.170	90	Menunjang
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	769.439.775	716.980.400	93	Menunjang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	355.785.000	333.461.832	94	Menunjang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	223.972.000	221.889.850	99	Menunjang
	Jumlah	Rp 32.632.320.720	Rp 30.393.199.393	93,14 %	Menunjang

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh berbagai perangkat daerah di Kota Pariaman, total anggaran yang dialokasikan melalui APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2025 sebesar Rp32.632.320.720. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp30.393.199.393 atau mencapai 93,14 persen dari total anggaran yang dialokasikan.

Tingkat realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dapat dilaksanakan dengan baik oleh perangkat daerah terkait. Program-program tersebut mencakup berbagai strategi penanggulangan kemiskinan, antara lain peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, serta upaya meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui berbagai intervensi di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, infrastruktur, dan ketenagakerjaan.

Capaian realisasi anggaran yang cukup tinggi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara optimal. Ke depan, pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sehingga intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan di Kota Pariaman.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Angka Kemiskinan	Rp 32.632.320.720	Rp 30.393.199.393	93,14%	5,03%	62,58	Efisien

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran

- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE = \frac{(32.632.320.720 \times 98,17\%) - 30.393.199.393}{32.632.320.720}\ x\ 100\%}$$

$$\boldsymbol{TE = 5,03\%}$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%
- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

Karena:

$$\boldsymbol{-20\% \leq TE \leq 20\%}$$

maka gunakan rumus:

$$\boldsymbol{NE = 50 + \left(\frac{TE}{20} \times 50\right)}$$

$$\boldsymbol{NE = 50 + (5,03/20 \times 50)}$$
$$\boldsymbol{NE = 50 + 12,58}$$
$$\boldsymbol{NE = 62,58}$$

Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, diperoleh nilai Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 5,03 persen. Nilai tersebut diperoleh dari perbandingan antara pagu anggaran, capaian kinerja, dan realisasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berjalan.

Selanjutnya, nilai tingkat efisiensi tersebut dikonversikan menjadi Nilai Efisiensi (NE) dengan menggunakan metode konversi nilai efisiensi, dimana apabila nilai TE berada pada rentang -20 persen sampai dengan 20 persen, maka digunakan rumus konversi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh Nilai Efisiensi sebesar 62,58.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan secara cukup efisien, dimana capaian kinerja yang diperoleh dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang relatif optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sumber daya anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja penanggulangan kemiskinan telah berjalan dengan baik, meskipun ke depan masih diperlukan upaya peningkatan efisiensi agar pemanfaatan anggaran dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

13. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Pengangguran terbuka meliputi penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan namun tetap termasuk dalam angkatan kerja.

Indikator ini digunakan untuk mengukur kondisi pasar kerja serta efektivitas kebijakan dan program ketenagakerjaan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam menciptakan kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran.

Secara umum rumus perhitungan TPT adalah:

$$TPT = \frac{Jumlah\ Penganggur}{Jumlah\ Angkatan\ Kerja} \times 100\%$$

Nilai TPT yang lebih rendah menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik karena semakin banyak angkatan kerja yang terserap dalam kegiatan ekonomi.

Tujuan penilaian adalah untuk Mengukur efektivitas kebijakan perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di Kota Pariaman. Pedoman penilaian 2025 Menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dirilis secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan konsep ketenagakerjaan yang digunakan dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh BPS, pengangguran terdiri dari:

1. Penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.
2. Penduduk yang tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha.
3. Penduduk yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).
4. Penduduk yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Mengingat TPT adalah indikator negative growth, maka realisasi yang semakin rendah menunjukkan kinerja yang semakin baik. Pihak yang Melakukan Penilaian adalah Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data dan Inspektorat Kota Pariaman sebagai evaluator AKIP.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 10 Menurunnya Angka Pengangguran				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,54%	5,16%	86,34%	Tinggi

Berdasarkan data Kota Pariaman Dalam Angka 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pariaman pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,16%. Nilai ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang angkatan kerja di Kota Pariaman terdapat sekitar 5 orang yang belum bekerja namun sedang mencari pekerjaan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, TPT Kota Pariaman mengalami penurunan dari 5,32% pada tahun 2024 menjadi 5,16% pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi pasar tenaga kerja di Kota Pariaman, yang

mengindikasikan meningkatnya penyerapan tenaga kerja atau bertambahnya kesempatan kerja di berbagai sektor ekonomi.

Pada Sasaran Strategis 10 yaitu Menurunnya Angka Pengangguran, indikator yang digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Target yang ditetapkan pada tahun pelaporan sebesar 4,54%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 5,16%.

Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, realisasi TPT masih lebih tinggi dari target, yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka belum berhasil ditekan sesuai dengan sasaran yang direncanakan. Meskipun demikian, berdasarkan metode penghitungan capaian kinerja untuk indikator yang bersifat semakin rendah semakin baik, diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 86,34% dengan kategori Tinggi.

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka belum sepenuhnya mencapai target, namun masih berada pada kategori kinerja yang baik. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dinamika pasar tenaga kerja, pertumbuhan kesempatan kerja, serta kondisi ekonomi daerah.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
5,19	5,68	5,32	5,16%	103,88%	86,62%	87,28%	86,34%

Perbandingan realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2022, realisasi TPT tercatat sebesar 5,19% dengan capaian kinerja 103,88%. Pada tahun 2023, realisasi TPT meningkat menjadi 5,68% sehingga capaian kinerja menurun menjadi 86,62%.

Selanjutnya pada tahun 2024, kondisi mulai membaik dengan penurunan TPT menjadi 5,32%, sehingga capaian kinerja meningkat menjadi 87,28%. Namun pada tahun 2025, realisasi TPT kembali

mengalami sedikit peningkatan menjadi 5,16% dengan capaian kinerja 86,34%.

Secara umum, perkembangan indikator ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir masih berada pada kisaran kategori tinggi, yang menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran terus dilakukan meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam penciptaan lapangan kerja.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
5,16%	4.10%	74,15%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RPD tahun 2026, diketahui bahwa realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,16% masih berada di atas target akhir yang ditetapkan yaitu 4,10%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan tingkat pengangguran masih perlu ditingkatkan agar target akhir perencanaan daerah dapat tercapai.

Berdasarkan metode perhitungan capaian kinerja untuk indikator yang bersifat semakin rendah semakin baik, diperoleh tingkat capaian sebesar 74,15%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja terhadap target akhir RPD masih belum optimal, sehingga diperlukan penguatan program dan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja serta peningkatan penyerapan tenaga kerja di daerah.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi tersebut antara lain keterbatasan ketersediaan lapangan kerja baru, dinamika pasar kerja, serta belum optimalnya kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan berbagai program dan kebijakan ketenagakerjaan, seperti peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, fasilitasi penempatan tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, serta mendorong perluasan

kesempatan kerja melalui investasi dan pengembangan sektor ekonomi produktif.

Dengan optimalisasi berbagai upaya tersebut, diharapkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pariaman dapat terus menurun sehingga target akhir RPD sebesar 4,10% pada tahun 2026 dapat lebih mendekati atau tercapai.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
5,16%	4,85%	93,61%

Berdasarkan perbandingan dengan capaian nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pariaman tahun 2025 sebesar 5,16% masih lebih tinggi dibandingkan TPT nasional sebesar 4,85%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kota Pariaman masih berada di atas rata-rata nasional.

Berdasarkan metode penghitungan capaian kinerja untuk indikator yang bersifat semakin rendah semakin baik, diperoleh tingkat capaian sebesar 93,61%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kota Pariaman relatif mendekati capaian nasional, namun masih diperlukan upaya yang lebih optimal dalam menurunkan tingkat pengangguran agar dapat berada di bawah atau setidaknya setara dengan rata-rata nasional.

2) Perbandingan dengan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi 2025	Realisasi Provinsi Sumbar 2025	Capaian
5,16%	5,62%	108,19%

Berdasarkan perbandingan dengan tingkat Provinsi Sumatera Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pariaman tahun 2025 sebesar 5,16% lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,62%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kota Pariaman relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi.

Berdasarkan metode perhitungan capaian kinerja untuk indikator yang bersifat semakin rendah semakin baik, diperoleh tingkat capaian sebesar 108,19%, yang menunjukkan bahwa kinerja Kota Pariaman dalam menekan tingkat pengangguran melampaui capaian rata-rata Provinsi Sumatera Barat.

3) Perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Peringkat	Kabupaten/Kota	TPT 2025 (%)
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1,53
2	Kabupaten Solok Selatan	2,13
3	Kabupaten Lima Puluh Kota	3,78
4	Kota Solok	3,87
5	Kota Bukittinggi	4,41
6	Kabupaten Sijunjung	4,59
7	Kota Sawahlunto	4,64
8	Kabupaten Solok	4,70
9	Kabupaten Agam	4,71
10	Kota Payakumbuh	4,96
11	Kota Padang Panjang	5,07
12	Kabupaten Pesisir Selatan	5,10
13	Kota Pariaman	5,16
14	Kabupaten Tanah Datar	5,26
15	Kabupaten Pasaman	5,29
16	Kabupaten Dharmasraya	5,51
17	Kabupaten Pasaman Barat	5,95
18	Kabupaten Padang Pariaman	6,48
19	Kota Padang	9,70

Sumber: Pariaman dalam Angka 2026

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, TPT Kota Pariaman tercatat sebesar 5,16%. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat, nilai tersebut menempatkan Kota Pariaman pada peringkat ke-13 dari 19 kabupaten/kota dengan tingkat pengangguran terendah ke tertinggi.

Beberapa daerah yang memiliki tingkat pengangguran lebih rendah dibandingkan Kota Pariaman antara lain Kabupaten Kepulauan Mentawai (1,53%), Kabupaten Solok Selatan (2,13%), Kabupaten Lima Puluh Kota (3,78%), serta Kota Solok (3,87%). Hal ini menunjukkan bahwa beberapa daerah tersebut memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif lebih baik.

Di sisi lain, terdapat beberapa daerah dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan Kota Pariaman, seperti Kabupaten Pasaman Barat (5,95%), Kabupaten Padang Pariaman (6,48%), dan Kota Padang (9,70%). Kondisi ini menunjukkan bahwa posisi Kota Pariaman masih berada pada kelompok menengah di antara kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Secara umum, tingkat pengangguran Kota Pariaman masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 5,62%, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kota Pariaman relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi. Namun demikian, pemerintah daerah tetap perlu meningkatkan berbagai program penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar tingkat pengangguran dapat terus ditekan pada tahun-tahun mendatang.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

Upaya yang telah dilakukan oleh DPMPTSP&NAKER di Tahun 2025 untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

1. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
    1) Kegiatan: Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
        a. Sub Kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Rekrutmen Pekerja Terampil untuk penempatan kerja di Jepang pada bulan Januari 2025 di Aula

Balaikota Pariaman. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta serta menghadirkan narasumber langsung dari Jepang untuk memberikan informasi mengenai peluang kerja, kualifikasi yang dibutuhkan, serta mekanisme penempatan tenaga kerja di Jepang.

Melalui kegiatan ini, pencari kerja memperoleh akses informasi yang lebih luas terkait peluang kerja luar negeri serta pemahaman mengenai persyaratan dan proses seleksi yang harus dipenuhi. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, serta mendukung upaya penurunan tingkat pengangguran di Kota Pariaman.



Sosialisasi dan Rekrutmen Pekerja Terampil untuk penempatan kerja di Jepang

2. Program Penempatan Tenaga Kerja
    1) Kegiatan: Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota.
        a. Sub Kegiatan: Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman telah melaksanakan kegiatan bimbingan dan pendampingan kepada Kader Ketenagakerjaan desa dan kelurahan sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat. Kader ketenagakerjaan berperan sebagai perpanjangan tangan

pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada pencari kerja di wilayah masing-masing.

Melalui kegiatan ini, kader dibekali pemahaman mengenai penyampaian informasi program pelatihan kerja, kesempatan kerja, prosedur pengajuan bantuan program padat karya sesuai petunjuk teknis Kementerian Ketenagakerjaan, prosedur pendaftaran Tenaga Kerja Mandiri, serta berbagai layanan ketenagakerjaan lainnya.

Penguatan kapasitas kader ketenagakerjaan ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan program ketenagakerjaan, sehingga mendorong peningkatan pemanfaatan program pemerintah, perluasan kesempatan kerja, serta mendukung upaya penurunan tingkat pengangguran di Kota Pariaman.



Kegiatan Bimbingan Dan Pendampingan Kepada Kader Ketenagakerjaan Desa Dan Kelurahan

b. Sub Kegiatan: Pelayanan Antar Kerja

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman memberikan pelayanan kepada pencari kerja melalui penyediaan informasi, bimbingan, dan pendampingan, serta fasilitasi antara pencari kerja dengan pemberi kerja. Pelayanan ini meliputi informasi dan tata cara pengurusan Kartu AK.1, penyampaian informasi program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun

lembaga swasta, penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan, serta fasilitasi penempatan tenaga kerja. Selain itu, juga dilakukan sinergi pelayanan antar kerja dengan perusahaan yang berada di wilayah Kota Pariaman.

Melalui pelayanan tersebut, pencari kerja memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi pasar kerja dan peluang peningkatan kompetensi, sehingga dapat mempercepat proses penempatan kerja serta mendukung upaya peningkatan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran di Kota Pariaman.








Pelayanan Antar Kerja

c. Sub Kegiatan: Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja

Pada tahun 2025, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman

melaksanakan kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja sebanyak 3 (tiga) kali. Kegiatan ini ditujukan kepada pencari kerja serta siswa/siswi SMK di Kota Pariaman, yaitu SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3, SMKN 4, dan SMK BMN Pariaman.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh informasi dan pemahaman mengenai perencanaan karier, peluang kerja, serta kesiapan memasuki dunia kerja. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dan daya saing pencari kerja, khususnya lulusan SMK, sehingga mendukung peningkatan penempatan tenaga kerja dan upaya penurunan tingkat pengangguran di Kota Pariaman.



Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja



Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Siswa/i SMKN1, SMKN 2, SMKN4 dan SMK BNM Pariaman



Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi SMKN 3 Pariaman

2) Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

a. Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penyediaan Infromasi Pasar Kerja Online

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman telah melaksanakan Rapat Teknis Informasi Pasar Kerja dan Angkatan Kerja yang diikuti oleh kader ketenagakerjaan serta perwakilan desa dan kelurahan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas kader dalam pengumpulan serta penyampaian data dan informasi ketenagakerjaan di tingkat desa dan kelurahan.

Melalui kegiatan ini diharapkan ketersediaan data dan informasi pasar kerja menjadi lebih akurat dan terbarui, sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan ketenagakerjaan serta peningkatan pelayanan kepada pencari kerja di Kota Pariaman.





Kegiatan Rapat Teknis Informasi Pasar Kerja dan Angkatan Kerja

3) Kegiatan: Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.
   a. Sub Kegiatan: Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
      - Bekerja sama dengan PNGG, pemerintah Kota Pariaman telah melaksanakan Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang, dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang.









Kegiatan Pelatihan Bahasa Jepang di PNGG

- Bekerja sama dengan Universitas Nasional PASIM, Pemerintah Kota Pariaman telah mengirim peserta pelatihan dari Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut:
  - Pelatihan Bahasa Jepang sebanyak 11 orang
  - Pelatihan untuk Kapal Pesiar sebanyak 8 orang
  - Pelatihan Bahasa Jerman sebanyak 15 orang



Kegiatan Pelatihan di Unas Pasim, Bandung.

3. Program Hubungan Industrial
   1) Kegiatan: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
      a. Sub Kegiatan: Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman melaksanakan bimbingan dan pendampingan kepada perusahaan dalam penyusunan Peraturan Perusahaan serta memfasilitasi proses pengesahannya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.

Melalui kegiatan ini, perusahaan memperoleh pemahaman mengenai penyusunan Peraturan Perusahaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kepastian hukum di lingkungan kerja, serta memperkuat perlindungan bagi pekerja dan pengusaha di Kota Pariaman.







Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan

b. Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman melaksanakan rapat penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, serta pengupahan.

Melalui kegiatan ini, diperoleh data dan informasi yang lebih akurat terkait sarana hubungan industrial di perusahaan, kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, serta penerapan pengupahan. Ketersediaan data tersebut mendukung peningkatan pembinaan ketenagakerjaan serta penguatan hubungan industrial yang harmonis di Kota Pariaman.



Kegiatan Rapat Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana HI

2) Kegiatan: Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di satu (1) daerah kabupaten/kota.

a. Sub Kegiatan: Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di satu (1) daerah kabupaten/ kota.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman melaksanakan kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan melalui pembinaan kepada perusahaan terkait penerapan sarana hubungan industrial, pembinaan serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan LKS Bipartit, dan peraturan ketenagakerjaan lainnya.

Melalui kegiatan ini, perusahaan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban dan mekanisme hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir potensi perselisihan hubungan industrial, menjaga stabilitas ketenagakerjaan, serta mendukung terciptanya hubungan industrial yang kondusif di Kota Pariaman.







Kegiatan Pencegahan Perselisihan

b. Sub Kegiatan: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yan Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada perusahaan di wilayah Kota Pariaman.

Melalui kegiatan ini, perselisihan antara pekerja dan pengusaha dapat difasilitasi penyelesaiannya secara musyawarah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menjaga stabilitas hubungan industrial, memberikan kepastian hukum bagi para pihak, serta mencegah eskalasi konflik ketenagakerjaan di Kota Pariaman.

Dokumentasi
Klarifikasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Antara Pihak Pekerja Sri Putri Ramadhani dengan
Pihak Pengusaha PT. Bank Rakyat Indonesia Cab. Pariaman
Tanggal 3 Juni 2025





Dokumentasi
Sidang Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Antara Pihak Pekerja Sri Putri Ramadhani dengan
Pihak Pengusaha PT. Bank Rakyat Indonesia Cab. Pariaman
Tanggal 25 Juni 2025





c. Sub Kegiatan: Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman melaksanakan kegiatan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja melalui pemberian bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Petugas Keagamaan dan unsur Lembaga Adat. Program ini merupakan salah satu Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman yang menjangkau 1.001 penerima manfaat yang tersebar di 71 desa dan kelurahan di Kota Pariaman.

Melalui program ini diharapkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Petugas Keagamaan dan unsur Lembaga Adat semakin meningkat melalui pemberian bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), sehingga memberikan kepastian perlindungan terhadap

risiko kerja, meningkatkan rasa aman dalam menjalankan tugas sosial kemasyarakatan, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Pariaman.







Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Faktor Penghambat (Kegagalan Mencapai Target Administratif):

1) Mismatch Kompetensi: Masih terdapat kesenjangan (mismatch) antara kualifikasi dan keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja lokal dengan kualifikasi spesifik yang dibutuhkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
2) Keterbatasan Sarana Pelatihan: Kota Pariaman tidak memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) mandiri, sehingga ketergantungan pada kuota pelatihan dari BLK Provinsi atau Pusat menjadi kendala dalam melakukan akselerasi peningkatan kompetensi secara masif di daerah.
3) Hambatan Geografis dan Psikologis: Adanya keengganan dari sebagian pencari kerja untuk ditempatkan di luar daerah atau luar

negeri karena faktor keterikatan keluarga serta tingginya biaya mobilitas/transportasi di awal masa kerja.

4) Dinamika Ekonomi Makro: Sebagai variabel makro, TPT dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali teknis dinas, seperti laju inflasi yang mempengaruhi daya beli dan pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya optimal dalam menciptakan lapangan kerja baru di sektor formal.

Faktor Pendukung (Keberhasilan Menjaga Tren Penurunan):

1. Optimalisasi Layanan Digital: Meskipun anggaran bursa kerja fisik (job fair) ditiadakan, penggunaan sistem informasi pasar kerja digital melalui WLLP (siapkerja.kemnaker.go.id) tetap mampu mempertemukan pencari kerja dengan lowongan yang tersedia secara efisien.
2. Penguatan Hubungan Industrial: Adanya pendekatan personal dan koordinasi yang intensif dengan perusahaan-perusahaan di daerah untuk melakukan mapping lowongan kerja secara rutin.

Dalam rangka meningkatkan kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun-tahun mendatang, pemerintah daerah akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

1) Meningkatkan kualitas dan relevansi program pelatihan kerja yang berbasis kebutuhan pasar kerja.
2) Memperluas kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka penempatan tenaga kerja.
3) Mendorong pengembangan kewirausahaan dan usaha produktif masyarakat guna menciptakan lapangan kerja baru.
4) Mengoptimalkan layanan informasi pasar kerja dan fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui berbagai platform pelayanan ketenagakerjaan.

Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan tingkat pengangguran terbuka dapat terus ditekan sehingga target pembangunan ketenagakerjaan daerah dapat tercapai secara lebih optimal pada periode perencanaan berikutnya.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 10 Menurunnya Angka Pengangguran					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tingkat Pengangguran Terbuuka	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp116.475.000	Rp.9.575.000	8,22%	Tidak Menunjang
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp298.163.500	Rp.183.114.500	61,41%	Menunjang
	Program Hubungan Industrial	Rp263.668.200	Rp.186.850.400	70,86%	Menunjang

Tingkat kesempatan kerja memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat kesempatan kerja menggambarkan besarnya proporsi penduduk usia kerja yang berhasil terserap dalam lapangan pekerjaan, sedangkan TPT menunjukkan persentase angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.

Dengan demikian, apabila tingkat kesempatan kerja meningkat, maka jumlah tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan ekonomi juga meningkat. Kondisi ini secara langsung akan menurunkan jumlah pengangguran, sehingga nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) akan menurun. Sebaliknya, apabila kesempatan kerja terbatas dan penyerapan tenaga kerja rendah, maka jumlah pengangguran akan meningkat dan menyebabkan TPT menjadi lebih tinggi.

Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesempatan kerja, seperti pelatihan kerja, fasilitasi penempatan tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, serta penciptaan iklim hubungan industrial yang kondusif, pada dasarnya merupakan upaya strategis untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka. Semakin besar kesempatan kerja yang tercipta, maka semakin kecil tingkat pengangguran yang terjadi di suatu daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kesempatan Kerja, terdapat beberapa program yang dilaksanakan dengan indikator kinerja utama Persentase Tingkat Kesempatan Kerja. Berdasarkan tabel di atas, secara umum seluruh program yang dilaksanakan berkontribusi atau menunjang terhadap upaya peningkatan kesempatan kerja, meskipun tingkat realisasi dan capaian masing-masing program berbeda.

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja memiliki pagu anggaran sebesar Rp116.475.000, dengan realisasi sebesar Rp9.575.000 atau capaian 8,22%. Rendahnya capaian realisasi pada program ini menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan yang direncanakan belum dapat dilaksanakan secara optimal pada tahun berjalan. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi peningkatan kompetensi tenaga kerja yang seharusnya menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan peluang kerja bagi pencari kerja.

Sementara itu, Program Penempatan Tenaga Kerja memiliki anggaran sebesar Rp298.163.500 dengan realisasi Rp183.114.500 atau capaian 61,41%. Program ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mendukung peningkatan kesempatan kerja melalui berbagai layanan ketenagakerjaan seperti pelayanan penempatan tenaga kerja, penyebarluasan informasi pasar kerja, serta fasilitasi pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan.

Selanjutnya, Program Hubungan Industrial memiliki anggaran sebesar Rp263.668.200 dengan realisasi Rp186.850.400 atau capaian 70,86%. Program ini juga berperan dalam menunjang pencapaian sasaran melalui upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha, sehingga mampu menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan mempertahankan keberlangsungan kesempatan kerja di perusahaan.

Secara keseluruhan, ketiga program tersebut menunjang pencapaian sasaran strategis peningkatan kesempatan kerja serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), namun masih terdapat ruang perbaikan khususnya pada optimalisasi pelaksanaan program pelatihan kerja agar peningkatan kompetensi tenaga kerja

dapat lebih maksimal dan berdampak langsung pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kota Pariaman. Penguatan sinergi antara peningkatan kompetensi, layanan penempatan tenaga kerja, serta pembinaan hubungan industrial diharapkan dapat semakin memperkuat upaya penurunan tingkat pengangguran di daerah.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis: Menurunnya Angka Pengangguran						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Tingkat Pengangguran Terbuka	Rp.678.306.700	Rp.379.539.900	86,34%	30,39%	100	Sangat Efisien

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%}$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE = \frac{(678.306.700 \times 0,8634) - 379.539.900}{678.306.700} \times 100\%}$$

$$\boldsymbol{TE = 30,39\%}$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%

- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

Nilai Efisiensi = $\mathbf{50} + \left(\frac{\boldsymbol{TE}}{\mathbf{20}} \times \mathbf{50}\right)$

$\boldsymbol{NE} = \mathbf{30,39}\% > \mathbf{20}\%$

NE= $\mathbf{100}$

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis Menurunnya Angka Pengangguran diukur melalui perbandingan antara capaian kinerja dengan penggunaan anggaran yang dialokasikan. Pada tahun 2025, pagu anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar Rp678.306.700, dengan realisasi anggaran sebesar Rp379.539.900 atau sekitar 55,96% dari total pagu anggaran. Sementara itu, capaian kinerja indikator mencapai 86,34%.

Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, diperoleh Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 30,39%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja yang diperoleh dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pagu anggaran yang tersedia. Dengan demikian, penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dikatakan efisien.

Selanjutnya, berdasarkan konversi nilai efisiensi sesuai dengan ketentuan pengukuran efisiensi kinerja, nilai Tingkat Efisiensi sebesar 30,39% berada di atas batas maksimum efisiensi sebesar 20%, sehingga diperoleh Nilai Efisiensi sebesar 100. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dalam mendukung program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran telah dilaksanakan secara sangat efisien.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa upaya yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan program ketenagakerjaan

mampu menghasilkan capaian kinerja yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang relatif lebih hemat. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap perlu meningkatkan efektivitas program penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penguatan kerja sama dengan sektor dunia usaha agar upaya penurunan tingkat pengangguran dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

14. Indeks Desa Membangun (IDM)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT) sejak tahun 2016 menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai instrument untuk mengukur status kemajuan dan kemandirian desa. IDM Menjadi dasar dalam penetapan status desa serta perumusan kebijakan afirmatif pembangunan desa.

Memasuki Tahun 2025, kebijakan pengukuran pemabngunan desa mengalami penguatan dan penyesuaian melalui transformasi IDM menjadi Indeks Desa (ID) sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan indikator pengukuran, menyesuaikan dengan dinamika regulasi dan pembangunan nasional, mengintegrasikan aspek keberlanjutan, digitalisasi dan ketahanan desa serta mendukung pencapaian target pembanguanan nasional dan SDGs Desa.

Adapun Tujuan Indeks Desa Membangun (IDM)/Indeks Desa (ID) Tahun 2025 bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa secara komprehensif, menjadi dasar penetapan status desa secara nasional, mendukung perencanaan pembangunan desa berbasis data, instrumen pengambilan kebijakan afirmatif oleh pemerintah pusat dan daerah dan mengintegrasikan capaian SDGs Desa dalam system pengukuran nasional. Dengan demikian, Indeks Desa tidak hanya berfungsi sebagai alat klasifikas, tetapi juga sebagai instrument perencanaan dan evaluasi pembangunan desa.

Indikator Kinerja pada Indeks Desa yang dikembangkan dari struktur IDM sebelumnya memiliki 6 dimensi utama, yaitu:

1. Layanan Dasar (akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi)
2. Sosial (kohesi social, partisipasi masyarakat, dan budaya gotong royong)
3. Ekonomi (Keberdayaan ekonomi local dan aktivitas usaha masyarakat desa)
4. Lingkungan (keberlanjutan ekosistem dan mitigasi bencana)
5. Aksesibilitas (mengukur kemudahan mobilitas masyarakat terhadap sarana transportasi, komunikasi dan pasar)
6. Tata Kelola Pemerintahan Desa (menilai transparansi, akuntabilitas dan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa).

Pedoman Penilaian pada Indeks Desa Tahun 2025 ditetapkan melalui Permendesa PDTT yang mengatur metodologi penghitungan indeks, sumber data (self-assessment desa dab verifikasi berjenjang), tata cara penginputan melalui aplikasi resmi Kemendes PDTT, dan Mekanisme Validasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Tim Verifikasi Nasional Kemendes PDTT.

Proses penilaian ini dilakukan melalui pengisian kuesioner berbasis indikator oleh Pemerintah Desa, verifikasi dokumen pendukunh, valisasi berjenjang dan finalisasi status desa oleh Kemendes PDTT. Penilaian ini juga dilakukan secara periodic setiap tahun dan menjadi basis perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan nilai akhir Indeks Desa, Desa diklasifikasikan dalam beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

Klasifikasi Status	Nilai Indeks
Desa Mandiri	0,7963 ≤ ID ≤ 1,000
Desa Maju	0,6935 ≤ ID ≤ 0,7962
Desa Berkembang	0,5739 ≤ ID ≤ 0,6934
Desa Tertinggal	0,4949 ≤ ID ≤ 0,5738
Desa Sangat Tertinggal	0,0000 ≤ ID ≤ 0,4948

Kemendes PDTT melakukan penilaian melalui mekanis berikut:

1. Pengumpulan data desa melalui aplikasi resmi Indeks Desa

2. Verfikasi administrasi dan substantive
3. Analis komposit berbasis system
4. Penetapan resmi status desa secara nasional
5. Publikasi hasil Indeks Desa secara terbuka.

Penilaian ini bersifat nasional dan menjadi rujukan utama dalam kebijakan pembangunan desa, termasuk penetapan prioritas Dana Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Desa Membangun (IDM)	0,8003	0,8003	100%	Tinggi

Berdasarkan hasil perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator Indeks Desa Membangun (IDM), diketahui bahwa target tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,8003 dengan realisasi kinerja yang mengacu pada hasil penilaian tahun 2025 yaitu sebesar 0,8003. Dengan hasil tersebut, tingkat capaian kinerja yang diperoleh mencapai 100% dengan kategori penilaian Tinggi.

Perubahan dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) di tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam arah baru pembangunan desa. Fokus kebijakan kini mencakup tidak hanya peningkatan ekonomi dan social, tetapi juga penguatan layanan dasar, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa yang baik (goog village governance). Seluruh desa telah memperbaharui Indeks Desa dengan dukungan data yang lengkap agar menjadi dasar penentuan arah kebijakan pembangunan tahun 2026.

Hasil Pemutakhiran IDM/ID Tahun 2025 dapat menjadi masukan berharga untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan pembangunan desa terutama dalam menyusun RKPDes 2026 serta menjadi pedoman dalam pencermatan ulang RPJMDes dan analisa

data yang dibutuhkan dalam melakukan revisi RPJMDesa pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dimana RPJMDesa menjadi 8 Tahun. IDM/ID ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menetapkan target pembangunan desa jangka panjang. Hasil rekomendasi ID dapat digunakan untuk memantau perkembangan desa secara berkala dan melakukan evaluasi.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
0,7744	0,7953	0,8045	0,8003	100,44%	100,41%	102,2%	100%

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja indikator Indeks Desa Membangun (IDM) dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat bahwa capain kinerja mengalami dinamika fluktuatif. Pada tahun 2022, realisasi IDM sebesar 0,7744, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 0,7953 lalu pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 0,8045. Namun pada tahun 2025, realisasi mengalami penurunan menjadi 0,8003.

Pemutakhiran Indeks Desa Tahun 2025 mengalami penurunan skor dari tahun 2024 dari 0,8052 menjadi 0,8003, penurunan sebesar 0,0049 ini bukan disebabkan penurunan kualitas, melainkan karena adanya penambahan dan penyempurnaan indikator penilaian pada Indeks Desa Tahun 2025 yang lebih komprehensif dan detail.

Pada Tahun 2024 IDM hanya terdiri dari 3 Indikator yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Sedangkan pada perubahan Pemutakhiran menjadi Indeks Desa di Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024, Indeks Desa disusun berdasarkan komponen 6 (enam) dimensi meliputi: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa dengan 48 indikator. Dengan adanya penambahan indikator pengukuran pada pemutakhiran Indeks Desa Tahun 2025, menyebabkan penurunan skor, tetapi tidak mengurangi

kualitas, karena pengukuran dilakukan secara real dengan kondisi lapangan yang ada.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
0,8003	0,8133	98,40%

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Realisasi Indeks Desa Kota Pariaman pada Tahun 2025 tercatat sebesar 0,8003, dibandingkan dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026 sebesar 0,8133. Dengan Demikian, tingkat capaian kinerja pada Tahun 2025 telah mencapai 98,40% dari target akhir yang ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa di Kota Paariaman berjalan dengan baik dan berada pada jalur yang tepat (on track) menuju target akhir periode RPD. Selisih antara realisasi dan target sebesar 0,0130 poin indeks mengindikasikan adanya gap yang relative kecil, shingga secara umum indikator kinerja ini dapat dikategorikan sangat baik.

Peningkatan nilai indeks ini mencerminkan adanya kemajuan pada berbagai aspek pembangunan desa, antara lain peningkatan kualitas infrastruktur dasar, akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan kelembagaan desa, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Upaya sinergis antara Pemerintah Kota Pariaman, Pemerintah Desa, serta dukungan pemangku kepentingan lainnya turut berkontribusi terhadap pencapaian tersebut.

Meskipun demikian, untuk mecapai target akhir sebesar 0,8133 pada Tahun 2026, diperlukan langkah-langka strategis yang lebih terfokus, terutama pada indikator-indikator yang masih memiliki nilai relatif rendah. Optimalisasi program pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi produktif desa, peningkatan kualitas layanan dasar, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa menjadi prioritas dalam upaya peningkatan indeks secara berkelanjutan.

Dengan capaian sebesar 98,40% pada target akhir RPD Tahun 2026 dinilai realistis untuk dicapai, dengan catatan adanya

konsistensi pelaksanaan program, penguatan koordinasi lintas sector, serta monitoring san evaluasi berbasis data secara berkala.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
0,8003	-	-

Sampai dengan saat penyusunan laporan ini, belum terdapat publikasi resmi yang memuat nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2025 secara nasional yang dapat dijadikan sebagai angka pembanding. Publikasi nilai IDM tingkat nasional umumnya diterbitkan setelah seluruh proses pendataan, verifikasi, dan validasi data desa selesai dilaksanakan secara nasional oleh kementerian terkait.

2) Perbandingan dengan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi 2025	Realisasi Provinsi Sumbar 2025	Capaian
0,8003	0,7382	108,41%

Pada Tahun 2025, realisasi Indeks Desa Kota Pariaman tercatat sebesar 0,8003, lebih tinggi dibandingkan realisasi Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,7382. Dengan demikian, capaian kinerja Kota Pariaman terhadap rata-rata provinsi mencapai 108,41%, yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan desa di Kota Pariaman berada diatas capaian regional.

Capaian sebesar 108,41% mengindikasikan bahwa pembangunan desa di Kota Pariaman telah melampaui rata-rata Provinsi Sumatera Barat sebesar 8,41%. Secara substantive, nilai 0,8003 menempatkan desa-desa di Kota Pariaman pada Kategori Desa Maju menuju Desa Mandiri, sesuai klasifikasi yang ditetapkan oleh Kemendes PDTT Republik Indonesia.

Keunggulan ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pembangunan desa yang dilaksanakan secara terintegrasi, baik melalui optimalisasi Dana Desa, penguatan

kapasitas aparatur desa, maupun peningkatan kualitas pelayanan public di tingkat desa.

Berikut ini beberapa faktor strategis yang berkontribusi terhadap tingginya capaian Indeks Desa Kota Pariaman antara lain:

a. Penguatan Dimensi Ketahanan Sosial yaitu peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan social yang merata di seluruh desa.
b. Pengembangan Ketahanan Ekonomi Desa yaitu optimalisasi peran BUM Desa serta dukungan terhadap UMKM dan sector ekonomi produktif desa.
c. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Desa yaitu Implementasi system administrasi berbasis digital dan peningkatan tarnsparansi pengelolaan keuangan desa.
d. Sinergi Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa dengan dilakukannya koordinasi yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa.

Jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,7382, maka selisih positif sebesar 0,0621 poin menunjukkan bahwa intervensi kebijakan Pemerintah Kota Pariaman relative lebih progresif dan terarah. Capaian ini sekaligus menjadi indikator bahwa strategi pembangunan desa di Kota Pariaman telah selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang serta kebijakan teknis Indeks Desa Tahun 2025.

3) Perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Nilai rata-rata ID 2025
1.	Kabupaten Pesisir Selatan	0,7751
2.	Kabupaten Solok	0,7463
3.	Kabupaten Sijunjung	0,8261
4.	Kabupaten Tanah Datar	0,8141
5.	Kabupaten Padang Pariaman	0,7326
6.	Kabupaten Agam	0,7897
7.	Kabupaten Lima Puluh Kota	0,8456

8.	Kabupaten Pasaman	0,7508
9.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0,6340
10.	Kabupaten Dharmasraya	0,7853
11.	Kabupaten Solok Selatan	0,7861
12.	Kabupaten Pasaman Barat	0,6951
13.	Kota Sawahlunto	0,7872
14.	Kota Pariaman	0,8003

Dilihat pada tabel diatas bahwa Capaian Indeks Desa Tahun 2025 Kota Pariaman berada pada kelompok lima besar tertinggi di Provinsi Sumatera Barat dan berada diatas sebagian besar kabupaten/kota lainnya. Dengan nilai 0,8003, selisih positif cukup signifikan terlihat dibandingkan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 0,7326, Kabupaten Pasaman Barat 0,6951, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,6340. Meskipun demikian, capaian kota pariaman masih berada dibawah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 0,8456 dan Kabupeten Sijunjung sebesar 0,8261, yang telah menunjukkan performa sangat kuat dalam penguatan ketahanan social, ekonomi dan tata kelola desa.

Secara komparatif, posisi ini mencerminkan bahwa pemabngunan desa di Kota Pariaman telah berjalan efektif, namun tetap memerlukan penguatan untuk meningkatkan daya saing dan mendorong seluruh desa mencapai kategori Desa Mandiri.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

Berdasarkan realisasi Indeks Desa Tahun 2025 sebesar 0,8003, Kota Pariaman berada pada kelompok atas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian tertinggi seperti Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 0,8456 dan Kabupaten Sijunjung sebesar 0,8261, masih terdapat ruang perbaikan untuk peningkatan kinerja menuju kategori Desa Mandiri secara menyeluruh.

Capaian nilai 0,8003 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator ketahanan social, ekonomi, dan tata kelola desa telah terpenuhi dengan baik. Adapun Faktor-faktor keberhasilan antara lain:

a. Konsistensi Kebijakan dan Pembinaan

   Pemerintah Kota Pariaman secara konsisten melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga indikator tata kelola relative stabil dan akuntabel.

b. Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa

   Pemnafaatan Dana Desa diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini berdampak postif terhadap peningkatan dimensi ketahanan social dan ekonomi.

c. Skala Wilayah yang Relatif Terkendali

   Sebagai daerah dengan cakupan desa yang tidak terlalu luas, koordinasi, pengawasan dan distribusi program relative lebih efektif dibandingkan daerah dengan wilayah geografis yang lebih kompleks.

d. Penguatan Tata Kelola dan Digitalisasi

   Implementasi system administrasi desa berbasis digital turut mendukung transparansi dan peningkatan skor pada dimensi tata kelola.

Meskipun berada pada kategori Desa Maju, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan capaian belum melampaui daerah dengan nilai tertinggi:

a. Kemandirian Ekonomi Desa Belum Merata

   Belum seluruh desa memiliki BUM Desa yang aktif dan produktif secara berkelanjutan. Diversifikasi usaha desa masih terbatas pada sector-sektor tertentu.

b. Inovasi Desa yang belum terstandarisasi

   Inovasi berbasis potensi local belum sepenuhnya terdokumentasi dan direplikasi secara sistematis.

c. Ketahanan Lingkungan dan Mitigas Risiko

Aspek pengelolaan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal perencanaan berbasis resiko.

d. Kualitas dan Integrasi Data Desa

Masih terdapat perbedaan kualitas penginputan data dan pembaruan indikator yang berdampak pada skor akhir.

Untuk meningkatkan capaian Indeks Desa pada tahun berikutnya, Pemerintah Kota Pariaman akan melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a. Penguatan Ekosistem Ekonomi Desa
   - Revitalisasi dan Pendampingan intensif BUM Desa.
   - Pengembangan produk unggulan desa berbasis potensi local.
   - Fasilitasi akses pasar dan digital marketing.
   - Kolaborasi dengan sector swasta dan lembaga keuangan.

b. Standarisasi dan Replikasi Inovasi Desa
   - Penyusunan bank inovasi desa
   - Kompetisi inovasi desa tingkat kota
   - Replikasi praktik baik (best practice) dari desa dengan skor tertinggi

c. Peningkatan Ketahanan Lingkungan
   - Penyusunan dokumen mitigasi risiko desa
   - Program desa tangguh bencana
   - Edukasi pengelolaan sampah dan konservasi lingkungan

d. Penguatan Tata Kelola Berbasis Data
   - Pelatihan pengelolaan Sistem Informasi Desa
   - Monitoring dan evaluasi berbasis dashboard kinerja
   - Sinkronisasi data desa dengan data kota secara berkala

e. Pendekatan Berbasis Klaster
   - Identifikasi desa dengan skor rendah
   - Intervensi tematik sesuai indikator yang lemah
   - Pendampingan khusus terhadap desa menuju kategori Mandiri

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 11 Meningkatnya kemandirian desa					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Indeks Desa Membangun (IDM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.355.280.723	Rp3.179.864.753	94,77%	Tidak Menunjang
	Program Penataan Desa	Rp2.214.400	Rp2.154.500	97,29%	Menunjang
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp307.210.228	Rp72.259.750	23,52%	Menunjang
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp1.862.574.500	Rp1.609.504.889	86,41%	Menunjang

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kemandirian Desa” dengan indikator kinerja utama Indeks Desa Membangun, Pemerintah Kota Pariaman melaksanakan beberapa program yang berkaitan dengan peningkatan kemandirian desa. Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan realisasi anggaran, diketahui bahwa tingkat kontribusi masing-masing program terhadap pencapaian indikator kinerja menunjukkan hasil yang bervariasi.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 3.355.280.723,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.179.864.753,- atau capaian 94,77 persen. Tingginya tingkat capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan optimal.

Program Penataan Desa memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 2.214.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.154.400,- atau capaian 97,29 persen. Persentase capaian yang tinggi menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan optimalnya koordinasi antara DPMD dengan pemerintah desa. Kegiatan dalam program ini elatif terukur dan tidak menghadapi kendala yang berarti, baik dari aspek teknis maupun administrative. Keberhasilan program ini mendukung terwujudnya tata kelola desa yang lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Administrasi Pemerintahan Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp. 307.210.228,- dengan realisasi sebesar Rp. 72.259.750,- atau capaian 23,52 persen. Rendahnya capaian realisasi pada program ini menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain penyesuaian kebijakan dan prioritas kegiatan, keterbatasan waktu pelaksanaan, dan adanya efiensi atau recofusinh anggaran. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan desa, sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk perbaikan perencanaan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki anggaran Rp. 1.862.574.500 dengan realisasi Rp. 1.609.504.889 atau capaian 86,41 persen. Capain tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan cukup baik. Keberhasilan ini didukung oleh partisipasi aktif lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat serta adanya dukungan kebijakan terhadap penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator Indeks Desa Membangun (IDM) Kota Pariaman didukung secara signifikan oleh Program Penataan Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki keterkaitan langsung pada peningkatan kemandirian desa. Sementara itu, program dengan capaian rendah hingga sedang masih perlu dilakukan penajaman

kegiatan, peningkatan efektivitas pelaksanaan, serta penguatan focus pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kemandirian Desa yang ada di Kota Pariaman.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis 11: Meningkatnya kemandirian desa						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Indeks Desa Membangun (IDM)	Rp2.171.999.128	Rp1.683.919.139	100%	22,47 %	100	Sangat Efisien

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE} = \frac{(\mathbf{2.171.999.128x100\%}) - \mathbf{1.683.919.139}}{\mathbf{2.171.999.128}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{TE} = \mathbf{22,47\%}$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%

- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

Nilai Efisiensi = $\mathbf{50} + \left(\frac{\boldsymbol{TE}}{\mathbf{20}} \times \mathbf{50}\right)$

$\boldsymbol{NE = 22,47\% > 20\%, maka}$

NE= $\mathbf{100}$

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Indeks Desa Membangun (IDM) dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kemandirian desa, diketahui bahwa pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2.171.999.128, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.683.919.139. Sementara itu, capaian kinerja yang diperoleh mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus tingkat efisiensi, diperoleh Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 22,47%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan konversi nilai efisiensi dengan asumsi batas efisiensi −20% hingga 20%, maka tingkat efisiensi yang melebihi 20% dikonversikan menjadi Nilai Efisiensi (NE) sebesar 100.

Dengan demikian, pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dikategorikan sangat efisien, karena target kinerja tercapai sepenuhnya dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari pagu yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya yang tersedia telah dilakukan secara optimal dan efektif dalam mendukung peningkatan kemandirian desa.

15. Nilai Evaluasi AKIP Kota

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penerapan prinsip pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Evaluasi AKIP bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran serta berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh Kementerian PANRB berdasarkan hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam menilai keterpaduan antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian hasil pembangunan pemerintah daerah.

Adapun klasifikasi predikat penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) beserta rentang nilai dan interpretasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai)
6	C	>30-50	Kurang
7	D	>0-30	Sangat Kurang

Sumber: Menpan.go.id

Penetapan target indikator AKIP Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024–2026, namun dilakukan penyesuaian target sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Penyepakatan Target SAKIP dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025–2029. Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2024, target nilai AKIP Tahun 2025 ditetapkan lebih tinggi, yaitu sebesar 70,01 dengan predikat BB.

Peningkatan target tersebut menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kota Pariaman untuk terus memperkuat implementasi SAKIP serta meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara menyeluruh.

Pada tanggal 22 Oktober 2025, telah dilaksanakan Evaluasi Implementasi SAKIP Kota Pariaman oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB, sebagaimana tertuang dalam Surat Tugas Kementerian PANRB Nomor 123/AA.04/2025. Evaluasi dilaksanakan dengan metode Evaluasi Mendalam (In-Depth Evaluation), yang bertujuan untuk menilai keterpaduan antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta capaian kinerja Pemerintah Daerah. Pemaparan dibuka oleh Wali Kota Pariaman yang kemudian dilanjutkan oleh Kepala Bappeda, Inspektur dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang memaparkan masing-masing Komponen Penilaian AKIP serta hasil monev dari matriks tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2024, sebagaimana dokumentasi berikut:





Evaluasi Implementasi SAKIP Kota Pariaman Tahun 2025

Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, Perangkat Daerah yang menjadi sampel evaluasi, yaitu:

1. Dinas Pendidikan Kota Pariaman,
2. Dinas Sosial Kota Pariaman, dan
3. Dinas Kesehatan Kota Pariaman.

Ketiga Perangkat Daerah tersebut menyampaikan paparan serta dokumen pendukung terkait implementasi SAKIP, mulai dari perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran dan monitoring kinerja, hingga penyusunan laporan kinerja.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Pariaman sebagai bagian dari upaya peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi dilakukan terhadap aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja instansi dan perangkat daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, Pemerintah Kota Pariaman memperoleh nilai 61,56 dengan predikat “B” (Baik). Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan penguatan komitmen dan perbaikan dalam manajemen kinerja agar akuntabilitas kinerja dapat terus meningkat.



Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Pariaman untuk melakukan penyempurnaan penerapan SAKIP melalui peningkatan

kualitas perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Nilai Evaluasi AKIP Kota	70,01 (BB)	61,56 (B)	87,93%	Tinggi

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, capaian Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Kota Pariaman sebesar 61,56 dengan predikat “B” menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan kategori baik. Implementasi manajemen kinerja pada tingkat pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama telah menunjukkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek penguatan kualitas pengelolaan kinerja secara berkelanjutan.

Capaian kinerja sebesar 87,93% terhadap target yang ditetapkan mengindikasikan bahwa upaya peningkatan birokrasi yang bersih dan akuntabel telah dilaksanakan secara cukup efektif. Namun demikian, diperlukan peningkatan konsistensi dalam penerapan manajemen kinerja berbasis hasil (result oriented), khususnya pada penyempurnaan kualitas perencanaan kinerja, penguatan pengukuran kinerja berjenjang, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi internal sebagai dasar pengambilan keputusan.

Ke depan, Pemerintah Kota Pariaman diharapkan dapat memperkuat komitmen pimpinan dan memastikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja secara lebih terukur dan berkelanjutan sehingga capaian kinerja dapat meningkat pada periode evaluasi berikutnya.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
61,08 (B)	61,49 (B)	57,43 (CC)	61,56 (B)	99,31%	87,83%	88,15%	87,93%

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Pariaman selama periode Tahun 2022–2025 menunjukkan dinamika implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang relatif stabil, meskipun mengalami fluktuasi pada tahun tertentu.

Berdasarkan data realisasi, nilai AKIP Kota Pariaman pada Tahun 2022 mencapai 61,08 dengan predikat B (Baik), kemudian mengalami sedikit peningkatan pada Tahun 2023 menjadi 61,49 dengan predikat yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik manajemen kinerja daerah telah berjalan cukup konsisten, terutama dalam menjaga keselarasan antara perencanaan dan pelaporan kinerja.

Namun pada Tahun 2024 terjadi penurunan nilai menjadi 57,43 dengan predikat CC (Cukup). Penurunan ini mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam implementasi SAKIP, khususnya pada aspek kualitas perencanaan berbasis hasil, pengukuran kinerja yang belum sepenuhnya berorientasi outcome, serta optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi internal. Kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan manajemen kinerja secara lebih sistematis.

Pada Tahun 2025, nilai AKIP kembali meningkat menjadi 61,56 dengan predikat B (Baik). Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan yang dilakukan Pemerintah Kota Pariaman melalui penguatan koordinasi perangkat daerah, peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, serta tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan sehingga diperlukan penguatan implementasi SAKIP secara lebih menyeluruh.

Dilihat dari sisi capaian kinerja terhadap target, persentase capaian menunjukkan tren yang relatif stabil pada kisaran 87–99 persen. Tahun 2022 mencatat capaian tertinggi sebesar 99,31%, kemudian menurun namun stabil pada Tahun 2023 hingga 2025, yaitu masing-masing 87,83%, 88,15%, dan 87,93%. Stabilitas capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap mampu menjaga tingkat kinerja pada kategori tinggi meskipun nilai evaluasi mengalami fluktuasi.

Secara umum, tren kinerja AKIP Kota Pariaman selama empat tahun terakhir memperlihatkan pola stabilisasi dengan fase penurunan sementara dan pemulihan kembali, yang menandakan adanya proses pembenahan berkelanjutan dalam tata kelola kinerja pemerintahan. Ke depan, peningkatan nilai AKIP memerlukan penguatan komitmen pimpinan, konsistensi penerapan manajemen kinerja berbasis hasil, penyempurnaan indikator kinerja yang lebih terukur, serta optimalisasi evaluasi internal sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
61,56 dengan Predikat B	73,05 dengan Predikat BB	84.27%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Pariaman menunjukkan capaian yang masih perlu ditingkatkan. Realisasi nilai AKIP Tahun 2025 sebesar 61,56 dengan predikat B (Baik), sementara target akhir RPD ditetapkan sebesar 73,05 dengan predikat BB (Sangat Baik). Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target akhir periode perencanaan baru mencapai 84,27%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan pada kategori baik, namun masih terdapat kesenjangan kinerja yang perlu diakselerasi agar target akhir periode dapat tercapai. Kesenjangan ini terutama berkaitan dengan perlunya penguatan kualitas perencanaan

berbasis hasil, konsistensi pengukuran kinerja berjenjang, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi internal sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan.

Sementara itu, target akhir kinerja pada periode perencanaan mengalami penyesuaian. Pada dokumen perencanaan awal, target akhir periode untuk indikator Nilai Evaluasi AKIP Kota ditetapkan sebesar 65,15 dengan predikat B. Namun demikian, seiring dengan kebijakan penguatan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas implementasi SAKIP, target tersebut selanjutnya mengalami penyesuaian menjadi 73,05 dengan predikat BB, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyepakatan Target SAKIP dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025–2029.

Penyesuaian target akhir periode tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional di bidang reformasi birokrasi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berorientasi hasil. Kenaikan target ini mencerminkan adanya peningkatan standar kinerja yang harus dicapai pemerintah daerah, sehingga diperlukan penguatan komitmen pimpinan, peningkatan kapasitas perangkat daerah, serta integrasi manajemen kinerja secara lebih konsisten dan terukur.

Secara keseluruhan, posisi capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pariaman telah berada pada jalur yang tepat menuju target akhir RPD, namun membutuhkan langkah percepatan dan perbaikan yang lebih sistematis agar peningkatan nilai AKIP dapat dicapai secara optimal pada akhir periode perencanaan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

4) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
61,56 dengan Predikat B	66,42 dengan Predikat B	92.68%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Pariaman

Tahun 2025 dengan realisasi nasional Tahun 2025, terlihat bahwa capaian kinerja daerah masih berada di bawah capaian nasional. Nilai AKIP Kota Pariaman tercatat sebesar 61,56 dengan predikat B (Baik), sementara realisasi nasional mencapai 66,42 dengan predikat yang sama. Tingkat capaian Kota Pariaman terhadap nilai nasional sebesar 92,68%.

Meskipun secara klasifikasi predikat tidak terdapat perbedaan, selisih nilai sebesar 4,86 poin menunjukkan adanya kesenjangan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan manajemen kinerja di Kota Pariaman masih perlu diperkuat, khususnya pada aspek kualitas perencanaan kinerja berbasis hasil, konsistensi pengukuran kinerja yang terintegrasi hingga level perangkat daerah, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi internal sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan program.

Perbandingan dengan capaian nasional menjadi indikator penting dalam melihat posisi relatif kinerja daerah dalam konteks tata kelola pemerintahan secara nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan akuntabilitas kinerja perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas outcome pembangunan yang terukur dan berdampak nyata.

Ke depan, diperlukan langkah percepatan melalui penguatan komitmen pimpinan, peningkatan kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh, serta konsistensi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Kementerian PANRB agar nilai AKIP Kota Pariaman dapat melampaui rata-rata nasional pada periode evaluasi berikutnya.

5) Perbandingan dengan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi 2025	Realisasi Provinsi Sumbar 2025	Capaian
61,56 dengan Predikat	78,85 dengan predikat	78.07%

B	BB	

Perbandingan antara realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Pariaman Tahun 2025 dengan capaian Provinsi Sumatera Barat menunjukkan adanya kesenjangan kinerja yang cukup signifikan. Nilai AKIP Kota Pariaman tercatat sebesar 61,56 dengan predikat B (Baik), sedangkan realisasi Provinsi Sumatera Barat mencapai 78,85 dengan predikat BB (Sangat Baik). Tingkat capaian Kota Pariaman terhadap nilai provinsi sebesar 78,07%.

Perbedaan nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat Kota Pariaman masih berada di bawah standar kinerja pemerintah provinsi. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan manajemen kinerja daerah belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam memastikan keterpaduan perencanaan kinerja dengan penganggaran, penguatan indikator kinerja berbasis outcome, serta konsistensi pelaksanaan evaluasi internal sebagai instrumen pengendalian kinerja organisasi.

Selain itu, capaian Provinsi Sumatera Barat yang telah berada pada predikat BB menunjukkan praktik manajemen kinerja yang relatif lebih matang, terutama dalam hal penguatan cascading kinerja, kualitas pengukuran kinerja lintas perangkat daerah, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan pembangunan. Kondisi ini menjadi pembanding strategis sekaligus referensi bagi Pemerintah Kota Pariaman dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP.

Ke depan, diperlukan langkah akseleratif melalui peningkatan komitmen pimpinan perangkat daerah, penguatan pembinaan SAKIP secara lebih terarah, serta optimalisasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Kementerian PANRB. Dengan upaya perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan, diharapkan kesenjangan kinerja dengan tingkat provinsi dapat diperkecil dan capaian akuntabilitas kinerja daerah meningkat pada periode evaluasi berikutnya.

6) Perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

No.	Nama Kabupaten/Kota	Nilai 2025	Predikat
1	Kota Padang	78,84	BB
2	Kota Payakumbuh	76,31	BB
3	Kab. Padang Pariaman	71,54	BB
4	Kota Bukittinggi	71,49	BB
5	Kab. Pesisir Selatan	69,19	B
6	Kota Solok	68,89	B
7	Kab. Solok	68,74	B
8	Kab. Tanah Datar	67,77	B
9	Kab. Agam	67,45	B
10	Kab. Dharmasraya	67,42	B
11	Kab. Sijunjung	66,58	B
12	Kab. Kep. Mentawai	66,50	B
13	Kota Padang Panjang	65,06	B
14	Kota Sawahlunto	64,44	B
15	Kab. Pasaman	63,55	B
16	Kab. Pasaman Barat	63,52	B
17	Kab. Lima Puluh Kota	62,09	B
18	Kab. Solok Selatan	61,57	B
19	Kota Pariaman	61,56	B

Sumber: Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil evaluasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, capaian kinerja Kota Pariaman masih berada pada posisi terbawah dibandingkan daerah lainnya. Dengan nilai 61,56 dan predikat B (Baik), Kota Pariaman menempati peringkat ke-19 dari 19 kabupaten/kota.

Jika dibandingkan dengan kelompok kinerja tertinggi, Kota Padang sebagai peringkat pertama memperoleh nilai 78,84 (BB), sehingga terdapat kesenjangan sebesar 17,28 poin. Kesenjangan ini menunjukkan perbedaan kualitas implementasi SAKIP yang cukup signifikan, terutama dalam hal konsistensi penerapan

manajemen kinerja berbasis hasil dan pemanfaatan evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan daerah pada kelompok menengah, seperti Kabupaten Agam (67,45) dan Kabupaten Tanah Datar (67,77), selisih nilai berada pada kisaran 6–7 poin. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Pariaman masih tertinggal dalam mencapai standar rata-rata kinerja daerah di tingkat provinsi, khususnya dalam aspek kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, serta integrasi antara perencanaan dan penganggaran.

Di sisi lain, jika dibandingkan dengan daerah yang memiliki nilai paling dekat, yaitu Kabupaten Solok Selatan (61,57), selisihnya sangat tipis yaitu 0,01 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara posisi, Kota Pariaman masih berada dalam kelompok bawah, namun memiliki peluang untuk segera keluar dari posisi tersebut apabila dilakukan perbaikan kinerja secara terarah dan konsisten.

Secara keseluruhan, distribusi nilai AKIP kabupaten/kota di Sumatera Barat menunjukkan bahwa sebagian besar daerah telah berada pada kisaran nilai 65 ke atas dan mulai mendekati predikat BB (Sangat Baik). Sementara itu, Kota Pariaman masih berada pada batas bawah predikat B, yang mengindikasikan bahwa kualitas implementasi SAKIP belum optimal dan masih memerlukan penguatan secara sistematis.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

No.	Kendala/Hambatan penyebab tidak tercapainya target	Solusi/Upaya yang dilakukan
1	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 belum seluruhnya ditandatangani dan diformalkan baik pada level kepala daerah maupun kepala perangkat daerah.	• Melakukan penandatanganan bersama Perjanjian Kinerja 2025 antara Wali Kota Pariaman dan Kepala Perangkat Daerah

		• Melakukan Dialog Kinerja terkait dengan tusi masing-masing PD yang didampingi dengan Tim Pendamping • Melakukan gerakan penandatanganan bersama Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah secara serentak antara Pimpinan PD ke bawahan secara berjenjang • Melaksanakan SAKIP Assesment untuk Pejabat Eselon II
2	Masih terdapat indikator kinerja perangkat daerah yang belum memenuhi kriteria SMART dan belum sesuai dengan level jabatan.	• Melakukan Penyusunan RPJMD 2025-2029, Renstra Pemda 2025-2029 dan Renstra PD 2025-2029 dengan memastikan sararan dan indikator kinerja yang disajikan sudah berorientasi hasil serta telah memenuhi kriteria Smart, yang didahului dengan proses penyusunan Pohon Kinerja • Melakukan Coaching Clinic yang dilaksanakan dalam Penyusunan RPJMD 2025-2029, Renstra Pemda 2025-2029 dan Renstra PD 2025-2029 oleh Tim Sakip

		Kota Pariaman dengan melibatkan tenaga ahli
3	Rencana aksi perangkat daerah belum sepenuhnya menggambarkan kegiatan atau aksi yang selaras dalam mendukung pencapaian kinerja.	Melakukan Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi seluruh OPD
4	Penjenjangan kinerja (*cascade down*) belum sepenuhnya disusun berdasarkan *logical framework* dan masih cenderung berdasarkan hierarki organisasi.	• Melakukan Pendampingan Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja oleh Tim Sakip Kota Pariaman dengan melibatkan tenaga ahli • Memastikan dokumen perencanaan kinerja sudah mempedomani pohon kinerja baik dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional melalui Coaching Clinic dokumen SAKIP Perangkat Daerah
6	Belum dilakukan identifikasi dan pemetaan potensi *crosscutting* kinerja antar perangkat daerah.	Mereviu kembali pohon kinerja untuk mengidentifikasi crosscutting yang diperlukan
7	Pemanfaatan aplikasi e-SAKIP belum optimal, ditunjukkan dengan data kinerja yang belum lengkap dan belum diperbarui secara berkala.	• Penyediaan tenaga programmer dengan kembali memfungsikan aplikasi e-SAKIP Kota Pariaman • Melakukan Bimtek penggunaan aplikasi e-SAKIP bagi semua operator PD

		• Melakukan Monev capaian kinerja per triwulan melalui aplikasi E-Sakip • Melakukan validasi hasil monev capaian kinerja per triwulan melalui aplikasi E-Sakip
8	Pengukuran kinerja perangkat daerah belum sepenuhnya dilakukan terhadap kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun berjalan.	• Melakukan Monev Pencapaian Kinerja Pemda Per Triwulan
9	Pengukuran capaian kinerja secara berjenjang hingga level unit kerja belum dilaksanakan secara optimal.	• Melakukan Monev Pencapaian Kinerja PD Per Triwulan
10	Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.	• Laporan hasil pengukuran kinerja dijadikan pertimbangan oleh Pimpinan Daerah memberikan arahan kepada PD untuk peningkatan kompetensi Pegawai serta mutasi rotasi pegawai • Merekomendasikan promosi jabatan sesuai capaian kinerja
11	Laporan kinerja sebagian perangkat daerah belum menyajikan analisis ketercapaian kinerja secara memadai, termasuk faktor	Melakukan pendampingan penyusunan LKj Pemda dan Perangkat Daerah oleh Tim Sakip Kota Pariaman dengan melibatkan Tenaga Ahli dari

	keberhasilan dan hambatan.	SMARTID
12	Laporan kinerja masih menitikberatkan pada pelaksanaan kegiatan dan belum sepenuhnya menjelaskan keterkaitan output dengan outcome.	• Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi untuk tim evaluator dengan bekerjasama dengan pihak ketiga • Melakukan panel hasil evaluasi secara internal dan ekternal • Melakukan revisi terhadap pedoman evaluasi LKj PD
13	Laporan kinerja belum menyajikan *benchmarking* capaian kinerja baik di tingkat provinsi maupun nasional.	• Melakukan reviu berjenjang yang lebih merinci kepada masing-masing komponen (perencanaan, pengukuran, pelaporan,dan evaluasi) LKj PD • Menambahkan pengendali teknis pada penugasan reviu dan evaluasi LKj PD
14	Informasi capaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.	• Melaksanakan rapat evaluasi Perjanjian Kinerja 2024 dan Penetapan Target PK Tahun 2025 • Melaksanakan Finalisasi Perjanjian Kinerja 2025 dengan Seluruh OPD
15	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan dokumen perencanaan terbaru, khususnya PK Kepala	• Melakukan gerakan penandatanganan bersama Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah secara

	Perangkat Daerah Tahun 2024.	serentak antara Pimpinan PD ke bawahan secara berjenjang
16	Laporan hasil evaluasi internal belum memberikan rekomendasi yang fokus pada akar permasalahan implementasi SAKIP.	• Tim APIP Kota Pariaman melakukan reviu terhadap laporan kinerja Pemda Tahun 2024 • Tim APIP Kota Pariaman melakukan reviu terhadap laporan kinerja PD Tahun 2024 • Tim APIP Kota Pariaman menerbitkan laporan hasil reviu
17	Sebagian perangkat daerah belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan oleh Inspektorat.	Melaksanakan Monev hasil evaluasi SAKIP OPD
18	Kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal belum efektif mendorong peningkatan implementasi SAKIP.	• Merevisi Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 12 tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dengan mengubah ketentuan pada pasal 15 yaitu memberikan sanksi bagi OPD dengan 3 peringkat terendah • Melaporkan hasil penilaian internal SAKIP OPD kepada Wali Kota Pariaman

		• Pemberian sanksi sesuai Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 12 tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN berupa pemotongan komponan produktifitas kerja selama 3 (tiga) bulan bagi Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP: a) Nilai SAKIP CC dikenakan sanksi pemotongan sebesar 5% (lima persen). b) Nilai SAKIP C dikenakan sanksi pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen). c) Nilai SAKIP D dikenakan sanksi pemotongan sebesar 15% (lima belas persen). • Pemberian penghargaan kepada 3 (tiga) OPD dengan hasil Evaluasi SAKIP internal tertinggi
19	Masih terdapat rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti secara tuntas dan berkelanjutan.	Melaksanakan Monev Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP



14 1

Disukai oleh **syahrini9576** dan **lainnya**

bagian_organisasi_kotapariaman Bagian Organisasi Kota Pariaman melaksanakan Bimbingan Teknis...
selengkapnya



37 2 6

Disukai oleh **via_yuni** dan **lainnya**

bagian_organisasi_kotapariaman PENTING! Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman!



46 1 4

Disukai oleh **via_yuni** dan **lainnya**

mediacenterkotapariaman Wawako Dorong Peningkatan SAKIP Kota Pariaman

Kominfo Kota Pariaman --- Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi dorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kota Pariaman.

Hal ini dikatakannya pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Matriks Tindak Lanjut Hasil AKIP tahun 2024 di Ruang Rapat Walikota Pariaman, Selasa (26/8/2025).

Mulyadi menyampaikan bahwa evaluasi AKIP ini merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian



16 1

Disukai oleh **via_yuni** dan **lainnya**

bagian_organisasi_kotapariaman Tim SAKIP Kota Pariaman melakukan audiensi dengan Tim SAKIP...
selengkapnya

Sebagai upaya perbaikan nilai Komponen Pelaporan, beberapa hal yang akan dilakukan oleh Bagian Organisasi pada tahun selanjutnya, antara lain:

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur publikasi laporan kinerja perangkat daerah.
2. Melakukan pemantauan dan rekapitulasi berkala terhadap LKjIP perangkat daerah yang telah diunggah pada website resmi Pemerintah kota Pariaman.
3. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja dengan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja kepada seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
4. Peningkatan kualitas analisis kinerja, terutama pada aspek perbandingan target dan realisasi, tren kinerja antar tahun, serta analisis faktor keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja dengan melaksanakan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja.
5. Penguatan koordinasi dan pembinaan kepada Perangkat Daerah, khususnya dalam penyusunan Laporan Kinerja agar lebih tepat waktu, seragam, dan sesuai dengan pedoman SAKIP.
6. Penyediaan contoh dan template analisis kinerja yang baku, sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas.
7. Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga laporan kinerja tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mencerminkan capaian kinerja yang sesungguhnya dengan melakukan monev PK dan dialog kinerja antara Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.
8. Pelaksanaan reviu laporan kinerja dengan melibatkan tenaga ahli.
9. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja Utama Kota Pariaman.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel

Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Nilai Evaluasi AKIP Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp69.337.650	Rp32.795.500	47,30%	Tidak Menunjang
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp724.105.972	Rp620.441.791	85.68%	Menunjang
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp183.334.610	Rp98.869.575	53.93%	Tidak Menunjang
	Program Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	Rp130.289.000	Rp128.547.500	98,66%	Menunjang

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis *"Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel"* dengan indikator kinerja utama *Nilai Evaluasi AKIP Kota*, Pemerintah Kota Pariaman melaksanakan beberapa program yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan dan manajemen kinerja daerah. Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan realisasi anggaran, diketahui bahwa tingkat kontribusi masing-masing program terhadap pencapaian indikator kinerja menunjukkan hasil yang bervariasi.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki pagu anggaran sebesar Rp69.337.650 dengan realisasi sebesar Rp32.795.500 atau capaian 47,30 persen. Rendahnya tingkat capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum berjalan optimal dan belum memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap peningkatan kualitas akuntabilitas

kinerja. Oleh karena itu, program ini dikategorikan sebagai program yang belum menunjang pencapaian kinerja secara optimal.

Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah memiliki pagu anggaran sebesar Rp724.105.972 dengan realisasi sebesar Rp620.441.791 atau capaian 85,68 persen. Program ini memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengendalian pelaksanaan pembangunan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Tingginya tingkat realisasi dan relevansi program terhadap implementasi SAKIP menunjukkan bahwa program ini merupakan program yang menunjang pencapaian indikator Nilai Evaluasi AKIP Kota.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki pagu anggaran sebesar Rp183.334.610 dengan realisasi sebesar Rp98.869.575 atau capaian 53,93 persen. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan belum sepenuhnya optimal, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan kualitas manajemen kinerja masih terbatas. Dengan demikian, program ini dikategorikan sebagai program yang belum sepenuhnya menunjang pencapaian kinerja.

Selain itu, Program Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah memiliki pagu anggaran sebesar Rp130.289.000 dengan realisasi sebesar Rp128.547.500 atau capaian 98,66 persen. Tingginya tingkat capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan kinerja telah berjalan sangat optimal. Program ini memberikan kontribusi penting dalam memastikan kepatuhan perangkat daerah terhadap ketentuan perencanaan dan pelaksanaan kinerja, serta mendorong perbaikan berkelanjutan melalui fungsi pengawasan dan evaluasi internal. Oleh karena itu, program pengawasan kinerja dapat dikategorikan sebagai program yang sangat menunjang pencapaian indikator Nilai Evaluasi AKIP Kota.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator Nilai Evaluasi AKIP Kota didukung secara signifikan oleh Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program

Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah, yang memiliki keterkaitan langsung dengan siklus manajemen kinerja dan implementasi SAKIP. Sementara itu, program dengan capaian rendah hingga sedang masih perlu dilakukan penajaman kegiatan, peningkatan efektivitas pelaksanaan, serta penguatan fokus pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis: Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Nilai Evaluasi AKIP Kota	Rp1.107.067.232	Rp880.654.366	87,93%	8,38%	70,95	Efisien

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE} = \frac{(\mathbf{1.107.067.232} \times \mathbf{87,93\%}) - \mathbf{880.654.366}}{\mathbf{1.107.067.232}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{TE} = \mathbf{8,38\%}$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%
- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

Nilai Efisiensi = $\mathbf{50} + \left(\frac{\boldsymbol{TE}}{\mathbf{20}} \times \mathbf{50}\right)$

$\boldsymbol{NE} = \mathbf{50} + \left(\frac{\mathbf{8,38}}{\mathbf{20}} \times \mathbf{50}\right)$

NE= $\mathbf{70,95}$

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Nilai Evaluasi AKIP Kota Pariaman sebesar 8,38%, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran lebih rendah dibandingkan kebutuhan anggaran ideal untuk mencapai tingkat kinerja yang diperoleh. Nilai efisiensi yang dihasilkan sebesar 70,95 menempatkan kinerja pengelolaan sumber daya pada kategori efisien.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sebesar 87,93% dapat direalisasikan tanpa harus menggunakan seluruh pagu anggaran yang tersedia. Hal tersebut mengindikasikan adanya optimalisasi pelaksanaan program melalui pengendalian belanja, peningkatan koordinasi pelaksanaan kegiatan, serta fokus pada aktivitas yang memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Secara substantif, hasil ini mencerminkan bahwa peningkatan kualitas implementasi SAKIP tidak sepenuhnya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh efektivitas pengelolaan program dan pemanfaatan sumber daya secara tepat sasaran. Ke depan, efisiensi ini perlu dipertahankan dengan tetap menjaga keseimbangan

antara penghematan anggaran dan peningkatan kualitas outcome kinerja.

16. Opini BPK terhadap LKPD

Opini BPK adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara dan pemerintah daerah. Opini ini diberikan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan ke BPK RI paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia merupakan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang dilakukan pada tahun berjalan. Sebagai contoh, opini yang diterima pada Tahun 2025 merupakan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2024. Hal ini dikarenakan proses pemeriksaan dilakukan setelah tahun anggaran berakhir dan laporan keuangan disampaikan kepada BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan:

a. Kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
b. Kecukupan pengungkapan.
c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
d. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan empat jenis opini atas laporan keuangan pemerintah, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar

(TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Pemerintah Kota Pariaman menetapkan target opini WTP sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Adapun klasifikasinya sebagai berikut :

Opini BPK	Kategori	Tingkat Kewajaran	Skor Numerik
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Sangat Baik	Sangat wajar	4
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Baik	Wajar dengan catatan	3
Tidak Wajar (TW)	Kurang	Tidak wajar	2
Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer)	Sangat Kurang	Tidak dapat dinilai	1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Target ini merujuk pada capaian WTP pada tahun sebelumnya, serta merupakan komitmen Pemerintah Kota Pariaman dalam mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Opini BPK terhadap	WTP	WTP	100%	Sangat Tiinggi

LKPD				

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Pariaman memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, capaian realisasi opini tahun 2025 sama dengan target yang telah ditetapkan, yaitu WTP dengan kategori sangat tinggi.

Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh kriteria penilaian BPK, meliputi kesesuaian SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), telah terpenuhi secara material.

Capaian WTP pada tahun 2025 mencerminkan konsistensi BPKPD dalam melaksanakan fungsi koordinasi, konsolidasi, dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pencapaian ini menegaskan keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sesuai standar yang berlaku.

Dengan stabilitas capaian opini WTP, BPKPD menunjukkan kematangan tata kelola keuangan daerah yang tinggi, serta kesiapan untuk mempertahankan opini WTP di tahun-tahun berikutnya melalui penguatan pengendalian internal dan tindak lanjut rekomendasi BPK secara berkelanjutan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten. Berdasarkan data yang tersedia, realisasi opini BPK pada setiap tahun adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat kesenjangan antara target dan realisasi kinerja, sehingga seluruh target yang telah

ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Konsistensi capaian opini WTP selama empat tahun berturut-turut mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tidak adanya fluktuasi dalam capaian indikator menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah telah berada pada kondisi yang stabil dan terkendali. Hal ini juga menandakan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan efektif dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal serta meminimalkan potensi kesalahan material.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, antara lain konsistensi penerapan SAP berbasis akrual, efektivitas koordinasi dan konsolidasi laporan keuangan oleh BPKPD, serta komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK secara berkesinambungan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
WTP	WTP	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan tolok ukur strategis yang mencerminkan tingkat akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Target akhir indikator ini ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai bagian dari sasaran pembangunan yang berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

Berdasarkan RPD, target akhir opini LKPD pada Tahun Anggaran 2025 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Target ini mencerminkan komitmen jangka menengah pemerintah daerah dalam menjaga kualitas penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan memenuhi kriteria pemeriksaan BPK.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi capaian opini LKPD adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga realisasi capaian telah memenuhi target akhir RPD. Pencapaian ini menunjukkan bahwa seluruh kriteria penilaian BPK, meliputi kesesuaian SAP, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), telah terpenuhi secara memadai.

Hasil ini menegaskan konsistensi BPKPD dalam mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah, serta kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan.

Keberhasilan mencapai target akhir RPD ini juga mencerminkan kematangan pengelolaan keuangan daerah, efektivitas koordinasi dan konsolidasi laporan keuangan, serta kesiapan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Dengan pencapaian ini, BPKPD menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas opini WTP pada periode berikutnya melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern, perbaikan proses pelaporan, dan peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
WTP	-	-

Perbandingan realisasi indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 dengan capaian nasional belum dapat disajikan secara kuantitatif. Hal ini disebabkan belum tersedianya data pembanding nasional yang terpublikasi secara lengkap dan terverifikasi pada periode penyusunan laporan kinerja ini.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintah Kota Pariaman telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah

memenuhi standar tertinggi dalam penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2) Perbandingan dengan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi 2025	Realisasi Provinsi Sumbar 2025	Capaian
61,56 dengan Predikat B	78,85 dengan predikat BB	78.07%

Berdasarkan perbandingan realisasi indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025, Pemerintah Kota Pariaman memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini sejalan dengan realisasi yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang juga mendapatkan opini WTP pada tahun yang sama.

Kesamaan capaian tersebut menunjukkan bahwa baik Pemerintah Kota Pariaman maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil memenuhi seluruh kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, meliputi kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Dengan capaian yang sama, yaitu sebesar 100%, dapat disimpulkan bahwa posisi kinerja Pemerintah Kota Pariaman berada setara dengan capaian pemerintah provinsi, sehingga tidak terdapat kesenjangan kinerja (gap). Hal ini mencerminkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah Kota Pariaman telah berada pada level yang optimal dan sejalan dengan standar tata kelola keuangan di tingkat provinsi.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pariaman memiliki tingkat kematangan tata kelola keuangan yang tinggi serta mampu mempertahankan konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

3) Perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

No	Nama Kabupaten/Kota	Realisasi 2025
1	Kota Pariaman	WTP
2	Kota Padang	WTP
3	Kota Payakumbuh	WTP
4	Kab. Padang Pariaman	WTP
5	Kota Bukittinggi	WTP
6	Kab. Pesisir Selatan	WTP
7	Kota Solok	WTP
8	Kab. Solok	WTP
9	Kab. Tanah Datar	WTP
10	Kab. Agam	WTP
11	Kab. Dharmasraya	WTP
12	Kab. Sijunjung	WTP
13	Kab. Kep. Mentawai	WTP
14	Kota Padang Panjang	WTP
15	Kota Sawahlunto	WTP
16	Kab. Pasaman	WTP
17	Kab. Pasaman Barat	WTP
18	Kab. Lima Puluh Kota	WTP
19	Kab. Solok Selatan	WTP

Berdasarkan perbandingan realisasi indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, seluruh pemerintah daerah termasuk Kota Pariaman memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Capaian ini menunjukkan bahwa secara regional, kualitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat telah berada pada kategori sangat baik dan relatif merata. Tidak terdapat

perbedaan capaian antar daerah karena seluruhnya telah memenuhi kriteria penilaian Badan Pemeriksa Keuangan, meliputi kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Dengan kondisi tersebut, posisi kinerja Kota Pariaman berada setara dengan kabupaten/kota lainnya, sehingga tidak terdapat kesenjangan (gap) kinerja dalam indikator ini. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Pariaman telah mampu menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah secara konsisten dan memenuhi standar yang berlaku.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh target yang telah ditetapkan dalam RPD(RPD) berhasil dicapai. Keberhasilan ini tidak terlepas dari beberapa faktor strategis berikut:

a) Konsistensi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
   - Penyusunan LKPD telah dilakukan sesuai prinsip akuntansi berbasis akrual, mencakup seluruh pendapatan, belanja, aset, dan liabilitas pemerintah daerah.
   - Penggunaan SAP secara konsisten meningkatkan kualitas penyajian laporan dan meminimalkan kesalahan pencatatan.

b) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)
   - Penerapan prosedur pengendalian internal secara menyeluruh di seluruh unit kerja BPKPD memastikan transaksi tercatat dengan benar dan memadai.
   - Evaluasi rutin dan monitoring berkala memungkinkan identifikasi potensi risiko serta penyelesaian masalah secara cepat.

c) Koordinasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan

- BPKPD secara aktif melakukan konsolidasi laporan keuangan perangkat daerah, serta memberikan bimbingan teknis dan review sebelum penyampaian LKPD ke BPK.
- Kolaborasi yang baik antarunit kerja mempercepat penyelesaian laporan dan meningkatkan kualitas dokumen.

d) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
- Pemerintah daerah secara konsisten menindaklanjuti rekomendasi BPK dari pemeriksaan tahun sebelumnya.
- Penyelesaian temuan BPK membantu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kualitas pengelolaan keuangan.

e) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- Pelatihan dan pembinaan aparatur pengelola keuangan meningkatkan kompetensi teknis dan pemahaman terhadap SAP, pengendalian intern, serta prosedur pelaporan.

Dalam rangka mencapai target opini WTP atas LKPD, Pemerintah Kota Pariaman melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) melaksanakan berbagai upaya strategis yang mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan efektif.

1. Konsistensi Penerapan SAP

   Penyusunan LKPD dilaksanakan berdasarkan SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan SAP dilakukan secara konsisten terhadap seluruh transaksi keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas. Konsistensi penerapan SAP bertujuab untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan, memastikan kesesuaian klasifikasi akun serta meminimalkan potensi kesalahan pencatatan yang dapat mempengaruhi kewajaran dalam laporan keuangan.

2. Penguatan SPI

   Pemerintah Kota Pariaman melakukan Penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) melalui penerapan mekamisme pengendalian, verifikasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala

pada seluruh perangkat daerah pengelola keuangan daerah. Pelaksanaan pengendalian intern dilakukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tercatat secara tertib, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Koordinasi dan konsolidasi laporan keuangan

   BPKPD melaksanakan koordinasi dan konsolidasi laporan keuangan perangkat daerah secara aktif dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui rekonsiliasi data keuangan, review laporan keuangan serta melaksanakan bimbingan teknis kepada pejabat pengelola keuangan dalam mendukung penyusunan LKPD. Koordinasi yang baik antar perangkat daerah mendukung percepatan penyelesaian laporan keuangan serta meningkatkan kualitas dokumen pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

   Pemerintah daerah secara konsisten melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya. Penyelesaian rekomendasi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai langkah perbaikan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK juga bertujuan untuk meminimalkan temuan berulang dan meningkatkan kualitas pengelolaan ekauangan daerah pada tahun berikutnya.

5. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

   Dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, Pemerintah Kota Pariaman melaksanakan program pelatihan, pembinaan dan bimbingan teknis bagi aparatur pengelola keuangan daerah. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi teknis aparatur dalam penerapan SAP berbasis akrual, penguatan pengendalian intern, penyusunan laporan keuangan serta pemahaman terhadap pengelolaan keuangan daerah baik secara aplikasi maupun regulasi yang berlaku.

6. Optimalisasi program dan kegiatan pendukung

Pencapaian indikator opini WTP didukung melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.786.920.818 dan realisasi anggaran Rp2.646.594.800 atau sebesar 94,96%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan strategis yang saling terintegrasi yaitu:

a) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini merupakan faktor strategis yang berperan dalam tahap awal pengelolaan keuangan daerah. Kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik berdampak langsung terhadap ketepatan pelaksanaan anggaran dan kewajaran penyajian laporan keuangan. Kegiatan ini mendukung pencapaian opini WTP melalui:

- Konsistensi antara dokumen perencanaan (RKPD, KUA-PPAS, dan APBD) dengan pelaksanaan anggaran.
- Ketepatan klasifikasi dan struktur anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Penguatan pengendalian internal sejak tahap perencanaan melalui proses verifikasi dan reviu.
- Sinkronisasi data keuangan antar perangkat daerah.

Dengan demikian, kegiatan ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian preventif dalam meminimalkan potensi kesalahan dan temuan audit.

b) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini berperan dalam pengelolaan arus kas, penatausahaan transaksi, serta pengendalian penerimaan dan pengeluaran daerah. Pelaksanaan kegiatan ini memberikan dampak positif berupa:

- Menurunnya selisih kas dan kesalahan pencatatan
- Ketepatan waktu dalam pengakuan dan penyetoran pendapatan
- Berkurangnya temuan audit terkait pengelolaan kas dan belanja

Kegiatan ini merupakan instrumen pengendalian keuangan yang bersifat preventif dan korektif, yang memastikan pengelolaan kas daerah berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.

c) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini merupakan inti dari proses penyusunan LKPD dan memiliki peran paling langsung dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Kontribusi kegiatan ini meliputi:

- Penerapan SAP berbasis akrual secara konsisten.
- Penyusunan laporan keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang lengkap dan transparan.
- Penguatan kepatuhan terhadap peraturan melalui monitoring dan reviu.
- Peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) melalui rekonsiliasi dan validasi data.

Kegiatan ini menjadi pilar utama dalam memenuhi seluruh kriteria penilaian BPK.

7. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Pemerintah Kota Pariaman juga melakukan penguatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah guna mendukung proses pencatatan, rekonsiliasi, monitoring, dan pelaporan keuangan secara lebih efektif, efesien dan tepat waktu. Implementasi teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan akurasi data, mempercepat proses penyusunan laporan keuangan, serta mendukung transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Pariaman mengimplementasikan aplikasi SIPD Kemendagri sebagai sistem informasi yang mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara elektronik dan terintegrasi antar perangkat daerah.

8. Monitoring dan evaluasi secara berkala

BPKPD melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kendala, meminimalkan potensi kesalahan, meningkatkan efektivitas SPI serta memastikan tercapainya target kinerja dan kualitas laporan keuangan secara akuntabel dan transparan.

Upaya yang dilakukan seperti monitoring pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada setiap perangkat daerah untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi data keuangan secara berkala serta melaksanakan koordinasi dengan pejabat pengelola keuangan pada perangkat daerah.

Dengan upaya-upaya tersebut, Pemerintah Kota Pariaman menargetkan agar capaian opini WTP tetap dipertahankan, sekaligus meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Opini WTP BPK terhadap LKPD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.786.920.818	2.646.594.800	94.96%	Menunjang

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan utama yang memiliki peran strategis dan saling terintegrasi, yaitu:

d) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini merupakan faktor strategis yang berperan dalam tahap awal pengelolaan keuangan daerah. Kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik berdampak langsung terhadap ketepatan pelaksanaan anggaran dan kewajaran penyajian laporan keuangan.

Kegiatan ini mendukung pencapaian opini WTP melalui:

- Konsistensi antara dokumen perencanaan (RKPD, KUA-PPAS, dan APBD) dengan pelaksanaan anggaran
- Ketepatan klasifikasi dan struktur anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Penguatan pengendalian internal sejak tahap perencanaan melalui proses verifikasi dan reviu
- Sinkronisasi data keuangan antar perangkat daerah

Dengan demikian, kegiatan ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian preventif dalam meminimalkan potensi kesalahan dan temuan audit.

e) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini berperan dalam pengelolaan arus kas, penatausahaan transaksi, serta pengendalian penerimaan dan pengeluaran daerah.

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan dampak positif berupa:

- Menurunnya selisih kas dan kesalahan pencatatan
- Ketepatan waktu dalam pengakuan dan penyetoran pendapatan
- Berkurangnya temuan audit terkait pengelolaan kas dan belanja

Kegiatan ini merupakan instrumen pengendalian keuangan yang bersifat preventif dan korektif, yang memastikan pengelolaan kas daerah berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.

f) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini merupakan inti dari proses penyusunan LKPD dan memiliki peran paling langsung dalam menentukan kualitas laporan keuangan.

Kontribusi kegiatan ini meliputi:

- Penerapan SAP berbasis akrual secara konsisten
- Penyusunan laporan keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang lengkap dan transparan
- Penguatan kepatuhan terhadap peraturan melalui monitoring dan reviu
- Peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) melalui rekonsiliasi dan validasi data

Kegiatan ini menjadi pilar utama dalam memenuhi seluruh kriteria penilaian BPK.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis: Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Opini WTP BPK terhadap LKPD	2.786.920.818	2.646.594.800	100%	5,03%	62,59	Efisien

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE} = \frac{(\mathbf{2.786.920.818} \times \mathbf{100\%}) - \mathbf{2.646.594.800}}{\mathbf{2.786.920.818}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{TE} = \mathbf{5,03\%}$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%
- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

Nilai Efisiensi = $\mathbf{50} + \left(\frac{\boldsymbol{TE}}{\mathbf{20}} \times \mathbf{50}\right)$

$\boldsymbol{NE} = \mathbf{50} + \left(\frac{\mathbf{5,03}}{\mathbf{20}} \times \mathbf{50}\right)$

NE= $\mathbf{62,59}$

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 5,03% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 62,59%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator Opini BPK terhadap LKPD telah dilaksanakan secara efisien, dimana capaian kinerja sebesar 100% dapat diraih tanpa menghabiskan seluruh anggaran yang tersedia.

17) Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Agar penerapannya berjalan terintegrasi dan terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai kerangka kerja Tata Kelola dan Manajemen SPBE sehingga pelaksanaannya efektif, efisien, berkelanjutan, serta menghasilkan layanan yang berkualitas.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian PANRB bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan SPBE. Pada tahun 2025, pemantauan

dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE serta Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024.

Hasil pemantauan SPBE tahun 2025 diharapkan menjadi dasar dalam menentukan langkah tindak lanjut guna meningkatkan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga kualitas layanan kepada masyarakat meningkat dan terwujud Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Penerapan SPBE diukur menggunakan model tingkat kematangan SPBE. Setiap tingkat kematangan dideskripsikan melalui kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Model tingkat kematangan tersebut terdiri atas 5 (lima) tingkatan. Semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka semakin tinggi pula kapabilitas instansi tersebut.

Penilaian dalam Pemantauan SPBE didasarkan pada data dan informasi yang disampaikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri dan Penilaian Dokumen.

Berdasarkan pedoman evaluasi SPBE dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020, nilai indeks SPBE diklasifikasikan sebagai berikut:

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 -<4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	<1,8	Kurang

Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilakukan melalui pengukuran terhadap beberapa domain dan aspek yang mencerminkan tingkat kematangan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap domain dan aspek memiliki bobot penilaian

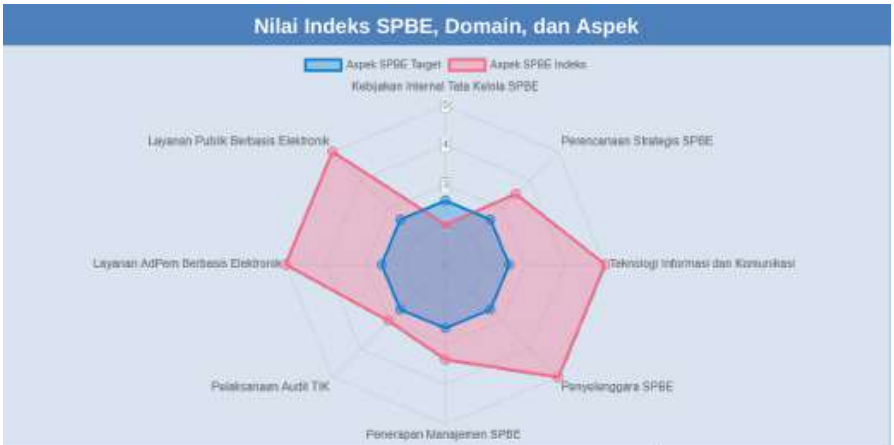
yang berbeda sesuai dengan tingkat kontribusinya terhadap keberhasilan implementasi SPBE secara menyeluruh. Pembobotan ini bertujuan untuk memastikan bahwa evaluasi tidak hanya menilai keberadaan kebijakan dan tata kelola, tetapi juga efektivitas manajemen serta kualitas layanan elektronik yang dihasilkan. Adapun domain dan aspek penilaian SPBE beserta bobotnya adalah sebagai berikut:

Domain / Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 – Kebijakan SPBE	13%
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 – Manajemen SPBE	16,5%
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 – Audit TIK	4,5%
Domain 4 – Layanan SPBE	45,5%
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 – Layanan Publik	18%

Penetapan target indikator Indeks SPBE Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024–2026, namun karena realisasi Tahun 2024 yaitu 3,44 melebih target tahun 2025 sebagaimana tertuang pada dokumen RPD yaitu 2,85 maka dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menjadi 3,51.

Berdasarkan hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025, Pemerintah Kota Pariaman memperoleh nilai Indeks SPBE sebesar 4,18 dengan predikat Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan SPBE telah berjalan secara efektif dan terintegrasi serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital secara optimal. Nilai tersebut mencerminkan tingkat kematangan implementasi SPBE yang tinggi, di

mana pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi bagian penting dalam mendukung proses bisnis pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.



Nama Indeks	Nilai 2025
SPBE	**4,18**
Domain Kebijakan SPBE	2,00
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*2,00*
Domain Tata Kelola SPBE	4,40
Perencanaan Strategis SPBE	*3,50*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*5,00*
Penyelenggara SPBE	*5,00*
Domain Manajemen SPBE	3,27
Penerapan Manajemen SPBE	*3,38*
Audit TIK	*3,00*
Domain Layanan SPBE	5,00
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*5,00*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*5,00*

Ditinjau berdasarkan domain penilaian, Domain Kebijakan SPBE memperoleh nilai 2,00 dan menjadi aspek dengan capaian terendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi internal masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait kebijakan arsitektur SPBE, manajemen data, keamanan informasi, serta audit TIK. Sebagian besar indikator kebijakan masih berada pada tingkat kematangan level 2, bahkan terdapat indikator yang masih berada pada level 1, sehingga belum memenuhi target tingkat kematangan minimal yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi SPBE yang telah berjalan baik belum sepenuhnya didukung oleh fondasi kebijakan yang matang dan terstandarisasi.

Pada Domain Tata Kelola SPBE, Pemerintah Kota Pariaman memperoleh nilai 4,40 yang menunjukkan kinerja sangat baik. Perencanaan

strategis SPBE telah berjalan cukup matang, sementara aspek teknologi informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan SPBE telah mencapai nilai maksimal. Capaian ini menandakan bahwa pengelolaan infrastruktur, aplikasi, serta mekanisme penyelenggaraan sistem elektronik telah dilaksanakan secara efektif dan mendukung integrasi layanan pemerintahan berbasis digital.

Sementara itu, Domain Manajemen SPBE memperoleh nilai 3,27 yang menunjukkan bahwa praktik manajemen SPBE telah diterapkan dengan baik namun masih memerlukan optimalisasi lebih lanjut. Beberapa aspek seperti manajemen risiko, keamanan informasi, dan pelaksanaan audit TIK telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya terukur dan terdokumentasi secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan pengendalian dan penguatan proses manajemen agar keberlanjutan implementasi SPBE dapat terjamin.

Adapun Domain Layanan SPBE menjadi capaian terbaik dengan nilai maksimal 5,00, baik pada layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik maupun layanan publik. Hasil ini menunjukkan bahwa layanan digital yang disediakan telah terintegrasi, berorientasi pada kebutuhan pengguna, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mayoritas indikator layanan telah mencapai tingkat kematangan optimal, yang menandakan keberhasilan Pemerintah Kota Pariaman dalam menghadirkan pelayanan publik berbasis elektronik secara efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil pemantauan menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya capaian pada domain layanan dan tata kelola dengan masih rendahnya kematangan pada domain kebijakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi SPBE telah berkembang pesat secara operasional, namun masih memerlukan penguatan aspek regulasi dan standardisasi internal agar penerapan SPBE menjadi lebih berkelanjutan, konsisten, serta selaras dengan prinsip tata kelola pemerintah digital nasional.

1) Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 13 Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks SPBE	3.51 (Sangat Baik)	4.18 (Sangat Baik)	119.08%	Sangat Tinggi

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada Sasaran Strategis 13 yaitu *Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel*, capaian Indeks SPBE menunjukkan kinerja yang sangat positif. Target Indeks SPBE yang ditetapkan sebesar 3,51 berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 4,18. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 119,08 persen dan berada pada kategori Sangat Tinggi.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah berjalan melampaui perencanaan yang ditetapkan. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa upaya penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas layanan elektronik telah dilaksanakan secara efektif. Nilai realisasi yang lebih tinggi dari target juga mencerminkan meningkatnya kapasitas birokrasi dalam mengelola proses pemerintahan secara lebih transparan, efisien, dan terintegrasi.

Selain itu, capaian ini menunjukkan bahwa transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi, khususnya dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik. Namun demikian, keberhasilan ini tetap perlu diimbangi dengan penguatan aspek kebijakan dan manajemen SPBE agar capaian yang tinggi dapat dipertahankan secara berkelanjutan

serta mampu mendukung peningkatan kualitas birokrasi di masa mendatang.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pariaman Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis sebagai upaya penguatan implementasi SPBE. Kegiatan tersebut antara lain Pelatihan *Tools Data* yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025 serta kegiatan Pemaparan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2025.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, serta mendorong penerapan SPBE yang terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dapat semakin optimal dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Pariaman.




Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Tools Data, Tanggal 12 Juni 2025






Dokumentasi Kegiatan Pemaparan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Tanggal 24 Oktober 2025

2) Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
2,64 (Baik)	2,65 (Baik)	3,44 (Baik)	4,18 (Sangat Baik)	101,53%	98,14%	127,40%	119.08%

Berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indeks SPBE dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan pada penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Pariaman. Pada tahun 2022 nilai Indeks SPBE tercatat sebesar 2,64 dengan predikat baik, kemudian mengalami peningkatan menjadi 2,65 pada tahun 2023. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan nilai indeks mencapai 3,44 dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 4,18 dengan predikat sangat baik.

Kenaikan nilai indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam implementasi SPBE, baik dari sisi tata kelola, manajemen, maupun penyediaan layanan berbasis elektronik. Lonjakan nilai pada periode 2024 hingga 2025 mengindikasikan bahwa berbagai upaya penguatan transformasi digital, peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi, serta pengembangan layanan elektronik telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja SPBE.

Ditinjau dari capaian kinerja, persentase capaian menunjukkan fluktuasi namun tetap berada di atas target yang ditetapkan. Pada

tahun 2022 capaian mencapai 101,53 persen, kemudian sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 98,14 persen. Selanjutnya terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2024 hingga mencapai 127,40 persen, dan pada tahun 2025 tetap berada pada kategori sangat tinggi dengan capaian sebesar 119,08 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja SPBE tidak hanya stabil tetapi juga mampu melampaui target yang telah direncanakan.

Secara keseluruhan, tren peningkatan realisasi dan capaian kinerja tersebut mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Pariaman dalam memperkuat birokrasi digital secara bertahap dan berkelanjutan. Meskipun demikian, konsistensi peningkatan perlu terus dijaga melalui penguatan kebijakan internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi manajemen SPBE agar capaian yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
4,18 (Sangat Baik)	3 (Baik)	139.33%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026, capaian Indeks SPBE Kota Pariaman menunjukkan hasil yang sangat positif. Realisasi Indeks SPBE pada tahun 2025 mencapai nilai 4,18 dengan predikat sangat baik, sementara target akhir RPD yang ditetapkan sebesar 3,00 dengan predikat baik. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 139,33 persen atau telah melampaui target yang direncanakan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan transformasi digital pemerintahan di Kota Pariaman berkembang lebih cepat dari proyeksi perencanaan daerah. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung implementasi SPBE, termasuk penguatan tata kelola

teknologi informasi serta peningkatan kualitas layanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.

Melampauinya target akhir RPD juga mengindikasikan bahwa kapasitas birokrasi dalam mengadopsi sistem pemerintahan digital telah berada pada tingkat kematangan yang tinggi. Kondisi ini menjadi modal strategis bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan kebijakan selanjutnya tidak hanya pada peningkatan nilai indeks, tetapi juga pada penguatan integrasi layanan, keberlanjutan sistem, serta optimalisasi manfaat SPBE bagi masyarakat.

Meskipun target telah terlampaui, upaya peningkatan tetap perlu dilakukan, terutama pada aspek penguatan kebijakan internal dan manajemen SPBE agar capaian kinerja yang tinggi dapat dipertahankan secara konsisten serta selaras dengan arah pengembangan pemerintah digital di masa mendatang.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
4,18 (Sangat Baik)	3,23 (Baik)	129.41%

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Indeks SPBE Tahun 2025 antara Pemerintah Kota Pariaman dengan capaian nasional, menunjukkan bahwa kinerja SPBE Kota Pariaman berada di atas rata-rata nasional. Nilai Indeks SPBE Kota Pariaman tercatat sebesar 4,18 dengan predikat sangat baik, sedangkan rata-rata nasional berada pada nilai 3,23 dengan predikat baik. Dengan demikian, tingkat capaian Kota Pariaman terhadap nilai nasional mencapai 129,41 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Pariaman telah berkembang lebih maju dibandingkan dengan rata-rata penerapan SPBE secara nasional. Keunggulan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola digital, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan

kualitas layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.

Selain itu, posisi capaian yang berada di atas rata-rata nasional menunjukkan adanya komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital birokrasi secara terencana dan berkelanjutan. Kondisi ini sekaligus menjadi indikator bahwa praktik penyelenggaraan SPBE di Kota Pariaman dapat menjadi referensi atau praktik baik (*best practice*) dalam pengembangan pemerintah digital di tingkat daerah.

Meskipun demikian, peningkatan kualitas tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada penguatan kebijakan internal dan manajemen SPBE, agar keunggulan yang telah dicapai dapat dipertahankan sekaligus meningkatkan daya saing kinerja SPBE pada tingkat nasional di masa mendatang.

2) Perbandingan dengan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi 2025	Realisasi Provinsi Sumbar 2025	Capaian
4,18 (Sangat Baik)	Tidak ikut Pemantauan	-

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Indeks SPBE Tahun 2025 antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perbandingan capaian tidak dapat dilakukan secara langsung. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak mengikuti pelaksanaan pemantauan SPBE, sehingga tidak tersedia nilai indeks yang dapat dijadikan sebagai pembanding.

Meskipun demikian, Pemerintah Kota Pariaman tetap menunjukkan capaian yang sangat baik dengan nilai Indeks SPBE sebesar 4,18 dengan predikat sangat baik. Ketiadaan data pembanding pada tingkat provinsi menyebabkan analisis komparatif tidak dapat dilakukan, baik dari sisi selisih nilai maupun tingkat capaian kinerja. Oleh karena itu, evaluasi kinerja SPBE Kota Pariaman pada tahun 2025 lebih tepat dilakukan melalui

perbandingan terhadap target kinerja daerah, capaian nasional, serta tren peningkatan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi ini tidak mengurangi makna capaian yang telah diraih, namun menjadi catatan bahwa perbandingan regional belum dapat menggambarkan posisi relatif Kota Pariaman terhadap pemerintah provinsi pada periode penilaian tersebut.

3) Perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Peringkat	Kabupaten/Kota	Nilai 2025	Predikat/ Keterangan
1	Kabupaten Pesisir Selatan	4,63	Memuaskan
2	Kota Solok	4,20	Memuaskan
3	Kota Pariaman	4,18	Sangat Baik
4	Kota Padang	4,17	Sangat Baik
5	Kabupaten Padang Pariaman	4,07	Sangat Baik
6	Kota Payakumbuh	3,89	Sangat Baik
7	Kabupaten Solok	3,71	Sangat Baik
8	Kota Sawahlunto	3,68	Sangat Baik
9	Kabupaten Sijunjung	3,52	Sangat Baik
10	Kabupaten Solok Selatan	3,50	Sangat Baik
11	Kabupaten Lima Puluh Kota	3,39	Baik
12	Kabupaten Agam	2,96	Baik
13	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2,60	Baik
14	Kota Bukittinggi	2,56	Cukup
15	Kabupaten Pasaman Barat	–	Tidak Ikut Pemantauan
16	Kota Padang Panjang	–	Tidak Ikut Pemantauan
17	Kabupaten Tanah Datar	–	Tidak Ikut Pemantauan
18	Kabupaten Dharmasraya	–	Tidak Ikut Pemantauan

19	Kabupaten Pasaman	–	Tidak Ikut Pemantauan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil perbandingan Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Pemerintah Kota Pariaman memperoleh nilai sebesar 4,18 dengan predikat sangat baik dan menempati posisi tiga besar di antara daerah yang mengikuti pemantauan SPBE. Posisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kematangan penerapan SPBE di Kota Pariaman berada pada kelompok daerah dengan kinerja tertinggi di tingkat provinsi serta mencerminkan keberhasilan dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik secara optimal.

Secara komparatif, capaian Kota Pariaman berada sangat dekat dengan daerah yang memperoleh predikat memuaskan, dengan selisih nilai yang relatif kecil dari peringkat teratas. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan SPBE di Kota Pariaman telah berkembang secara signifikan, terutama pada aspek layanan digital dan tata kelola teknologi informasi yang mampu mendukung peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat berada pada kategori sangat baik dan baik, namun masih terdapat daerah yang berada pada kategori cukup. Kondisi tersebut menunjukkan adanya variasi tingkat kematangan SPBE antar daerah. Dalam konteks ini, capaian Kota Pariaman mencerminkan tingkat kesiapan digital yang lebih maju dibandingkan sebagian besar kabupaten/kota lainnya.

Selain itu, terdapat beberapa pemerintah daerah yang tidak mengikuti pemantauan SPBE Tahun 2025, yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Pasaman. Oleh karena itu, perbandingan kinerja regional belum sepenuhnya

menggambarkan kondisi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Meskipun demikian, berdasarkan data daerah yang mengikuti pemantauan, Kota Pariaman tetap menunjukkan posisi yang kompetitif dan berada pada kelompok daerah dengan kinerja SPBE unggul.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pariaman telah berhasil memperkuat transformasi digital birokrasi secara konsisten. Ke depan, penguatan kebijakan internal, peningkatan kualitas manajemen SPBE, serta inovasi layanan digital perlu terus dilakukan agar capaian dapat meningkat menuju predikat memuaskan sekaligus mempertahankan posisi unggul di tingkat provinsi.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

No.	Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target	Upaya yang telah dilakukan
1	Pelaksanaan Kebijakan SPBE yang Konsisten	• Menyusun dan menetapkan Dokumen Arsitektur SPBE sebagai pedoman integrasi proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur • Melaksanakan sosialisasi Dokumen SPBE dengan mengundang seluruh OPD instansi
2	Penguatan Tata Kelola dan Manajemen SPBE	• Menetapkan SK terkait System Development Life Cycle (SDLC) sebagai pedoman standar dalam pengembangan dan pengelolaan aplikasi • Menetapkan SK Manajemen Risiko SPBE

3	Pemanfaatan Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi secara Optimal	• Mengembangkan dan memanfaatkan aplikasi pemerintahan sesuai dengan Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan • Dalam rencana menyesuaikan pengembangan aplikasi dengan tahapan SDLC agar sistem lebih terstruktur dan terdokumentasi
4	Adanya Dokumen Perencanaan SPBE yang Terstruktur dan Terarah	• Menyusun Peta Rencana SPBE sebagai panduan tahapan pengembangan jangka menengah dan panjang. • Menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan kebutuhan proses bisnis dan pelayanan perangkat daerah

Sebagai upaya peningkatan kinerja penerapan SPBE ke depan, Pemerintah Kota Pariaman menetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan, antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Implementasi Peta Rencana dan Arsitektur SPBE
2. Optimalisasi Penerapan SDLC dalam Pengembangan Aplikasi
3. Peningkatan Manajemen Risiko SPBE Secara Berkelanjutan
4. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPBE
5. Peningkatan Kapasitas SDM dan Koordinasi Lintas Unit Kerja/OPD

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 13 Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel					
Indikator	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/

Kinerja Utama					Tidak Menunjang
Indeks SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp1.784.554.442	Rp1.738.052.303	97,39%	Menunjang

Berdasarkan hasil analisis terhadap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 13 yaitu meningkatnya birokrasi yang kapabel, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian Indeks SPBE. Program ini didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.784.554.442 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.738.052.303 atau mencapai tingkat penyerapan sebesar 97,39 persen.

Tingginya realisasi anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kegiatan dalam program tersebut berperan dalam mendukung pengembangan, pengelolaan, serta optimalisasi aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang menjadi komponen utama dalam peningkatan kualitas layanan digital dan tata kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Keberhasilan pelaksanaan program ini turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai Indeks SPBE yang mencapai predikat sangat baik. Dengan demikian, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dapat dikategorikan sebagai program yang menunjang pencapaian kinerja, karena mampu mendukung implementasi SPBE secara lebih terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Meskipun capaian realisasi anggaran telah tinggi, optimalisasi program tetap perlu dilakukan melalui peningkatan integrasi sistem, penguatan tata kelola aplikasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dampak program terhadap peningkatan kinerja SPBE dapat semakin maksimal dan berkelanjutan.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis: Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Indeks SPBE	Rp1.784.554.442	Rp1.738.052.303	119.08%	21,69%	100	Efisien

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE} = \frac{(\mathbf{1.784.554.442} \times \mathbf{119,08\%}) - \mathbf{1.738.052.303}}{\mathbf{1.784.554.442}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{TE} = \mathbf{21,69\%}$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%
- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

Nilai Efisiensi = $\mathbf{21,69\% > 20\%}$

NE= $\mathbf{100}$

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Indeks SPBE, diperoleh Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 21,69 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program mampu menghasilkan capaian kinerja yang tinggi dengan penggunaan anggaran yang relatif optimal. Realisasi anggaran sebesar Rp1.738.052.303 dari pagu anggaran Rp1.784.554.442 menunjukkan bahwa target kinerja tidak hanya tercapai, tetapi juga melampaui target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 119,08 persen.

Sesuai dengan ketentuan konversi efisiensi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, nilai Tingkat Efisiensi yang melebihi batas atas 20 persen dikategorikan sebagai efisiensi maksimal. Oleh karena itu, Nilai Efisiensi (NE) ditetapkan sebesar 100. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja Indeks SPBE telah dilaksanakan secara sangat efisien, di mana peningkatan kinerja dapat dicapai tanpa diikuti peningkatan penggunaan anggaran secara proporsional.

Capaian efisiensi ini mencerminkan efektivitas perencanaan program, ketepatan pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, khususnya dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas layanan pemerintahan berbasis elektronik. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa strategi implementasi SPBE telah mampu memberikan hasil yang maksimal dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan terkendali.

Ke depan, efisiensi yang telah dicapai perlu dipertahankan melalui penguatan integrasi sistem, peningkatan kualitas manajemen SPBE, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar kinerja yang tinggi tetap dapat dicapai secara berkelanjutan tanpa meningkatkan beban anggaran secara signifikan.

18) Indeks Profesionalitas ASN

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berwibawa menuntut adanya tata kelola birokrasi yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah secara fundamental akan tercapai secara optimal apabila dikelola oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas, profesional, dan bertanggung jawab terhadap amanah publik yang diembannya. Hal ini sejalan dengan konstelasi reformasi birokrasi nasional yang ditegaskan melalui amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menitikberatkan pada penerapan Sistem Merit dan transformasi manajemen kepegawaian dari sekadar administrasi personalia menuju manajemen modal manusia (Human Capital Management) yang berdaya saing global. Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja yang memuat hasil pengukuran dan analisa kinerja secara komprehensif atas Indikator Kinerja Utama (IKU).

Bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pariaman, instrumen utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan tata kelola sumber daya manusia adalah Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN). Indeks Profesionalitas ASN merupakan sebuah ukuran statistik terpadu yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, riwayat kompetensi, rekam jejak kinerja, dan tingkat kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya sehari-hari. Pengukuran IP ASN ini diatur secara komprehensif dan rigid melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 38 Tahun 2018 serta diturunkan tata laksana teknisnya melalui Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Tujuan utama dari pengukuran ini adalah untuk menciptakan standar basis data tunggal yang valid terkait profil profesionalitas pegawai, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia, pemetaan talenta (talent pool), serta perencanaan suksesi kepemimpinan di lingkungan instansi pemerintah.

Secara metodologis, konstruksi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dibangun melalui agregasi dari empat dimensi utama yang memiliki pembobotan yang merepresentasikan tingkat urgensi dan dampaknya

terhadap produktivitas birokrasi. Dimensi pertama adalah Dimensi Kualifikasi yang memiliki bobot sebesar dua puluh lima persen. Dimensi ini digunakan untuk mengukur data dan informasi mengenai jenjang kualifikasi pendidikan formal tertinggi yang telah dicapai oleh seorang pegawai negeri, mulai dari pendidikan dasar hingga strata doktoral. Dimensi ini merepresentasikan fondasi akademis dan kapasitas intelektual dasar yang dimiliki aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas teknis maupun manajerial. Dimensi kedua, yang merupakan tulang punggung dari indeks ini dengan bobot terbesar yakni empat puluh persen, adalah Dimensi Kompetensi. Dimensi ini secara spesifik mengukur riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh ASN yang memiliki keselarasan dengan pelaksanaan tugas jabatan, mencakup keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dengan pemenuhan standar minimal dua puluh jam pelajaran per tahun, serta partisipasi dalam seminar maupun lokakarya.

Selanjutnya, dimensi ketiga adalah Dimensi Kinerja yang memiliki bobot tiga puluh persen. Dimensi ini mengukur tingkat pencapaian sasaran kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja yang disusun secara berjenjang (cascading) pada tingkat individu dan unit organisasi. Pengukuran ini secara empiris didasarkan pada dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada aplikasi e-Kinerja terintegrasi, yang secara ketat memperhatikan target, realisasi capaian, hasil, manfaat, serta evaluasi perilaku kerja pegawai secara periodik. Terakhir, dimensi keempat adalah Dimensi Disiplin yang memiliki bobot lima persen. Meskipun secara persentase terlihat paling kecil, dimensi ini merupakan prasyarat mutlak yang mengukur kepatuhan aparatur terhadap norma, standar, dan aturan kepegawaian. Penilaian pada dimensi ini dititikberatkan pada ada tidaknya riwayat hukuman disiplin, baik pada tingkatan ringan, sedang, maupun berat, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dalam kurun waktu lima tahun terakhir pelaksanaan tugas.

Hasil kalkulasi dari integrasi keempat dimensi tersebut akan menghasilkan suatu nilai akhir Indeks Profesionalitas ASN dengan rentang skala absolut dari nol hingga seratus. Interpretasi atau sebutan tingkat profesionalitas ASN kemudian diklasifikasikan ke dalam lima kategori

pemeringkatan, yaitu: kategori Sangat Tinggi bagi instansi atau individu yang meraih rentang nilai sembilan puluh satu hingga seratus, kategori Tinggi untuk rentang nilai delapan puluh satu hingga sembilan puluh, kategori Sedang untuk rentang nilai tujuh puluh satu hingga delapan puluh, kategori Rendah untuk rentang nilai enam puluh satu hingga tujuh puluh, dan kategori Sangat Rendah bagi yang memperoleh nilai enam puluh ke bawah. Penilaian dan validasi akhir atas pengukuran ini dilakukan secara terpusat oleh Badan Kepegawaian Negara melalui instrumen Sistem Informasi ASN (SI-ASN) dan dikoordinasikan pelaksanaannya di tingkat regional oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru untuk wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat.

Indeks Profesionalitas ASN sejatinya berfungsi tidak hanya sebagai alat ukur administratif pemenuhan regulasi, tetapi lebih jauh bertransformasi menjadi instrumen strategis bagi pimpinan daerah dalam memetakan kesenjangan kompetensi antar struktur, memandu investasi anggaran pendidikan dan pelatihan agar lebih tepat sasaran, serta menjadi katalisator bagi penerapan sistem merit yang murni dalam setiap tahapan manajemen sumber daya manusia aparatur. Analisis komprehensif atas Laporan Kinerja ini disusun guna memberikan evaluasi yang mendalam, objektif, dan berbasis bukti atas capaian Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Pariaman pada Tahun Anggaran 2025. Analisis ini akan membedah secara rinci perbandingan capaian terhadap target, dinamika fluktuasi historis dalam lima tahun terakhir, keselarasan pencapaian dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah, komparasi kinerja pada konstelasi persaingan regional dan nasional, serta merumuskan kausalitas atas hambatan yang terjadi beserta orkestrasi rekomendasi perbaikan tata kelola sumber daya manusia birokrasi ke depan.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 13 Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks	85,96	85,40 (Tinggi)	99.34%	Sangat

Profesional ASN	(Tinggi)			Tinggi

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pekanbaru Nomor 120/B-BM/SD/KR.XII/2026 tanggal 9 Maret 2026 tentang *Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru*, diketahui bahwa nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Pariaman tercatat sebesar 85,40 dengan kategori Tinggi.

Nilai tersebut merupakan hasil agregasi dari empat dimensi penilaian Indeks Profesionalitas ASN yang meliputi kualifikasi sebesar 21,81, kompetensi 33,56, kinerja 25,04, dan disiplin 5,00. Dalam pengukuran tersebut, jumlah ASN yang menjadi objek penilaian di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman tercatat sebanyak 2.362 ASN, yang terdiri dari 2.278 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 84 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Apabila dilihat berdasarkan jenis pegawai, nilai Indeks Profesionalitas ASN untuk PNS Kota Pariaman mencapai 85,54 dengan kategori Tinggi, sedangkan nilai indeks untuk PPPK sebesar 81,69 yang juga berada pada kategori Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa baik PNS maupun PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman telah memiliki tingkat profesionalitas yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tabel di atas, Pemerintah Kota Pariaman melalui BKPSDM menetapkan target Indeks Profesionalitas ASN sebesar 85,96 pada tahun anggaran berjalan. Target tersebut berada pada kategori Tinggi dan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas manajemen sumber daya aparatur serta memperkuat profesionalitas ASN dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dihitung melalui sistem pengelolaan kepegawaian nasional menunjukkan bahwa realisasi kinerja mencapai skor 85,40, yang secara klasifikasi juga

berada dalam kategori Tinggi. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, tingkat capaian indikator kinerja ini mencapai 99,34 persen, sehingga berdasarkan kriteria penilaian kinerja termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pembinaan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman secara umum telah berjalan secara efektif dan mampu mempertahankan tingkat profesionalitas aparatur pada level yang baik.

Meskipun demikian, masih terdapat selisih sebesar 0,56 poin antara target dan realisasi yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Selisih tersebut menunjukkan bahwa meskipun kinerja telah berada pada tingkat yang sangat baik, masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian nilai indeks secara maksimal.

Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian Indeks Profesionalitas ASN adalah dinamika pengelolaan sumber daya aparatur yang terus berkembang, terutama terkait dengan perubahan komposisi jumlah ASN akibat pengangkatan pegawai baru melalui mekanisme pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil maupun rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Aparatur yang baru bergabung dalam sistem birokrasi pada umumnya belum sepenuhnya memenuhi beberapa komponen penilaian indeks, khususnya pada dimensi kompetensi dan kinerja, karena masih berada dalam tahap adaptasi terhadap sistem manajemen kinerja serta pemenuhan kewajiban pengembangan kompetensi minimal setiap tahunnya.

Selain itu, faktor kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian pada sistem informasi kepegawaian nasional juga dapat mempengaruhi nilai indeks secara agregat. Ketidaklengkapan data riwayat pengembangan kompetensi, pendidikan, maupun kinerja pada sebagian ASN dapat berdampak pada penilaian dimensi indeks secara keseluruhan.

Namun demikian, keberhasilan mempertahankan nilai 85,40 pada kategori Tinggi menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan

pengelolaan ASN yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Pariaman telah berjalan secara efektif. Hal ini merupakan hasil dari berbagai langkah strategis yang dilakukan, antara lain melalui peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, optimalisasi pemutakhiran data ASN pada sistem informasi kepegawaian, serta penguatan implementasi manajemen kinerja ASN melalui pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala.

Dengan capaian kinerja sebesar 99,34 persen, Pemerintah Kota Pariaman menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga kualitas profesionalitas aparatur serta memperkuat tata kelola kepegawaian yang akuntabel, sehingga diharapkan pada tahun-tahun mendatang nilai Indeks Profesionalitas ASN dapat terus meningkat dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kompilasi data komparatif kinerja pada tabel di atas, Pemerintah Kota Pariaman melalui BKPSDM menetapkan target Indeks Profesionalitas ASN sebesar 85,96 pada tahun anggaran berjalan, yang secara klasifikasi berada pada kategori Tinggi. Target tersebut merepresentasikan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas manajemen sumber daya aparatur serta meningkatkan profesionalitas ASN dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dihitung melalui sistem pengelolaan kepegawaian nasional menunjukkan bahwa realisasi kinerja mencapai skor 85,24, yang secara substantif masih berada dalam kategori Tinggi. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 99,16 persen, sehingga berdasarkan kriteria penilaian kinerja termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kebijakan pembinaan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman telah berjalan secara efektif dan mampu mempertahankan kualitas profesionalitas aparatur pada level yang optimal.

Meskipun demikian, masih terdapat selisih sebesar 0,72 poin antara target dan realisasi yang perlu menjadi perhatian dalam upaya

peningkatan kinerja ke depan. Selisih ini mengindikasikan bahwa secara operasional pembinaan dan pengelolaan aparatur telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa faktor teknis dan administratif yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian nilai indeks secara maksimal.

Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian Indeks Profesionalitas ASN adalah dinamika pengelolaan sumber daya aparatur yang terus berkembang, terutama terkait dengan perubahan komposisi jumlah ASN akibat pengangkatan pegawai baru, baik melalui mekanisme pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil maupun rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Aparatur yang baru bergabung dalam sistem birokrasi pada umumnya belum sepenuhnya memenuhi persyaratan pada beberapa dimensi penilaian indeks, khususnya pada aspek pengembangan kompetensi dan rekam kinerja, karena masih berada dalam tahap adaptasi terhadap sistem manajemen kinerja serta pemenuhan kewajiban pengembangan kompetensi minimal setiap tahunnya.

Selain itu, faktor kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian pada sistem informasi kepegawaian nasional juga turut mempengaruhi nilai indeks secara agregat. Ketidaklengkapan data riwayat pengembangan kompetensi, kinerja, maupun administrasi kepegawaian pada sebagian ASN dapat berdampak pada penilaian dimensi indeks secara keseluruhan.

Namun demikian, keberhasilan mempertahankan nilai 85,24 pada kategori Tinggi menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pengelolaan ASN yang dilakukan oleh BKPSDM Kota Pariaman telah berjalan secara efektif. Hal ini merupakan hasil dari berbagai langkah strategis yang dilakukan, antara lain melalui peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, optimalisasi pemutakhiran data ASN pada sistem informasi kepegawaian, serta penguatan implementasi manajemen kinerja ASN melalui pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala.

Dengan capaian kinerja sebesar 99,16 persen, Pemerintah Kota Pariaman menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga kualitas profesionalitas aparatur serta memperkuat tata kelola kepegawaian yang akuntabel, sehingga diharapkan pada tahun-tahun mendatang nilai Indeks Profesionalitas ASN dapat terus meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan secara optimal.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
45,85 (Sangat Rendah)	85,96 (Tinggi)	78,65 (Sedang)	85,40 (Tinggi)	87,5%	100,53%	91,49%	99,34%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya dinamika perkembangan nilai indeks yang mencerminkan kondisi pengelolaan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Pada tahun 2022, realisasi Indeks Profesionalitas ASN tercatat sebesar 45,85 yang berada pada kategori Sangat Rendah, dengan capaian kinerja sebesar 87,5 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada periode tersebut pengelolaan data dan pemenuhan indikator profesionalitas ASN masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pemenuhan pengembangan kompetensi ASN, kelengkapan data kepegawaian, maupun implementasi manajemen kinerja yang belum sepenuhnya optimal.

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang sangat signifikan dimana realisasi Indeks Profesionalitas ASN mencapai 85,96 dengan kategori Tinggi, bahkan capaian kinerja mencapai 100,53 persen sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan yang cukup besar dalam pengelolaan data kepegawaian, pemenuhan pengembangan kompetensi ASN, serta implementasi sistem manajemen kinerja yang lebih tertata.

Memasuki tahun 2024, realisasi indeks mengalami penurunan menjadi 78,65 yang berada pada kategori Sedang, dengan capaian kinerja sebesar 91,49 persen. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh dinamika pengelolaan kepegawaian, termasuk perubahan komposisi jumlah ASN, proses pemutakhiran data pada sistem kepegawaian nasional, serta adanya pegawai yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan pada dimensi penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

Pada tahun 2025, nilai indeks kembali mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 85,40 yang kembali berada pada kategori Tinggi, dengan capaian kinerja sebesar 99,34 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pengelolaan ASN yang dilakukan oleh BKPSDM Kota Pariaman telah mampu memperbaiki capaian indeks serta mengembalikan tingkat profesionalitas ASN pada kategori yang tinggi.

Secara keseluruhan, tren perkembangan Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Pariaman dalam kurun waktu 2022–2025 menunjukkan pola fluktuatif namun cenderung meningkat secara signifikan dibandingkan kondisi awal periode. Peningkatan yang terjadi mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola kepegawaian, peningkatan pemenuhan pengembangan kompetensi ASN, serta optimalisasi pemutakhiran data pada sistem informasi kepegawaian nasional.

Dengan capaian pada tahun 2025 yang kembali berada pada kategori Tinggi, Pemerintah Kota Pariaman menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan profesionalitas aparatur serta memperkuat kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur guna mendukung kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih optimal.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
85,40 (Tinggi)	85,96 (Tinggi)	99,34%

Berdasarkan tabel perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun

2026, Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Pariaman menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Realisasi nilai Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2025 tercatat sebesar 85,40 yang berada pada kategori Tinggi. Sementara itu, target akhir yang ditetapkan dalam dokumen RPD untuk tahun 2026 adalah sebesar 85,96, yang juga berada pada kategori Tinggi.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tersebut, maka capaian kinerja tahun 2025 telah mencapai 99,34 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman telah berada sangat dekat dengan target akhir pembangunan yang telah ditetapkan dalam perencanaan daerah. Dengan selisih sebesar 0,56 poin, realisasi tahun 2025 dapat dikatakan hampir memenuhi target akhir RPD.

Capaian ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembinaan aparatur yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Pariaman telah berjalan secara efektif dalam meningkatkan kualitas profesionalitas ASN. Upaya peningkatan kompetensi ASN melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, penguatan implementasi manajemen kinerja ASN, serta optimalisasi pemutakhiran data kepegawaian pada sistem informasi kepegawaian nasional menjadi faktor penting dalam mendukung capaian tersebut.

Selain itu, keberhasilan mendekati target akhir RPD juga menunjukkan bahwa arah kebijakan pengelolaan sumber daya aparatur yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah berada pada jalur yang tepat. Dengan mempertahankan konsistensi pelaksanaan program pengembangan kompetensi, peningkatan disiplin ASN, serta penguatan tata kelola manajemen kinerja, diharapkan nilai Indeks Profesionalitas ASN pada tahun berikutnya dapat mencapai bahkan melampaui target akhir yang telah ditetapkan dalam RPD.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Rata-Rata nilai IP ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN 2025	Capaian
85,40 (Tinggi)	80,77 (Sedang)	105,73%

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2025 dengan rata-rata nilai IP ASN pada wilayah kerja Kantor Regional XII BKN, terlihat bahwa kinerja Pemerintah Kota Pariaman menunjukkan capaian yang relatif lebih baik. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Pariaman pada tahun 2025 tercatat sebesar 85,40 yang berada pada kategori Tinggi. Sementara itu, rata-rata nilai Indeks Profesionalitas ASN pada wilayah kerja Kantor Regional XII BKN tahun 2025 tercatat sebesar 80,77 yang berada pada kategori Sedang.

Apabila dilakukan perbandingan antara realisasi nilai tersebut dengan rata-rata regional, maka tingkat capaian Pemerintah Kota Pariaman mencapai 105,73 persen. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Pariaman berada di atas rata-rata wilayah kerja regional, sehingga mencerminkan kinerja pengelolaan sumber daya aparatur yang relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata instansi pemerintah daerah lainnya dalam lingkup wilayah kerja Kantor Regional XII BKN.

Namun demikian, perlu dijelaskan bahwa perbandingan capaian Indeks Profesionalitas ASN secara nasional tidak dapat dilakukan secara langsung, mengingat keterbatasan ketersediaan data agregat nasional yang dapat digunakan sebagai pembanding pada periode pengukuran yang sama. Oleh karena itu, analisis komparatif dalam laporan ini menggunakan rata-rata nilai Indeks Profesionalitas ASN pada wilayah kerja Kantor Regional XII BKN sebagai referensi pembanding yang paling relevan dan tersedia.

Dengan capaian yang berada di atas rata-rata regional tersebut, Pemerintah Kota Pariaman menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan profesionalitas aparatur serta memperkuat tata kelola manajemen kepegawaian. Ke depan, upaya peningkatan kualitas pengembangan kompetensi ASN, penguatan implementasi manajemen kinerja, serta optimalisasi pemutakhiran data kepegawaian diharapkan dapat terus dilakukan guna mempertahankan bahkan meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN secara berkelanjutan.

2) Perbandingan dengan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi 2025	Realisasi Provinsi Sumbar 2025	Capaian
85,40 (Tinggi)	84,73 (Tinggi)	100,79%

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dirilis oleh Kantor Regional XII BKN, nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Pariaman pada tahun 2025 tercatat sebesar 85,40 yang berada pada kategori Tinggi. Sementara itu, nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 84,73 yang juga berada pada kategori Tinggi.

Apabila dilakukan perbandingan antara kedua nilai tersebut, maka realisasi Indeks Profesionalitas ASN Kota Pariaman lebih tinggi sebesar 0,67 poin dibandingkan dengan nilai indeks Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Jika dihitung berdasarkan rasio perbandingan antara nilai Kota Pariaman terhadap nilai Provinsi Sumatera Barat, maka tingkat capaian Kota Pariaman mencapai sekitar 100,79 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman melampaui nilai indeks pada tingkat pemerintah provinsi, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pengelolaan sumber daya aparatur di Kota Pariaman berada pada tingkat yang sangat baik dan kompetitif di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Keunggulan capaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya pembinaan aparatur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman melalui BKPSDM, antara lain melalui peningkatan pengembangan kompetensi ASN, penguatan implementasi manajemen kinerja, serta optimalisasi pemutakhiran data kepegawaian pada sistem informasi kepegawaian nasional. Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Pariaman tidak hanya mampu mempertahankan nilai Indeks Profesionalitas ASN pada kategori Tinggi, tetapi juga menunjukkan kinerja pengelolaan ASN yang relatif lebih unggul dibandingkan dengan capaian pada tingkat provinsi.

3) Perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Peringkat	Kabupaten/Kota	Nilai IP ASN	Kategori
1	Kota Pariaman	85,40	Tinggi
2	Kab. Sijunjung	84,84	Tinggi
3	Kab. Tanah Datar	83,60	Tinggi
4	Kab. Dharmasraya	82,88	Tinggi
5	Kab. Pesisir Selatan	82,75	Tinggi
6	Kota Padang	82,60	Tinggi
7	Kab. Pasaman	82,12	Tinggi
8	Kota Solok	80,88	Sedang
9	Kab. Solok Selatan	80,87	Sedang
10	Kota Padang Panjang	80,65	Sedang
11	Kota Bukittinggi	80,62	Sedang
12	Kota Payakumbuh	80,62	Sedang
13	Kab. Solok	80,54	Sedang
14	Kab. Agam	79,47	Sedang
15	Kab. Pasaman Barat	79,03	Sedang
16	Kab. Padang Pariaman	78,94	Sedang
17	Kab. Lima Puluh Kota	78,92	Sedang
18	Kota Sawahlunto	78,32	Sedang
19	Kab. Kepulauan Mentawai	73,31	Sedang

Sumber: BKN Regional XII

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Kantor Regional XII, nilai Indeks Profesionalitas ASN pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan variasi capaian yang cukup beragam. Secara umum, sebagian besar daerah berada pada kategori Sedang hingga Tinggi, yang mencerminkan bahwa pengelolaan manajemen ASN di wilayah provinsi tersebut telah berjalan cukup baik meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada beberapa aspek pengelolaan sumber daya aparatur.

Dari hasil pemeringkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN tersebut, Pemerintah Kota Pariaman menempati posisi tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan nilai sebesar 85,40 yang berada pada kategori Tinggi. Posisi ini menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman relatif lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain di wilayah provinsi. Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan manajemen ASN, terutama dalam aspek pemenuhan kualifikasi pendidikan, pengembangan kompetensi, implementasi manajemen kinerja, serta penegakan disiplin aparatur.

Di bawah Kota Pariaman, terdapat beberapa daerah yang juga menunjukkan capaian pada kategori Tinggi, seperti Kabupaten Sijunjung dengan nilai 84,84, Kabupaten Tanah Datar dengan nilai 83,60, serta Kabupaten Dharmasraya dengan nilai 82,88. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa beberapa pemerintah daerah di Sumatera Barat telah mampu mengelola sumber daya aparatur secara cukup efektif, meskipun masih berada sedikit di bawah capaian Kota Pariaman.

Sementara itu, sebagian besar kabupaten/kota lainnya berada pada kategori Sedang, dengan nilai indeks berkisar pada rentang 78 hingga 81. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada beberapa daerah masih terdapat tantangan dalam pemenuhan

indikator profesionalitas ASN, terutama terkait dengan pemenuhan pengembangan kompetensi aparatur, kelengkapan data kepegawaian pada sistem informasi kepegawaian nasional, serta konsistensi implementasi manajemen kinerja ASN.

Dengan menempati posisi tertinggi di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, capaian Pemerintah Kota Pariaman menunjukkan bahwa berbagai upaya pembinaan dan pengelolaan ASN yang dilakukan melalui BKPSDM telah berjalan secara efektif. Keberhasilan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

Dimensi Pengukuran	Hambatan/Penyebab Kendala Kinerja (Evaluasi 2024-2025)	Solusi/Upaya yang Telah Dilakukan dan Mitigasi Tahun Selanjutnya
Dimensi Kualifikasi	Adanya ketidaksesuaian tingkat kualifikasi formal secara *de facto* dengan data administrasi. Banyak pegawai negeri yang sesungguhnya telah menyelesaikan pendidikan tingkat lanjut (Pascasarjana) melalui skema Izin Belajar namun menunjukkan keengganan atau kelambanan untuk mengurus proses administrasi Penyesuaian Ijazah atau Pencantuman Gelar. Akibatnya, sistem SI-ASN BKN masih membaca dan menilai kualifikasi mereka sama seperti saat pertama kali diangkat menjadi CPNS.	Solusi Berjalan: BKPSDM terus memberikan layanan fasilitasi *online* melalui aplikasi lokal (e-SDM) untuk mempercepat, memangkas birokrasi, dan mempermudah pengurusan Penyesuaian Ijazah. Upaya Akselerasi Tahun Depan: Menyusun kebijakan yang mempermudah pemakaian gelar serta memperbaiki kualitas pelayanan berbasis

		online sehingga lebih transparan.
Dimensi Kompetensi	Menjadi dimensi dengan tingkat kesulitan tertinggi. Persyaratan pemenuhan minimal dua puluh Jam Pelajaran per tahun belum dapat dipenuhi secara merata oleh seluruh ASN. Hambatan ini diperparah secara sistemik oleh keterbatasan porsi anggaran APBD untuk pelaksanaan Diklat Klasikal, serta fenomena kelalaian kronis di kalangan ASN dalam mengunggah sertifikat pendidikan, pelatihan, atau sosialisasi ke dalam portal pemutakhiran data MyASN.	Solusi Berjalan: Melaksanakan kampanye sosialisasi yang berkesinambungan dan menyediakan pendampingan teknis harian (*coaching clinic*) mengenai tata cara pemutakhiran data mandiri. Upaya Akselerasi Tahun Depan: Mengubah paradigma dari pelatihan berbiaya tinggi dengan membangun skema *Corporate University* Kota Pariaman dan Kerjasama dengan Kementerian serta Lembaga yang menyediakan sarana *e-learning* mandiri (Webinar, MOOCs) yang biayanya sangat efisien. data.

Dimensi Kinerja	Terjadinya fenomena keterlambatan penginputan matriks dan finalisasi Sasaran Kinerja Pegawai pada aplikasi e-Kinerja BKN, terutama di masa transisi tahunan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat resistensi kultural di tataran operasional di mana sebagian ASN masih menganggap mekanisme pelaporan kinerja merupakan sebuah beban administratif dan sekadar formalitas tahunan belaka, alih-alih instrumen evaluasi produktivitas.	Solusi Berjalan: Melakukan sinkronisasi kebijakan sistemik di mana parameter persetujuan output SKP diintegrasikan sebagai prasyarat mutlak dalam proses layanan kepegawaian dan tunjangan kinerja (TPP) setiap bulannya. Upaya Akselerasi Tahun Depan: Memperkuat penjenjangan kinerja secara logis dan mendalam dari pimpinan tertinggi hingga fungsional pelaksana. Pelaporan e-Kinerja diubah paradigmanya menjadi *review* periodic bulanan, serta disampaikan kepada pimpinan daerah untuk evaluasi seketika.
Dimensi Disiplin	Dinamika kepegawaian yang dipicu oleh masuknya gelombang pegawai mutasi dari instansi daerah lain serta besarnya volume penerimaan pegawai baru melalui jalur PPPK yang mana database rekam jejak kompetensi historis mereka belum terinjeksi secara utuh ke dalam ekosistem sistem kepegawaian Kota Pariaman. Di sisi lain, upaya mempertahankan angka nihil pelanggaran disiplin menjadi tantangan pembinaan.	Solusi Berjalan: Melakukan koordinasi lintas wilayah yang intensif dengan Kanreg XII BKN untuk melakukan optimalisasi peningkatan disiplin ASN dan pengunaan system I-DIS Upaya Akselerasi Tahun Depan:

		Menyusun kebijakan optimalisasi penegakan disiplin secara melekat oleh atasan langsung serta menjadikan komponen disiplin sebagai salah satu faktor kunci dalam layanan kepegawaian dan Pembayaran Tunjangan Kinerja.

Faktor keberhasilan dari capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN yaitu:

1. Dimensi Kualifikasi

   Beberapa upaya yang dilakukan dalam bentuk surat edaran dari Wali Kota. Bentuknya saat ini adalah Perwako TPP yang mengaitkan SKP untuk pembayaran TPP. Sehingga dimensi kinerja mengalami peningkatan paling besar.
2. Dimensi Kompetensi

   Adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Pariaman terkait dengan digitalisasi manajemen sistem, atau DMS. Dimana masing-masing PNS maupun PPPK, atau ASN secara umumnya memiliki kewenangan atau memiliki hak untuk mengusulkan diklat-diklat yang sudah pernah diikutinya. Sehingga secara garis besar pemenuhan diklat itu sudah terpenuhi, meskipun diklat secara online ataupun dalam bentuk sosialisasi. Jadi kompetensi tersebut sifatnya cukup besar dan ini juga bisa terpenuhi.
3. Dimensi Kualifikasi

   Tetap sama dari tahun ke tahun karena ini sifatnya adalah tingkat pendidikan, tidak ada progres yang tinggi di sini.
4. Dimensi Disiplin

   Tidak ada pegawai yang terkena hukuman disiplin.

Sintesa Solusi Kelembagaan:

Berdasarkan anatomi permasalahan di atas, secara fundamental, determinasi solusi dari pencegahan fluktuasi IP ASN ke depan adalah komitmen berkelanjutan untuk membangun Sistem Informasi Kepegawaian (SI-ASN/e-SDM) yang terintegrasi penuh secara real-time. Seluruh jejak historis yang merangkum mulai dari pergerakan kualifikasi pendidikan, rekam medis pelaksanaan diklat, lintasan capaian SKP bulanan, hingga integritas tingkat kedisiplinan harus terekam kuat sebagai ekosistem digital terpadu (Big Data Kepegawaian). Keterikatan dan interoperabilitas absolut antara basis data kepegawaian dengan instrumen pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai terbukti menjadi efek kejut fungsional terbaik dalam memaksa terciptanya habituasi positif pada seluruh elemen aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Dokumentasi Sosialisasi E-Kinerja di Lingkungan Kota Pariaman







6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan luar biasa maupun defisit marjinal dalam pencapaian Indeks Profesionalitas ASN sejatinya tidak pernah terjadi

dan terealisasi di ruang hampa, melainkan merupakan derivasi logis dan konsekuensi langsung dari kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan serta efektivitas pengalokasian sumber daya finansial pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Guna mendukung peningkatan secara agresif terhadap Sasaran Strategis yang berbunyi "Meningkatnya Birokrasi yag Kapabel", Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman mengampu dan menjalankan Program Kepegawaian Daerah secara komprehensif. Program payung ini dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan esensial yang beririsan langsung dengan dimensi pengukuran indeks. Berikut adalah postur pagu anggaran dan serapan realisasi finansial yang menopang target IP ASN di tahun 2025:

Sasaran Strategis 13 Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Indeks Profesional ASN	Program Kepegawaian Daerah	87.776.500	60.123.000	68,50%	Menunjang

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis 13 yaitu Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel, Pemerintah Kota Pariaman melalui BKPSDM melaksanakan Program Kepegawaian Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalitas aparatur sipil negara. Program ini menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pencapaian Indeks Profesionalitas ASN sebagai indikator kinerja utama.

Pada tahun anggaran berjalan, Program Kepegawaian Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp87.776.500, dengan realisasi anggaran sebesar Rp60.123.000 atau setara dengan 68,50 persen dari total pagu yang tersedia. Meskipun tingkat serapan anggaran belum mencapai 100 persen, pelaksanaan program tersebut tetap mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang telah direalisasikan mampu mendukung berbagai kegiatan pembinaan aparatur, antara lain melalui pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, pemutakhiran data ASN pada sistem informasi kepegawaian nasional, serta fasilitasi pengembangan kompetensi aparatur. Berbagai kegiatan tersebut berperan penting dalam meningkatkan kualitas manajemen ASN yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN.

Dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 68,50 persen, program ini tetap dikategorikan menunjang pencapaian indikator kinerja, karena kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan dampak positif terhadap penguatan profesionalitas aparatur. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat serapan anggaran, tetapi juga oleh kualitas implementasi kegiatan yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya aparatur.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis: Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Indeks Profesional ASN	87.776.500	60.123.000	119.08%	21,69%	100	Efisien

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran

- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE} = \frac{(\mathbf{87.776.500} \times \mathbf{0,9934}) - \mathbf{60.123.000}}{\mathbf{87.776.500}} \times \mathbf{100}\%$$

$$\boldsymbol{TE} = \mathbf{30,84}\%$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%
- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

Nilai Efisiensi = $\mathbf{30,84}\% > \mathbf{20}\%$

NE= $\mathbf{100}$

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi antara capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Program Kepegawaian Daerah yang mendukung indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN, diperoleh nilai Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 30,84 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program mampu menghasilkan capaian kinerja yang tinggi dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah dari pagu yang telah dialokasikan.

Dengan capaian kinerja sebesar 99,34 persen dan realisasi anggaran sebesar 68,50 persen dari total pagu anggaran, program ini mampu mencapai target kinerja secara optimal tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam Program Kepegawaian Daerah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien

dalam mendukung peningkatan profesionalitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Berdasarkan ketentuan konversi tingkat efisiensi, nilai TE sebesar 30,84 persen berada di atas batas efisiensi tertinggi yang ditetapkan yaitu 20 persen, sehingga menghasilkan Nilai Efisiensi sebesar 100. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada program tersebut termasuk dalam kategori sangat efisien, karena mampu menghasilkan kinerja yang tinggi dengan pemanfaatan anggaran yang optimal.

Capaian efisiensi ini mencerminkan bahwa perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh BKPSDM Kota Pariaman telah berjalan dengan baik. Ke depan, praktik pengelolaan anggaran yang efisien ini perlu terus dipertahankan melalui perencanaan kegiatan yang lebih terarah, optimalisasi pelaksanaan program, serta penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar tetap selaras dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

19) Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintah baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Penilaian ini dilakukan melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indeks ini menggambarkan tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat, yang mencakup berbagai aspek seperti kebijakan pelayanan, kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelayanan, sistem informasi pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta inovasi pelayanan publik.

Hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penilaian Indeks Pelayanan Publik bertujuan untuk:

1. Mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintah.
2. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
3. Menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja unit penyelenggara pelayanan publik.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan kepada masyarakat.
5. Mendorong terciptanya inovasi pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Landasan hukum terkait aturan untuk pelaksanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP) adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
g. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan Nilai Untuk Setiap Indikator Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang berbeda-beda disesuaikan dengan bobot per aspek. Karena nilai indeks merupakan nilai komposit dari 3 formulir, maka nilai per indikator merupakan nilai rerata formulir F01, F02, dan F03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator: $(nilai\ F01+nilai\ F02+nilai\ F03\ 3) \times bobot\ perindikat$
2. Menentukan Nilai Setiap Aspek Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dimana Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat melihat aspek mana yang sudah baik dan aspek mana yang masih membutuhkan perbaikan. Nilai setiap aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek. Nilai per aspek: ∑nilai perindikator
3. Menentukan Indeks Setelah nilai indikator dan dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dengan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks: $\sum(nilai\ aspekn \times bobot\ aspekn)$.

Nilai Indeks	Kategori
4,51 – 5,00	A (Pelayanan Sangat Baik)
4,01 – 4,50	A-
3,51 – 4,00	B
3,01 – 3,50	B-
2,51 – 3,00	C
2,00 – 2,50	C-
1,51 – 2,00	D
1,01 – 1,50	E
0,10 – 1,00	F

Sumber: Surat Menpan RB

Penetapan target indikator IPP Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024–2026, jika di bandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 4,32 dengan kategori A-target tahun 2025 ditetapkan lebih tinggi yaitu 4,54 dengan kategori A. Peningkatan target tersebut menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kota Pariaman untuk terus memperkuat pelayanan Publik di Kota Pariaman agar bisa melakukan pelayanan secara prima.

Berdasarkan surat dari Kementerian PAN RB Nomor B/92/PP.00.02/2025, tanggal 29 Agustus 2025 perihal Pelaksanaan PEKPPP Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2025, surat Kementerian PAN RB Nomor B/102/PP.00.02/2025, tanggal 10 September 2025 perihal Pemberitahuan Informasi Tambahan PEKPPP Pemerintah Daerah Tahun 2025, dimana Kementerian PANRB akan melakukan PEKPPP mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan batas waktu tanggal 27 Oktober 2025, dan surat Sekretaris Daerah Nomor 000.8.3.4/376/ORG/IX-2025 tentang Bimbingan Teknis Penilaian PEKPPP Mandiri Tahun 2025.



Kegiatan Bimtek PEKPPP

Kegiatan PEKPPP dilakukan secara 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Kegiatan PEKPPP Mandiri

   PEKPPP Mandiri adalah kegiatan PEKPPP yang melibatkan instansi sebagai evaluator, dimana tujuan utamanya adalah memperluas pelaksanaan PEKPPP pada keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan Administratif. Diharapkan dengan dilakukannya PEKPPP Mandiri dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari instansi yang dievaluasi.

   PEKPPP Mandiri terdiri 3 Tahapan, yaitu:

1) Pra Evaluasi
2) Pembinaan dan Pendampingan
3) Pelaksanaan Evaluasi

OPP yang dimaksud dalam PEKPPP Mandiri 2025 sebagai berikut:

1) Inspektorat
2) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
3) Dinas Komunikasi dan Informatika
4) Bappeda
5) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
7) Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
9) Dinas Perindagkop dan UMKM
10) Dinas Pariwisata
11) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
12) Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
13) Kecamatan Pariaman Selatan
14) Kecamatan Pariaman Utara
15) UPTD Laboratorium Lingkungan
16) UPTD Sikapak

OPP yang dimaksud dalam seleksi untuk penilaian dalam PEKPPP Mandiri 2025 sebagai berikut:

1) Inspektorat
2) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
3) Dinas Kominfo
4) Puskesmas Sikapak

Dalam proses PEKPPP Mandiri, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah bersama akan bertindak selaku evaluator, namun hasil akhir tetap diterbitkan oleh Kementerian PANRB.

2. Kegiatan PEKPPP Nasional

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu proses sistematis untuk mengukur kualitas pelayanan publik suatu isntansi pemerintah guna mendapatkan Indeks Pelayanan

Publik (IPP) sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas, yang mencakup 6 aspek utama yaitu kebijakan, Profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi demi mewujudkan birokrasi yang lebih baik dan berdampak bagi masyarakat. Dimana untuk PEKPPP Nasional ditunjuk 2 (dua) OPP, yaitu:

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 14 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik	4,52 (A)	3,10 (B-)	68,58%	Sedang

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025, Pemerintah Kota Pariaman memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,10 dengan kategori B-.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pariaman berada pada kategori baik, namun masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam klasifikasi hasil evaluasi PEKPPP, kategori B- berada pada rentang nilai 3,01–3,50, yang menggambarkan bahwa sebagian besar komponen penyelenggaraan pelayanan publik telah tersedia dan berjalan, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan agar memenuhi standar pelayanan publik secara optimal. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Pariaman menetapkan target Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,52 dengan kategori A sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pelayanan Publik (PEKPPP), realisasi nilai yang diperoleh adalah 3,10 dengan kategori B-.

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebesar 68,58 persen, yang termasuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 belum sepenuhnya tercapai, sehingga masih diperlukan berbagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Belum tercapainya target tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat beberapa aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang perlu diperkuat, antara lain peningkatan kualitas standar pelayanan, optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia pelayanan, serta penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat dan inovasi pelayanan publik.

Selain itu, nilai realisasi yang berada pada kategori B- menunjukkan bahwa sebagian komponen penyelenggaraan pelayanan publik telah tersedia dan berjalan, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi standar pelayanan publik secara lebih optimal.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
4,4 (A-)	4,09 (A-)	4,32 (A-)	3,10 (B-)	-	-	95,78%	68,58%

Berdasarkan data realisasi Indeks Pelayanan Publik Kota Pariaman selama periode tahun 2022 hingga 2025, terlihat bahwa capaian kinerja pelayanan publik mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Pariaman memperoleh nilai indeks sebesar 4,40 dengan kategori A-, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berada pada kategori sangat baik. Pada tahun 2023, nilai indeks mengalami sedikit penurunan menjadi 4,09 dengan kategori A-, namun masih berada pada kategori yang sama

sehingga secara umum kualitas pelayanan publik masih tergolong sangat baik.

Selanjutnya pada tahun 2024, nilai indeks kembali mengalami peningkatan menjadi 4,32 dengan kategori A- dengan tingkat capaian kinerja sebesar 95,78 persen terhadap target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pariaman relatif stabil dan mendekati target kinerja yang direncanakan.

Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan yang cukup signifikan, dimana nilai Indeks Pelayanan Publik tercatat sebesar 3,10 dengan kategori B- dengan tingkat capaian kinerja sebesar 68,58 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan publik mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang berada pada kategori A-.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
3,10 (B-)	4,53 (A)	68.43%

Berdasarkan data yang tersedia, realisasi Indeks Pelayanan Publik Kota Pariaman pada tahun 2025 sebesar 3,10 dengan kategori B-, sedangkan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2026 ditetapkan sebesar 4,53 dengan kategori A.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tersebut, capaian kinerja pada tahun 2025 baru mencapai 68,43 persen dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara kondisi capaian saat ini dengan target yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Nilai realisasi yang masih berada pada kategori B- menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pariaman sudah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan berbagai peningkatan agar dapat mencapai kategori pelayanan yang sangat baik sebagaimana yang ditargetkan dalam RPD.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
3,10 (B-)	-	-

Pada prinsipnya, perbandingan capaian kinerja dengan tingkat nasional dilakukan untuk melihat posisi kinerja daerah dibandingkan dengan capaian pelayanan publik secara nasional. Namun demikian, hingga saat ini nilai Indeks Pelayanan Publik tingkat nasional tahun 2025 secara resmi belum dirilis, sehingga perbandingan secara kuantitatif antara capaian Kota Pariaman dengan capaian nasional belum dapat dilakukan.

Dengan demikian, analisis perbandingan realisasi Indeks Pelayanan Publik Kota Pariaman tahun 2025 dengan tingkat nasional belum dapat disajikan. Perbandingan tersebut akan dapat dilakukan apabila data nilai Indeks Pelayanan Publik tingkat nasional telah tersedia dan dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2) Perbandingan dengan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi 2025	Realisasi Provinsi Sumbar 2025	Capaian
3,10 (B-)	3,70 (B)	83.78%

Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2025, Indeks Pelayanan Publik Kota Pariaman memperoleh nilai sebesar 3,10 dengan kategori B-. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai indeks sebesar 3,70 dengan kategori B.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi, nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Pariaman masih berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat. Tingkat capaian kinerja Kota Pariaman terhadap nilai Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 83,78 persen.

Perbedaan nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pariaman masih perlu ditingkatkan agar dapat mendekati bahkan melampaui capaian pada tingkat provinsi. Meskipun demikian, nilai yang diperoleh Kota Pariaman masih berada pada kategori baik, yang menunjukkan bahwa sebagian besar unsur penyelenggaraan pelayanan publik telah tersedia dan berjalan.

3) Perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Peringkat	Kabupaten/Kota	Nilai 2025	Predikat
1	Kabupaten Padang Pariaman	4,58	A
2	Kabupaten Pesisir Selatan	4,47	A-
3	Kota Padang Panjang	4,47	A-
4	Kabupaten Pasaman	4,47	A-
5	Kabupaten Solok	4,44	A-
6	Kota Payakumbuh	4,35	A-
7	Kabupaten Dharmasraya	4,25	A-
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	4,21	A-
9	Kabupaten Tanah Datar	4,15	A-
10	Kabupaten Solok Selatan	4,03	A-
11	Kabupaten Sijunjung	3,99	B
12	Kabupaten Agam	3,78	B
13	Kota Padang	3,38	B-
14	Kabupaten Pasaman Barat	3,37	B-
15	Kota Pariaman	3,10	B-
16	Kota Bukittinggi	3,05	B-
17	Kota Sawahlunto	3,04	B-
18	Kota Solok	2,93	C
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2,67	C

Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 pada

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, nilai Indeks Pelayanan Publik menunjukkan variasi capaian antar daerah.

Kabupaten Padang Pariaman memperoleh nilai tertinggi dengan 4,58 (kategori A), diikuti oleh beberapa daerah lain seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Pasaman yang masing-masing memperoleh nilai 4,47 (kategori A-). Sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat berada pada kategori A-, yang menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di daerah tersebut sudah berada pada kategori sangat baik.

Sementara itu, Kota Pariaman memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,10 dengan kategori B-. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, nilai tersebut menempatkan Kota Pariaman pada peringkat ke-15 dari 19 kabupaten/kota.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja pelayanan publik di Kota Pariaman masih berada di bawah sebagian besar daerah di Provinsi Sumatera Barat yang telah mencapai nilai di atas 4,00. Meskipun demikian, nilai yang diperoleh Kota Pariaman masih berada pada kategori baik, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik telah berjalan, namun masih memerlukan berbagai peningkatan pada beberapa aspek pelayanan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pariaman perlu terus melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan implementasi standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik agar capaian Indeks Pelayanan Publik dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

No.	Kendala/Hambatan penyebab tidak tercapainya target	Solusi/Upaya yang dilakukan
1	Nilai IPP Kota Pariaman Tahun 2025 sebesar 3,10 atau predikat B- merupakan nilai yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB berdasarkan hasil PEKPPP Tahun 2025 pada OPP yang telah ditetapkan sebagai lokus penilaian. Namun dalam pelaksanaan PEKPPP Tahun 2025 diklasifikasikan kepada 2 (dua) kelompok penilaian, yaitu PEKPPP Nasional (lokus ditetapkan oleh KemenpanRB) dan PEKPPP Mandiri (lokus ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pariaman). Jumlah OPP yang ditetapkan sebagai lokus PEKPPP Mandiri yaitu minimal sebesar 25% dari jumlah OPP. Namun, hingga tahap penilaian berakhir, Kementerian PANRB belum memberikan informasi terkait metodologi dan komposisi penilaian antara PEKPPP Nasional dan PEKPPP Mandiri. Sehingga Pemerintah Kota Pariaman tidak mengetahui dan tidak dapat melakukan seleksi lokus yang akan ditetapkan sebagai lokus PEKPPP Mandiri.	• Upaya yang telah dilakukan antara lain : 1.berkomunikasi dengan PIC terkait dari Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian PANRB, terkait metodologi dan komposisi penilaian 2.melakukan pembinaan kepada OPP lokus PEKPPP Nasional dan OPP calon lokus PEKPPP Mandiri dalam hal pemenuhan indikator penilaian PEKPPP 3.melakukan pendampingan kepada OPP lokus PEKPPP

		Nasional dan Mandiri dalam penginputan F01
2	Dalam penetapan lokus PEKPPP mandiri, Kementerian PAN RB menentukan jumlah minimal lokus tahun 2025, yaitu sebanyak minimal 25% dari jumlah OPP. Terkait ini Pemerintah Kota Pariaman telah mematuhi ketentuan tersebut yaitu dengan menetapkan sebanyak 16 OPP sebagai lokus PEKPPP Mandiri Tahun 2026 (30% dari jumlah OPP). Namun, nilai sementara hasil penilaian Tim Evaluator Pemerintah Kota Pariaman, sebanyak 15 OPP (93,75%) memperoleh nilai dengan predikat ≤ C, yaitu : - Predikat B- (1 OPP) - Predikat C (2 OPP) - Predikat D (2 OPP) - Predikat E (5 OPP) - Predikat F (6 OPP) *(Laporan Hasil Evaluasi masing-masing OPP lokus PEKPPP Mandiri yang ditetapkan oleh Kementerian PAN RB hingga laporan ini disusun masih belum diterbitkan, dan untuk hasil penilaian sementara yang dilakukan oleh Tim Evaluator Kota Pariaman dapat dilihat sebagaimana*	Upaya yang dilakukan Bagian Organisasi yaitu : 1.melakukan pendampingan lan jutan kepada OPP untuk memperbaiki/ meningkatkan nilai, 2.berkomunikasi dengan PIC terkait dari Kementerian PANRB untuk melakukan penyesuaian penetapan OPP sebagai lokus dengan nilai predikat minimal Baik. 3. Dalam upaya percepatan memperoleh nilai final masing-masing lokus baik PEKPPP Nasional maupun Mandiri, Bagian Organisasi

	tabel dibawah) *Sedangkan Laporan Hasil Evaluasi masing-masing OPP lokus PEKPPP Nasional hingga saat ini juga belum diterima, dan yang diperoleh hanya nilai total berupa Indeks Pelayanan Publik (IPP) yaitu sebesar 3,10.*	selalu melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Kementerian PANRB
3	Kendala yang lebih konkrit yakni dalam hal Pengisian Bukti Dukung yang dilakukan oleh sebagian besar OPP tidak sesuai/ tidak lengkap	• Melakukan Pendampingan terhadap OPP secara berkelanjutan. • Melakukan Dialog Kinerja terkait dengan Standar Pelayanan masing-masing OPP yang didampingi dengan Tim Pendamping
4	Kurangnya pemahaman OPP terhadap Aspek yang dinilai pada PEKPPP tahun 2026.	• Melakukan desk Pendampingan kepada setiap OPP sebagai lokus PEKPPP yang menjadi lokus penilaian

Sebagai upaya perbaikan Indeks Pelayanan Publik (IPP), beberapa hal yang akan dilakukan oleh Bagian Organisasi pada tahun selanjutnya, antara lain:

1. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik melalui penguatan komitmen Pimpinan Daerah hingga Pimpinan Perangkat Daerah
2. Meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah selaku Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) melalui kegiatan Sosialisasi atau Bimbingan Teknis kepada seluruh OPP di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, terkait materi-materi pelayanan publik, antara lain Standar Pelayanan Publik, Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, Forum Konsultasi Publik dan sebagainya.
3. Melakukan upaya-upaya pembinaan dan pendampingan intensif dalam bentuk desk maupun kunjungan lapangan ke masing-masing OPP.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan luar biasa maupun defisit marjinal dalam pencapaian Indeks Profesionalitas ASN sejatinya tidak pernah terjadi dan terealisasi di ruang hampa, melainkan merupakan derivasi logis dan konsekuensi langsung dari kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan serta efektivitas pengalokasian sumber daya finansial pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Guna mendukung peningkatan secara agresif terhadap Sasaran Strategis yang berbunyi "Meningkatnya Birokrasi yag Kapabel", Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman mengampu dan menjalankan Program Kepegawaian Daerah secara komprehensif. Program payung ini dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan esensial yang beririsan langsung dengan dimensi pengukuran indeks. Berikut adalah postur pagu anggaran dan serapan realisasi finansial yang menopang target IP ASN di tahun 2025:

Sasaran Strategis 14 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Indeks Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	133.705.500	38.735.505	27.34%	Tidak Menunjang

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis *"*Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dann Tata Laksana*"* dengan indikator kinerja utama Nilai Indeks Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Pariaman melaksanakan beberapa program yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan dan manajemen kinerja daerah. Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan realisasi anggaran, diketahui bahwa tingkat kontribusi masing-masing program terhadap pencapaian indikator kinerja menunjukkan hasil yang bervariasi.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki pagu anggaran sebesar Rp.133.705.500 dengan realisasi sebesar Rp.38.735.505 atau capaian 27,34 persen. Rendahnya tingkat capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum berjalan optimal dan belum memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, program ini dikategorikan sebagai program yang belum menunjang pencapaian kinerja secara optimal.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Indeks Pelayanan Publik	133.705.500	38.735.505	68,58%	39,60%	100	Sangat Efisien

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100}\%$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE} = \frac{(\mathbf{133.705.500} \times \mathbf{0,6858}) - \mathbf{38.735.505}}{\mathbf{133.705.500}} \times \mathbf{100}\%$$

$$\boldsymbol{TE} = \mathbf{39,60}\%$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%
- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

Nilai Efisiensi = $39{,}60\% > 20\%$

$NE = \mathbf{100}$

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Indeks Pelayanan Publik, diketahui bahwa pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp133.705.500, dengan realisasi anggaran sebesar Rp38.735.505 dan capaian kinerja sebesar 68,58%. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus tingkat efisiensi, diperoleh Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 39,60%.

Nilai tersebut berada di atas batas efisiensi tertinggi yang ditetapkan yaitu 20%, sehingga setelah dilakukan konversi diperoleh Nilai Efisiensi sebesar 100. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan

program dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik telah dilaksanakan secara sangat efisien, dimana capaian kinerja dapat diperoleh dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pagu anggaran yang tersedia.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program telah dilakukan secara optimal, sehingga output kinerja tetap dapat tercapai meskipun realisasi anggaran tidak sepenuhnya terserap. Efisiensi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain optimalisasi pelaksanaan kegiatan, penggunaan sumber daya yang lebih efektif, serta adanya efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pelayanan publik.

20) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pengukuran IKM dilakukan melalui survei kepada pengguna layanan dengan menilai sembilan unsur pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

Tujuan pengukuran IKM adalah untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan publik, sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan, serta sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Mengacu PermenPANRB No. 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur:

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Nilai IKM dikonversi dalam skala 25 sampai dengan 100, dengan kategori mutu pelayanan yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik. Semakin tinggi nilai IKM menunjukkan semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Predikat
88.31 – 100	A	Sangat Baik
76.61 – 88.30	B	Baik
65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
25.00 – 64.99	D	Tidak Baik

Berdasarkan Lampiran Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Pariaman Tahun 2025, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Pariaman adalah sebesar 89,55 dengan kategori “Sangat Baik” (A). Nilai tersebut merupakan hasil rekapitulasi pengukuran terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Capaian nilai IKM ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kota Pariaman secara umum telah memenuhi harapan masyarakat dan berada pada tingkat yang sangat baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan, terutama pada aspek waktu pelayanan, persyaratan, dan sarana prasarana.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 14 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Nilai IKM Kota	86,20	89,55	103,89%	Sangat Tinggi

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Pariaman Tahun 2025, diperoleh realisasi sebesar 89,55 dari target yang ditetapkan sebesar 86,20.

Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 103,89% dan termasuk dalam kategori sangat tinggi karena telah melampaui target yang ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman telah berjalan dengan sangat optimal dan mampu memberikan tingkat kepuasan masyarakat yang melebihi target yang direncanakan. Keberhasilan ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan pada berbagai perangkat daerah.

Namun demikian, upaya peningkatan kualitas pelayanan tetap perlu dilakukan secara konsisten, khususnya pada unsur pelayanan yang masih memiliki nilai relatif lebih rendah seperti waktu pelayanan, persyaratan, dan sarana prasarana, guna menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
79,21	83	83,29	89,55	91,83	93,93	100,16	103,89%

Berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Pariaman dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya tren peningkatan kinerja pelayanan publik yang cukup signifikan.

Nilai realisasi IKM mengalami peningkatan dari 79,21 pada tahun 2022 menjadi 83,00 pada tahun 2023 dan relatif stabil pada tahun 2024 sebesar 83,29. Selanjutnya, pada tahun 2025 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 89,55. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Sejalan dengan peningkatan realisasi, capaian kinerja juga menunjukkan tren positif, dimana pada tahun 2022 sebesar 91,83%, meningkat menjadi 93,93% pada tahun 2023, kemudian mencapai 100,16% pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 103,89% pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2024

kinerja pelayanan publik telah melampaui target yang ditetapkan, dan pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang lebih optimal.

Peningkatan signifikan pada tahun 2025 mengindikasikan adanya penguatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik melalui peningkatan kompetensi aparatur, perbaikan sistem pelayanan, maupun pemanfaatan teknologi dalam pelayanan. Namun demikian, konsistensi peningkatan kinerja tetap perlu dijaga agar kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tren peningkatan realisasi dan capaian kinerja IKM Kota Pariaman mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
89,55	88,35	101,35%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RPD Tahun 2026, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Pariaman pada tahun 2025 sebesar 89,55 telah melampaui target akhir RPD yang ditetapkan sebesar 88,35. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 101,35%.

Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pariaman telah berhasil mencapai bahkan melampaui target kinerja yang direncanakan untuk akhir periode RPD lebih awal dari waktu yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah berjalan dengan sangat baik dan efektif.

Keberhasilan ini mencerminkan adanya percepatan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan sistem pelayanan, maupun optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan.

Meskipun target akhir RPD telah tercapai lebih awal, Pemerintah Kota Pariaman tetap perlu menjaga konsistensi dan melakukan inovasi pelayanan agar capaian kinerja ini dapat

dipertahankan bahkan ditingkatkan pada periode perencanaan selanjutnya.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
89,55	-	-

Berdasarkan perbandingan antara realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Pariaman Tahun 2025 dengan tingkat nasional, perbandingan tidak dapat dilakukan karena data realisasi IKM nasional tahun 2025 belum tersedia.

Dengan demikian, capaian kinerja terhadap tingkat nasional belum dapat dihitung dan dianalisis. Oleh karena itu, analisis perbandingan kinerja IKM Kota Pariaman hanya dapat dilakukan terhadap target yang ditetapkan serta perbandingan dengan tingkat provinsi.

Ke depan, apabila data IKM nasional telah tersedia, maka perbandingan kinerja dapat dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait posisi capaian pelayanan publik Kota Pariaman dalam lingkup nasional.

2) Perbandingan dengan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi 2025	Realisasi Provinsi Sumbar 2025	Capaian
89,55	93,31	95.97%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Pariaman Tahun 2025 dengan realisasi Provinsi Sumatera Barat, diketahui bahwa nilai IKM Kota Pariaman sebesar 89,55 masih berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 93,31. Dengan demikian, tingkat capaian Kota Pariaman terhadap provinsi adalah sebesar 95,97%.

Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas pelayanan publik di Kota Pariaman telah berada pada kategori sangat baik, namun secara komparatif masih terdapat selisih

sebesar 3,76 poin dibandingkan dengan rata-rata capaian di tingkat provinsi.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat seperti kecepatan pelayanan, kemudahan persyaratan, serta ketersediaan sarana dan prasarana.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pariaman perlu terus melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan melalui inovasi pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi sistem pelayanan berbasis teknologi, sehingga ke depan capaian IKM dapat meningkat dan mendekati bahkan melampaui capaian di tingkat provinsi.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Nilai IKM Kota Pariaman 2025 adalah:

1. Bagian Organisasi melakukan Sosialisasi dan edukasi terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat kepada seluruh Perangkat Daerah selaku Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP), baik melalui surat, Rapat Koordinasi, Sosialisasi/Bimbingan Teknis, hingga publikasi dan penyebarluasan informasi melalui media sosial/online .
2. Menerbitkan Instruksi Walikota Pariaman Nomor 000.8.3.4/361/ORANG/2025 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Mandiri Tahun 2025 tanggal 3 September 2025 sebagai salah satu bentuk komitmen Pimpinan dalam hal pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.
3. Bagian Organisasi mendorong setiap OPP untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat, serta memberikan layanan konsultasi dan pendampingan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat kepada OPP.

4. Bagian Organisasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat oleh OPP, melalui penyampaian Surat Permintaan Laporan SKM kepada seluruh Perangkat Daerah.
5. Bagian Organisasi melakukan kompilasi dan rekapitulasi Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dari masing-masing OPP, dan menyusun serta menyampaikan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tingkat Kota Pariaman Tahun 2025.

Beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Nilai IKM Kota Pariaman Tahun 2025 adalah :

1. Belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah dalam hal pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
2. Belum kuatnya komitmen Pimpinan Perangkat Daerah untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai bentuk evaluasi kinerja (*feedback*) penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025, sehingga pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang awalnya akan dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi selaku pihak eksternal tidak dapat direalisasikan, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara mandiri oleh masing-masing OPP.
4. Terbatasnya kualitas SDM pelaksana SKM dan penyusun laporan SKM pada masing-masing OPP.
5. Waktu dan mekanisme pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang bervariasi (per tahun, per semester, per triwulan), jumlah responden yang belum mewakili jumlah populasi, serta jenis layanan yang dilakukan pengukuran kepuasan belum spesifik pada masing-masing OPP.
6. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat belum terkoordinir melalui satu jenis aplikasi terintegrasi untuk seluruh OPP, sehingga hasil yang diperoleh belum dapat diakui terstandarisasi secara keseluruhan.
7. Belum adanya kebijakan *reward and punishment* atas hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, yaitu :

1. Komitmen dan Dukungan Pimpinan
   - Dukungan Penuh: Pimpinan instansi harus berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan SKM, mulai dari alokasi anggaran hingga menjadikannya prioritas program.
   - Kebijakan Berbasis Data: Hasil survei harus dijadikan dasar pengambilan keputusan strategis untuk perbaikan tata kelola dan reformasi
2. Akurasi dan Partisipasi Publik
   - Tingkat Partisipasi Tinggi: Semakin banyak responden yang mewakili berbagai latar belakang, semakin akurat data yang diperoleh.
   - Keadilan Akses (Inklusivitas): Survei harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat pengguna layanan tanpa memandang status ekonomi, budaya, atau golongan.
3. Instrumen dan Indikator Terstandar
   - Mengikuti Regulasi: Menggunakan instrumen baku yang sesuai dengan pedoman seperti Peraturan Menteri PANRB, yang mencakup 9 unsur utama seperti persyaratan, prosedur, waktu, biaya, dan kompetensi petugas.
   - Validitas Data: Data harus terverifikasi dengan baik sehingga mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya dan bebas dari manipulasi.
4. Transparansi dan Kemudahan Akses SKM
   - Kemudahan Pengisian: Menggunakan instrumen pengumpulan data yang mudah diakses dan dipahami, seperti pengisian formulir online (e-SKM), kotak saran, atau wawancara langsung.
   - Keterbukaan Hasil: Mempublikasikan hasil indeks SKM secara transparan kepada masyarakat umum sebagai bentuk akuntabilitas publik.

5. Evaluasi dan Tindak Lanjut Nyata (Feedback Loop)
    - Perbaikan Area Lemah: Fokus pada pembenahan unsur-unsur dengan skor terendah (biasanya terkait kecepatan waktu penyelesaian, kejelasan prosedur, dan sistem biaya/tarif).
    - Tindak Lanjut Periodik: Kegiatan SKM harus dilakukan secara berkala (minimal setiap semester atau 6 bulan sekali) untuk mengukur sejauh mana perbaikan pelayanan telah berjalan

Strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat:

1. Peningkatan pemahaman dan kapasitas Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, melalui berbagai upaya antara lain Sosialisasi/Edukasi, Bimbingan Teknis dan Pendampingan kepada OPP baik yang dilakukan secara langsung (offline) maupun online (media sosial).
2. Penguatan komitmen Pimpinan Perangkat Daerah selaku OPP melalui penerbitan Instruksi Walikota terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2026 secara mandiri oleh masing-masing OPP
3. Membangun komitmen bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Perangkat Daerah, melalui proses Dialog Kinerja untuk penyepakatan target kinerja dan pencantuman Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah sebagai salah satu indikator kinerja utama Perangkat Daerah yang diperjanjikan kepada Walikota Pariaman, sebagaimana tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja setiap Perangkat Daerah Tahun 2026.
4. Dalam upaya standarisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2026, sebagaimana juga telah diluncurkan oleh Kementerian PAN RB bahwa pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2026 akan dilakukan melalui aplikasi skm.online yang akan digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 14 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp72.471.595	0	0	Tidak Menunjang

Berdasarkan hasil analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025, diketahui bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya realisasi anggaran dan kegiatan, sehingga capaian program tercatat sebesar 0%.

Pada awalnya, peningkatan kualitas pelayanan publik yang diukur melalui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat direncanakan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp72.471.595 untuk pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat melalui kerja sama dengan pihak eksternal/independen, yaitu akademisi (Perguruan Tinggi). Namun demikian, seiring dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran serta dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemandirian Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tidak dilakukan melalui kerja sama dengan pihak akademisi, melainkan dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Sebagai konsekuensi dari perubahan kebijakan tersebut, anggaran yang telah dialokasikan untuk jasa tenaga ahli sebesar Rp72.471.595 tidak direalisasikan atau sebesar Rp0 (nol rupiah). Meskipun demikian, capaian indikator kinerja IKM Kota Pariaman tetap menunjukkan hasil yang sangat baik, yang mengindikasikan bahwa pencapaian tersebut lebih dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan kegiatan lain yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan publik.

Dengan demikian, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dikategorikan sebagai program yang tidak menunjang secara langsung terhadap pencapaian indikator IKM. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyelarasan antara perencanaan program, penganggaran, dan indikator kinerja agar setiap program memiliki kontribusi yang jelas dan terukur terhadap pencapaian kinerja organisasi.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	103,89%	-	-	-

Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi menggunakan rumus yang telah ditetapkan, diketahui bahwa nilai efisiensi tidak dapat dihitung karena pagu anggaran (PA) dan realisasi anggaran (RA) bernilai nol. Kondisi ini menyebabkan perhitungan tingkat efisiensi tidak dapat dilakukan secara matematis karena terjadi pembagian dengan nol.

Meskipun demikian, capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 menunjukkan hasil sebesar 103,89% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian kinerja tidak dipengaruhi oleh penggunaan anggaran pada program dimaksud, melainkan berasal dari kontribusi program atau kegiatan lain yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini tidak dapat dilakukan secara kuantitatif, sehingga diperlukan perbaikan dalam perencanaan anggaran agar keterkaitan antara anggaran dan indikator kinerja dapat diukur secara lebih akurat pada periode berikutnya.

21) Indeks Infrastruktur Daerah

Indeks Infrastruktur Daerah adalah sebuah indeks yang menggambarkan pencapaian kualitas infrastruktur yang terdiri dari Infrastruktur jalan, Infrastruktur drainase, infrastruktur irigasi , Infrastruktur bangunan publik, dan infrastruktur PJU. Dasar Penghitungan Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Walikota Pariaman Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024–2026.

Adapun indeks infrastruktur daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\boldsymbol{Indeks\ Infrastruktur\ Daerah} = \frac{\%\boldsymbol{Jalan\ Mantap} + \%\boldsymbol{Drainase\ Baik} + \%\boldsymbol{Irigasi\ Baik}}{\mathbf{3}} \times \mathbf{100}\%$$

Indeks Infrastruktur Daerah dihitung dari rata-rata tiga indikator:

1. Persentase panjang jalan kota kondisi mantap

Tabel Persentase panjang jalan kota dalam kondisi mantap

No.	Kondisi Jalan	Panjang 2025 (KM)
1	Kondisi baik (mantap)	178.104
2	Kondisi sedang (mantap)	16.326
3	Kondisi rusak ringan	66.875
4	Kondisi rusak berat	31.650
Total Panjang Jalan Kota		292.955

Rumus Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Jalan Mantap} = \frac{\text{Panjang Jalan Kondisi Baik + Sedang}}{\text{Total Panjang Jalan Kota}} \times \mathbf{100}\%$$

Keterangan:

- Jalan kondisi baik = jalan yang memenuhi standar pelayanan minimal dan dapat dilalui dengan lancar.
- Jalan kondisi sedang = jalan yang masih berfungsi namun membutuhkan pemeliharaan.
- Total panjang jalan kota = seluruh panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota.

$$\text{Persentase Jalan Mantap} = \frac{\mathbf{194,43}}{\mathbf{292,955}} \times \mathbf{100\%} = \mathbf{66,37\%}$$

2. Persentase panjang drainase kota kondisi baik

Tabel Panjang drainase kota dalam kondisi baik

No.	Nama Drainase	Panjang 2025 (KM)	Total
1	Drainase primer	10,22	19,122
2	Drainase sekunder	26,32	44,458
Total		36,54	63,58

Keterangan:

- Panjang drainase kondisi baik = panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik (tidak rusak, tidak tersumbat, dan mampu mengalirkan air sesuai kapasitas).
- Total panjang drainase kota = seluruh panjang jaringan drainase yang menjadi kewenangan pemerintah kota.

$$\text{Persentase Drainase Baik} = \frac{\mathbf{36,54}}{\mathbf{63,58}} \times \mathbf{100\%} = \mathbf{57,47\%}$$

3. Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik

Tabel Panjang jaringan irigasi berdasarkan Jenis saluran

No.	Jenis Saluran	Panjang 2025 (KM)
1	Irigasi Primer	1,117
2	Irigasi Sekunder	57,058
3	Irigasi Tersier	93,381
Total Panjang Jalan Kota		292.955

Tabel Panjang jaringan irigasi berdasarkan Kondisi Saluran

No.	Kondisi Saluran	Panjang 2025 (KM)
1	Irigasi Primer	15,099
2	Baik	92,000
3	Sedang	30,202
4	Rusak Ringan	44,644

Total Panjang Jalan Kota	151,559

Rumus Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik adalah:

$$\text{Persentase Irigasi Baik} = \frac{\text{Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik}}{\text{Total Panjang Jaringan Irigasi}} \times \mathbf{100}\%$$

Keterangan:

- Panjang jaringan irigasi kondisi baik = panjang saluran irigasi (primer, sekunder, tersier) yang berfungsi dengan baik.
- Total panjang jaringan irigasi = seluruh panjang jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

$$\text{Persentase Irigasi Baik} = \frac{\mathbf{107,099}}{\mathbf{151,559}} \times \mathbf{100}\% = \mathbf{70,66}\%$$

Indeks Infrastruktur Daerah:

$$\boldsymbol{IID} = \frac{\mathbf{66,37 + 57,47 + 70,66}}{\mathbf{3}} = \mathbf{64,83}$$

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 15 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Infrastruktur Daerah	64,74	64,83	101,13%	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, Indeks Infrastruktur Daerah pada sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah* menunjukkan kinerja yang sangat baik. Target yang ditetapkan sebesar 64,74 berhasil direalisasikan sebesar 64,83, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,13% dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di daerah telah berjalan dengan baik serta mampu

memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Pencapaian Indeks Infrastruktur Daerah tersebut didukung oleh tiga indikator utama yaitu:

1. Persentase panjang jalan kota dalam kondisi mantap sebesar 66,37%.
2. Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik sebesar 57,47%.
3. Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 70,66%.

Dari ketiga indikator tersebut, indikator drainase kota dalam kondisi baik menunjukkan capaian yang melebihi target, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan nilai indeks infrastruktur daerah. Sementara itu, indikator jalan mantap dan jaringan irigasi dalam kondisi baik masih belum sepenuhnya mencapai target, namun tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai indeks secara keseluruhan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, rehabilitasi dan pembangunan drainase perkotaan, serta rehabilitasi jaringan irigasi yang dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
62,08%	59,01%	62,92%	63,83%	93,67	89,84	97,92	101,13

Berdasarkan data realisasi kinerja Indeks Infrastruktur Daerah selama periode tahun 2022–2025, terlihat bahwa capaian kinerja menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif namun secara umum mengalami peningkatan pada tahun 2025.

Realisasi Indeks Infrastruktur Daerah pada tahun 2022 sebesar 62,08, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 59,01. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh kondisi beberapa

infrastruktur yang mengalami penurunan kualitas, terutama pada kondisi jalan kota yang belum sepenuhnya berada dalam kondisi mantap serta keterbatasan anggaran pemeliharaan infrastruktur.

Pada tahun 2024, nilai indeks kembali meningkat menjadi 62,92, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas infrastruktur melalui berbagai program pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur daerah. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 64,83, yang merupakan nilai tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Dari sisi capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, pada tahun 2022 capaian mencapai 93,67%, kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 89,84%. Namun pada tahun 2024 capaian kembali meningkat menjadi 97,92%, dan pada tahun 2025 berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 101,13%.

Peningkatan capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas infrastruktur daerah melalui berbagai program pembangunan, rehabilitasi, serta pemeliharaan infrastruktur telah berjalan secara efektif. Program-program yang mendukung peningkatan tersebut antara lain pembangunan dan pemeliharaan jalan kota, rehabilitasi jaringan drainase, serta peningkatan kualitas jaringan irigasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tren capaian Indeks Infrastruktur Daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur guna mendukung pelayanan publik, konektivitas wilayah, serta kegiatan ekonomi masyarakat.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026) yang telah disesuaikan	Capaian
64,83%	68,25%	94,98%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, realisasi Indeks Infrastruktur Daerah mencapai 64,83%, sedangkan target akhir

RPD tahun 2026 ditetapkan sebesar 68,25%. Dengan demikian tingkat capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir RPD mencapai 94,98%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan infrastruktur daerah telah mendekati target yang ditetapkan pada akhir periode RPD. Hal ini menggambarkan bahwa berbagai program dan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kualitas infrastruktur daerah.

Pencapaian ini didukung oleh peningkatan kondisi beberapa komponen infrastruktur utama, antara lain peningkatan kualitas jaringan drainase perkotaan, rehabilitasi jaringan irigasi, serta pembangunan dan pemeliharaan jalan kota. Program-program tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai indeks infrastruktur daerah secara bertahap. Masih terdapat selisih sekitar 5,02% dari target akhir RPD yang perlu dicapai. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan melalui peningkatan program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, khususnya pada peningkatan kondisi jalan kota agar persentase jalan dalam kondisi mantap dapat terus meningkat.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
64,83%	-	-

Perbandingan capaian Indeks Infrastruktur Daerah (IID) Kota Pariaman dengan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota lainnya tidak dapat dilakukan secara langsung. Hal ini disebabkan karena indikator Indeks Infrastruktur Daerah merupakan indikator yang disusun secara khusus oleh Pemerintah Kota Pariaman dengan menggunakan formula perhitungan tersendiri yang menggabungkan beberapa indikator infrastruktur daerah.

Formula perhitungan indeks tersebut terdiri dari rata-rata beberapa indikator, yaitu persentase panjang jalan kota dalam kondisi mantap, persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik, serta

persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik. Oleh karena itu, nilai indeks yang dihasilkan merupakan hasil pengolahan indikator yang disesuaikan dengan kondisi, kewenangan, serta kebutuhan pengukuran kinerja pembangunan infrastruktur di Kota Pariaman.

Di tingkat nasional maupun provinsi pada umumnya tidak menggunakan indikator yang sama ataupun formula yang identik dalam mengukur kualitas infrastruktur daerah, sehingga data yang tersedia tidak bersifat sebanding secara metodologis.

Dengan demikian, capaian Indeks Infrastruktur Daerah Kota Pariaman lebih tepat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja internal pemerintah daerah dalam memantau perkembangan kualitas infrastruktur dari tahun ke tahun, serta sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan
    1. Penyebab Permasalahan
        1) Kondisi jalan mengalami kerusakan lebih cepat
            a. Tingginya intensitas curah hujan dan beban kendaraan menyebabkan beberapa ruas jalan cepat rusak.
            b. Keterbatasan anggaran pemeliharaan berkala mengakibatkan belum seluruh ruas jalan dapat ditangani optimal.
        2) Jaringan irigasi belum sepenuhnya optimal
            a. Sebagian saluran irigasi mengalami sedimentasi dan kerusakan bangunan pelengkap.
            b. Keterbatasan dana rehabilitasi menyebabkan penanganan dilakukan secara bertahap.
        3) Drainase melebihi target namun belum merata

            Walaupun capaian drainase melampaui target, masih terdapat beberapa titik genangan yang membutuhkan penanganan lanjutan.
    2. Upaya yang Dilakukan
        1) Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan

a. Melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala pada ruas prioritas.
b. Mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui skala prioritas penanganan jalan.

2) Perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi
a. Melakukan rehabilitasi saluran irigasi yang rusak secara bertahap.
b. Melaksanakan normalisasi dan pembersihan sedimentasi saluran.
c. Meningkatkan koordinasi dengan kelompok pengguna air dan masyarakat.

3) Optimalisasi sistem drainase
a. Melakukan pembersihan drainase secara rutin.
b. Menangani titik-titik rawan genangan dan penyumbatan.
c. Mengembangkan program pemeliharaan berbasis kawasan prioritas.

4) Penguatan perencanaan dan monitoring
a. Meningkatkan pendataan kondisi infrastruktur secara berkala.
b. Memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik.
c. Mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi dan pusat.

5) Peningkatan koordinasi lintas sektor
a. Memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam penanganan infrastruktur.
b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur yang telah dibangun.

3. Faktor Keberhasilan

1) Komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur
Adanya dukungan kebijakan dan penganggaran yang konsisten terhadap peningkatan kualitas jalan, drainase, dan irigasi.

2) Penetapan skala prioritas penanganan

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada lokasi yang memiliki tingkat kerusakan dan kebutuhan layanan paling tinggi sehingga hasil penanganan lebih optimal.

3) Pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala

Pemeliharaan infrastruktur dilakukan secara berkesinambungan sehingga mampu mempertahankan kondisi layanan infrastruktur tetap baik.

4) Koordinasi antar perangkat daerah yang baik

Sinergi antara perangkat daerah terkait mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan infrastruktur.

5) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang lebih optimal

Monitoring lapangan dan pengendalian mutu pekerjaan membantu meningkatkan kualitas hasil pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur.

6) Partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur

Dukungan masyarakat dalam menjaga kebersihan drainase dan memanfaatkan infrastruktur secara baik turut membantu mempertahankan kondisi infrastruktur.

7) Capaian drainase yang melampaui target

Realisasi kondisi drainase baik sebesar 57,47% melebihi target 53,60%, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap capaian Indeks Infrastruktur Daerah secara keseluruhan.

8) Optimalisasi sumber daya dan anggaran

Pemanfaatan anggaran dan sumber daya secara efektif mendukung penyelesaian kegiatan infrastruktur sesuai prioritas dan target kinerja.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 15 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Indeks	Program	4.643.151.500	4.233.799.186	91,18	Menunjang

Infrastruktur Daerah	Penyelenggaraan Jalan				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	832.236.000	754.959.342	90,72	Menunjang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.082.696.997	1.072.874.422	99,09	Menunjang

Berdasarkan data pelaksanaan program tahun 2025 dalam mendukung pencapaian Indeks Infrastruktur Daerah, seluruh program pada dasarnya telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja, namun dengan tingkat efektivitas yang berbeda. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase merupakan program yang paling menunjang pencapaian kinerja, dengan realisasi keuangan yang tinggi sebesar 99,09%, sehingga mampu mendorong peningkatan capaian indikator drainase yang melampaui target dan berkontribusi signifikan terhadap nilai indeks.

Program Penyelenggaraan Jalan juga termasuk program yang menunjang, dengan realisasi keuangan sebesar 91,18%. Program ini berperan dalam peningkatan kondisi jalan kota, namun kontribusinya belum optimal karena capaian indikator jalan mantap masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Selanjutnya, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) juga berkontribusi dalam mendukung pencapaian indikator dengan realisasi keuangan sebesar 90,72%. Program ini mendukung peningkatan kondisi jaringan irigasi, namun capaian indikatornya masih belum sepenuhnya mencapai target sehingga kontribusinya perlu lebih dioptimalkan.

Secara keseluruhan, tidak terdapat program yang tidak menunjang pencapaian kinerja. Namun demikian, Program Penyelenggaraan Jalan dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air masih perlu ditingkatkan efektivitasnya agar dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap pencapaian target Indeks Infrastruktur Daerah pada tahun berikutnya.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis 15 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Indeks Infrastruktur Daerah	Rp6.558.084.497	Rp6.061.632.950	101,13 %	7,70%	69,25	Efisien

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE} = \frac{(\mathbf{6.558.084.497} \times \mathbf{1,0013}) - \mathbf{6.061.632.950}}{\mathbf{6.558.084.497}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{TE} = \mathbf{7,70\%}$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%
- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

Nilai Efisiensi = $\mathbf{50} + \left(\frac{\mathbf{7,70}}{\mathbf{20}} \times \mathbf{50}\right)$

NE= $\mathbf{69,25}$

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2025, diperoleh nilai Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 7,70% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 69,25. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian Indeks Infrastruktur Daerah telah dilaksanakan dengan tingkat efisiensi yang cukup baik.

Nilai efisiensi tersebut menggambarkan bahwa capaian kinerja yang melebihi target, yaitu sebesar 100,13%, dapat dicapai dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 92,43%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran relatif optimal karena dengan realisasi anggaran yang tidak mencapai 100%, kinerja yang dihasilkan justru mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Efisiensi ini didukung oleh pelaksanaan program yang tepat sasaran, khususnya pada program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang memiliki realisasi anggaran tinggi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan capaian indikator. Selain itu, pengelolaan anggaran yang dilakukan secara selektif melalui penentuan prioritas kegiatan juga turut berperan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

22) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kota Pariaman yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH merupakan hasil

penggabungan dari 3 indikator komponen lingkungan yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Nilai IKLH diperoleh dari hasil penggabungan ketiga indikator tersebut dengan metode pembobotan sesuai pedoman nasional. IKLH memberikan gambaran umum (early warning indicator) mengenai kondisi lingkungan hidup pada periode dan wilayah tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pariaman terkait erat dengan sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) 2025-2029.

Tujuan Penyusunan IKLH:

1. Sebagai informasi dalam mendukung pengambilan keputusan di tingkat pusat maupun daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pencapaian target kinerja program lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Sebagai instrumen evaluasi keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran serta kerusakan lingkungan.
4. Sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan perbaikan kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

Dasar penghitungan IKLH adalah Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025. Penetapan target indikator mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029, SK ini menetapkan target IKLH (IKA, IKU, IKL) Kabupaten/Kota se-Indonesia. Target IKLH Kota Pariaman yang juga tertuang pada Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2025 - 2029.

Parameter yang diukur untuk setiap komponen IKLH dan bobot masing-masing komponen dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

No	Indikator IKLH	Parameter	Bobot
1	Kualitas Air Badan Air (Sungai, Danau, Waduk, Situ)	pH	0,376
		DO (Dissolved Oxygen)	
		BOD (Biochemical Oxygen Demand)	
		COD (Chemical Oxygen Demand)	
		TSS (Total Suspended Solid)	
		Nitrat	
		Total Fosfat	
		Fecal Coliform	
2	Kualitas Udara	SO_2	0,405
		NO_2	
		PM2,5	
3	Kualitas Lahan	Luas tutupan vegetasi hutan	0,219
		Luas tutupan vegetasi non-hutan:	
		- Belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan & fungsi lindung (kemiringan > 25%, sempadan sungai, pantai, dan danau)	
		- RTH (Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota)	
		- Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL)	

Rumus yang digunakan untuk IKLH Kabupaten/Kota adalah :

IKLH_Kab/Kota = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)

Keterangan :

IKLH_Kab/Kota	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota
IKA	:	Indeks Kualitas Air
IKU	:	Indeks Kualitas Udara
IKL	:	Indeks Kualitas Lahan

Kategori Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Kategori	Rentang Nilai
1	Baik	85 < x ≤ 100

2	Sedang	60 < x ≤ 85
3	Kurang	0 < x ≤ 60

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH merupakan hasil penggabungan dari 3 indikator komponen lingkungan yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKLH Kota Pariaman Tahun 2025 dihitung berdasarkan:

1. Hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan pada 5 sungai (masing-masing sungai 3 titik: hulu, rentang dan hilir) dan 3 talao di Kota Pariaman, sebanyak 2 kali dalam setahun;
2. Data dari KLHK yang merupakan hasil pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* di Kota Pariaman pada kawasan transportasi, pemukiman, industri dan perkantoran;
3. Hasil pemantauan kualitas udara ambien metode *manual aktif* pada 12 titik di Kota Pariaman;
4. Hasil delianiasi ruang terbuka hijau dan tutupan vegetasi dengan menggunakan aplikasi.

Hasil Perhitungan IKLH Kota Pariaman Tahun 2025

No	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil	Kriteria
1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,81	0,405	34,35	Sedang
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	67,92	0,376	25,53	Sedang
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	55,65	0,219	12,19	Sedang
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			72,07	Sedang

Sumber : Laporan IKLH Tahun 2025

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pariaman Tahun 2025, diperoleh nilai sebesar 72,07 dengan kategori Sedang. Nilai ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan hidup di Kota Pariaman secara umum masih dalam keadaan cukup baik dan terkendali, namun belum mencapai kategori baik. Kontribusi terbesar terhadap nilai IKLH berasal dari Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 84,81

dengan kontribusi 34,35 poin, yang menunjukkan bahwa kondisi udara relatif terjaga dan menjadi kekuatan utama dalam kualitas lingkungan daerah. Sementara itu, Indeks Kualitas Air (IKA) memperoleh nilai 67,92 dengan kontribusi 25,53 poin, yang mengindikasikan adanya tekanan terhadap kualitas badan air, seperti potensi pencemaran dari aktivitas domestik dan kegiatan perkotaan. Adapun Indeks Kualitas Lahan (IKL) memiliki nilai terendah yaitu 55,65 dengan kontribusi 12,19 poin, yang menunjukkan masih terbatasnya tutupan vegetasi dan kemungkinan adanya alih fungsi lahan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi lingkungan Kota Pariaman masih tergolong sedang, diperlukan upaya peningkatan terutama pada aspek kualitas lahan dan pengelolaan air agar nilai IKLH dapat meningkat ke kategori yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Analisis Berdasarkan Komponen Penyusun

Indeks Kualitas Udara (IKU)

Nilai: 84,81

Kontribusi (hasil x bobot): 34,35

Kategori: Sedang (mendekati Baik)

IKU memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan IKLH karena memiliki bobot tertinggi (0,405). Tingginya nilai IKU menunjukkan bahwa kualitas udara ambien di Kota Pariaman relatif baik, yang dipengaruhi oleh:

- Minimnya industri besar penghasil emisi
- Ketersediaan ruang terbuka hijau
- Karakteristik kota pesisir dengan sirkulasi udara yang baik

Komponen ini menjadi faktor dominan yang mendorong capaian IKLH melampaui target.

Indeks Kualitas Air (IKA)

Nilai: 67,92

Kontribusi: 25,53

Kategori: Sedang

Nilai IKA masih berada pada kategori sedang dan belum optimal. Hal ini mengindikasikan masih terdapat tekanan terhadap badan air, yang dapat disebabkan oleh:

- Limbah domestik rumah tangga
- Aktivitas permukiman di bantaran sungai
- Sistem pengelolaan air limbah yang belum sepenuhnya terpadu

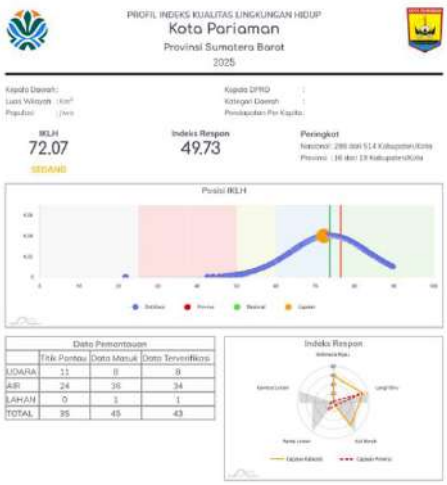
Meskipun demikian, nilai IKA tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap total IKLH.

Indeks Kualitas Lahan (IKL)
Nilai: 55,65
Kontribusi: 12,19
Kategori: Sedang

IKL merupakan komponen dengan nilai terendah dan kontribusi terkecil (bobot 0,219). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tutupan lahan dan kondisi ekosistem masih memerlukan perhatian lebih, khususnya terkait:

- Alih fungsi lahan
- Pengurangan tutupan vegetasi
- Keterbatasan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Metode perhitungan IKLH berubah mulai tahun 2025, perhitungan tersebut mengacu pada Permen LH/BPLH No. 14 Tahun 2025 dan perhitungannya yang lama sesuai dengan Permen LHK No. 27 tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan perubahan metode perhitungan tersebut maka nilai IKLH tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan nilai IKLH tahun -tahun sebelumnya.



1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 13 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,97	72,07	103%	Sangat Tinggi

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada Sasaran Strategis 13 yaitu *Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan hasil yang sangat positif. Target IKLH Tahun 2025 ditetapkan sebesar 69,97, sedangkan realisasinya mencapai 72,07, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 103%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan lingkungan hidup telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian sebesar 103% dengan kategori Sangat Tinggi mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup berjalan efektif. Keberhasilan ini kemungkinan didukung oleh upaya pengendalian pencemaran udara, pengelolaan kualitas air, serta pengelolaan dan perlindungan tutupan lahan yang cukup optimal selama tahun berjalan.

Meskipun demikian, meskipun target telah terlampaui, nilai IKLH secara klasifikasi umum masih berada pada kategori sedang. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan terutama pada aspek yang masih memiliki nilai lebih rendah, seperti kualitas lahan dan kualitas air, agar pada periode berikutnya tidak hanya melampaui target kinerja, tetapi juga mampu meningkatkan status kualitas lingkungan ke kategori yang lebih baik secara substantif.

Sumber data/Perhitungan Realisasi:

- Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar *European Union Directives* untuk parameter NO_2, SO_2, $PM_{2,5}$.
- Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yang digunakan saat ini adalah hasil pengembangan indeks kualitas air berbasis formulasi dari *National Sanitation Foundation – Water Quality Index* (NSF – WQI) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia melalui pengambilan keputusan dengan metode *Delphi*. Perhitungan nilai IKA dilakukan dengan mentranformasikan 8 parameter (pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phospat (TP) dan Fecal Coliform) ke dalam kurva sub-indeks dari masing-masing parameter.
- Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dilakukan dengan menghitung kualitas tutupan lahan yang termasuk dalam 23 (dua puluh tiga) kelas tutupan dan dibandingkan dengan luas wilayah administratifnya. Data tutupan lahan bersumber dari data dari KLH yang merupakan hasil analisis tutupan lahan berdasarkan data citra satelit 2018 dan juga hasil deliniasi RTH Kota Pariaman dengan menggunakan *Google Earth*.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
56,35	56,80	59,44	72,07	88,60%	88,66%	104,24%	103%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKLH selama tahun 2022–2025, terlihat adanya tren peningkatan yang

cukup signifikan, khususnya pada tahun 2025. Pada tahun 2022 nilai realisasi sebesar 56,35 dengan capaian 88,60%, kemudian meningkat sedikit pada tahun 2023 menjadi 56,80 dengan capaian 88,66%. Tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang lebih baik dengan realisasi 59,44 dan capaian mencapai 104,24%, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan.

Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2025, di mana realisasi melonjak menjadi 72,07 dengan capaian 103%. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan yang cukup besar dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan periode 2022–2023 yang relatif stagnan, maka periode 2024–2025 menunjukkan akselerasi peningkatan kualitas lingkungan hidup yang lebih nyata.

Secara keseluruhan, tren ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan lingkungan hidup mengalami perbaikan berkelanjutan dan semakin efektif dalam mencapai target. Keberhasilan melampaui target pada dua tahun terakhir (2024 dan 2025) mencerminkan adanya penguatan kebijakan, program, dan intervensi lingkungan yang lebih optimal. Namun demikian, konsistensi dan keberlanjutan upaya tetap diperlukan agar peningkatan ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Metode perhitungan IKLH berubah mulai tahun 2025, perhitungan tersebut mengacu pada Permen LH/BPLH No. 14 Tahun 2025 dan perhitungannya yang lama sesuai dengan Permen LHK No. 27 tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan perubahan metode perhitungan tersebut maka nilai IKLH tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan nilai IKLH tahun -tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Metode perhitungan IKLH berubah mulai tahun 2025, perhitungan tersebut mengacu pada Permen LH/BPLH No. 14 Tahun 2025 dan perhitungannya yang lama sesuai dengan Permen LHK No. 27 tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan perubahan metode perhitungan tersebut maka nilai IKLH tahun 2025 targetnya berubah dari 57,70 menjadi 69,97. Begitu juga target di RPD tahun 2026 sebesar 58,08 menjadi 70,18. Jika menggunakan target yang

mengacu kepada Peraturan terbaru maka analisanya dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Adapun persentase capaian IKLH 2025 bila dibandingkan dengan tahun 2026, yaitu perbandingan realisasi dengan target Akhir RPD (2026) adalah sebagai berikut:

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026) yang telah disesuaikan	Capaian
72,07 dengan Klasifikasi Sedang	70,18 dengan Klasifikasi Sedang	102,69%

Persentase capaian IKLH Kota Pariaman Tahun 2025 terhadap target akhir periode tahun 2026 sudah mencapai 102,69% melebihi target. Target RPD Tahun 2025 yang sudah disesuaikan adalah sebesar 69,97, sedangkan realisasi mencapai 72,07, sehingga terdapat selisih positif sebesar 2,10 poin indeks.

Jika dibandingkan persentase capaian IKLH tahun 2025 (103%), dengan perbandingan di tahun akhir RPD (2026), maka mengalami penurunan. Namun walaupun mengalami penurunan realisasi tahun 2025 (72,07) sudah melampaui target tahun 2026 (70,18).

Capaian ini menunjukkan bahwa:

- Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan berjalan efektif.
- Pengawasan perizinan lingkungan dan pengelolaan sampah mulai memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan.
- Sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan berkelanjutan mulai menunjukkan hasil yang terukur.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
72,07 dengan Klasifikasi	Belum di publish	-

Sedang		

Capaian IKLH Nasional belum publish karena belum terbitnya Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup tentang Penyampaian Hasil Nilai IKLH Tahun 2025.

Capaian IKLH Kota Pariaman Tahun 2025 berada dibawah capaian IKLH Provinsi Sumatera Barat, meskipun untuk penghitungan IKLH Nasional dan Provinsi ada penambahan indikator yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Target IKLH Kota Pariaman juga ditetapkan dibawah target Nasional/ Provinsi Sumatera, namun untuk target Indeks Kualitas Udara (IKU) ditetapkan diatas target Nasional/Provinsi Sumatera Barat dan capaian IKU Kota Pariaman telah melebihi capaian Nasional/Provinsi Sumatera Barat. Capaian IKLH, IKA, IKU dan IKL Kota Pariaman Tahun 2025 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

2) Perbandingan dengan Provinsi Sumatera Barat

Uraian	Realisasi Kota Pariaman 2025	Realisasi Provinsi Sumbar 2025	Capaian
Indeks Kualitas Air (IKA)	70,30	73,85	95,19%
Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,81	84,01	100,95%
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	55,65	80,04	69,53%
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	-	84,97	-
Indeks Kualitas	72,07 (Sedang)	80,12 (Sedang)	89,96%

Lingkungan Hidup (IKLH)			

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi Kota Pariaman Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, terlihat bahwa capaian kualitas lingkungan hidup Kota Pariaman secara umum masih berada di bawah rata-rata provinsi, meskipun pada beberapa indikator menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Pada Indeks Kualitas Air (IKA), Kota Pariaman memperoleh nilai 70,30, sedangkan Provinsi Sumatera Barat mencapai 73,85. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air di Kota Pariaman sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi, meskipun selisihnya tidak terlalu besar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan kualitas air sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan agar dapat menyamai atau melampaui capaian provinsi.

Pada Indeks Kualitas Udara (IKU), Kota Pariaman menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan nilai 84,81, sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat sebesar 84,01. Hal ini menandakan bahwa kualitas udara di Kota Pariaman relatif lebih terjaga dan menjadi salah satu keunggulan utama dalam pembentuk nilai IKLH.

Sebaliknya, pada Indeks Kualitas Lahan (IKL), Kota Pariaman memperoleh nilai 55,65, jauh lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 80,04. Selisih yang cukup signifikan ini menunjukkan bahwa aspek tutupan lahan dan vegetasi masih menjadi kelemahan utama Kota Pariaman dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.

Perlu diketahui bahwa dalam penghitungan IKLH Provinsi Sumatera Barat, terdapat penambahan indikator yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dengan nilai 84,97. Sementara itu, pada tingkat Kota Pariaman, indikator IKAL tidak dihitung atau tidak menjadi komponen pembentuk IKLH. Penambahan indikator IKAL pada tingkat provinsi ini turut mempengaruhi nilai akhir IKLH

Provinsi sehingga struktur perhitungannya tidak sepenuhnya sama dengan tingkat kota.

Secara keseluruhan, nilai IKLH Kota Pariaman sebesar 72,07 (Sedang) masih berada di bawah IKLH Provinsi Sumatera Barat sebesar 80,12 (Sedang). Meskipun berada dalam kategori yang sama, terdapat selisih nilai yang cukup nyata. Perbedaan ini dipengaruhi oleh rendahnya nilai Indeks Kualitas Lahan di Kota Pariaman serta adanya tambahan indikator IKAL dalam perhitungan tingkat provinsi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas lahan serta optimalisasi pengelolaan lingkungan lainnya perlu menjadi prioritas agar kesenjangan dengan capaian provinsi dapat semakin diperkecil pada tahun mendatang.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

   1) Faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target

      Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap capaian IKLH Tahun 2025 antara lain:

      - Peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha
      - Pengendalian pencemaran air melalui pemantauan rutin
      - Pengelolaan sampah yang lebih sistematis
      - Upaya rehabilitasi dan pemeliharaan RTH
      - Minimnya aktivitas industri skala besar

      Area Perbaikan dan Rekomendasi Tahun Berikutnya

      Meskipun target terlampaui, terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat:

      - Peningkatan kualitas badan air melalui pengendalian limbah domestik.
      - Perluasan dan optimalisasi RTH publik untuk meningkatkan nilai IKL.
      - Penguatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah dan perlindungan lingkungan.
      - Integrasi data lingkungan berbasis digital untuk meningkatkan akurasi pemantauan.

Sasaran strategi untuk menopang keberhasilan pemerintah untuk program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan instrumen keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan penilaian predikatnya. Penyempurnaan IKLH merupakan upaya yang berkelanjutan dan diharapkan tetap terus dilakukan.

2) Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam meningkatkan Nilai IKLH Kota Pariaman Tahun 2025 adalah:

4. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air di 3 sungai (Batang Pampan, Batang Pariaman dan Batang Manggung);
5. Pembangunan tangki septik individual untuk masyarakat dalam rangka menjaga kualitas perairan (sungai) Kota Pariaman;
6. Proses perizinan lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar;
7. Melakukan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar baik air maupun udara;
8. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Kualitas udara Kota Pariaman masih dalam kondisi sangat baik, yang disebabkan karena tidak adanya sumber emisi dari industri, sumber emisi hanya berasal dari transportasi dan aktifitas masyarakat skala rumah tangga dan masih banyaknya vegetasi yang mampu menyerap polutan yang ada di udara ambien.
2. Peningkatan nilai IKL ini disebabkan karena peningkatan luasan RTH dan non RTH yang terdeliniasi. Kota Pariaman tidak memiliki hutan, sehingga IKL Kota Pariaman dihitung dari luas RTH yang memiliki vegetasi yang menutupi lahan RTH tersebut (tutupan vegetasi non hutan), karena tidak semua RTH di Kota Pariaman yang memiliki tutupan vegetasi. Selain itu penghitungan nilai IKL Kota Pariaman juga didapat dari luasan non RTH, namun memiliki tutupan vegetasi.

3) Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan Nilai IKLH Kota Pariaman Tahun 2025 adalah:
    5. Ketidakselarasan Program Antar OPD
    6. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya
    7. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang sanitasi lingkungan terutama pembuangan limbah yang layak dan sesuai ketentuan
    8. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur sanksi terhadap pihak yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
4) Beberapa upaya/strategi yang akan ditargetkan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka meningkatkan nilai IKLH Kota Pariaman :
    4. IKLH perlu terus dikembangkan sebagai salah satu alat pendukung pembuatan kebijakan, sesuai dengan konsep holistik dan menyeluruh dimana kebutuhan dan ketersediaan data turut mengikuti konsep tersebut, sehingga diharapkan ditemukan suatu konsep yang sangat mendekati kondisi lapangan.
    5. Pembenahan dan penyempurnaan kesahihan dan keakuratan sumber data, terutama memastikan kualitas data mulai dari kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan pemantauan, sehingga dapat ditelusuri (traceable) setiap angka indikatifnya dan dapat ditemukan sumber permasalahannya.
    6. Perlu upaya pendalaman terhadap permasalahan dengan menggunakan metode analisis Drive – Pressure – State – Impact – Responses (DPSIR) dalam periode tertentu sehingga penanganan akan lebih spesifik.
    7. Pengembangan instrumen pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan.

8. Penerapan aturan yang ketat dan konsisten terhadap usaha/kegiatan yang merupakan sumber pencemar (air dan udara).

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 16 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	209.299.500	191.749.500	91,61%	Menunjang
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	165.664.500	155.385.050	93,80%	Menunjang
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.286.012.610	1.144.752.600	89,02%	Menunjang
	Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	20.833.000	15.408.000	73,96%	Menunjang
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan (PPLH)	30.800.000	22.125.000	71,83%	Menunjang
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	176.745.900	57.687.900	32,64%	Tidak Menunjang
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	3.545.000	3.020.000	85,19%	Menunjang
	Program	7.397.827.631	5.555.230.496	75,09%	Menunjang

	Pengelolaan Persampahan				

Berdasarkan tabel Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 16 (Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup), dapat diketahui bahwa secara umum sebagian besar program memberikan kontribusi positif terhadap capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), meskipun terdapat beberapa program yang belum optimal.

Program yang paling menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan capaian 93,80% serta Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan capaian 91,61%. Tingginya capaian pada program ini menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian kualitas air, udara, serta perencanaan dokumen lingkungan berjalan efektif dan mendukung peningkatan nilai IKLH. Selain itu, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) juga memberikan kontribusi signifikan dengan capaian 89,02%, yang berperan dalam menjaga kualitas lahan dan tutupan vegetasi.

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup juga tergolong baik dengan capaian 85,19%, menunjukkan responsivitas pemerintah daerah dalam menangani permasalahan lingkungan yang dilaporkan masyarakat. Sementara itu, Program Pengelolaan Persampahan memiliki anggaran terbesar namun capaian realisasi keuangan sebesar 75,09%, yang menunjukkan pelaksanaan cukup baik tetapi masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan dampaknya terhadap kualitas lingkungan.

Di sisi lain, terdapat program yang belum optimal dan berpotensi menjadi faktor penghambat, yaitu Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan capaian hanya 32,64%. Rendahnya capaian ini dapat mempengaruhi upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu, Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan (PPLH) serta Program

Pengendalian B3 dan Limbah B3 juga menunjukkan capaian yang masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian IKLH terutama didukung oleh program teknis pengendalian pencemaran dan perencanaan lingkungan, sementara peningkatan kapasitas masyarakat dan optimalisasi pengelolaan persampahan perlu menjadi perhatian untuk memperkuat pencapaian kinerja pada periode berikutnya.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis 16 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	209.299.500	191.749.500	103%	26,09%	100%	Efisien
	165.664.500	155.385.050				
	1.286.012.610	1.144.752.600				
	20.833.000	15.408.000				
	30.800.000	22.125.000				
	176.745.900	57.687.900				
	3.545.000	3.020.000				
	7.397.827.631	5.555.230.496				
Jumlah	9.290.728.141	7.145.358.546				

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%}$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE = \frac{(9.290.728.141 \times 1,03) - 7.145.358.546}{9.290.728.141} \times 100\%}$$

$\boldsymbol{TE = 26,09\%}$

2. Nilai Efisiensi

   Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

   Asumsi PMK:

   - Efisiensi terendah = –20%
   - Efisiensi tertinggi = 20%

   Ketentuan:

   TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

   TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

   Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

   Nilai Efisiensi = $\boldsymbol{26,09\% > 20\%}$

   NE= $\boldsymbol{100}$

Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi menggunakan rumus yang telah ditetapkan, dengan Pagu Anggaran (PA) sebesar Rp 9.290.728.141, Realisasi Anggaran (RA) sebesar Rp 7.145.358.546, dan Capaian Kinerja (CK) sebesar 103%, diperoleh Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 26,09%. Nilai tersebut dihitung dari selisih antara anggaran yang disesuaikan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran, kemudian dibagi dengan pagu anggaran dan dikalikan 100 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Sasaran Strategis 16 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup tidak hanya berhasil melampaui target kinerja, tetapi juga dilakukan dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat dibandingkan proporsi capaian yang diperoleh.

Berdasarkan ketentuan konversi nilai efisiensi, apabila Tingkat Efisiensi (TE) lebih dari atau sama dengan 20%, maka Nilai Efisiensi ditetapkan sebesar 100. Dengan demikian, atas capaian TE sebesar 26,09%, Sasaran Strategis 16 memperoleh Nilai Efisiensi maksimal yaitu 100. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dalam mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025 tergolong sangat efisien.

23) Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni

Indikator persentase perumahan dan permukiman layak huni merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan proporsi rumah tangga yang menempati hunian yang memenuhi standar minimal kelayakan di suatu wilayah. Standar kelayakan hunian mencakup berbagai aspek, antara lain kondisi fisik bangunan yang aman dan memadai, akses terhadap air minum layak, akses sanitasi yang layak dan aman, serta ketersediaan ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Selain itu, aspek kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam menentukan kelayakan suatu hunian.

Indikator ini memiliki peran strategis dalam mendukung evaluasi kondisi perumahan dan kawasan permukiman, serta menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan di bidang perumahan. Pemerintah daerah memanfaatkan indikator ini untuk mengidentifikasi permasalahan, menentukan prioritas penanganan, serta merumuskan kebijakan yang tepat dalam rangka meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Secara nasional, pengukuran indikator ini mengacu pada kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta selaras dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam mewujudkan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan.

Perhitungan persentase perumahan dan permukiman layak huni dilakukan dengan menggunakan pendekatan rata-rata dari tiga indikator utama, yaitu persentase akses sanitasi layak dan aman, persentase akses air minum layak, serta persentase rumah layak huni. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap kondisi permukiman, karena tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik bangunan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\%\text{Perumahan dan Permukiman Layak Huni} = \frac{\%\text{Sanitasi Layak Aman} + \%\text{Air Minum Layak} + \%\text{Rumah Layak}}{3}$$

Dengan demikian, semakin tinggi nilai persentase perumahan dan permukiman layak huni, maka semakin baik pula kondisi hunian

masyarakat di suatu wilayah. Sebaliknya, nilai yang masih rendah menunjukkan perlunya upaya peningkatan kualitas perumahan, baik melalui program perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan akses air minum dan sanitasi, maupun penataan kawasan permukiman secara terpadu.

A. Persentase Akses Sanitasi Layak

Persentase akses sanitasi layak merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan. Indikator ini mencerminkan tingkat pemenuhan layanan dasar sanitasi masyarakat serta berperan penting dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan lingkungan dan kualitas hidup penduduk.

Rumus yang digunakan:

$$\%\text{Akses Sanitasi Layak} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times \mathbf{100}\%$$

Keterangan:

- Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar yang memenuhi standar kesehatan, seperti jamban sehat dengan septic tank atau sistem pengolahan limbah domestik yang sesuai.
- Jumlah Rumah Tangga adalah total seluruh rumah tangga di wilayah yang dihitung.

Jumlah Data Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2025

No	Kecamatan	Cubluk (Septic Tank)	IPLT (Pengolahan Lumpur Tinja)	IPAL Domestik	Jumlah
1	Pariaman Selatan	613	360	145	1.118
2	Pariaman Tengah	0	487	611	1.098
3	Pariaman Timur	0	780	147	927

4	Pariaman Utara	1.145	734	496	2.375
	Jumlah	1.758	2.361	1.399	5.518

Penghitungan Kebutuhan SPM Pekerjaan Umum Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2025

Desa	Target				Reaalisasi				
	Total	Akses dasar/ akses layak perdesaan	Akses aman spald-s	Akses aman spald-t	Tanpa akses	Akses dasar	Akses layak	Akses aman spald-s	Akses aman spald-t
Pasir Sunur	90	73	17	0	0	73		17	0
Marunggi	540	439	4	63	34	439		4	63
Kampung Apar	231	0	3	0	228	0		3	0
Sikabu	100	0	0	0	100	0		0	0
Palak Aneh	273	0	40	11	222	0		40	11
Padang Cakur	145	101	43	0	1	101		43	0
Taluk	930	0	1	8	921	0		1	8
Marabau	244	0	31	12	201	0		31	12
Sungai Kasai	156	0	48	17	91	0		48	17
Batang Tajongkek	206	0	34	10	162	0		34	10
Balai Kurai Taji	319	0	10	13	296	0		10	13
Pauh Kurai Taji	295	0	1	0	294	0		1	0
Simpang	231	0	46	0	185	0		46	0
Toboh Palabah	452	0	0	0	452	0		0	0
Rambai	312	0	22	11	279	0		22	11
Punggung Lading	587	0	60	0	527	0		60	0
Karan Aur	451	0	16	0	435	0		16	0
Jalan Baru	350	0	1	0	349	0		1	0
Ujung Batung	254	0	27	0	227	0		27	0
Jalan Kereta Api	210	0	95	0	115	0		95	0

Cimparuh	750	0	94	0	656	0		94	0
Alai Gelombang	190	0	9	95	86	0		9	95
Taratak	390	0	25	47	318	0		25	47
Kampung Baru	480	0	4	27	449	0		4	27
Lohong	245	0	33	0	212	0		33	0
Pasir	201	0	0	0	201	0		0	0
Kampung Perak	157	0	3	0	154	0		3	0
Pondok Ii	245	0	5	17	223	0		5	17
Jawi-Jawi I	191	0	0	0	191	0		0	0
Jawi-Jawi Ii	251	0	0	229	22	0		0	229
Kampung Jawa Ii	225	0	6	37	182	0		6	37
Kampung Jawa I	230	0	4	20	206	0		4	20
Kampung Pondok	361	0	4	32	325	0		4	32
Pauh Barat	430	0	89	81	260	0		89	81
Pauh Timur	450	0	49	8	393	0		49	8
Rawang	425	0	17	0	408	0		17	0
Jati Hilir	375	0	6	0	369	0		6	0
Jati Mudik	150	0	0	18	132	0		0	18
Kampung Gadang	301	0	49	0	252	0		49	0
Talago Sarik	354	0	36	0	318	0		36	0
Bato	276	0	14	0	262	0		14	0
Batang Kabung	257	0	48	0	209	0		48	0
Sungai Sirah	154	0	9	0	145	0		9	0
Bungo Tanjung	260	0	52	0	208	0		52	0
Kampung Kandang	331	0	58	0	273	0		58	0
Kaluat	208	0	8	0	200	0		8	0
Kajai	201	0	80	15	106	0		80	15
Kampung Tangah	90	0	1	0	89	0		1	0
Sungai Pasak	201	0	54	0	147	0		54	0
Air Santok	370	0	122	0	248	0		122	0

Cubadak Mentawai	298	0	59	98	141	0		59	98
Koto Marapak	287	0	106	9	172	0		106	9
Pakasai	279	0	66	25	188	0		66	25
Kp. Baru Padusunan	291	0	18	0	273	0		18	0
Ampalu	496	0	33	161	302	0		33	161
Tanjung Sabar	120	0	37	0	83	0		37	0
Apar	324	0	31	39	254	0		31	39
Manggung	300	0	79	0	221	0		79	0
Cubadak Air	361	255	19	82	5	255		19	82
Cubadak Air Selatan	224	199	12	13	0	199		12	13
Sikapak Timur	289	0	52	0	237	0		52	0
Sikapak Barat	464	0	45	30	389	0		45	30
Tungkal Selatan	396	0	90	28	278	0		90	28
Tungkal Utara	280	229	50	0	1	229		50	0
Cubadak Air Utara	444	306	36	74	28	306		36	74
Naras Hilir	305	0	26	8	271	0		26	8
Naras I	550	0	47	0	503	0		47	0
Balai Naras	600	0	20	17	563	0		20	17
Padang Birik-Birik	364	0	63	31	270	0		63	31
Sintuk	199	156	23	13	7	156		23	13
Sungai Rambai	279	0	71	0	208	0		71	0
Total *)	22275	1758	2361	1399	16757	1758		2361	1399
PERSENTASE LAYANAN					75,23%	7,89%		10,60%	6,28%
CAPAIAN AKSES					24,77%				

Persentase Akses Sanitasi Layak Kota Pariaman Tahun 2025

$$\%\text{Akses Sanitasi Layak} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$$

$$= \frac{5.518}{22.275} \times 100\% = 24,77\%$$

Persentase akses sanitasi layak Kota Pariaman pada tahun 2025 tercatat sebesar 24,77%, yang diperoleh dari 5.518 rumah tangga yang telah memiliki akses sanitasi layak dari total 22.275 rumah tangga. Akses sanitasi layak tersebut mencakup layanan sanitasi dasar, serta akses sanitasi aman melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memperoleh layanan sanitasi yang memenuhi standar kesehatan, namun secara umum tingkat akses sanitasi layak di Kota Pariaman masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih besarnya jumlah rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi yang memadai.

Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan intervensi program sanitasi, baik melalui pembangunan infrastruktur sanitasi dasar, pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik, maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang layak. Upaya ini penting dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

B. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak

Persentase penduduk berakses air minum layak merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi rumah tangga yang telah memperoleh layanan air minum yang memenuhi standar kualitas dan kesehatan. Indikator ini mencerminkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar air minum masyarakat serta menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan sektor air minum di daerah.

Rumus Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak

$$\%\text{Penduduk Berakses Air Minum Layak} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times \mathbf{100}\%$$

Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum

No	Kecamatan	Jaringan Perpipaan (JP)	Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	Jumlah
1	Pariaman Selatan	1.188	3.409	4.597
2	Pariaman Tengah	2.057	4.537	6.594
3	Pariaman Timur	819	3.020	3.839
4	Pariaman Utara	1.480	4.168	5.648
Jumlah		5.544	15.134	20.678

KELURAHAN/ DESA	TARGET	REALISASI		
		TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
Pasir Sunur	90	50	40	0
Marunggi	540	169	344	27
Kampung Apar	231	107	120	4
Sikabu	100	85	15	0
Palak Aneh	273	51	192	30
Padang Cakur	145	66	79	0
Taluk	930	170	730	30
Marabau	244	97	147	0
Sungai Kasai	156	17	109	30
Batang Tajongkek	206	6	101	99
Balai Kurai Taji	319	15	278	26
Pauh Kurai Taji	295	31	260	4
Simpang	231	14	210	7
Toboh Palabah	452	86	330	36
Rambai	312	49	249	14
Punggung Lading	587	175	205	207
Karan Aur	451	45	228	178
Jalan Baru	350	116	234	0
Ujung Batung	254	55	199	0
Jalan Kereta Api	210	27	125	58
Cimparuh	750	141	538	71
Alai Gelombang	190	98	91	1
Taratak	390	92	298	0

Kampung Baru	480	449	31	0
Lohong	245	1	244	0
Pasir	201	1	200	0
Kampung Perak	157	1	156	0
Pondok II	245	0	245	0
Jawi-Jawi I	191	7	184	0
Jawi-Jawi II	251	94	157	0
Kampung Jawa II	225	83	142	0
Kampung Jawa I	230	30	196	4
Kampung Pondok	361	231	127	3
Pauh Barat	430	187	192	51
Pauh Timur	450	177	273	0
Rawang	425	137	288	0
Jati Hilir	375	67	308	0
Jati Mudik	150	18	81	51
Kampung Gadang	301	11	267	23
Talago Sarik	354	51	261	42
Bato	276	33	243	0
Batang Kabung	257	32	176	49
Sungai Sirah	154	27	120	7
Bungo Tanjung	260	1	216	43
Kampung Kandang	331	2	299	30
Kaluat	208	7	172	29
Kajai	201	15	186	0
Kampung Tangah	90	0	27	63
Sungai Pasak	201	24	175	2
Air Santok	370	83	287	0
Cubadak Mentawai	298	95	203	0
Koto Marapak	287	283	4	0
Pakasai	279	140	118	21
Kp. Baru Padusunan	291	15	266	10
Ampalu	496	10	451	35
Tanjung Sabar	120	45	71	4
Apar	324	2	276	46
Manggung	300	55	243	2

Cubadak Air	361	68	293	0
Cubadak Air Selatan	224	132	80	12
Sikapak Timur	289	182	107	0
Sikapak Barat	464	174	290	0
Tungkal Selatan	396	122	257	17
Tungkal Utara	280	117	163	0
Cubadak Air Utara	444	130	255	59
Naras Hilir	305	4	251	50
Naras I	550	54	457	39
Balai Naras	600	2	529	69
Padang Birik-Birik	364	2	348	14
Sintuk	199	107	92	0
Sungai Rambai	279	274	5	0
Total	22275	5544	15134	1597
PERSENTASE LAYANAN		24,89%	67,94%	7,17%
CAPAIAN AKSES		92,83%		

Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak:

$$= \frac{\mathbf{20.678}}{\mathbf{22.275}} \times \mathbf{100}\% = \mathbf{92,83}\%$$

Persentase penduduk berakses air minum layak Kota Pariaman tahun 2025 sebesar 92,83%, yang diperoleh dari 20.678 rumah tangga yang telah mendapatkan akses air minum layak, baik melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan, dari total 22.275 rumah tangga. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memperoleh akses terhadap layanan air minum yang memenuhi standar, meskipun masih terdapat sebagian kecil rumah tangga yang belum terlayani dan memerlukan perhatian lebih lanjut.

C. Persentase Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan, dan utilitas dasar sehingga mampu memberikan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penghuninya.

Adapun kriteria rumah layak huni meliputi:

1) Persyaratan Keselamatan Bangunan
   - Struktur bangunan permanen atau semi permanen
   - Tidak membahayakan keselamatan penghuni
2) Persyaratan Kesehatan
   - Pencahayaan dan ventilasi memadai
   - Memiliki akses terhadap air minum layak
   - Memiliki akses sanitasi layak
   - Luas minimum ruang sesuai standar kecukupan hunian
3) Persyaratan Utilitas Dasar
   - Memiliki akses listrik
   - Kondisi drainase lingkungan memadai

Kriteria teknis tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020

Persentase rumah layak huni menggambarkan proporsi rumah yang memenuhi standar kelayakan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi penghuninya. Indikator ini digunakan oleh pemerintah daerah sebagai alat evaluasi kondisi perumahan serta dasar dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman. Selain itu, indikator ini juga selaras dengan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs).

Tujuan:

- Mengukur efektivitas program penanganan kawasan kumuh
- Mendukung pencapaian target RPJMD dalam peningkatan kualitas permukiman
- Menjadi dasar evaluasi pengurangan backlog perumahan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat
- Mendukung target nasional penanganan kawasan kumuh sesuai kebijakan Kementerian PUPR

Penilaian indikator pada tahun 2025 mengacu pada:

- Standar teknis kelayakan rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Indikator perumahan layak dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs)
- Data sektoral Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Data pendukung berupa hasil verifikasi lapangan dan pendataan *by name by address*

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Rumah Layak Huni} = \frac{\text{Total Rumah} - (\text{Total RTLH} - \text{RTLH yang Ditangani})}{\text{Total Rumah}} \times \mathbf{100}\%$$

Penilaian dilakukan berdasarkan:

- Hasil verifikasi lapangan
- Basis data perumahan daerah
- Pembaruan data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Penilaian indikator ini dilakukan oleh:

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
- Tim teknis verifikasi lapangan
- Aparat kelurahan/desa

Dalam pelaksanaan program tertentu, penilaian juga dapat melibatkan verifikator dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Evaluasi dan pelaporan kinerja dilakukan melalui:

- Sistem pelaporan kinerja daerah (LKjIP)
- Laporan kepada Pemerintah Provinsi
- Sinkronisasi dengan sistem nasional perumahan

Perhitungan Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2025

Diketahui:

- Total rumah = 22.275 unit
- Total RTLH awal = 590 unit
- RTLH yang ditangani = 15 unit

Maka:

- RTLH akhir = 590 – 15 = 575 unit
- Rumah layak huni = 22.275 – 575 = 21.700 unit

Substitusi ke dalam rumus:

$$\text{Persentase Rumah Layak Huni} = \frac{\mathbf{22.275 - (590 - 15)}}{\mathbf{22.275}} \times \mathbf{100}\%$$

$$= \mathbf{97,42}$$

Berdasarkan data tahun 2025, jumlah total rumah di Kota Pariaman sebanyak 22.275 unit, dengan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada awal tahun sebanyak 590 unit atau sebesar 2,65%. Setelah dilakukan penanganan RTLH sebanyak 15 unit, jumlah RTLH menurun menjadi 575 unit atau sebesar 2,58%.

Dengan demikian, jumlah rumah layak huni meningkat dari 21.685 unit menjadi 21.700 unit. Jika dihitung menggunakan rumus yang telah ditetapkan, maka persentase rumah layak huni di Kota Pariaman tahun 2025 adalah sebesar 97,42%.

Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi kualitas perumahan di Kota Pariaman sudah tergolong baik, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan dalam penanganan RTLH untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat secara menyeluruh.

Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni:

$$\%\text{Perumahan dan Permukiman Layak Huni} = \frac{\%\text{Sanitasi Layak Aman} + \%\text{Air Minum Layak} + \%\text{Rumah Layak}}{\mathbf{3}}$$

$$= \frac{\mathbf{24,77 + 92,83 + 97,42}}{\mathbf{3}} = \mathbf{71,67}\%$$

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 17: Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	89,08%	71,67%	80,45%	Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada indikator *Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni*, target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 89,08%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 71,67%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 80,45% dan termasuk dalam kategori tinggi.

Meskipun realisasi belum mencapai target yang ditetapkan, capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup baik. Selisih antara target dan realisasi sebesar 17,41% mengindikasikan masih adanya kesenjangan yang perlu ditindaklanjuti, terutama pada aspek yang memiliki kontribusi rendah terhadap indikator.

Secara komponen, tingginya persentase rumah layak huni (97,42%) dan akses air minum layak (92,83%) telah memberikan kontribusi positif terhadap capaian indikator. Namun demikian, rendahnya akses sanitasi layak (24,77%) menjadi faktor utama yang menahan pencapaian target secara keseluruhan, mengingat indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata dari ketiga komponen tersebut.

Dengan capaian sebesar 80,45%, kinerja indikator ini dapat dikategorikan tinggi, yang menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan hasil yang signifikan. Namun demikian, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terarah, khususnya dalam peningkatan akses sanitasi layak, agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal pada periode berikutnya.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
92,15%	92,72%	74,35%	71,67%	117,85%	111,30%	88,35%	80,45%

Berdasarkan data realisasi kinerja indikator *Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni* selama periode tahun 2022–2025, terlihat adanya fluktuasi capaian yang cenderung menurun dalam dua tahun terakhir.

Realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 92,15% dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 92,72%. Namun demikian, pada

tahun 2024 terjadi penurunan signifikan menjadi 74,35%, dan kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 71,67%.

Sejalan dengan itu, capaian kinerja terhadap target juga menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2022 capaian kinerja mencapai 117,85% dan tahun 2023 sebesar 111,30%, yang menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Akan tetapi, pada tahun 2024 capaian menurun menjadi 88,35%, dan kembali turun pada tahun 2025 menjadi 80,45%.

Penurunan kinerja dalam dua tahun terakhir terutama dipengaruhi oleh perubahan pada komponen indikator, khususnya rendahnya capaian akses sanitasi layak yang menjadi salah satu variabel utama dalam perhitungan indikator. Meskipun komponen rumah layak huni dan akses air minum relatif tinggi, kontribusi sanitasi yang masih rendah menyebabkan nilai agregat indikator mengalami penurunan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
71,67%	86,25%	83,09%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RPD tahun 2026 pada indikator *Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni*, diperoleh realisasi sebesar 71,67%, sedangkan target akhir RPD ditetapkan sebesar 86,25%. Dengan demikian, capaian terhadap target akhir RPD mencapai 83,09%.

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja indikator sudah berada pada arah yang sesuai dengan target jangka menengah, namun masih terdapat selisih sebesar 14,58% yang perlu dikejar dalam periode perencanaan berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun program dan kegiatan telah memberikan hasil yang cukup signifikan, upaya percepatan masih diperlukan untuk mencapai target akhir yang telah ditetapkan.

Jika dilihat dari komponen penyusunnya, tingginya capaian rumah layak huni dan akses air minum layak belum sepenuhnya

mampu mengangkat nilai indikator secara keseluruhan akibat masih rendahnya akses sanitasi layak. Kondisi ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi belum tercapainya target akhir RPD.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

   Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
71,67%	-	-

Perbandingan realisasi kinerja indikator *Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni* antara Kota Pariaman dengan capaian nasional tahun 2025 tidak dapat dilakukan secara langsung. Hal ini disebabkan oleh perbedaan metode dan formula perhitungan yang digunakan.

Indikator yang digunakan oleh Kota Pariaman dihitung berdasarkan pendekatan rata-rata dari tiga komponen utama, yaitu akses sanitasi layak, akses air minum layak, dan rumah layak huni. Sementara itu, pada tingkat nasional, indikator serupa umumnya menggunakan definisi, metodologi, dan parameter yang berbeda sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku secara nasional.

Perbedaan dalam pendekatan perhitungan tersebut menyebabkan hasil yang diperoleh tidak berada pada basis yang sama, sehingga tidak dapat dibandingkan secara *apple to apple*. Oleh karena itu, capaian realisasi Kota Pariaman tahun 2025 sebesar 71,67% lebih tepat digunakan untuk evaluasi internal kinerja daerah serta perbandingan antar waktu (time series) dalam lingkup daerah itu sendiri.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

   Faktor Penghambat Persentase Akses Sanitasi layak

   1. Keterbatasan Infrastruktur Sanitasi
      - Belum semua rumah tangga memiliki jamban sehat atau akses IPAL.
      - Fasilitas sanitasi komunal dan individu masih terbatas, terutama di kawasan kumuh atau desa terpencil.

- Infrastruktur lama banyak yang rusak atau tidak berfungsi.

Dampak: cakupan sanitasi layak rendah.

2. Keterbatasan Anggaran dan Pendanaan
   - Alokasi APBD untuk sanitasi belum mencukupi.
   - Biaya pembangunan sanitasi bagi masyarakat masih tinggi.

   Dampak: percepatan perluasan akses sanitasi terhambat.
3. Rendahnya Kesadaran dan Perilaku Masyarakat
   - Masih adanya praktik BABS (Buang Air Besar Sembarangan).
   - Kurangnya pemeliharaan fasilitas oleh pengguna.
   - Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya sanitasi layak.

   Dampak: fasilitas yang tersedia kurang dimanfaatkan, kualitas sanitasi menurun.
4. Keterbatasan Kapasitas SDM dan Kelembagaan
   - SDM teknis sanitasi belum memadai, terutama di tingkat desa.
   - Koordinasi antar OPD (PU, Kesehatan, Perumahan) kurang optimal.
   - Lemahnya pengawasan operasional IPAL dan SPALD.

   Dampak: program sanitasi kurang efektif dan tidak merata.
5. Kurangnya Layanan Pengelolaan Lumpur Tinja
   - IPLT atau jasa penyedotan lumpur tinja belum tersedia di banyak wilayah.
   - Layanan pengolahan lumpur tinja kurang terjadwal atau tidak aman.
   - Penanganan limbah domestik belum memenuhi standar kesehatan.

   Dampak: sanitasi tidak sepenuhnya layak meskipun ada jamban.
6. Keterbatasan Data dan Monitoring
   - Data akses sanitasi belum lengkap atau tidak mutakhir.
   - Monitoring cakupan dan kualitas sanitasi tidak rutin.
   - Program dan intervensi sulit diukur efektivitasnya.

   Dampak: penanganan tidak tepat sasaran.
7. Hambatan Sosial dan Ekonomi
   - Masyarakat berpendapatan rendah kesulitan membangun atau

memelihara jamban.

- Prioritas anggaran rumah tangga lebih pada kebutuhan pokok lain.
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program sanitasi komunal.

Dampak: pertumbuhan akses sanitasi layak lambat.

Solusi Strategis dan Operasional

1. Mengatasi Keterbatasan Infrastruktur Sanitasi

   Solusi:

   - Pembangunan jamban sehat individu dan komunal di kawasan kumuh dan terpencil.
   - Pengembangan dan rehabilitasi SPALD dan IPAL komunal.
   - Perluasan jaringan sanitasi berbasis komunitas (desa/RT/RW).

   Hasil: cakupan akses sanitasi layak meningkat merata.

2. Meningkatkan Anggaran dan Pendanaan

   Solusi:

   - Prioritaskan anggaran APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan sanitasi.
   - Optimalkan pemanfaatan DAK, APBN, program SANIMAS, dan skema KPBU.
   - Fasilitasi subsidi atau bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

   Hasil: percepatan pembangunan sarana sanitasi lebih terjamin.

3. Meningkatkan Kesadaran dan Perilaku Masyarakat

   Solusi:

   - Kampanye STOP BABS dan hidup bersih sehat (PHBS).
   - Pelatihan pemeliharaan fasilitas bagi masyarakat.
   - Pelibatan tokoh masyarakat dan kader kesehatan dalam edukasi sanitasi.

   Hasil: fasilitas yang dibangun dimanfaatkan secara optimal.

4. Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan

   Solusi:

   - Pelatihan teknis sanitasi untuk aparatur desa/kelurahan dan

OPD terkait.

- Pembentukan unit koordinasi lintas sektor untuk pemantauan sanitasi.
- Pengawasan rutin operasional IPAL dan SPALD.

Hasil: program sanitasi lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

5. Meningkatkan Layanan Pengelolaan Lumpur Tinja

Solusi:

- Pembangunan dan operasional IPLT atau layanan penyedotan lumpur tinja komunal.
- Jadwal rutin pengangkutan dan pengolahan limbah domestik.
- Sosialisasi pentingnya pengelolaan limbah yang aman.

Hasil: sanitasi memenuhi standar layak dan aman.

6. Penguatan Data, Monitoring, dan Evaluasi

Solusi:

- Pemutakhiran database sanitasi secara berkala.
- Pemetaan wilayah tanpa akses sanitasi layak.
- Monitoring indikator cakupan dan kualitas sanitasi secara rutin.

Hasil: program lebih tepat sasaran dan terukur.

8. Mengatasi Hambatan Sosial dan Ekonomi

Solusi:

- Fasilitasi masyarakat berpendapatan rendah melalui bantuan/subsidi pembangunan jamban.
- Pelibatan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas komunal.
- Integrasi program sanitasi dengan program kesejahteraan masyarakat.

Hasil: pertumbuhan akses sanitasi layak meningkat cepat.

Faktor Penunjang tercapainya Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak

1. Ketersediaan dan Pengembangan Infrastruktur Air Minum

- Pembangunan dan peningkatan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) perpipaan dan non-perpipaan.
- Rehabilitasi jaringan distribusi dan sambungan rumah.

- Pengembangan sumber air baku yang berkelanjutan.

Dampak: cakupan layanan air minum meningkat.

2. Dukungan Anggaran dan Pendanaan
   - Alokasi APBD yang memadai untuk air minum.
   - Dukungan pendanaan dari APBN, DAK, dan bantuan provinsi.
   - Skema pendanaan alternatif (KPBU, hibah air minum).

   Dampak: percepatan pembangunan dan perluasan layanan.
3. Peran dan Kinerja PDAM/BUMD Air Minum
   - Peningkatan kapasitas produksi dan distribusi PDAM.
   - Perbaikan manajemen dan efisiensi operasional.
   - Penurunan tingkat kehilangan air (NRW).

   Dampak: layanan air minum lebih optimal dan berkelanjutan.
4. Ketersediaan Sumber Air Baku yang Memadai
   - Perlindungan daerah tangkapan air.
   - Pengelolaan sumber air permukaan dan air tanah.
   - Kerja sama antar daerah dalam pemanfaatan sumber air.

   Dampak: kontinuitas pasokan air terjamin.
5. Penerapan Standar Kualitas Air Minum
   - Pengolahan air sesuai standar baku mutu.
   - Pengawasan kualitas air secara berkala.
   - Sertifikasi dan pengujian kualitas air minum.

   Dampak: air minum yang disalurkan layak dan aman dikonsumsi.
6. Kebijakan dan Regulasi Pendukung
   - Kebijakan daerah yang mendukung akses air minum layak.
   - Integrasi program air minum dengan sanitasi dan kesehatan.
   - Kemudahan perizinan pembangunan SPAM.

   Dampak: pelaksanaan program lebih terarah.
7. Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat
   - Kesediaan masyarakat untuk tersambung jaringan air minum.
   - Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan SPAM desa/komunal.
   - Perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.

   Dampak: pemanfaatan fasilitas air minum lebih optimal.
8. Pemanfaatan Teknologi
   - Penggunaan teknologi pengolahan air yang tepat guna.

- Sistem monitoring dan pengendalian distribusi.
- Digitalisasi pelayanan pelanggan air minum.

Dampak: efisiensi dan kualitas layanan meningkat.

9. Koordinasi Lintas Sektor
    - Sinergi antara OPD teknis, PDAM, dan pemerintah desa.
    - Integrasi program air minum dengan perumahan dan permukiman.

    Dampak: pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran.

Beberapa faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian target persentase rumah layak huni pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Basis Data yang Relatif Akurat

   Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah menggunakan pendekatan *by name by address*, sehingga pelaksanaan intervensi program dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
2. Jumlah RTLH Relatif Kecil

   Pada awal tahun 2025, dari total 22.275 unit rumah, jumlah RTLH tercatat sebanyak 590 unit atau sekitar 2,65%. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara proporsional tingkat rumah layak huni di Kota Pariaman sudah cukup tinggi, sehingga upaya peningkatan kualitas perumahan menjadi lebih terfokus dan terarah.
3. Intervensi Program Perbaikan RTLH

   Pelaksanaan kegiatan perbaikan terhadap 15 unit RTLH pada tahun 2025 memberikan kontribusi langsung terhadap penurunan jumlah RTLH dan peningkatan jumlah rumah layak huni, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya persentase capaian indikator.
4. Dukungan Kebijakan dan Perencanaan

   Indikator persentase rumah layak huni telah menjadi salah satu prioritas dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah, sehingga mendapatkan perhatian dan

dukungan yang berkelanjutan baik dari sisi program maupun penganggaran.

Keterbatasan / Potensi Risiko

Meskipun capaian indikator persentase rumah layak huni pada tahun 2025 tergolong tinggi, masih terdapat beberapa potensi tantangan yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

1. Masih Terdapat RTLH Tersisa
   Hingga akhir tahun 2025 masih terdapat 575 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
2. Risiko Munculnya RTLH Baru
   Kondisi ekonomi masyarakat berpotensi menyebabkan munculnya RTLH baru, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu melakukan perbaikan rumah secara mandiri.
3. Potensi Dampak Bencana Alam
   Risiko kerusakan rumah akibat bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau cuaca ekstrem dapat menambah jumlah RTLH di masa mendatang.
4. Keterbatasan Anggaran Daerah
   Pelaksanaan program perbaikan RTLH masih sangat bergantung pada ketersediaan anggaran daerah, sehingga dapat membatasi jumlah intervensi yang dilakukan setiap tahun.

Upaya yang Akan Dilakukan Tahun Selanjutnya

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, direncanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Aksi Terintegrasi
   Menyusun rencana aksi penanganan kawasan kumuh yang terintegrasi lintas perangkat daerah guna memastikan keterpaduan program dan kegiatan.
2. Optimalisasi Pendanaan
   Melakukan pengusulan program dan kegiatan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi secara lebih intensif dan terarah untuk memperoleh dukungan pendanaan.
3. Penetapan Skala Prioritas Kawasan
   Menetapkan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kekumuhan

tertinggi agar intervensi yang dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran.

4. Penguatan Regulasi dan Pengawasan
   Meningkatkan regulasi serta pengawasan dalam pemanfaatan ruang dan pembangunan permukiman untuk mencegah tumbuhnya kawasan kumuh baru.
5. Monitoring dan Evaluasi Berkala
   Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala berbasis indikator kinerja, baik output maupun outcome, guna memastikan efektivitas pelaksanaan program.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 17 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp355.785.000	Rp333.461.832	93,73%	Menunjang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp223.972.000	Rp221.889.850	99,07%	Menunjang
	Program Pengembangan Perumahan	Rp33.128.000	Rp8.128.250	24,62%	Tidak Menunjang

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator *Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni*, terdapat beberapa program yang

berkontribusi secara signifikan maupun yang belum memberikan dukungan optimal.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah menunjukkan realisasi anggaran sebesar Rp333.461.832 dari pagu Rp355.785.000 atau sebesar 93,73%, sehingga termasuk dalam kategori menunjang pencapaian kinerja. Program ini berkontribusi dalam peningkatan akses sanitasi, meskipun secara keseluruhan capaian sanitasi masih relatif rendah.

Selanjutnya, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum memiliki realisasi anggaran sebesar Rp221.889.850 dari pagu Rp223.972.000 atau sebesar 99,07%. Tingginya realisasi anggaran ini menunjukkan pelaksanaan program berjalan sangat baik dan memberikan kontribusi positif terhadap tingginya capaian akses air minum layak.

Namun demikian, Program Pengembangan Perumahan menunjukkan realisasi anggaran yang relatif rendah, yaitu sebesar Rp8.128.250 dari pagu Rp33.128.000 atau hanya 24,62%, sehingga dikategorikan tidak menunjang pencapaian kinerja. Rendahnya realisasi program ini berdampak pada terbatasnya intervensi terhadap peningkatan kualitas rumah, khususnya dalam penanganan rumah tidak layak huni.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis 17 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Rp612.885.000	Rp563.479.932	80,45%	-11,50%	21,25	Tidak Efisien

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100}\%$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE} = \frac{(\mathbf{612.885.000} \times \mathbf{0,8045}) - \mathbf{563.479.932}}{\mathbf{612.885.000}} \times \mathbf{100}\%$$

$$\boldsymbol{TE} = -\mathbf{11,50}\%$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%
- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

$$\boldsymbol{NE} = \mathbf{50} + \left(\frac{\boldsymbol{TE}}{\mathbf{20}} \times \mathbf{50}\right)$$

$$\boldsymbol{NE} = \mathbf{50} + \left(\frac{-\mathbf{11,50}}{\mathbf{20}} \times \mathbf{50}\right)$$

$$= \mathbf{50} + (-\mathbf{28,75})$$

$$= \mathbf{21,25}$$

Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni tahun 2025 sebesar -11,50%, yang menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih besar dibandingkan capaian kinerja yang dihasilkan.

Nilai efisiensi yang diperoleh sebesar 21,25, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun serapan anggaran cukup tinggi, namun belum diikuti oleh capaian kinerja yang optimal, sehingga diperlukan peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

24) Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani

Menurut UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Indikator ini bertujuan untuk:

- Mengukur efektivitas program penanganan kawasan kumuh.
- Mendukung pencapaian target RPJMD dalam peningkatan kualitas permukiman.
- Menjadi dasar evaluasi pengurangan backlog dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- Mendukung target nasional penanganan kawasan kumuh sesuai kebijakan Kementerian PUPR.

Penilaian indikator ini mengacu pada:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Permen PUPR tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- SK Penetapan Luasan Kawasan Kumuh oleh Kepala Daerah Dokumen RPD Kota Pariaman Tahun 2024–2026
- Renstra Dinas Perkim-LH tahun 2024-2026

Metode penghitungan dilakukan melalui:

- Verifikasi lapangan
- Pengukuran luasan yang telah ditangani
- Evaluasi pengurangan skor kekumuhan berdasarkan indikator teknis (7 indikator kekumuhan)

Kategori capaian dihitung berdasarkan persentase realisasi terhadap target tahunan:

≥ 100% : Sangat Baik
90% – 99% : Baik
75% – 89% : Cukup
< 75% : Kurang

Penilaian Dilakukan Oleh

- Perhitungan teknis dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman melalui bidang permukiman.
- Verifikasi dan monitoring dapat dilakukan bersama:
  a) Bappeda
  b) Inspektorat (evaluasi kinerja)
  c) Pemerintah Provinsi / Kementerian PUPR (jika terkait DAK atau program pusat)

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 17 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	19,09 Ha	0,16 Ha	0,83%	Sangat Rendah

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada Sasaran Strategis 17: Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni, diketahui bahwa target penanganan kawasan permukiman kumuh pada tahun pelaporan ditetapkan sebesar 19,62 Ha.

Namun hingga akhir periode pelaporan, realisasi penanganan kawasan kumuh yang dapat dicapai hanya sebesar 0,16 Ha, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada 0,82% dari target yang ditetapkan. Berdasarkan kategori penilaian kinerja, capaian tersebut termasuk dalam kategori sangat rendah.

Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut Terjadinya pengurangan alokasi anggaran (efisiensi anggaran) baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah yang berdampak langsung pada terbatasnya pelaksanaan kegiatan fisik penanganan kawasan permukiman kumuh. Keterbatasan pendanaan tersebut menyebabkan sebagian besar rencana kegiatan penanganan yang telah direncanakan pada awal tahun tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
11,19 Ha	3,61 Ha	1,79 Ha	0,16 Ha	84,65%	36,1%	7,15%	0,83%

Berdasarkan data realisasi penanganan kawasan permukiman kumuh selama periode 2022–2025, terlihat bahwa capaian kinerja mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 capaian kinerja masih tergolong tinggi, namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama keterbatasan pendanaan dan berkurangnya dukungan program penanganan kawasan kumuh.

a. Tahun 2022

Pada tahun 2022 terjadi pengurangan luasan kawasan kumuh sebesar 11,19 Ha dengan capaian kinerja 84,65%. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penghitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Kota Pariaman Nomor 600/1574/DISPEKIM-LH/2022, ditetapkan pengurangan luasan kumuh sebesar 11,19 Ha (84,65%) dari total luasan kumuh berdasarkan SK Nomor 38/050/2022 yaitu 184,36 Ha.

Lokasi penanganan kawasan kumuh pada tahun 2022 meliputi:

- Kecamatan Pariaman Tengah, Kelurahan Jati Hilir seluas 3,63 Ha (dari total 6,51 Ha)
- Kecamatan Pariaman Tengah, Kelurahan Kampung Pondok seluas 1,60 Ha (dari total 3,63 Ha)
- Kecamatan Pariaman Tengah, Kelurahan Jawi-Jawi I seluas 2,34 Ha (dari total 6,16 Ha)
- Kecamatan Pariaman Tengah, Kelurahan Jawi-Jawi II seluas 3,62 Ha (dari total 7,99 Ha)

Tingginya capaian pada tahun ini dipengaruhi oleh adanya dukungan program penanganan kawasan kumuh dan kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman yang relatif besar.

b. Tahun 2023

Pada tahun 2023 terjadi pengurangan luasan kawasan kumuh sebesar 3,61 Ha dengan capaian kinerja 36,10%. Lokasi penanganan kawasan kumuh berada di Kecamatan Pariaman Utara, Desa Manggung dengan total luas kawasan kumuh 13,40 Ha, dimana penanganan yang dapat direalisasikan pada tahun tersebut seluas 3,61 Ha.

Capaian kinerja pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh berkurangnya alokasi anggaran dan terbatasnya kegiatan fisik penanganan kawasan kumuh.

c. Tahun 2024

Pada tahun 2024 terjadi pengurangan luasan kawasan kumuh sebesar 1,79 Ha dengan capaian kinerja 7,15%. Lokasi penanganan kawasan kumuh berada di Kecamatan Pariaman Tengah, Desa Pauh Barat dengan luasan kawasan kumuh yang berhasil ditangani sebesar 1,79 Ha.

Penurunan capaian pada tahun ini dipengaruhi oleh keterbatasan pendanaan serta efisiensi anggaran, sehingga kegiatan penanganan kawasan kumuh yang dapat dilaksanakan menjadi lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya.

d. Tahun 2025

Pada tahun 2025 realisasi penanganan kawasan kumuh tercatat sebesar 0,16 Ha dengan capaian kinerja 0,83%. Capaian ini menunjukkan bahwa penanganan kawasan kumuh pada tahun 2025 masih sangat terbatas dan belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Rendahnya capaian ini dipengaruhi oleh pengurangan alokasi anggaran baik dari pemerintah pusat maupun daerah, yang berdampak langsung pada terbatasnya kegiatan fisik penanganan kawasan kumuh.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
0,16 Ha	19,73 Ha	0.81%

Berdasarkan tabel perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RPD Kota Pariaman Tahun 2026, diketahui bahwa realisasi penanganan kawasan permukiman kumuh pada tahun 2025 adalah sebesar 0,16 Ha, sedangkan target yang ditetapkan pada akhir periode RPD tahun 2026 adalah sebesar 19,73 Ha. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target akhir RPD baru mencapai 0,81%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi penanganan kawasan permukiman kumuh masih sangat jauh dari target akhir yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penanganan kawasan kumuh masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi pendanaan, prioritas program pembangunan, maupun kesesuaian perencanaan target dengan kondisi riil di lapangan.

Selain keterbatasan anggaran, rendahnya capaian tersebut juga dipengaruhi oleh ketidaktepatan dalam penetapan target awal. Luas kawasan permukiman kumuh yang dijadikan dasar dalam penetapan target mencakup kawasan dengan luasan di atas 10 Ha. Sementara itu, berdasarkan ketentuan serta prioritas penanganan

kawasan kumuh, kewenangan dan fokus intervensi pemerintah daerah lebih diarahkan pada kawasan kumuh dengan luasan di bawah 10 Ha.

Perbedaan dasar perhitungan tersebut menyebabkan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan menjadi kurang realistis apabila dibandingkan dengan kapasitas fiskal daerah, kewenangan penanganan, serta kemampuan pelaksanaan program di tingkat daerah. Akibatnya, realisasi capaian kinerja menjadi sangat rendah apabila diukur terhadap target akhir RPD yang telah ditetapkan.

Ke depan, diperlukan penyesuaian perencanaan target penanganan kawasan kumuh yang lebih realistis dan berbasis pada kewenangan daerah, ketersediaan anggaran, serta prioritas lokasi penanganan. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan program maupun pendanaan guna mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Pariaman.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
0,16 Ha	-	-

Berdasarkan tabel perbandingan antara realisasi penanganan kawasan permukiman kumuh Kota Pariaman tahun 2025 dengan realisasi nasional tahun 2025, data tersebut tidak dapat diperbandingkan secara langsung. Hal ini disebabkan karena data realisasi nasional untuk indikator luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani pada tahun 2025 tidak tersedia atau tidak dipublikasikan secara spesifik dalam format yang sama, sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengukuran capaian secara kuantitatif antara daerah dan nasional pada tahun yang sama.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan target penanganan kawasan permukiman kumuh secara nasional sebesar 10.000 Ha selama periode 2020–2024. Target tersebut

merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional dalam rangka percepatan pengurangan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan dalam berbagai sumber pemberitaan pembangunan, hingga tahun 2022 telah ditangani sekitar 7.257 Ha (72,57%), sehingga masih tersisa sekitar 2.743 Ha kawasan kumuh yang perlu ditangani untuk mencapai target nasional tersebut.

Sementara itu, berdasarkan SK Walikota Pariaman Nomor 38/050/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Perubahan Kedua atas Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pariaman, luas total kawasan kumuh di Kota Pariaman tercatat sebesar 184,36 Ha.

Realisasi penanganan kawasan kumuh di Kota Pariaman dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kontribusi terhadap upaya pengurangan kawasan kumuh secara nasional, yaitu:

- Tahun 2022 sebesar 11,19 Ha
- Tahun 2023 sebesar 3,61 Ha
- Tahun 2024 sebesar 1,79 Ha
- Tahun 2025 sebesar 0,16 Ha

Secara kumulatif, total penanganan kawasan kumuh hingga tahun 2025 tercatat sebesar 128,62 Ha dengan capaian sekitar 49,21% dari luasan kawasan kumuh yang ada. Dengan demikian, sisa kawasan kumuh di Kota Pariaman pada tahun 2025 diperkirakan masih sekitar 132,73 Ha.

Apabila dibandingkan dengan target nasional sebesar 10.000 Ha, capaian Kota Pariaman secara kuantitatif memang relatif kecil, mengingat target nasional tersebut merupakan akumulasi penanganan kawasan kumuh dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karena itu, perbandingan secara langsung antara capaian daerah dengan target nasional tidak sepenuhnya menggambarkan kinerja daerah secara proporsional.

Namun demikian, secara proporsional terhadap luasan kawasan kumuh yang ada di wilayah Kota Pariaman, capaian

tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional pengurangan kawasan kumuh. Kontribusi Kota Pariaman merupakan bagian dari upaya kolektif nasional dalam mencapai target pengurangan kawasan kumuh sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN.

Ke depan, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, optimalisasi sumber pendanaan baik dari APBD, APBN maupun sumber pembiayaan lainnya, serta perencanaan yang berbasis data agar penanganan kawasan permukiman kumuh dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

2) Perbandingan dengan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi 2025	Realisasi Provinsi Sumbar 2025	Capaian
0,16 Ha	-	-

Berdasarkan tabel perbandingan antara realisasi penanganan kawasan permukiman kumuh Kota Pariaman tahun 2025 dengan realisasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, perbandingan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung karena data realisasi penanganan kawasan kumuh tingkat provinsi pada tahun 2025 tidak tersedia dalam format indikator yang sama. Oleh karena itu, kolom capaian tidak dapat dihitung secara kuantitatif.

Indikator Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani juga perlu dilihat dalam konteks regional, khususnya terhadap upaya penanganan kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman yang dihimpun dari dokumen perencanaan provinsi, luas kawasan kumuh yang telah ditetapkan di wilayah Provinsi Sumatera Barat mencapai sekitar 4.771 Ha yang tersebar dalam kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan berbagai intervensi program untuk mengurangi kawasan kumuh di wilayah provinsi secara bertahap.

Selain itu, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, target penurunan kawasan kumuh di tingkat provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah kawasan kumuh yang telah diinventarisasi serta persentase pengurangan tahunan yang disusun sesuai dengan kapasitas kewenangan dan sumber daya daerah. Dalam perencanaan tersebut, pemerintah provinsi menargetkan penanganan kawasan kumuh sekitar 7,09% per tahun terhadap luasan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi.

Sementara itu, realisasi penanganan kawasan kumuh di Kota Pariaman pada tahun 2025 sebesar 0,16 Ha (0,82%) menunjukkan kontribusi daerah terhadap upaya pengurangan kawasan kumuh di tingkat regional. Secara absolut, capaian Kota Pariaman relatif kecil apabila dibandingkan dengan kebutuhan penanganan kawasan kumuh di tingkat provinsi yang mencapai ribuan hektar. Namun demikian, kondisi tersebut juga mencerminkan adanya perbedaan skala kewenangan, luas wilayah, serta kapasitas fiskal antar daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian, meskipun perbandingan secara langsung tidak dapat dilakukan, capaian penanganan kawasan kumuh di Kota Pariaman tetap menjadi bagian dari kontribusi daerah dalam mendukung upaya penanganan kawasan kumuh secara regional di Provinsi Sumatera Barat. Ke depan diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, optimalisasi dukungan program, serta peningkatan sinergi pendanaan agar penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

   Hambatan dan permasalahan dalam mendukung pencapaian sasaran luas kawasan kumuh yang ditangani. Berikut adalah beberapa hambatan utama:

1. Keterbatasan Anggaran: Memiliki keterbatasan anggaran untuk program penanganan kawasan kumuh. Hal ini menghambat pelaksanaan proyek-proyek penataan kawasan kumuh yang memerlukan biaya tinggi.
2. Kendala Birokrasi: Proses perizinan dan regulasi yang rumit sering kali menghambat pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh. Kendala birokrasi ini dapat memperlambat progres dan mengurangi efektivitas program.
3. Kurangnya Koordinasi Antar Pihak: Penanganan kawasan kumuh memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Kurangnya koordinasi dan sinergi antar pihak dapat menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan program.
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kekurangan tenaga ahli dan teknisi dalam pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh juga menjadi tantangan besar. Keterbatasan sumber daya manusia ini dapat memperlambat proses pelaksanaan program dan mengurangi efektivitasnya.
5. Ketidakmampuan Masyarakat: Banyak masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh tidak memiliki kemampuan finansial atau teknis untuk mendukung program penanganan. Hal ini menyebabkan banyak proyek yang tidak selesai atau tidak sesuai dengan standar yang diharapkan.
6. Keterbatasan Akses Dana: Meskipun ada bantuan dari berbagai sumber, akses masyarakat terhadap dana ini sering kali terbatas. Prosedur yang rumit atau kurangnya sosialisasi mengenai program-program bantuan dapat menjadi hambatan dalam pencairan dana.
7. Masalah Kepemilikan Lahan: Konflik kepemilikan lahan di kawasan kumuh sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan program penataan. Penyelesaian konflik ini memerlukan waktu dan proses yang tidak sederhana.

Untuk mendukung pencapaian sasaran luas kawasan kumuh yang ditangani pada tahun 2025, kota melalui Dinas PerkimLH perlu

melakukan berbagai langkah strategis dan terkoordinasi. Berikut adalah beberapa upaya dilakukan:

1. Pemetaan Kawasan Kumuh: melakukan pemetaan yang akurat dan komprehensif terhadap kawasan kumuh yang ada di wilayahnya. Penggunaan teknologi penginderaan jarak jauh dan survei lapangan dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengukur luas kawasan kumuh.
2. Penyusunan Rencana Penanganan: Berdasarkan hasil pemetaan, kemudian disusun rencana penanganan yang terperinci dan realistis.
3. Penguatan Kolaborasi dan Koordinasi: melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri.
4. Monitoring dan Evaluasi: melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program penanganan kawasan kumuh. Tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas program, mengidentifikasi hambatan yang muncul, dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, direncanakan strategi atau langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana aksi penanganan kumuh terintegrasi lintas perangkat daerah.
2. Pengusulan program pendanaan pusat dan provinsi secara lebih agresif.
3. Penetapan prioritas kawasan berbasis tingkat kekumuhan tertinggi.
4. Penguatan regulasi dan pengawasan untuk mencegah tumbuhnya kawasan kumuh baru.
5. Monitoring dan evaluasi berkala berbasis indikator output dan outcome.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 18 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Luasan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	52.465.750	33.400.190	63,66%	Menunjang

Kumuh yang Tertangani	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.270.000.000	1.265.827.630	99,67%	Menunjang

Program Kawasan Permukiman memiliki pagu anggaran sebesar Rp52.465.750 dengan realisasi sebesar Rp33.400.190 atau 63,66%. Melalui program ini dilakukan penanganan kawasan kumuh seluas 0,16 Ha, dengan dukungan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pada 9 lokasi kegiatan, yaitu:

1. Rabat beton Kompleks Pondok Lestari, Kelurahan Kampung Pondok
2. Saluran irigasi/drainase Jalan Perumahan Kampung Baru
3. Lanjutan pembangunan drainase Perumahan Ujung Batung
4. Lanjutan rabat beton Perum Laneva Ujung Batung
5. Rabat beton Perumahan Permata Hijau Toboh Palabah
6. Rabat beton Perumahan Toboh Palabah Residence
7. Rehabilitasi drainase Kampung Perak arah Sungai Batang Piaman
8. Peningkatan jalan Dusun II Desa Manggung
9. Pembangunan jalan lingkungan menuju Pesantren Al-Mughny Desa Pauh Barat

Kegiatan tersebut berkontribusi dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta mendukung penanganan kawasan kumuh di Kota Pariaman.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.270.000.000 dengan realisasi sebesar Rp1.265.827.630 atau 99,67% dari total anggaran. Pada tahun 2025 terdapat tambahan 14 perumahan yang menyerahkan PSU, sehingga total perumahan yang telah menyerahkan PSU menjadi 32 perumahan. Adapun pelaksanaan PSU pada tahun 2025 dilakukan pada 4 lokasi perumahan, yaitu:

1. Perumahan Toboh Palabah Residence
2. Perumahan Deto Patra Indah Permai (Ujung Batung)
3. Perumahan Lanefa Residence I (Ujung Batung)
4. Perumahan Pondok Lestari (Kelurahan Kampung Pondok)

Capaian kinerja program ini sebesar 22,22%, yang diperoleh dari perhitungan 4 lokasi yang ditangani dari total target 18 lokasi (4/18 × 100%).

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis 18 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	Rp1.322.465.750	Rp1.299.227.820	0,83%	-97,44%	0	Tidak Efisien

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE} = \frac{(\mathbf{1.322.465.750} \times \mathbf{0,83\%}) - \mathbf{1.299.227.820}}{\mathbf{1.322.465.750}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{TE} = \mathbf{-97,44\%}$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%
- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

Nilai Efisiensi = -97,34%<-20%

NE= **0**

Berdasarkan hasil penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran Strategis 18 yaitu *Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Mitigasi Bencana*, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 6,61% dengan nilai efisiensi sebesar 66,51. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah berjalan efisien, dimana capaian kinerja sebesar 104% dapat diperoleh dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan pagu anggaran yang tersedia.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana mampu memberikan output kinerja yang optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang relatif efektif. Efisiensi tersebut didukung oleh optimalisasi pelaksanaan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan serta pengelolaan anggaran yang lebih terarah sesuai prioritas program. Meskipun demikian, peningkatan kualitas perencanaan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan tetap diperlukan agar efisiensi anggaran dapat terus ditingkatkan sekaligus mendorong peningkatan capaian ketahanan daerah menuju kategori yang lebih tinggi.

25) Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik tingkat kabupaten/kota maupun Provinsi. Indeks Ketahanan Daerah berfungsi untuk memetakan kemampuan daerah, mengevaluasi kinerja penanggulangan bencana serta menjadi dasar perencanaan dari sebuah kebijakan. Indeks Ketahanan Daerah mengukur 71 indikator yang mencakup kebijakan, kelembagaan, perencanaan, sistem

informasi dan mitigasi dengan tujuan utama untuk meningkatkan resilensi wilayah serta meminimalkan dampak bencana secara berkelanjutan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah yang mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks resiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya.

Adapun klasifikasi predikat penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) beserta rentang dan interprestasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

$$IKDT = \begin{cases} 0,4 \times IKD, & IKD \leq 0,4 \\ \frac{1}{3} + 0,4\ (IKD - 0,4), & 0,4 < IKD \leq 0,8 \\ \frac{2}{3} + 1,67\ (IKD - 0,8), & IKD > 0,8 \end{cases}$$

Sumber : BNPB

Penetapan target indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024–2026, dibandingkan dengan realisasi 2024 sebesar 44%, target 2025 ditetapkan lebih tinggi yaitu 48%.

Pada tanggal 12 Juni 2025 telah dilaksanakan kick off tentang penilaian nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam surat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 300.2.3/579/BPBD/2025. Kegiatan ini dilakukan secara daring melalui zoom meeting yang dihadiri oleh Bappeda dan BPBD 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Tujuan dari zoom ini sebagai langkah awal dimulainya penilain IKD Tahun 2025 yang lebih baik dari segi jumlah nilai maupun kualitas data yang dikirimkan, sebagaimana dokumentasinya sebagai berikut:





Berdasarkan Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-32/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang Penyampaian Hasil Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025, Kota Pariaman memperoleh nilai IKD sebesar 0,50, yang termasuk dalam kategori sedang. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Pariaman telah berjalan cukup baik melalui dukungan kelembagaan, perencanaan, serta pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, namun masih memerlukan penguatan agar mencapai kategori ketahanan tinggi. Capaian ini mengindikasikan bahwa sistem penanggulangan bencana telah tersedia dan berfungsi, tetapi optimalisasi pada aspek mitigasi berbasis masyarakat, peningkatan kualitas perencanaan kebencanaan, serta penguatan koordinasi lintas sektor masih perlu ditingkatkan guna mendukung penurunan tingkat risiko bencana secara berkelanjutan.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 18 Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Mitigasi Bencana				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Ketahanan Daerah	48	50	104 %	Sangat Tinggi

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada Sasaran Strategis 18 yaitu *Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Mitigasi Bencana*, indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah menunjukkan capaian yang sangat baik. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 48 dengan predikat sedang, sedangkan realisasi yang dicapai pada tahun pelaporan sebesar 50 dengan predikat sedang, sehingga diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 104% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana telah berjalan efektif serta mampu meningkatkan kapasitas ketahanan daerah melebihi target yang direncanakan.

Keberhasilan ini didukung oleh penguatan kelembagaan penanggulangan bencana, peningkatan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan, serta koordinasi lintas perangkat daerah dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Meskipun target telah terlampaui, masih terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi capaian penilain, antara lain belum optimalnya pengkajian resiko dan perencanaan yang terpadu, peningkatan efektivitas pencegahan dan perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. Perbedaan antara target dan realisasi tersebut menjadi dasar perlunya peningkatan komitmen bagi Pemerintah Kota Pariaman agar lebih meningkatkan lagi kinerja dan upaya dalam mitigasi dan penanganan bencana.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
44	45	44	50	142%	102%	95,65%	104%

Berdasarkan hasil perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD), diketahui bahwa target Tahun 2025 ditetapkan sebesar 48 dengan predikat sedang, sedangkan realisasi kinerja mencapai 50 dengan predikat sedang, sebagaimana tertuang dalam surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-06.03/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025 perihal

penyampaian IKD 2024 dan IRB 2024 di Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 Januari 2025. Secara kuantitatif capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, namun secara kualitas masih berada pada kategori sedang sehingga belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan ketahanan daerah yang optimal.

Hasil penilaian IKD Tahun 2025 menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain belum optimalnya pengkajian risiko bencana dan perencanaan yang terpadu, serta perlunya peningkatan efektivitas upaya pencegahan, penguatan kesiapsiagaan, dan penanganan darurat bencana. Perbedaan antara target dan capaian kualitas tersebut menjadi dasar perlunya peningkatan komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk terus memperkuat pelaksanaan program mitigasi dan penanggulangan bencana secara berkelanjutan guna meningkatkan ketahanan daerah pada periode selanjutnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
50	52	96,15 %

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026 pada indikator Indeks Ketahanan Daerah, diketahui bahwa realisasi Tahun 2025 sebesar 50, sedangkan target akhir RPD ditetapkan sebesar 52, sehingga capaian kinerja mencapai 96,15%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja yang telah dilaksanakan mendekati target akhir yang direncanakan, namun masih terdapat selisih yang perlu dioptimalkan agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara penuh.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan ketahanan daerah melalui program mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi program, konsistensi pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan sinergi lintas perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah percepatan dan

optimalisasi kinerja pada periode berikutnya agar target akhir RPD dapat tercapai sesuai dengan sasaran pembangunan ketahanan daerah terhadap bencana.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
50	-	-

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025, Kota Pariaman memperoleh nilai realisasi sebesar 50. Sampai dengan periode pelaporan, nilai rata-rata nasional Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025 belum dipublikasikan secara resmi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sehingga perbandingan capaian kinerja secara kuantitatif terhadap tingkat nasional belum dapat dilakukan.

Meskipun demikian, capaian realisasi Kota Pariaman yang berada pada kategori sedang menunjukkan bahwa tingkat ketahanan daerah telah berkembang dan sejalan dengan kecenderungan capaian daerah secara umum yang masih berada pada kategori sedang. Ke depan, perbandingan dengan nilai nasional perlu dilakukan setelah data resmi dirilis guna memperoleh gambaran posisi relatif kinerja daerah terhadap capaian ketahanan bencana secara nasional serta sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan kinerja yang lebih terarah.

2) Perbandingan dengan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi 2025	Rata-rata Nilai IKD Kab/Kota di Provinsi Sumbar 2025	Capaian
50 dengan kategori sedang	38 dengan kategori rendah	131%

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025, Kota Pariaman memperoleh nilai sebesar 50 dengan kategori sedang, sedangkan rata-rata nilai IKD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sebesar 38 dengan

kategori rendah. Dengan demikian, capaian kinerja Kota Pariaman mencapai 131% dibandingkan rata-rata provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketahanan daerah Kota Pariaman relatif lebih baik dibandingkan capaian rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program penanggulangan bencana di Kota Pariaman telah berjalan lebih optimal, khususnya dalam aspek penguatan kelembagaan, kesiapsiagaan, dan pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana. Meskipun demikian, nilai IKD masih berada pada kategori sedang sehingga diperlukan upaya peningkatan secara berkelanjutan melalui penguatan perencanaan berbasis risiko, peningkatan kapasitas sumber daya, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor guna mencapai kategori ketahanan tinggi pada periode berikutnya.

3) Perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Peringkat	Kabupaten/Kota	IKD 2025	Kategori
1	Kota Padang	0,52	Sedang
2	Padang Pariaman	0,52	Sedang
3	Pesisir Selatan	0,52	Sedang
4	Kota Pariaman	0,50	Sedang
5	Solok Selatan	0,42	Sedang
6	Dharmasraya	0,40	Sedang
7	Kota Sawahlunto	0,40	Sedang
8	Pasaman Barat	0,40	Sedang
9	Solok	0,39	Sedang
10	Kota Padang Panjang	0,37	Sedang
11	Sijunjung	0,37	Sedang
12	Kota Solok	0,36	Sedang
13	Pasaman	0,36	Sedang
14	Agam	0,34	Sedang
15	Lima Puluh Kota	0,34	Sedang
16	Kota Bukittinggi	0,28	Rendah

17	Kota Payakumbuh	0,25	Rendah
18	Tanah Datar	0,25	Rendah
19	Kepulauan Mentawai	0,24	Rendah

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2025, capaian ketahanan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh kategori sedang, dengan hanya sebagian kecil daerah yang berada pada kategori rendah dan belum terdapat daerah yang mencapai kategori tinggi. Nilai IKD tertinggi dicapai oleh Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai 0,52, sedangkan nilai terendah terdapat pada Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,24.

Kota Pariaman memperoleh nilai IKD sebesar 0,50 dan menempati peringkat ke-4 se-Provinsi Sumatera Barat, yang menunjukkan bahwa kapasitas ketahanan daerah relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar kabupaten/kota lainnya. Posisi tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan program mitigasi bencana, kesiapsiagaan, serta penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di Kota Pariaman telah berjalan cukup efektif.

Meskipun demikian, secara umum seluruh daerah masih berada pada kategori sedang sehingga menunjukkan bahwa penguatan kapasitas penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek pengkajian risiko, integrasi perencanaan pembangunan berbasis kebencanaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Kondisi ini menjadi dasar perlunya peningkatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna mendorong peningkatan ketahanan daerah menuju kategori tinggi pada periode mendatang.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan

No.	Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target	Upaya yang telah dilakukan
1	Masih rendahnya nilai pada prioritas pengkajian resiko dan perencanaan terpadu	➢ Melakukan penyusunan peta bahaya, peta kerentnan dan kapasitas dan pembaharuannya sesuai dengan aturan ➢ Melakukan revisi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana daerah
2	Masih rendahnya nilai pada prioritas peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	➢ Melakukan pengurangan frekuensi dan dampak banjir melalui penerapan sumur resapan dan biopori, perlindungan daerah tangkapan air, restorasi sungai dan penguatan lereng. ➢ Melakukan penguatan aturan daerah tentang pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu untuk deteksi dan pencegahan bencana banjir ➢ Melakukan penegakan hukum untuk pelanggaran penerapan IMB khusunya bangunan tahan gempabumi ➢ Melakukan pembangunan zona perendam gelombang tsunami di daerah yang berisiko
3	Masih rendahnya nilai pada prioritas perkuatan kesiapsiagaan dan	➢ Melakukan penguatan kesiapsiagaan meghadapi bencana gempa bumi, tsunami

	penanganan darurat bencana	melalui perencanaan kontijensi ➢ Melakukan penguatan kapasitas sarana dan prasarana evakuasi masyarakat untuk bencana tsunami ➢ Melakukan penguatan kapasitas dalam menghadapi bencana kekeringan dan banjir bandang melalui perencanaan kontijensi

Sebagai upaya peningkatan kinerja penerapan Indeks Ketahanan Daerah ke depan, Pemerintah Kota Pariaman menetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan, antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pembaharuan dokumen perencanaan resiko bencana secara berkala.
2. Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusian (SDM) kebencanaan dengan cara melakukan pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi kebencanaan bagi aparat dan relawan untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
3. Peningkatan mitigasi fisik dan non fisik dengan cara pembangunan infrsastruktur yang tahan gempa serta sarana dan prasarana penunjang bencana dan penanaman pohon (penghijauan) serta pelestarin lingkungan untuk mengurangi dampak bencana alam.
4. Pengembangan sistem peringatan dini dan edukasi untuk meningkatkan kesadran masyarakat tentang tanda-tanda bencana dan julur evakuasi yang telah dibuat.
5. Penguatan aspek ekonomi dan pangan dengan cara menigatkan ketahanan pangan desa melalui diversifikan tanaman serta membangun lumbung pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan distribusi dari pusat.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 18 Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Mitigasi Bencana					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Indeks Ketahanan Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Rp1.409.327.450	Rp1.232.184.454	75%	

Berdasarkan pelaksanaan Sasaran Strategis 18 yaitu *Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Mitigasi Bencana*, pencapaian indikator kinerja utama Indeks Ketahanan Daerah didukung melalui pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.409.327.450 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.232.184.454 atau 75% dari total anggaran yang tersedia. Realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketahanan daerah, yang tercermin dari capaian nilai IKD yang berhasil melampaui target kinerja.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja antara lain pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, koordinasi lintas perangkat daerah, serta penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana. Namun demikian, realisasi anggaran yang belum optimal menunjukkan masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal, sehingga berpotensi mempengaruhi peningkatan kualitas capaian ketahanan daerah yang masih berada pada kategori sedang.

Dengan demikian, Program Penanggulangan Bencana secara umum menunjang pencapaian kinerja, namun ke depan diperlukan optimalisasi perencanaan kegiatan, percepatan pelaksanaan program, serta peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran agar capaian indikator kinerja dapat meningkat secara lebih signifikan dan berkelanjutan.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis 18 Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Mitigasi Bencana						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Indeks Ketahanan Daerah	Rp1.784.554.442	Rp1.738.052.303	104%	6,61%	66,51	Efisien

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE} = \frac{(\mathbf{1.784.554.442} \times \mathbf{104\%}) - \mathbf{1.738.052.303}}{\mathbf{1.784.554.442}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{TE} = \mathbf{6,61\%}$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%
- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

$$\text{Nilai Efisiensi} = \mathbf{50} + \left(\frac{\boldsymbol{TE}}{\mathbf{20}} \times \mathbf{50}\right)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = \mathbf{50} + \left(\frac{\mathbf{6,61\%}}{\mathbf{20}} \times \mathbf{50}\right)$$

$$NE = \mathbf{66,51}$$

Berdasarkan hasil penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran Strategis 18 yaitu *Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Mitigasi Bencana*, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 6,61% dengan nilai efisiensi sebesar 66,51. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah berjalan efisien, dimana capaian kinerja sebesar 104% dapat diperoleh dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan pagu anggaran yang tersedia.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana mampu memberikan output kinerja yang optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang relatif efektif. Efisiensi tersebut didukung oleh optimalisasi pelaksanaan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan serta pengelolaan anggaran yang lebih terarah sesuai prioritas program. Meskipun demikian, peningkatan kualitas perencanaan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan tetap diperlukan agar efisiensi anggaran dapat terus ditingkatkan sekaligus mendorong peningkatan capaian ketahanan daerah menuju kategori yang lebih tinggi.

26) Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu urusan wajib dalam pelayanan dasar pemerintah. Terciptanya ketentraman dan ketertiban pada masyarakat berdampak pada kualitas hidup yang tertib, aman dan nyaman. Pengukuran indikator ini dilakukan melalui pendekatan komposit yang terdiri dari empat komponen utama, yaitu: (1) penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) K3, (2) penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, (3) peningkatan kapasitas aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan (4) cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan perlindungan masyarakat.

Setiap komponen dihitung dalam bentuk persentase antara realisasi dengan total kejadian atau sasaran, kemudian dikalikan dengan bobot yang telah ditetapkan, yaitu masing-masing sebesar 30%, 30%, 20%, dan 20%. Nilai akhir indeks diperoleh dari penjumlahan seluruh komponen tersebut dalam skala 0 sampai dengan 100.

Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kondisi ketentraman dan ketertiban yang semakin baik, yang ditandai dengan rendahnya tingkat gangguan, tingginya penyelesaian pelanggaran, meningkatnya kapasitas aparatur, serta luasnya cakupan perlindungan masyarakat. Sebaliknya, nilai indeks yang rendah menunjukkan masih adanya permasalahan dalam pengendalian ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

Rumus Indeks Ketentraman dan Ketertiban:

1. Penyelesaian Pelanggaran Perda K3 (Bobot 30%)

$$\left(\frac{\textbf{\textit{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda K3 yang ditangani}}}{\textbf{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda K3 yang terjadi}}\ \textbf{\textit{x}}\ \mathbf{30}\right)$$

2. Persentase Pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebanyak 30 %

$$\left(\frac{\textbf{\textit{Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman yang ditan}}}{\textbf{Jumlah gangguan ketertiban dan ketentraman yang terjadi}}\right.$$

3. Persentase peningkatan kapasitas POL PP sebanyak 20%

$$\left(\frac{\textbf{\textit{Jumlah Pol PP yang terlatih}}}{\textbf{Jumlah Pol PP}}\ \textbf{\textit{x}}\ \mathbf{20}\right)$$

4. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Perlindungan Masyarakat sebanyak 20 %

$$\left(\frac{\textbf{\textit{Jumlah Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan perlindungan masya}}}{\textbf{Jumlah Desa/Kelurahan}}\right.$$

Data Persentase dapat diperoleh dari :

a. Persentase Penyelesaian pelanggaran K3 diperoleh dari laporan pengaduan masyarakat tentang pelanggaran Perda K3 yang tertangani.
b. Persentase Pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diperoleh dari kegiatan pengamanan event, aset daerah, orang penting atau tamu VVIP dan tempat wisata di seputaran Kota Pariaman.
c. Persentase peningkatan kapasitas Pol PP diperoleh dari personil Pol PP yang mengikuti diklat atau bimtek lainnya.
d. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Perlindungan Masyarakat diperoleh dari jumlah desa/kelurahan yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan linmas.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 19 Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Keamanan dan Ketertiban	72,06%	60%	83,26%	Tinggi

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2024–2026, Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Pariaman pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 72,06%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 60%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja adalah sebesar 83,26%, yang menunjukkan bahwa kinerja indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi Indeks Ketentraman dan Ketertiban tahun 2025 diperoleh dari akumulasi empat sub indikator, yaitu:

1. Penyelesaian pelanggaran Perda K3 mencapai nilai maksimal sebesar 30, yang diperoleh dari seluruh kasus pelanggaran yang terjadi dapat ditangani (267 dari 267 kasus).

2. Pengendalian gangguan ketentraman dan ketertiban umum juga mencapai nilai maksimal sebesar 30, dengan seluruh gangguan yang terjadi berhasil ditangani (356 dari 356 kasus).
3. Peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP memperoleh nilai 0, karena tidak terdapat personel yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dari total 164 personel.
4. Cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan perlindungan masyarakat juga memperoleh nilai 0, karena tidak terdapat desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dari total 71 desa/kelurahan.

Dengan demikian, total nilai Indeks Ketentraman dan Ketertiban pada tahun 2025 adalah: 30 + 30 + 0 + 0 = 60.

Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu keterbatasan anggaran yang berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP serta tidak adanya kegiatan yang melibatkan perlindungan masyarakat (Linmas) di tingkat desa/kelurahan.

Selain itu, pada tahun 2025 terjadi perubahan kebijakan daerah pasca pelantikan Walikota Pariaman yang baru, dimana terdapat program prioritas penataan pasar rakyat. Kondisi ini menyebabkan fokus kegiatan Satpol PP lebih diarahkan pada penertiban kawasan pasar, sehingga alokasi sumber daya untuk kegiatan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Linmas menjadi terbatas.

Secara umum, meskipun aspek penegakan ketertiban menunjukkan kinerja yang optimal, namun belum didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat, sehingga berdampak pada belum optimalnya capaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban secara keseluruhan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi				Capaian			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
84,40%	93%	70%	60%	123,21%	132,10%	101,22%	83,26%

Berdasarkan data perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Pariaman dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya fluktuasi capaian kinerja.

Pada tahun 2022, realisasi indikator mencapai 84,40% dengan tingkat capaian sebesar 123,21%, yang menunjukkan kinerja sangat baik karena melampaui target yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada tahun 2023, realisasi meningkat menjadi 93% dengan capaian sebesar 132,10%, yang mengindikasikan adanya peningkatan kondisi ketentraman dan ketertiban serta efektivitas penanganan gangguan di masyarakat.

Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi menjadi 70% dengan capaian 101,22%, meskipun masih berada pada kategori tercapai. Penurunan ini mengindikasikan mulai adanya kendala dalam mempertahankan kinerja optimal.

Pada tahun 2025, realisasi kembali mengalami penurunan menjadi 60% dengan capaian sebesar 83,26%, sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Penurunan signifikan ini menunjukkan adanya permasalahan pada aspek tertentu, khususnya terkait keterbatasan anggaran yang berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas aparatur serta tidak optimalnya pemberdayaan perlindungan masyarakat (Linmas).

Secara umum, tren kinerja menunjukkan bahwa meskipun pada periode awal capaian indikator sangat baik, namun dalam dua tahun terakhir terjadi penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kembali capaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban pada tahun berikutnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Realisasi 2025	Target Akhir RPD (2026)	Capaian
60%	75,01%	83,26%

Capaian kinerja Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Pariaman pada tahun 2025 adalah sebesar 83,26%, yang diperoleh dari realisasi sebesar 60% dibandingkan dengan target sebesar

72,06%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator ini belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Jika dilihat dari komponen penyusunnya, dua sub indikator utama yaitu penyelesaian pelanggaran Perda K3 dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum telah mencapai nilai maksimal masing-masing sebesar 30, yang menunjukkan kinerja optimal pada aspek penegakan peraturan dan pengendalian gangguan di masyarakat.

Namun demikian, dua komponen lainnya yaitu peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan cakupan perlindungan masyarakat tidak memberikan kontribusi terhadap nilai indeks (masing-masing sebesar 0). Hal ini disebabkan oleh tidak terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi personel Satpol PP serta tidak adanya kegiatan yang melibatkan perlindungan masyarakat (Linmas) di tingkat desa/kelurahan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketidaktercapaian indikator bukan disebabkan oleh lemahnya penegakan ketertiban, melainkan lebih pada belum optimalnya aspek penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, perbaikan kinerja ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan peran Linmas melalui dukungan anggaran dan program yang berkelanjutan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

   1) Perbandingan Realisasi dengan Nasional

Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025	Capaian
60%	-	-

Indikator Indeks Ketentraman dan Ketertiban tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota lain, karena metode penghitungan indikator ini disusun secara mandiri oleh Pemerintah Kota Pariaman sesuai dengan kebutuhan, karakteristik daerah, serta ketersediaan data pada perangkat daerah terkait. Formula yang digunakan merupakan penggabungan beberapa sub indikator dengan bobot

tertentu yang ditetapkan sendiri, sehingga tidak menggunakan metode, definisi operasional, maupun pembobotan yang seragam secara nasional atau regional.

Dengan kondisi tersebut, hasil pengukuran indikator ini lebih tepat digunakan sebagai alat ukur kinerja internal daerah dari tahun ke tahun, bukan untuk perbandingan eksternal antarwilayah. Oleh karena itu, pada tahun 2025 realisasi sebesar 60% hanya dapat dianalisis terhadap target daerah yang telah ditetapkan, serta dibandingkan dengan capaian Kota Pariaman pada tahun-tahun sebelumnya.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target serta alternatif solusi yang dilakukan
   a. Tidak tercapainya target realisasi dalam indeks ketentraman dan ketertiban di Kota Pariaman pada tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor :
      1. Dikarenakan tidak adanya anggaran untuk pelatihan dan bimtek lainnya untuk personil.
      2. Belum tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Linmas, sehingga pelaksanaan program kerja belum dapat berjalan secara optimal.
      3. Kurangnya Sarana dan Prasarana untuk menujang Seluruh Kegiatan Satpol PP.
      4. Kurangnya anggaran untuk melaksanakan operasional Kegiatan Satpol PP dan Linmas.
   b. Kota Pariaman telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan angka Ketentraman dan Ketertiban;
      1. Koordinasi dengan OPD lainnya di Kota Pariaman

         Koordinasi ini dilakukan supaya penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban dengan OPD lainnya agar berjalan dengan optimal, seperti dengan Dinas Perindagkop tentang Para Pedagang yang sering melanggar Perda.
      2. Meningkatkan Peran Niniak Mamak dan Pemangku Kepentingan

Selalu mengikut sertakan niniak mamak atau pemangku kepentingan sebelum melakukan penertiban di suatu desa/kelurahan di Kota Pariaman.

c. Beberapa upaya/strategi yang akan ditargetkan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Dalam Rangka Meningkatkan Angka Ketentraman dan Ketertiban Kota Pariaman Tahun 2025, Arah kebijakan untuk memenuhi target ini adalah dengan;
   1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Satpol PP agar bisa melaksanakan tugas dengan Optimal.
   2. Meningkatan Anggaran Operasional Satpol PP dan Linmas.
   3. Mengusulkan kebutuhan anggaran melalui perencanaan kegiatan serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Linmas tetap dapat dilaksanakan secara maksimal meskipun dengan keterbatasan anggaran.
   4. Mengadakan Kembali Penyuluhan dan Sosialisasi Perda/Perkada.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 19 Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat					
Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran	Realiasi	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Indeks Keamanan dan Ketertiban	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp2.678.113.060	Rp2.619.978.254	97,83%	Menunjang

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program utama yang mendukung pencapaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Pariaman pada tahun 2025. Program ini didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.678.113.060, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.619.978.254 atau mencapai 97,83%.

Tingginya tingkat realisasi anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan secara optimal dari sisi penyerapan anggaran. Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini, seperti patroli rutin, penertiban pelanggaran Perda, serta pengendalian gangguan ketentraman dan ketertiban umum, terbukti mampu mendorong capaian maksimal pada sub indikator penyelesaian pelanggaran Perda K3 dan penanganan gangguan ketertiban yang masing-masing mencapai nilai penuh.

Namun demikian, meskipun program ini dikategorikan menunjang pencapaian indikator kinerja, hasil akhir Indeks Ketentraman dan Ketertiban belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program masih terfokus pada aspek operasional penegakan ketertiban, dan belum mencakup secara menyeluruh seluruh komponen pembentuk indikator.

Secara khusus, program belum mampu mengakomodasi kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP serta pemberdayaan perlindungan masyarakat (Linmas), yang merupakan dua komponen penting dalam perhitungan indeks. Tidak adanya alokasi anggaran untuk kegiatan pelatihan dan pembinaan Linmas menyebabkan kedua sub indikator tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap nilai indeks.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan telah efektif dalam mendukung aspek penegakan ketertiban, namun belum sepenuhnya selaras dengan struktur indikator kinerja. Ke depan, diperlukan penyesuaian perencanaan program dan penganggaran agar mencakup seluruh dimensi indikator, khususnya pada aspek peningkatan kapasitas aparatur dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pencapaian indikator dapat lebih optimal.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis 19 Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat						
Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
Indeks Keamanan	Rp2.678.113.060	Rp2.619.978.254	83,26%	-14,57%	13,57	Tidak Efisien

dan Ketertiban						

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100\%}$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE} = \frac{(\mathbf{2.678.113.060} \times \mathbf{0,8326}) - \mathbf{2.619.978.254}}{\mathbf{2.678.113.060}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{TE} = \mathbf{-14,57\%}$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%
- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

Nilai Efisiensi = $\mathbf{50} + \left(\frac{\boldsymbol{TE}}{\mathbf{20}} \times \mathbf{50}\right)$

Nilai Efisiensi = $\mathbf{50} + \left(\frac{\mathbf{-14,57\%}}{\mathbf{20}} \times \mathbf{50}\right)$

NE= $\mathbf{13,57}$

Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Pariaman tahun 2025 adalah sebesar -14,57%, dengan nilai efisiensi sebesar 13,57.

Nilai efisiensi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum efisien, dimana realisasi anggaran yang tinggi tidak sebanding dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Hal ini terlihat dari realisasi anggaran yang mencapai 97,83%, sementara capaian kinerja hanya sebesar 83,26%.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan operasional penegakan ketertiban, seperti patroli dan penertiban, yang terbukti menghasilkan capaian maksimal pada beberapa sub indikator. Namun demikian, penggunaan anggaran belum mencakup secara optimal seluruh komponen indikator kinerja, khususnya pada aspek peningkatan kapasitas aparatur dan pemberdayaan perlindungan masyarakat (Linmas), yang tidak memberikan kontribusi terhadap nilai indeks.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketidakefisienan terjadi akibat belum optimalnya keselarasan antara alokasi anggaran dengan seluruh komponen indikator kinerja. Ke depan, diperlukan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran agar lebih berorientasi pada pencapaian outcome secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek operasional kegiatan.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting yang mencerminkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan pencapaian kinerja. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Pariaman disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sebagai instrumen evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan daerah.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat capaian realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menilai konsistensi antara perencanaan kinerja dan pelaksanaan anggaran, sekaligus mendukung analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025. Adapun rincian realisasi anggaran dimaksud disajikan pada tabel berikut yang bersumber dari dokumen resmi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	Rp655.738.471.097	Rp620.430.914.949	94,62	Rp644.362.029.673
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp66.713.656.675	Rp57.449.978.228	86,11	Rp45.911.378.642
4.1.01	Pajak Daerah	Rp24.153.192.141	Rp22.296.272.876	92,31	Rp14.396.111.950
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp12.987.038.800	Rp11.729.158.547	90,31	Rp9.375.406.310
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp11.365.010.955	Rp11.365.010.955	100	Rp11.331.512.753
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp18.208.414.779	Rp12.059.535.850	66,23	Rp10.808.347.629

	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp66.713.656.675	Rp57.449.978.228	86,11	Rp45.911.378.642
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp585.024.814.422	Rp558.980.936.721	95,54	Rp598.450.651.031
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp541.629.061.358	Rp529.944.771.058	97,84	Rp565.486.692.998
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp43.395.753.064	Rp29.036.165.663	66,91	Rp32.963.958.033
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	Rp585.024.814.422	Rp558.980.936.721	95,54	Rp598.450.651.031
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp4.000.000.000	Rp4.000.000.000	100	Rp0.0
4.3.02	Dana Darurat	Rp4.000.000.000	Rp4.000.000.000	100	Rp0.0
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp4.000.000.000	Rp4.000.000.000	100	Rp0.0
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp655.738.471.097	Rp620.430.914.949	94,61	Rp644.362.029.673
5	BELANJA DAERAH	Rp655.447.003.808	Rp598.455.933.818	91,30	Rp648.100.984.541
5.1	BELANJA OPERASI	Rp526.370.469.696	Rp485.891.824.192	92,30	Rp501.308.593.783
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp338.992.439.397	Rp317.424.790.284	93,63	Rp314.988.384.111

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp179.810.154.299	Rp160.910.917.798	89,48	Rp164.059.422.975
5.1.05	Belanja Hibah	Rp7.567.876.000	Rp7.556.116.110	99,84	Rp21.650.244.697
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp0.0	Rp0.0	0	Rp610.542.000
	JUMLAH BELANJA OPERASI	Rp526.370.469.696	Rp485.891.824.192	92,30	Rp501.308.593.783
5.2	BELANJA MODAL	Rp34.814.704.203	Rp24.540.291.383	70,48	Rp58.680.468.559
5.2.01	Belanja Modal Tanah	Rp8.000.000.000	Rp0.0	0	Rp0.0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp12.284.428.388	Rp10.884.258.129	88,60	Rp10.229.912.049
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp5.477.909.000	Rp4.710.081.248	85,98	Rp27.172.296.811
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp7.648.905.865	Rp7.140.318.441	93,35	Rp19.973.012.799
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp1.304.460.950	Rp1.716.537.750	131,58	Rp1.305.246.900
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp99.000.000	Rp89.095.815	89,99	Rp0.0
	JUMLAH BELANJA MODAL	Rp34.814.704.203	Rp24.540.291.383	70,48	Rp58.680.468.559
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp5.230.000.000	Rp561.152.287	10,72	Rp120.495.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	Rp5.230.000.000	Rp561.152.287	10,72	Rp120.495.000
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp5.230.000.000	Rp561.152.287	10,72	Rp120.495.000
5.4	BELANJA TRANSFER	Rp89.031.829.909	Rp87.462.665.956	98,23	Rp87.991.427.199

5.4.01	Belanja Bagi Hasil	Rp2.884.022.614	Rp1.396.736.261	48,43	Rp971.520.204
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	Rp2.415.319.214	Rp1.011.376.155	41,87	Rp546.550.321
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	Rp468.703.400	Rp385.360.106	82,21	Rp424.969.883
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp86.147.807.295	Rp86.065.929.695	99,90	Rp87.019.906.995
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	Rp3.065.760.000	Rp3.065.760.000	100	Rp3.235.680.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Rp83.082.047.295	Rp83.000.169.695	99,90	Rp83.784.226.995
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	Rp89.031.829.909	Rp87.462.665.956	98,23	Rp87.991.427.199
	JUMLAH BELANJA	Rp655.447.003.808	Rp598.455.933.818	91,30	Rp648.100.984.541
	SURPLUS/DEFISIT	Rp291.467.289	Rp21.974.981.130	7.539,43	-Rp3.738.954.868
6	PEMBIAYAAN DAERAH	-Rp291.467.289	-Rp291.467.288	99,99	Rp6.383.487.580
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp2.644.532.711	Rp2.644.532.712	100	Rp7.383.487.580
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp2.644.532.711	Rp2.644.532.712	100	Rp7.383.487.580

	Tahun Sebelumnya				
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp2.644.532.711	Rp2.644.532.712	100	Rp7.383.487.580
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp2.936.000.000	Rp2.936.000.000	100	Rp1.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	Rp2.936.000.000	Rp2.936.000.000	100	Rp1.000.000.000
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp2.936.000.000	Rp2.936.000.000	100	Rp1.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	-Rp291.467.289	-Rp291.467.288	99,99	Rp6.383.487.580
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp0.0	Rp21.683.513.842	0,00	Rp2.644.532.712

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 tidak terlepas dari dinamika kebijakan fiskal nasional, khususnya kebijakan efisiensi belanja negara dan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi struktur pendapatan dan pola belanja daerah selama tahun berjalan.

Pemerintah pusat pada Tahun 2025 melakukan langkah konsolidasi fiskal melalui kebijakan efisiensi anggaran nasional, termasuk pemangkasan dana transfer ke daerah sebesar sekitar Rp50,59 triliun melalui kebijakan Kementerian Keuangan. Pemotongan tersebut antara lain menyasar Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta terutama Dana Alokasi

Khusus (DAK) fisik yang mengalami pengurangan signifikan guna menjaga stabilitas APBN dan mengalihkan belanja pada program prioritas nasional.

Kebijakan efisiensi ini merupakan bagian dari penataan belanja pemerintah agar lebih fokus pada program prioritas dan pengendalian pengeluaran yang dinilai kurang produktif. Pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat.

Dalam konteks tersebut, realisasi pendapatan Kota Pariaman Tahun 2025 sebesar Rp620,43 miliar mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp644,36 miliar. Penurunan ini sejalan dengan tren nasional dimana alokasi transfer ke daerah mengalami penyesuaian dan perlambatan pertumbuhan.

Pendapatan transfer tetap menjadi komponen dominan dengan kontribusi lebih dari 90 persen terhadap total pendapatan daerah, namun realisasinya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan tingginya sensitivitas kapasitas fiskal daerah terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat. Secara nasional, sekitar 60–70 persen pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer pusat sehingga setiap penyesuaian TKD langsung mempengaruhi APBD daerah. Di tengah kondisi tersebut, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman dari Rp45,91 miliar pada Tahun 2024 menjadi Rp57,45 miliar pada Tahun 2025 menunjukkan adanya respons positif daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber pendapatan lokal.

Kebijakan efisiensi anggaran nasional turut tercermin pada pola belanja Pemerintah Kota Pariaman. Realisasi belanja daerah Tahun 2025 sebesar Rp598,46 miliar (91,30 persen) lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai Rp648,10 miliar. Penurunan realisasi terutama terjadi pada belanja modal yang hanya terealisasi 70,48 persen dan menurun signifikan dibanding Tahun 2024. Kondisi ini sejalan dengan dampak pengurangan DAK fisik secara nasional yang menyebabkan sejumlah kegiatan pembangunan fisik di daerah mengalami penyesuaian prioritas dan penjadwalan ulang.

Sebaliknya, belanja operasi tetap relatif stabil karena pemerintah daerah tetap harus menjaga keberlangsungan pelayanan publik serta pemenuhan kewajiban belanja pegawai yang bersifat mandatory. Fenomena ini juga terjadi secara nasional, dimana banyak daerah menghadapi tekanan fiskal akibat besarnya belanja rutin di tengah berkurangnya transfer pusat.

Pelaksanaan APBD Tahun 2025 menghasilkan surplus sebesar Rp21,97 miliar, berbalik dari kondisi defisit Tahun 2024 sebesar Rp3,73 miliar. Surplus ini menunjukkan adanya penguatan disiplin fiskal dan pengendalian belanja sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi nasional. Namun demikian, meningkatnya SiLPA menjadi Rp21,68 miliar juga mengindikasikan bahwa sebagian program pembangunan belum terlaksana secara optimal, khususnya pada belanja modal. Oleh karena itu, efisiensi anggaran perlu diarahkan tidak hanya pada penghematan, tetapi juga pada peningkatan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan kegiatan agar tetap menghasilkan output dan outcome pembangunan.

Dalam perspektif SAKIP, kondisi Tahun 2025 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pariaman mampu menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan eksternal berupa penyesuaian transfer pusat. Efisiensi anggaran yang dilakukan berkontribusi pada terciptanya keseimbangan fiskal dan surplus anggaran. Namun demikian, tantangan ke depan adalah memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD serta memastikan efisiensi tidak berdampak pada penurunan kualitas pembangunan daerah. Kebijakan nasional yang mendorong efisiensi dan rasionalisasi transfer daerah menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) agar setiap belanja benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Penghitungan efisiensi dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Perhitungan efisiensi menggunakan formulasi yang telah disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, dengan tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

1. Rumus Tingkat Efisiensi:

$$\boldsymbol{Tingkat\ Efisiensi} = \frac{(\boldsymbol{PA} \times \boldsymbol{CK}) - \boldsymbol{RA}}{\boldsymbol{PA}} \times \mathbf{100}\%$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
- CK = Capaian Kinerja (%) dengan batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%
- RA = Realisasi Anggaran

$$\boldsymbol{TE = \frac{(655.738.471.097 \times 0,9533) - 620.430.914.949}{655.738.471.097} \times 100\%}$$

$$\boldsymbol{TE = 0,71\%}$$

2. Nilai Efisiensi

Setelah memperoleh Tingkat Efisiensi (TE), nilai tersebut dikonversi menjadi Nilai Efisiensi.

Asumsi PMK:

- Efisiensi terendah = –20%
- Efisiensi tertinggi = 20%

Ketentuan:

TE < –20% → Nilai Efisiensi = 0

TE > 20% → Nilai Efisiensi = 100

Jika –20% ≤ TE ≤ 20%, gunakan rumus:

Nilai Efisiensi = $50 + \left(\frac{TE}{20} \times 50\right)$

Nilai Efisiensi = $50 + \left(\frac{0,71\%}{20} \times 50\right)$

NE= $51,78$

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,71%. Nilai tersebut berada dalam rentang -20% sampai dengan 20%, sehingga termasuk dalam kategori efisiensi. Selanjutnya diperoleh Nilai Efisiensi (NE) sebesar 51,78, yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025 telah berjalan secara cukup efisien.

C. PENGHARGAAN

1. Penghargaan Program Digitalisasi Pembelajaran dari Kemendikdasmen RI



2. Penghargaan UI Green City Matric Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia (UI)



3. Opini WTP Untuk Ke-12 Kalinya dari BPKP



4. Juara Umum Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



5. Penganugerahan Mitra Strategis dari Universitas Negeri Padang (UNP)



6. Juara 1 di Festival Batik Sumbar 2025 di Sawahlunto



BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Pariaman Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab III, capaian kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 95,33%. Dari total 26 indikator kinerja, diperoleh capaian sebagai berikut:

1. Indikator dengan capaian di atas 100% sebanyak 10 indikator;
2. Indikator dengan capaian tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Indikator dengan capaian di bawah 100% sebanyak 14 indikator.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal, terutama pada sektor pelayanan publik, pariwisata, serta perumahan dan permukiman.

Pemerintah Kota Pariaman pada Tahun 2025 juga telah berhasil menggunakan sumber daya keuangan secara efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis. Sumber daya keuangan yang digunakan sebesar Rp655.447.003.808, dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp598.455.933.818 atau sebesar 91,30%, sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp56.991.069.990.

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 4,02% dengan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 60,05, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara cukup efisien dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah. Efisiensi tersebut mencerminkan adanya optimalisasi penggunaan sumber daya, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam meningkatkan efektivitas belanja agar lebih berdampak langsung terhadap capaian kinerja.

4.2 Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2025, masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi pencapaian kinerja, antara lain:

1. Belum optimalnya capaian pada beberapa indikator, khususnya pada sektor pelayanan publik, pariwisata, serta perumahan dan permukiman.
2. Belum optimalnya sinergi dan koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis secara terpadu.
3. Keterbatasan anggaran pada beberapa program prioritas yang berdampak pada belum maksimalnya output kegiatan.
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja dan pelayanan publik.
5. Pengaruh faktor eksternal, seperti dinamika ekonomi nasional dan kebijakan fiskal pemerintah pusat, yang berdampak pada kapasitas fiskal daerah.

4.3 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Sebagai upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang, Pemerintah Kota Pariaman akan melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang lebih terukur, terarah, dan terintegrasi.
2. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam pencapaian sasaran strategis.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja dan pelayanan publik.
4. Meningkatkan fokus intervensi pada indikator yang belum mencapai target, khususnya pada sektor pelayanan publik, pariwisata, serta perumahan dan permukiman.
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar lebih berorientasi pada hasil (outcome).
6. Memperkuat monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan guna memastikan ketercapaian target yang telah ditetapkan.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pariaman, 16 Desember 2025
Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET		KET
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		SEBELUM	SESUDAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Manusia yang Berdaya Saing	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,82	14,82	Tetap
			Angka Rata-rata Lama Sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,46	11,46	Tetap
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	74,37	74,37	Tetap
			Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	%	10,5%	10,5%	Tetap
3	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	Pendapatan Perkapita yang disesuaikan	Pendapatan Perkapita yang disesuaikan	Rp	(Ribu/Rp) 14.146	(Ribu/Rp) 14.146	Tetap
4	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	57,45	57,45	Tetap
			Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	98,70	98,70	Tetap
5	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	% Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	% Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	16,14%	16,14%	Tetap

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET		KET
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		SEBELUM	SESUDAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
6	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	% Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	% Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	17,96%	17,76%	Turun
7	Meningkatnya Produktifitas Sektor Pariwisata	Meningkatnya Produktifitas Sektor Pariwisata	% Pertumbuhan Spending of Money	% Pertumbuhan Spending of Money	%	3,5%	3,5%	Tetap
8	Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi	Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi	% Pertumbuhan Realisasi Investasi	% Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	2,8%	2,8%	Tetap
9	Menurunnya Angka Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	3,76%	3,76%	Tetap
10	Menurunnya Angka Penganguran	Menurunnya Angka Penganguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,54%	4,54%	Tetap
11	Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,8118	0,8003	Turun
12	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	70,01 (BB)	70,01 (BB)	Tetap
			Opini BPK terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	Tetap
13	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks SPBE	Indeks SPBE	Indeks	3,51	3,51	Tetap
			Indeks Profesional ASN	Indeks Profesional ASN	Indeks	85,96 (Tinggi)	85,96 (Tinggi)	Tetap
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,52 (Pelayanan Prima)	4,52 (Pelayanan Prima)	Tetap
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,20 (Baik)	86,20 (Baik)	Tetap

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET		KET
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		SEBELUM	SESUDAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
15	Meningkatnya kualitas Insfrastruktur	Meningkatnya kualitas Insfrastruktur	Indeks Insfrastruktur Daerah	Indeks Insfrastruktur Daerah	%	66,15%	64,74%	Turun
16	Meningkatnya kualitas lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks	69,97	69,97	Tetap
17	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan Permukiman Layak Huni	%	89,08%	89,08%	Tetap
			Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	ha	19,09	19,09	Tetap
18	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	48	48	Tetap
19	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Indeks Keamanan dan Ketertiban	Indeks Keamanan dan Ketertiban	%	72,06%	72,06%	Tetap

Pariaman, 16 Desember 2025
Wali Kota Pariaman,



Yota Balad

No.	Program	Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp410.105.019.744	Rp404.481.103.885	-Rp5.623.915.859
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp7.451.525.824	Rp7.466.326.727	Rp14.800.903
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp811.957.045	Rp543.030.029	-Rp268.927.016
4	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp12.940.893.489	Rp13.792.969.332	Rp852.075.843
5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp860.784.750	Rp626.145.000	-Rp234.639.750
6	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp236.010.000	Rp104.994.000	-Rp131.016.000
7	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp947.300.622	Rp724.105.972	-Rp223.194.650
8	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp430.671.409	Rp183.334.610	-Rp247.336.799
9	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp370.397.100	Rp215.089.400	-Rp155.307.700
10	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp91.020.587.152	Rp89.934.728.113	-Rp1.085.859.039
11	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp557.919.394	Rp768.965.194	Rp211.045.800
12	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp1.529.302.250	Rp2.076.263.680	Rp546.961.430
13	Program Kepegawaian Daerah	Rp2.094.912.750	Rp1.481.051.100	-Rp613.861.650
14	Program Penanggulangan Bencana	Rp1.410.865.831	Rp1.409.327.450	-Rp1.538.381
15	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp952.403.666	Rp919.792.831	-Rp32.610.835
16	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp36.997.200	Rp29.797.200	-Rp7.200.000
17	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp30.000.000	Rp982.500	-Rp29.017.500
18	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp495.999.666	Rp479.838.416	-Rp16.161.250
19	Program Pemasaran Pariwisata	Rp249.999.754	Rp186.263.840	-Rp63.735.914

No.	Program	Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp14.999.316	Rp5.815.000	-Rp9.184.316
21	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp53.000.000	Rp68.503.100	Rp15.503.100
22	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp0	Rp23.867.000	Rp23.867.000
23	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp27.610.931.692	Rp29.775.454.192	Rp2.164.522.500
24	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp10.000.000	Rp7.850.000	-Rp2.150.000
25	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp177.767.000	Rp327.951.500	Rp150.184.500
26	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp1.729.542.300	Rp1.352.872.500	-Rp376.669.800
27	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp200.000.000	Rp150.000.000	-Rp50.000.000
28	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp28.353.901.543	Rp28.832.185.411	Rp478.283.868
29	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp25.000.000	Rp537.493.000	Rp512.493.000
30	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp451.410.000	Rp429.960.000	-Rp21.450.000
31	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp114.135.808	Rp243.960.900	Rp129.825.092
32	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp46.881.000	Rp166.300.000	Rp119.419.000
33	Program Perlindungan Perempuan	Rp157.635.400	Rp201.835.400	Rp44.200.000
34	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp36.843.000	Rp71.843.000	Rp35.000.000
35	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp8.615.000	Rp3.662.500	-Rp4.952.500
36	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp348.036.750	Rp303.854.600	-Rp44.182.150
37	Program Pengendalian Penduduk	Rp98.664.000	Rp158.664.000	Rp60.000.000
38	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp1.617.024.000	Rp1.528.224.000	-Rp88.800.000

No.	Program	Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
39	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp1.604.695.000	Rp1.545.395.000	-Rp59.300.000
40	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp316.550.000	Rp159.215.500	-Rp157.334.500
41	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp10.000.000	Rp3.193.000	-Rp6.807.000
42	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp11.240.000	Rp4.676.750	-Rp6.563.250
43	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp700.000.000	Rp379.050.000	-Rp320.950.000
44	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp590.251.040	Rp490.311.940	-Rp99.939.100
45	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp157.000.000	Rp93.655.000	-Rp63.345.000
46	Program Peyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp1.588.820.415	Rp889.162.165	-Rp699.658.250
47	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp345.094.900	Rp524.997.000	Rp179.902.100
48	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp358.398.401	Rp285.122.541	-Rp73.275.860
49	Program Pengendalian dan Penangulangan Bencana Pertanian	Rp129.519.900	Rp58.397.400	-Rp71.122.500
50	Program Penyuluhan Pertanian	Rp172.469.392	Rp253.140.700	Rp80.671.308
51	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp177.850.000	Rp116.475.000	-Rp61.375.000
52	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp70.600.000	Rp298.163.500	Rp227.563.500
53	Program Hubungan Industrial	Rp64.239.500	Rp263.668.200	Rp199.428.700
54	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp25.000.000	Rp2.000.000	-Rp23.000.000
55	Program Promosi Penanaman Modal	Rp105.000.000	Rp27.890.000	-Rp77.110.000
56	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp204.129.750	Rp77.343.500	-Rp126.786.250
57	Program Pemberdayaan Sosial	Rp122.674.750	Rp155.039.750	Rp32.365.000
58	Program Rehabilitasi Sosial	Rp524.253.000	Rp8.963.459.880	Rp8.439.206.880

No.	Program	Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp96.251.600	Rp125.287.600	Rp29.036.000
60	Program Penanganan Bencana	Rp126.700.000	Rp117.803.250	-Rp8.896.750
61	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp25.204.334	Rp35.695.544	Rp10.491.210
62	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp49.197.500	Rp59.710.000	Rp10.512.500
63	Program Pengembangan UMKM	Rp37.400.500	Rp182.990.260	Rp145.589.760
64	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp313.748.600	Rp473.746.000	Rp159.997.400
65	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp15.840.000	Rp5.820.000	-Rp10.020.000
66	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp12.936.000	Rp1.743.500	-Rp11.192.500
67	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp43.075.000	Rp35.529.500	-Rp7.545.500
68	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp286.370.000	Rp657.191.500	Rp370.821.500
69	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp35.444.000	Rp13.376.500	-Rp22.067.500
70	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp27.650.000	Rp9.151.500	-Rp18.498.500
71	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp0	Rp76.000.000	Rp76.000.000
72	Program Penataan Desa	Rp3.000.000	Rp2.214.400	-Rp785.600
73	Program Administrasi Pemerintah Desa	Rp357.475.578	Rp307.210.228	-Rp50.265.350
74	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp1.732.820.500	Rp1.862.574.500	Rp129.754.000
75	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp1.146.500.000	Rp1.122.243.750	-Rp24.256.250
76	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp0	Rp10.665.000	Rp10.665.000
77	Program Pengelolaan Arsip	Rp388.432.500	Rp160.601.500	-Rp227.831.000
78	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp108.993.500	Rp21.514.500	-Rp87.479.000

No.	Program	Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
79	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp1.124.099.250	Rp1.318.678.750	Rp194.579.500
80	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp1.876.579.708	Rp1.784.554.442	-Rp92.025.266
81	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp81.899.863	Rp4.670.500	-Rp77.229.363
82	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp75.999.864	Rp21.289.000	-Rp54.710.864
83	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp1.092.029.750	Rp832.236.000	-Rp259.793.750
84	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp183.475.000	Rp223.972.000	Rp40.497.000
85	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp223.220.500	Rp355.785.000	Rp132.564.500
86	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp1.866.507.000	Rp1.705.305.497	-Rp161.201.503
87	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp791.113.250	Rp996.169.000	Rp205.055.750
88	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp100.000.000	Rp150.000.000	Rp50.000.000
89	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp31.006.532.000	Rp4.643.151.500	-Rp26.363.380.500
90	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp50.000.000	Rp19.641.000	-Rp30.359.000
91	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp247.480.000	Rp270.055.500	Rp22.575.500
92	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp125.000.000	Rp58.432.750	-Rp66.567.250
93	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp4.246.480.073	Rp5.869.261.214	Rp1.622.781.141
94	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp305.334.700	Rp262.780.075	-Rp42.554.625
95	Program Pengembangan Perumahan	Rp53.000.000	Rp33.128.000	-Rp19.872.000
96	Program Kawasan Pemukiman	Rp60.212.000	Rp52.465.750	-Rp7.746.250
97	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp1.450.000.000	Rp1.270.000.000	-Rp180.000.000
98	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp239.070.000	Rp209.299.500	-Rp29.770.500

No.	Program	Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
99	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp0	Rp280.361.500	Rp280.361.500
100	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp944.769.130	Rp1.263.392.435	Rp318.623.305
101	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp859.969.824	Rp1.286.012.610	Rp426.042.786
102	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp73.700.310	Rp70.661.652	-Rp3.038.658
103	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp35.000.000	Rp30.800.000	-Rp4.200.000
104	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp64.769.900	Rp176.745.900	Rp111.976.000
105	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp5.050.000	Rp3.545.000	-Rp1.505.000
106	Program Pengelolaan Persampahan	Rp3.381.450.170	Rp7.397.827.631	Rp4.016.377.461
107	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp2.312.561.053	Rp2.683.113.060	Rp370.552.007
108	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp1.501.666.120	Rp2.479.342.880	Rp977.676.760
109	Program Pendaftaran Penduduk	Rp239.146.000	Rp244.868.000	Rp5.722.000
110	Program Pencatatan Sipil	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp0
111	Program Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Rp3.000.000	Rp33.000.000	Rp30.000.000
112	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp0
113	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp765.914.330	Rp857.821.250	Rp91.906.920
114	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp1.031.840.000	Rp1.007.640.200	-Rp24.199.800
115	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp75.858.000	Rp12.330.000	-Rp63.528.000

No.	Program	Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
116	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp335.655.000	Rp426.349.500	Rp90.694.500
117	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp424.592.950	Rp549.481.781	Rp124.888.831
118	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp1.619.589.832	Rp1.637.217.492	Rp17.627.660
119	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp1.056.594.990	Rp1.134.765.149	Rp78.170.159
120	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Rp2.014.000	Rp1.414.000	-Rp600.000
121	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp70.784.000	Rp67.607.050	-Rp3.176.950
Jumlah		Rp665.680.718.682	Rp651.217.003.808	-Rp14.463.714.874

Pariaman, 16 Desember 2025
Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Afrizal Azhar, M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Yota Balad	Afrizal Azhar

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel Serta Pelayanan Publik yang Prima	Capaian Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Capaian Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	11,5	11,5	Tetap
			Nilai EPPD	Nilai EPPD	3,41 (Tinggi)	3,41 (Tinggi)	Tetap
			Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal	99,48% (Tuntas Utama)	99,48% (Tuntas Utama)	Tetap
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM SETDA)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM SETDA)	91 (Sangat Baik)	91 (Sangat Baik)	Tetap
			Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	78,25 (BB)	78,25 (BB)	Tetap
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang Akuntabel	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang Akuntabel	95%	95%	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22.274.323.243	Rp. 28.286.545.565	Rp. 6.012.222.322
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 7.451.525.824	Rp. 7.466.326.727	Rp. 14.800.903
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 811.957.045	Rp. 543.030.029	(Rp. 268.927.016)
	Jumlah	**Rp. 30.537.806.112**	**Rp. 36.295.902.321**	**Rp. 5.758.096.209**

Pariaman, 16 Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Sekretaris Daerah,

Afrizal Azhar

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Sakti, SH, MM
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Indra Sakti, SH, MM
Pembina Utama Madya/ IV/d
NIP 196601011989031017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap Peran DPRD sesuai Fungsinya	Meningkatkan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap Peran DPRD sesuai Fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90	Tetap
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,01% (BB)	70,01% (BB)	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 16.056.795.605	Rp. 15.708.541.374	(Rp. 348.254.231)
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp. 12.940.893.489	Rp. 13.792.969.332	(Rp. 852.075.843)
	Jumlah	**Rp. 28.997.689.094**	**Rp. 29.501.510.706**	**Rp. 503.821.612**

Pariaman, Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Sekretaris DPRD,

Indra Sakti, SH, MM
Pembina Utama Madya/ IV/d
NIP 196601011989031017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfian Harun, SE, MM
Jabatan : Inspektur Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Alfian Harun, SE, MM
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196609101987121002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya tatakelola pengawasan pemerintah Kota Pariaman	Meningkatnya tatakelola pengawasan pemerintah Kota Pariaman	Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	3	Tetap
			Nilai Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP	2,91	3	Berdasarkan reviu APIP terhadap rekapitulasi AKIP OPD rata-rata BB
			Nilai Sakip Kota Komponen Evaluasi	Nilai Sakip Kota Komponen Evaluasi	16,66	16,66	Tetap
			Persentase tindak lanjut temuan	Persentase tindak lanjut temuan	83,5	83,5	Tetap
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Inspektorat	Nilai AKIP Inspektorat	81,63	86,88	Berdasarkan LHE AKIP Inspektorat Tahun 2025
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	81	Tetap

No.	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.062.563.731	Rp. 8.014.563.519	(Rp.1.048.000.212)
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 860.784.750	Rp. 626.145.000	(Rp. 234.639.750)
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 236.010.000	Rp. 104.994.000	(Rp. 131.016.000)
	Jumlah	**Rp. 10.159.358.481**	**Rp. 8.745.702.519**	**(Rp. 1.413.655.962)**

Pariaman, 16 Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Inspektur,

Alfian Harun, SE, MM
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196609101987121002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hertati Taher, SE
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Hertati Taher, SE
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196903261989032009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Aksesabilitas Pendidikan	Meningkatnya Aksesabilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	65%	65%	Tetap
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	94%	94%	Tetap
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	91%	91%	Tetap
2	Meningkatnya Kualitas Pendidik	Meningkatnya Kualitas Pendidik	% Guru sesuai Kualifikasi S1 dan D4	% Guru sesuai Kualifikasi S1 dan D4	98,75%	98,75%	Tetap
			% Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	% Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	50,80%	50,80%	Tetap
3	Meningkatnya Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan	Meningkatnya Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan	Rata-rata kemampuan Literasi Siswa SD/MI berdasarkan Rapor Pendidikan	Rata-rata kemampuan Literasi Siswa SD/MI berdasarkan Rapor Pendidikan	2,5	2,5	Tetap
			Rata-rata kemampuan Literasi Siswa SMP/MTs berdasarkan Rapor Pendidikan	Rata-rata kemampuan Literasi Siswa SMP/MTs berdasarkan Rapor Pendidikan	2,5	2,5	Tetap
			Rata-rata kemampuan Numerasi Siswa SD/MI berdasarkan Rapor Pendidikan	Rata-rata kemampuan Numerasi Siswa SD/MI berdasarkan Rapor Pendidikan	2,3	2,3	Tetap

			Rata-rata kemampuan Numerasi Siswa SMP/MTs berdasarkan Rapor Pendidikan	Rata-rata kemampuan Numerasi Siswa SMP/MTs berdasarkan Rapor Pendidikan	2,3	2,3	Tetap
4	Meningkatnya Prestasi Pemuda	Meningkatnya Prestasi Pemuda	Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi	1	1	Tetap
5	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi	30	30	Tetap
6	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,5 (A)	80,5 (A)	Tetap
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83	Tetap

No.	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	**Sesudah**	**Bertambah/Berkurang**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 122.931.818.595	Rp. 125.999.543.364	Rp. 3.067.724.769
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 27.610.931.692	Rp. 29.775.454.192	Rp. 2.164.522.500
3.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 10.000.000	Rp. 7.850.000	(Rp. 2.150.000)
4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 177.767.000	Rp. 327.951.500	Rp. 150.184.500
5.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 1.729.542.300	Rp. 1.352.872.500	(Rp. 376.669.800)
6.	Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	Rp. 200.000.000	Rp. 150.000.000	(Rp. 50.000.000)
	Jumlah	**Rp. 152.660.059.587**	**Rp. 157.613.671.556**	**Rp. 4.953.611.969**

Pariaman, Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga,

Hertati Taher, SE
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196903261989032009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Nazifah, MM
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Dra. Nazifah, MM
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196705131989032005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik /Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
1	Menurunnya angka morbiditas dan mortalitas	Menurunnya angka morbiditas dan mortalitas	Angka Usia Harapan Hidup	Angka Usia Harapan Hidup	74,37	74,37	Tetap
			Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI)	0	0	Tetap
			Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Bayi (AKB)	10/ 1000 KH	10/ 1000 KH	Tetap
			Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	10,5 %	10,5 %	Tetap
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah	77 (BB)	77 (BB)	Tetap
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 85.561.397.500	Rp. 84.332.883.894	(Rp.1.228.513.606)
2.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rp. 28.353.901.543	Rp. 28.832.185.411	Rp. 478.283.868
3.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rp. 25.000.000	Rp. 537.493.000	Rp. 512.493.000
4.	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Rp. 451.410.000	Rp. 429.960.000	(Rp. 21.450.000)
5.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Rp. 114.135.808	Rp. 243.960.900	Rp. 129.825.092
	Jumlah	**Rp. 114.505.844.851**	**Rp. 114.376.483.205**	**(Rp. 129.361.646)**

Pariaman, 16 Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Kepala Dinas Kesehatan,

Dra. Nazifah, MM
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196705131989032005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riko Jamal, ST, MT
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Yota Balad	Riko Jamal, ST, MT Pembina/ IV.a NIP. 198508102009011001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase panjang jalan kota dalam kondisi mantap	Persentase panjang jalan kota dalam kondisi mantap	74,60 %	74,60 %	Tetap
			Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik	Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik	45,00 %	45,00 %	Tetap
			Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	72,70 %	72,70 %	Tetap
			Persentase bangunan gedung pemerintah yang representatif	Persentase bangunan gedung pemerintah yang representatif	80,58 %	80,58 %	Tetap
2.	Meningkatnya kualitas permukiman yang layak huni	Meningkatnya kualitas permukiman yang layak huni	Persentase akses sanitasi layak	Persentase akses sanitasi layak	74,03 %	74,03 %	Tetap
			Persentase penduduk berakses air minum layak	Persentase penduduk berakses air minum layak	98,45 %	98,45 %	Tetap
3.	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana penataan ruang	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana penataan ruang	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	67,25 %	67,25 %	Tetap
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP OPD	Nilai evaluasi SAKIP OPD	A	A	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.12.258.938.151	Rp. 10.865.370.786	(Rp.1.393.567.365)
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 1.092.029.750	Rp. 832.236.000	(Rp. 259.793.750)
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 183.475.000	Rp. 223.972.000	Rp. 40.497.000
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 223.220.500	Rp. 355.785.000	Rp. 132.564.500
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 1.866.507.000	Rp. 1.705.305.497	(Rp. 161.201.503)
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 791.113.250	Rp. 996.169.000	Rp. 205.055.750
7.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 100.000.000	Rp.150.000.000	Rp. 50.000.000
8.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 31.006.532.000	Rp. 4.643.151.500	(Rp. 26.363.380.500)
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 50.000.000	Rp. 19.641.000	(Rp. 30.359.000)
10.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 247.480.000	Rp. 270.055.500	Rp. 22.575.500
11.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 125.000.000	Rp. 58.432.750	(Rp. 66.567.250)
12.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 1.893.269.374	Rp. 2.239.612.610	Rp. 346.343.236
	Jumlah	Rp. **49.837.565.025**	Rp. **22.359.731.643**	(Rp. **27.477.833.382**)

Pariaman, 16 Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan,

Riko Jamal, ST, MT
Pembina/ IV.a
NIP. 198508102009011001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feri Andri, ST, MT
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Feri Andri, ST, MT.
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP 196602251994031006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Perumahan Layak Huni dan Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya Perumahan Layak Huni dan Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	94,78%	94,78%	Tetap
			Jumlah Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	Jumlah Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	19,62 Ha	19,62 Ha	Tetap
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,97	69,97	Tetap
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP	86,50	86,50	Tetap
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	75	75	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.626.255.823	Rp. 11.842.538.768	(Rp. 2.783.717.055)
2.	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 53.000.000	Rp. 33.128.000	(Rp. 19.872.000)
3.	Program Kawasan Permukiman	Rp. 60.212.000	Rp. 52.465.750	(Rp. 7.746.250)
4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 1.450.000.000	Rp. 1.270.000.000	(Rp. 180.000.000)
5.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 239.070.000	Rp. 209.299.500	(Rp. 29.770.500)
6.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 944.769.130	Rp. 1.263.392.435	Rp. 318.623.305
7.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 859.969.824	Rp. 1.286.012.610	Rp. 426.042.786
8.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 73.700.310	Rp. 70.661.652	(Rp. 3.038.658)
9.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 35.000.000	Rp. 30.800.000	(Rp. 4.200.000)
10.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluh Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 64.769.900	Rp. 176.745.900	Rp. 111.976.000
11.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 5.050.000	Rp. 3.545.000	(Rp. 1.505.000)
12.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 3.381.450.170	Rp. 7.397.827.631	Rp. 4.016.377.461
13.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	-	Rp. 280.361.500	Rp. 280.361.500
	Jumlah	**Rp. 21.793.247.157**	**Rp. 23.916.778.746**	**Rp. 2.123.531.589**

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Pariaman, Desember 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup,

Feri Andri, ST, MT.
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP 196602251994031006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Roem, SH, MM
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Muhamad Roem, SH, MM
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196703181986021002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya pemenuhan hak dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya pemenuhan hak dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar esensial	Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar esensial	100%	100%	Tetap
			Persentase PPKS yang terlayani	Persentase PPKS yang terlayani	100%	100%	Tetap
2.	Meningkatnya tatakelola Pemerintahan Daerah yang akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Meningkatnya tatakelola Pemerintahan Daerah yang akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	79 (BB)	79 (BB)	Tetap
			Nilai indeks kepuasan masyarakat	Nilai indeks kepuasan masyarakat	93	93	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.169.731.312	Rp. 3.023.612.881	(Rp. 146.118.431)
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 122.674.750	Rp. 155.039.750	Rp. 32.365.000
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 524.253.000	Rp. 8.963.459.880	Rp. 8.439.206.880
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 96.251.600	Rp. 125.287.600	Rp. 29.036.000
5.	Program Penanganan Bencana	Rp. 126.700.000	Rp. 117.803.250	(Rp. 8.896.750)
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 25.204.334	Rp. 35.695.544	Rp. 10.491.210
	Jumlah	**Rp. 4.064.814.996**	**Rp. 12.420.898.905**	**Rp. 8.356.083.909**

Pariaman, 16 Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Dinas Sosial,

Muhamad Roem, SH, MM
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196703181986021002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marlina Sepa, SP, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Marlina Sepa SP, M.Si
Pembina/IV/a
NIP.197010082005012001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian	Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian	Persentase Capaian Produksi Sektor Pertanian	Persentase Capaian Produksi Sektor Pertanian	99%	99%	Tetap
2.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	84,08	84,08	Tetap
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	83,66	83,66	Tetap
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	98,44	98,44	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 15.080.760.340,00	Rp. 15.048.590.038,98	(Rp.32.170.301,02)
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 316.550.000,00	Rp. 159.215.500,00	(Rp.157.334.500,00)
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 10.000.000,00	Rp. 3.193.000,00	(Rp.6.807.000,00)
4.	Program Pengawasan keamanan Pangan.	Rp. 11.240.000,00	Rp. 4.676.750,00	(Rp.6.563.250,00)
5.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 700.000.000,00	Rp. 379.050.000,00	(Rp.320.950.000,00)

6.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.	Rp. 590.251.040,00	Rp. 490.311.940,00	(Rp. 99.939.100,00)
7.	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan.	Rp. 157.000.000,00	Rp. 93.655.000,00	(Rp. 63.345.000,00)
8.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 1.588.820.415,00	Rp. 889.162.165,00	(Rp. 699.658.250,00)
9.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.	Rp. 345.094.900,00	Rp. 524.997.000,00	Rp. 179.902.100,00
10	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 358.398.401,00	Rp. 285.122.541,00	(Rp.73.275.860,00)
11	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.	Rp. 129.519.900,00	Rp. 58.397.400.00	(Rp.71.122.500,00)
12	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 172.469.392,00	Rp. 253.140.700.00	Rp.80.671.308,00
	Jumlah	**Rp. 19.460.104.388,00**	**Rp. 18.189.512.034,98**	**(Rp. 1.270.592.353,02)**

Pariaman, 16 Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Plt. Kepala Dinas Pertanian,
Pangan, dan Perikanan,

Marlina Sepa SP, M.Si
Pembina/ IVa
NIP.197010082005012001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Ika Septia Maulana, S.IP
Jabatan	:	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan	:	Wali Kota Pariaman

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Yota Balad	Ika Septia Maulana, S.IP Pembina / IVa NIP 19870915 200701 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,45 %	57,45 %	Tetap
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	Strata Kota Layak Anak (KLA)	Strata Kota Layak Anak (KLA)	Nindya	Nindya	Tetap
3.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern / mCPR bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun	Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern / mCPR bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun	74,29%	74,29%	Tetap
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet Need*)	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet Need*)	14,75 %	14,75 %	Tetap
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,02 (A)	80,02 (A)	Tetap
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.242.708.849	Rp. 4.277.743.689	(Rp. 964.965.160)
2.	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 46.881.000	Rp. 166.300.000	Rp. 119.419.000
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 157.635.400	Rp. 201.835.400	Rp. 44.200.000
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 36.843.000	Rp. 71.843.000	Rp. 35.000.000
5.	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 8.615.000	Rp. 3.662.500	(Rp. 4.952.500)
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 348.036.750	Rp. 303.854.600	(Rp. 44.182.150)
7.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 98.664.000	Rp. 158.664.000	Rp. 60.000.000
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp. 1.617.024.000	Rp. 1.528.224.000	(Rp. 88.800.000)
9.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera	Rp. 1.604.695.000	Rp. 1.545.395.000	(Rp. 59.300.000)
	Jumlah	**Rp. 9.161.102.999**	**Rp. 8.257.522.189**	**(Rp. 903.580.810)**

Pariaman, 16 Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Ika Septia Maulana, S.IP
Pembina / IV/a
NIP. 19870915 2007012001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yalviendri, SE.Akt, MM
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Yalviendri, SE.Akt, MM
Pembina Tk. I/ IV/b
NIP 197703022005011007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Sistim penyelengaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Sistim penyelengaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Implementasi SPBE	Meningkatnya Implementasi SPBE	3.51	3.51	Tetap
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	95	95	Tetap
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik	2.5	2.5	Tetap
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerh yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerh yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai AKIP	Nilai AKIP	80.01	80.01	Tetap
			Nilai IKM	Nilai IKM	95	95	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.576.706.909	Rp. 4.520.302.126	(Rp. 1.056.404.783)
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp. 1.124.099.250	Rp. 1.318.678.750	Rp. 194.579.500
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 1.876.579.708	Rp. 1.784.554.442	Rp. 92.025.266
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 81.899.863	Rp. 4.670.500	(Rp. 77.229.363)
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 75.999.864	Rp. 21.289.000	Rp. 54.710.864
	Jumlah	**Rp. 8.735.285.594**	**Rp. 7.649.494.818**	**(Rp. 1.085.790.776)**

Pariaman, 16 Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

Yalviendri, SE.Akt, MM
Pembina Tk. I/ IV/b
NIP 197703022005011007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusniyeti Zaunit, S.Kom, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Gusniyeti Zaunit, S.Kom, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196908181997032001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PARIAMAN

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp.55.000.000.000,-	Rp.51.000.000.000,-	Turun
2.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	94,85 %	94,85 %	Tetap
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	83,55 (A)	83,55 (A)	Tetap
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	92	92	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.045.648.300	Rp. 4.817.050.654	(Rp. 228.597.646)
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 177.850.000	Rp. 116.475.000	(Rp. 61.375.000)
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 70.600.000	Rp. 298.163.500	Rp. 227.563.500
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 64.239.500	Rp. 263.668.200	Rp. 199.428.700
5.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 25.000.000	Rp. 2.000.000	(Rp. 23.000.000)
6.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 105.000.000	Rp. 27.890.000	(Rp. 77.110.000)
7.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 204.129.750	Rp. 77.343.500	(Rp. 126.786.250)
	Jumlah	**Rp. 5.692.467.550**	**Rp. 5.602.590.854**	**(Rp. 89.876.696)**

Pariaman, 16 Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja,

Gusniyeti Zaunit, S.Kom, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 196908181997032001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferialdi, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Ferialdi, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196908032003121004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	10,7 %	10,7 %	Tetap
2.	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan	Rata – rata Lama Tinggal Wisatawan	Rata – rata Lama Tinggal Wisatawan	1,73 / hari	1,73 / hari	Tetap
3.	Peningkatan Pemajuan Kebudayaan	Peningkatan Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Peningkatan Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Peningkatan Pemajuan Kebudayaan	3 Objek	3 Objek	Tetap
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	71 (BB)	71 (BB)	Tetap
5.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 952.403.666,00	Rp. 919.792.831,00	(Rp. 32.610.835,00)
2.	Program Pegembangan Kesenian Tradisional	Rp. 36.997.200,00	Rp. 29.797.200,00	(Rp. 7.200.000,00)
3.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 30.000.000,00	Rp. 982.500,00	(Rp. 29.017.500,00)
4.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 0	Rp. 23.867.000,00	Rp. 23.867.000,00
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 6.184.408.316,00	Rp. 5.466.464.828,00	(Rp. 717.943.488,00)
6.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 495.999.666,00	Rp. 479.838.416,00	(Rp. 16.161.250,00)
7.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 249.999.754,00	Rp. 186.263.840,00	(Rp. 53.736.914,00)
8.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 14.999.316,00	Rp. 5.815.000,00	(Rp. 9.184.316,00)
9.	Program Pegembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 53.000.000,00	Rp. 68.503.100,00	Rp. 15.503.100,00
	Jumlah	**Rp. 8.017.807.918,00**	**Rp. 7.181.324.715,00**	**(Rp. 826.484.203,00)**

Pariaman, 16 Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,

Ferialdi, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196908032003121004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Alyendra, SH
Jabatan	:	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pariaman

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan	:	Wali Kota Pariaman

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Yota Balad	Alyendra, SH
	Pembina Utama Muda/IV/c
	NIP 196701061998031005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan, industri, koperasi dan UMKM	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan, industri, koperasi dan UMKM	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan	2,05	2,05	Tetap
			Persentase pertumbuhan sektor industri	Persentase pertumbuhan sektor industri	1,7	1,7	Tetap
			Persentase peningkatan kualitas koperasi	Persentase peningkatan kualitas koperasi	2,3	2,3	Tetap
			Persentase peningkatan kualitas UMKM	Persentase peningkatan kualitas UMKM	5,42	5,42	Tetap
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel seta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76 (BB)	76 (BB)	Tetap
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61	76,61	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 9.141.092.342	Rp. 7.935.026.008	(Rp. 1.206.066.334)
2.	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Rp. 49.197.500	Rp. 22.210.000	(Rp. 26.987.500)
3.	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	0	Rp. 76.000.000	Rp. 76.000.000
4.	Program pengembangan UMKM	Rp. 37.400.500	Rp. 182.990.260	Rp. 145.589.760
5.	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Rp. 313.748.600	Rp. 473.746.000	Rp. 159.997.400
6.	Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rp. 15.840.000	Rp. 5.820.000	(Rp. 10.020.000)
7.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Rp. 12.936.000	Rp. 1.743.500	(Rp. 11.192.500)
8.	Program Standarisasi dan perlindungan Konsumen	Rp. 43.075.000	Rp. 35.529.500	(Rp. 7.545.500)
9.	Program perencanaan dan pembangunan industri	Rp. 286.370.000	Rp. 657.191.500	Rp. 370.821.500
10	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 35.444.000	Rp. 13.376.500	(Rp. 22.067.500)
11	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 27.650.000	Rp. 9.151.500	(Rp.18.498.500)
	Jumlah	**Rp. 9.962.753.942**	**Rp. 9.412.784.768**	**(Rp. 549.969.174)**

Pariaman, 16 Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah,

Alyendra, SH
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP 196701061998031005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Junaidi, AP.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Adi Junaidi, AP.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 197506221995011001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	93.66	93.66	Tetap
2	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93.87%	93.87%	Tetap
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	83.90	83.90	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan Bertambah/Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.967.534.927	Rp. 3.629.880.276	(Rp. 337.654.652)
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 239.146.000	Rp. 244.868.000	Rp. 5.722.000
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	-
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 3.000.000	Rp. 33.000.000	Rp. 30.000.000
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	-
	Jumlah	**Rp. 4.215.680.927**	**Rp. 3.913.748.276**	**(Rp. 301.932.652)**

Pariaman, 16 Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Adi Junaidi, AP.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 197506221995011001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afwandi, S.STP, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Afwandi, S.STP, M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 197910221998101001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Berlalu Lintas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Berlalu Lintas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,05	89,05	Tetap
			Persentase Cakupan Layanan Berlalu Lintas	Persentase Cakupan Layanan Berlalu Lintas	90	90	Tetap
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai AKIP Perangkap Daerah	Nilai AKIP Perangkap Daerah	68 (B)	68 (B)	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.479.398.279	Rp. 6.000.517.966	(Rp. 478.880.313)
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 2.353.210.698	Rp. 3.629.648.604	Rp. 1.276.437.906
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 305.334.700	Rp. 262.780.075	(Rp. 42.554.625)
	Jumlah	**Rp. 9.137.943.677**	**Rp. 9.892.946.645**	**(Rp. 755.002.968)**

Pariaman, 16 Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Kepala Dinas Perhubungan,

Afwandi, S.STP, M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 197910221998101001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noviardi, SH
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Noviardi, SH
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196611041989031011

PERJANJIAN KINERJAPERUBAHANTAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	49,10 % (27 Desa)	49,10 % (27 Desa)	Tetap
			Persentase Desa Maju	Persentase Desa Maju	50,90 % (28 Desa)	50,90 % (28 Desa)	Tetap
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai AKIP	Nilai AKIP	80,50 (A)	80,50 (A)	Tetap
			Nilai IKM	Nilai IKM	86,5 (B)	86,5 (B)	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.550.597.792	Rp. 3.355.280.723	(Rp. 195.317.069)
2.	Program Penataan Desa	Rp. 3.000.000	Rp. 2.214.400	(Rp. 785.600)
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 357.475.578	Rp. 307.210.228	(Rp. 50.265.350)
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemsyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.732.820.500	Rp. 1.862.574.500	Rp. 129.754.000)
	Jumlah	**Rp. 5.643.893.870**	**Rp. 5.527.279.851**	**(Rp. 116.614.019)**

Pariaman, 16 Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Noviardi, SH
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196611041989031011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfian, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Alfian, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 197407261993111001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pencapaian Penegakan Perda/Perkada	Meningkatnya Pencapaian Penegakan Perda/Perkada	Persentasi Pencapaian Penegakan Perda/Perkada	Persentasi Pencapaian Penegakan Perda/Perkada	91%	91%	Tetap
2	Meningkatnya Pengendalian Bencana Kebakaran	Meningkatnya Pengendalian Bencana Kebakaran	Persentase Bencana Kebakaran yang Tertangani	Persentase Bencana Kebakaran yang Tertangani	100%	100%	Tetap
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	65 (B)	65 (B)	Tetap
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.506.316.409	Rp. 9.988.507.741	Rp. 1.482.191.332
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.312.516.053	Rp. 2.683.113.060	Rp. 370.597.007
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 1.501.666.120	Rp. 2.479.342.880	Rp. 977.676.760
	Jumlah	**Rp. 12.320.543.582**	**Rp. 15.150.963.681**	**Rp. 2.830.420.099**

Pariaman, Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,

Alfian, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 197407261993111001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syukri, SE, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Muhammad Syukri, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196612051993081001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat	Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	72,50%	72,50%	Tetap
2.	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan Pemerintah	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan Pemerintah	Persentase OPD yang mengelola Arsip sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Persentase OPD yang mengelola Arsip sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	45%	45%	Tetap
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	73 (BB)	73 (BB)	Tetap
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Rp. 2.900.397.371	Rp. 2.718.737.052	(Rp. 181.660.320.00)
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 1.146.500.000	Rp. 1.122.243.750	(Rp. 24.256.250.00)
3.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	0	Rp. 10.665.000	Rp. 10.665.000.00
4.	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 388.432.500	Rp. 160.601.500	(Rp. 227,831,000)
5.	Program Perlindungan dan penyelamatan Arsip	Rp. 108.993.500	Rp. 21.514.500	(Rp. 87.479.000)
	Jumlah	**Rp. 4.544.323.371**	**Rp. 4.033.761.802**	**(Rp. 510,561,569)**

Pariaman, 16 Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,

Muhammad Syukri, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP 196612051993081001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Junaidi, AP
Jabatan : Plt. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Adi Junaidi, AP
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 197506221995011001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan	77,5%	77,5%	Tetap
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	24,5%	24,5%	Tetap
			Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	20,5%	20,5%	Tetap
			Persentase Target Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD/RPD) yang tercapai	Persentase Target Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD/RPD) yang tercapai	80%	80%	Tetap
			Persentase Pemanfaatan Dokumen Penelitian Daerah dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Dokumen Penelitian Daerah dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan	76,5%	76,5%	Tetap
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82 (A)	82 (A)	Tetap
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.411.587.564	Rp. 4.854.025.561	(Rp. 557.562.003)
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 947.300.622	Rp. 724.105.972	(Rp. 223.194.650)
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 430.671.409	Rp. 183.334.610	(Rp. 247.336.799)
4	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 370.397.100	Rp. 215.089.400	(Rp. 155.307.700)
	Jumlah	**Rp. 7.159.956.695**	**Rp. 5.976.555.543**	**(Rp. 1.183.401.152)**

Pariaman, 16 Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Plt. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah,

Adi Junaidi, AP
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 197506221995011001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Willy Firmadian, SE, MM
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Willy Firmadian, SE, MM
Pembina / IV/a
NIP. 197901022005011004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	Tetap
2	Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	33%	33%	Tetap
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,01	70,01	Tetap
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	75	75	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.910.819.647	Rp. 14.049.693.251	Rp. 138.873.604
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 91.020.587.152	Rp. 89.934.728.113	(Rp. 1.085.859.039)
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 557.919.394	Rp. 768.965.194	Rp. 211.045.800
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.529.302.250	Rp. 2.076.263.680	Rp. 546.961.430
	Jumlah	**Rp. 107.018.628.443**	**Rp. 106.829.650.238**	**(Rp. 188.978.205)**

Pariaman, 16 Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah,

Willy Firmadian, SE, MM
Pembina / IV/a
NIP. 197901022005011004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Novandri, S.Sos, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Reza Novandri, S.Sos, M.Si
Penata Tk.I/III/d
NIP. 198711082006041003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	86,55	86,55	Tetap
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur	Indeks Penerapan Sistem Merit	Indeks Penerapan Sistem Merit	215	215	Tetap
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	89,7	89,7	Tetap
4	Terselenggaranya Pengelolaan Anggaran BKPSDM Kota Pariaman secara Optimal	Terselenggaranya Pengelolaan Anggaran BKPSDM Kota Pariaman secara Optimal	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	90%	90%	Tetap
			Persentase Penyerapan Anggaran BKPSDM	Persentase Penyerapan Anggaran BKPSDM	95,54%	95,54%	Tetap
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,01 (A)	80.01(A)	Tetap

No	Program		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 4.311.490.509	Rp 4.231.596.909	(Rp. 79.893.600)
2.	Program Kepegawaian Daerah		Rp. 2.094.912.750	Rp 1.481.051.100	(Rp.613.861.650)
		Jumlah	**Rp. 6.406.403.259**	**Rp 5.712.648.009**	**(Rp. 693.755.250)**

Pariaman, 16 Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Plt. Pihak Pertama,

Reza Novandri, S.Sos, M.Si
Penata Tk.I/III/d
NIP. 198711082006041003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radius Syahbandar, SE, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka premberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Radius Syahbandar, SE, M.Si
Pembina/ IV/a
NIP 197001012000031004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Mitigasi Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	48%	48%	Tetap
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	85 (A)	85 (A)	Tetap
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.291.900.330	Rp. 4.414.097.559	Rp. 122.197.229
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp.1.410.865.831	Rp. 1.409.327.450	(Rp. 1.538.381)
	Jumlah	**Rp. 5.702.766.161**	**Rp. 5.823.425.009**	**Rp. 120.658.848**

Pariaman, 16 Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Plt. Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah,

Radius Syahbandar, SE, M.Si
Pembina/ IV/a
NIP 197001012000031004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferry Ferdian Bagindo Putra, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Ferry Ferdian B. P., S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I/ IV/b
NIP 198302162001121002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pendektesian Dini Potensi Konflik	Meningkatnya Pendektesian Dini Potensi Konflik	Persentase Potensi Konflik yang dicegah di Kota Pariaman	Persentase Potensi Konflik yang dicegah di Kota Pariaman	100%	100%	Tetap
2	Meningkatnya Kehidupan Demokrasi di Kota Pariaman	Meningkatnya Kehidupan Demokrasi di Kota Pariaman	Terfasilitasnya Bantuan Keuangan Partai Politik	Terfasilitasnya Bantuan Keuangan Partai Politik	100%	100%	Tetap
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.01 (A)	80.01 (A)	Tetap
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.182.988.901	Rp. 2.016.399.639	(Rp. 166.589.262)
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 765.914.330	Rp. 857.821.250	Rp. 91.906.920
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 1.031.840.000	Rp. 1.007.640.200	(Rp. 24.199.800)
4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 75.858.000	Rp. 12.330.000	(Rp. 63.528.000)
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 335.655.000	Rp. 426.349.500	Rp. 90.694.500
	Jumlah	**Rp 4.392.256.231**	**Rp. 4.320.540.589**	**(Rp. 71.715.642)**

Pariaman, 16 Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik,

Ferry Perdian B. P. S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I/ IV/b
NIP 198302162001121002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raswan Azmi, S.STP
Jabatan : Camat Pariaman Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Raswan Azmi, S.STP
Pembina Tingkat I/ IV/b
NIP 197709041998021001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	92	Tetap
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	Tetap
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,01 (BB)	70,01 (BB)	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 13.762.811.707	Rp. 11.581.157.709	(Rp. 2.181.653.998)
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 396.536.200	Rp. 532.739.281	Rp. 136.203.081
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.586.106.082	Rp.1.581.115.742	Rp. 4.990.340
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 57.070.000	Rp. 55.928.500	Rp. 1.141.500
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.053.296.490	Rp. 1.132.066.649	Rp. 78.770.159
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	0	Rp. 37.500.000	Rp. 37.500.000
	Jumlah	**Rp. 16.855.820.479**	**Rp. 14.920.507.881**	**(Rp. 1.935.312.598)**

Pariaman, 16 Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Camat Pariaman Tengah,

Raswan Azmi, S.STP
Pembina Tingkat I/ IV/b
NIP 197709041998021001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Farid Marwan, S.STP, MM
Jabatan : Camat Pariaman Selatan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Moh. Farid Marwan, S.STP, MM
Pembina/ IV/a
NIP 198609192004121001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	91	Tetap
2	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	Tetap
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang prima	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72,53	72,53	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.937.154.943	Rp 2.804.613.704	(Rp. 132.541.239)
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 6.684.500	Rp. 29.884.500	Rp. 23.200.000
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.000.000	Rp. 1.400.000	(Rp. 600.000)
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Rp. 2.014.000	Rp. 1.414.000	(Rp. 600.000)
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 3.389.000	Rp 3.144.000	(Rp. 245.000)
	Jumlah	**Rp. 2.951.242.443**	**Rp 2.840.456.204**	**(Rp. 110.786.239)**

Pariaman, Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Camat Pariaman Selatan,

Moh. Farid Marwan, S.STP, MM
Pembina/ IV/a
NIP 198609192004121001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Masmudi, SE
Jabatan : Camat Pariaman Utara
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,

Yota Balad

Pihak Pertama,

Dedi Masmudi, SE
Pembina Tingkat I/ III/d
NIP 196902162003121002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,5	86,5	Tetap
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	Tetap
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	75 (BB)	75 (BB)	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.980.430.076	Rp. 2.650.847.047	(Rp. 329.583.029)
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 28.056.750	Rp. 16.742.500	(Rp.11.314.250)
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 18.911.250	Rp. 19.837.250	Rp.926.000
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 7.000.000	Rp. 3.701.550	(Rp.3.298.450)
	Jumlah	**Rp. 3.034.398.076**	**Rp. 2.691.128.347**	**(Rp. 343.269.729)**

Pariaman, 16 Desember 2025

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Camat Pariaman Utara,

Dedi Masmudi, SE
Penata Tingkat I/ III/d
NIP 196902162003121002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arif Gunawan, S.STP
Jabatan : Camat Pariaman Timur
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yota Balad, S.STP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Pariaman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 16 Desember 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Yota Balad	M. Arif Gunawan, S.STP Pembina/ IV/a NIP 198511022003121001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Keterangan / Status / Naik/Turun
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,7	86,7	Tetap
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Persentase capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100%	100%	Tetap
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	62,58 (B)	62,58 (B)	Tetap

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp.2.698.442.273	Rp. 2.046.971.254	(Rp. 651.471.019)
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 7.888.000	Rp. 6.380.000	(Rp.1.508.000)
3.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 1.298.500	Rp. 1.298.500	-
4.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan	Rp. 3.325.000	Rp. 4.833.000	(Rp. 1.508.000)
	Jumlah	**Rp2.710.953.773**	**Rp 2.059.482.754**	**(Rp. 651.741.019)**

Wali Kota Pariaman,

Yota Balad

Pariaman, Desember 2025

Camat Pariaman Timur,

M. Arif Gunawan, S.STP
Pembina/ IV/a
NIP 198511022003121001

Tabel 13.12 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat (tahun), 2021—2025
Table *Expected Years of Schooling by Regency/Municipality in Sumatera Barat Province (years) , 2021—2025*

	Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	2021	2022	2023	2024	2025
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kabupaten/*Regency*					
01.	Kepulauan Mentawai	12,82	12,89	12,89	12,90	12,91
02.	Pesisir Selatan	13,32	13,33	13,35	13,36	13,37
03.	Solok	13,04	13,05	13,30	13,55	13,56
04.	Sijunjung	12,37	12,38	12,64	12,72	12,76
05.	Tanah Datar	14,33	14,34	14,59	14,78	15,05
06.	Padang Pariaman	13,67	13,68	13,93	14,19	14,20
07.	Agam	13,87	13,88	13,88	13,89	14,16
08.	Lima Puluh Kota	13,29	13,30	13,40	13,41	13,42
09.	Pasaman	12,80	12,81	13,05	13,25	13,52
10.	Solok Selatan	12,71	12,72	12,73	12,80	13,07
11.	Dharmasraya	12,43	12,44	12,51	12,68	12,89
12.	Pasaman Barat	13,61	13,68	13,69	13,70	13,72
	Kota/*Municipality*					
71.	Padang	16,52	16,53	16,54	16,56	16,57
72.	Solok	14,32	14,33	14,34	14,36	14,37
73.	Sawahlunto	13,17	13,18	13,42	13,69	13,86
74.	Padang Panjang	15,06	15,07	15,07	15,29	15,47
75.	Bukittinggi	14,97	14,98	14,99	15,01	15,28
76.	Payakumbuh	14,26	14,27	14,29	14,30	14,57
77.	Pariaman	14,54	14,55	14,61	14,79	14,80
	Sumatera Barat	**14,02**	**14,09**	**14,1**	**14,11**	**14,3**

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2025
National Socia Economic Survey

https://padangpariamankota.bps.go.id

Paniai	10,55
Intan Jaya	7,84
Puncak	5,67
Puncak Jaya	7,66
PAPUA PEGUNUNGAN	9,99
Nduga	4,73
Jayawijaya	12,86
Lanny Jaya	9,73
Tolikara	9,04
Mamberamo Tengah	9,79
Yalimo	9,85
Yahukimo	8,56
Pegunungan Bintang	7,30
INDONESIA	13,30

Keterangan Data :

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai IPM metode baru silahkan klik link di bawah ini
-Booklet IPM metode Baru
-Bahan Sosialisasi IPM metode baru

Tabel 13.13 **Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (tahun), 2021—2025**
Table ***Mean Year of Schooling by Regency/Municipality in Sumatera Barat Province (years) , 2021—2025***

	Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	2021	2022	2023	2024	2025
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kabupaten/*Regency*					
01.	Kepulauan Mentawai	7,20	7,48	7,76	8,03	8,21
02.	Pesisir Selatan	8,27	8,43	8,58	8,81	9,06
03.	Solok	7,87	7,89	7,90	7,91	8,25
04.	Sijunjung	8,12	8,30	8,57	8,62	8,66
05.	Tanah Datar	8,62	8,90	9,02	9,29	9,46
06.	Padang Pariaman	7,88	8,16	8,41	8,42	8,78
07.	Agam	8,97	8,98	9,22	9,23	9,57
08.	Lima Puluh Kota	8,07	8,08	8,12	8,13	8,49
09.	Pasaman	8,10	8,11	8,13	8,14	8,41
10.	Solok Selatan	8,32	8,41	8,69	8,85	9,20
11.	Dharmasraya	8,55	8,56	8,71	8,98	9,31
12.	Pasaman Barat	8,27	8,55	8,81	8,99	9,28
	Kota/*Municipality*					
71.	Padang	11,59	11,60	11,62	11,63	11,64
72.	Solok	11,04	11,35	11,36	11,37	11,38
73.	Sawahlunto	10,32	10,43	10,44	10,53	10,54
74.	Padang Panjang	11,63	11,92	11,94	12,00	12,01
75.	Bukittinggi	11,34	11,63	11,64	11,65	11,66
76.	Payakumbuh	10,81	10,82	10,88	10,89	11,08
77.	Pariaman	10,67	10,78	10,79	11,06	11,32
	Sumatera Barat	**9,07**	**9,18**	**9,28**	**9,44**	**9,77**

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2025
National Socia Economic Survey

https://pariamankota.bps.go.id

Puncak	2,40
Puncak Jaya	4,59
PAPUA PEGUNUNGAN	4,50
Nduga	2,19
Jayawijaya	6,15
Lanny Jaya	3,87
Tolikara	3,70
Mamberamo Tengah	3,99
Yalimo	3,83
Yahukimo	4,36
Pegunungan Bintang	3,59
INDONESIA	9,07

Keterangan Data :

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai IPM metode baru silahkan klik link di bawah ini
-Booklet IPM metode Baru
-Bahan Sosialisasi IPM metode baru

Tabel 13.11 Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (tahun), 2022—2025
Table ***Life Expectancy at Birth by Regency/Municipality in Sumatera Barat Province (years), 2022—2025***

	Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	2022	2023	2024	2025
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kabupaten/*Regency*				
01.	Kepulauan Mentawai	70,91	71,06	71,21	71,40
02.	Pesisir Selatan	73,20	73,27	73,44	73,68
03.	Solok	72,12	72,31	72,52	72,82
04.	Sijunjung	72,27	72,59	72,89	73,30
05.	Tanah Datar	73,84	74,19	74,26	74,35
06.	Padang Pariaman	73,67	73,77	73,88	74,04
07.	Agam	74,07	74,22	74,39	74,63
08.	Lima Puluh Kota	73,03	73,25	73,42	73,64
09.	Pasaman	71,71	72,04	72,36	72,76
10.	Solok Selatan	71,89	72,22	72,50	72,77
11.	Dharmasraya	73,84	74,04	74,25	74,34
12.	Pasaman Barat	72,14	72,44	72,75	73,17
	Kota/*Municipality*				
71.	Padang	74,71	74,94	75,20	75,59
72.	Solok	74,31	74,56	74,85	75,30
73.	Sawahlunto	73,50	73,79	74,12	74,21
74.	Padang Panjang	74,03	74,24	74,48	74,86
75.	Bukittinggi	75,02	75,33	75,62	76,06
76.	Payakumbuh	74,48	74,77	75,08	75,54
77.	Pariaman	73,98	74,20	74,37	74,62
	Sumatera Barat	**73,88**	**74,14**	**74,37**	**74,69**

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Hasil Hasil Long Form SP2021 (LF SP2021)
Long Form SP2021 Result

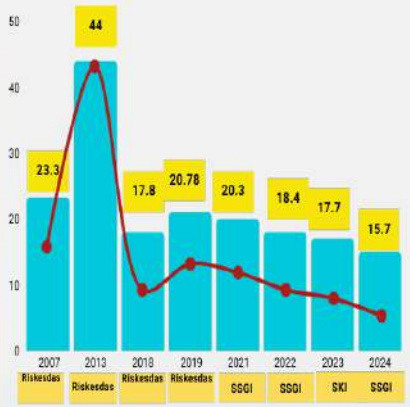
https://pariamankota.bps.go.id

Tabel 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Indikator Penyusun dan Provinsi, 2022–2025

Provinsi	Umur Harapan Hidup saat Lahir[1] (tahun)				Harapan Lama Sekolah (tahun)				Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	72,92	73,06	73,20	73,48	14,37	14,38	14,39	14,40	9,44	9,55	9,64	9,95
Sumatera Utara	73,39	73,67	73,90	74,19	13,31	13,48	13,49	13,50	9,71	9,82	9,93	10,08
Sumatera Barat	73,88	74,14	74,37	74,69	14,10	14,11	14,30	14,31	9,18	9,28	9,44	9,77
Riau	73,95	74,18	74,41	74,74	13,29	13,30	13,42	13,44	9,22	9,32	9,43	9,55
Jambi	73,61	73,84	74,06	74,39	13,05	13,13	13,14	13,34	8,68	8,81	8,90	8,95
Sumatera Selatan	73,76	74,04	74,26	74,58	12,55	12,63	12,64	12,65	8,37	8,50	8,57	8,91
Bengkulu	72,90	73,11	73,31	73,59	13,68	13,74	13,75	13,76	8,91	9,03	9,04	9,23
Lampung	73,95	74,17	74,39	74,71	12,74	12,77	12,78	12,79	8,18	8,29	8,36	8,61
Kep. Bangka Belitung	73,68	73,90	74,12	74,46	12,18	12,31	12,49	12,50	8,11	8,25	8,33	8,65
Kepulauan Riau	74,62	74,90	75,12	75,46	12,99	13,05	13,27	13,28	10,37	10,41	10,50	10,72
DKI Jakarta	75,54	75,81	75,99	76,27	13,08	13,33	13,51	13,80	11,31	11,45	11,49	11,59
Jawa Barat	74,65	74,91	75,16	75,53	12,62	12,68	12,80	13,02	8,78	8,83	8,87	9,14
Jawa Tengah	74,58	74,69	74,91	75,24	12,81	12,85	12,86	13,05	7,93	8,01	8,02	8,15
D.I. Yogyakarta	75,11	75,18	75,36	75,64	15,65	15,66	15,70	15,78	9,75	9,83	9,92	10,20
Jawa Timur	74,57	74,87	75,07	75,36	13,37	13,38	13,43	13,44	8,03	8,11	8,28	8,39
Banten	74,46	74,77	74,97	75,33	13,05	13,09	13,10	13,11	9,13	9,15	9,23	9,56
Bali	74,60	74,88	75,10	75,46	13,48	13,58	13,62	13,63	9,39	9,45	9,54	9,75
Nusa Tenggara Barat	71,66	72,02	72,25	72,60	13,96	13,97	13,98	13,99	7,61	7,74	7,87	8,21
Nusa Tenggara Timur	71,30	71,57	71,83	72,16	13,21	13,22	13,23	13,34	7,70	7,82	8,02	8,22
Kalimantan Barat	73,47	73,71	73,94	74,28	12,66	12,67	12,68	12,69	7,59	7,71	7,78	8,07
Kalimantan Tengah	73,34	73,54	73,73	74,01	12,75	12,76	12,77	12,78	8,65	8,73	8,81	8,96
Kalimantan Selatan	73,70	73,97	74,18	74,49	12,82	12,86	12,87	13,12	8,46	8,55	8,62	8,81
Kalimantan Timur	74,45	74,72	74,94	75,28	13,84	14,02	14,03	14,04	9,92	9,99	10,02	10,10
Kalimantan Utara	73,51	73,54	73,57	73,68	13,06	13,20	13,21	13,31	9,27	9,34	9,35	9,44
Sulawesi Utara	73,59	73,85	74,08	74,44	12,95	12,96	12,97	12,98	9,68	9,77	9,84	9,91
Sulawesi Tengah	70,49	70,66	70,84	71,10	13,32	13,33	13,34	13,35	8,89	8,96	9,04	9,10
Sulawesi Selatan	73,40	73,63	73,83	74,15	13,53	13,54	13,55	13,56	8,63	8,76	8,86	9,00
Sulawesi Tenggara	71,70	71,79	71,88	72,06	13,69	13,70	13,71	13,72	9,25	9,31	9,42	9,56
Gorontalo	70,22	70,50	70,73	71,06	13,12	13,16	13,17	13,18	8,02	8,10	8,29	8,38
Sulawesi Barat	70,42	70,76	71,03	71,44	12,87	12,88	12,89	12,90	8,08	8,13	8,15	8,31
Maluku	70,16	70,45	70,68	71,02	14,00	14,08	14,09	14,10	10,19	10,20	10,26	10,51
Maluku Utara	70,47	70,76	71,05	71,47	13,73	13,74	13,75	13,76	9,24	9,26	9,37	9,50
Papua Barat	68,06	68,28	68,47	68,76	13,14	13,16	13,17	13,21	7,43	7,66	7,86	8,07
Papua Barat Daya	69,58	69,83	70,02	70,31	13,86	13,87	13,88	13,89	8,22	8,23	8,39	8,69
Papua	70,03	70,26	70,47	70,77	13,60	13,71	13,72	13,94	9,63	9,64	9,82	10,01
Papua Selatan	68,06	68,27	68,46	68,71	12,44	12,56	12,67	12,68	8,04	8,24	8,38	8,64
Papua Tengah	67,86	68,04	68,18	68,38	9,61	9,62	9,63	9,64	5,91	6,02	6,12	6,13
Papua Pegunungan	67,11	67,27	67,39	67,55	9,95	9,96	9,97	9,98	3,89	4,01	4,21	4,30
Indonesia	73,70	73,93	74,15	74,47	13,10	13,15	13,21	13,30	8,69	8,77	8,85	9,07

PROFIL STUNTING KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

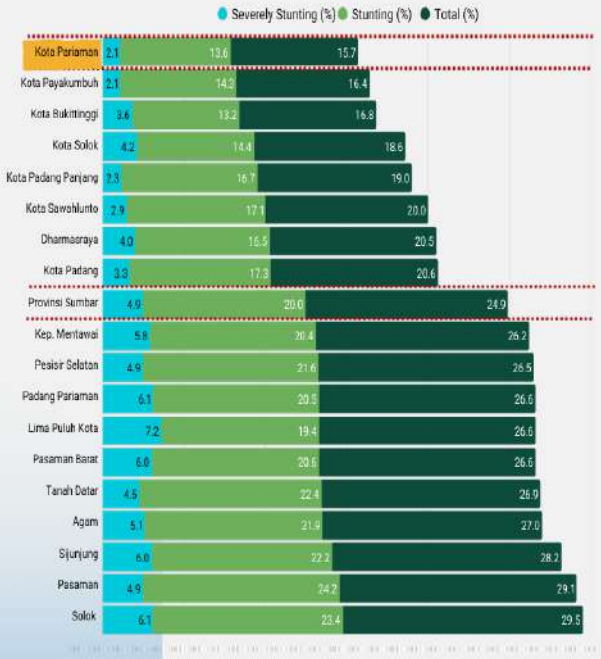
TREND PENURUNAN ANGKA STUNTING KOTA PARIAMAN HINGGA TAHUN 2024



BERDASARKAN DATA TAHUN 2024, STUNTING KOTA PARIAMAN MENGALAMI PENURUNAN SIGNIFIKAN. ANGKA INI SUDAH BERADA DI BAWAH RATA-RATA PROVINSI SUMATERA BARAT (24,2%) DAN TERMASUK SALAH SATU TERENDAH DI SUMBAR.

CAPAIAN INI MENUNJUKKAN EFEKTIVITAS INTERVENSI LINTAS SEKTOR SERTA KOMITMEN KUAT PEMERINTAH DAERAH.

PREVALENSI STATUS GIZI (TB/U) PADA BALITA PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT KAB/KOTA 2024



PREVALENSI STUNTING
KOTA PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT DAN NASIONAL 2021–2024



Prevalensi Stunting Kota Pariaman
Konsisten turun setiap tahunnya

Selama periode 2021–2024, Kota Pariaman berhasil menunjukkan tren penurunan stunting yang konsisten dan signifikan.

Angka stunting turun dari 20,3% pada 2021 menjadi 15,7% pada 2024, atau menurun 4,6 persen poin dalam empat tahun. Capaian ini lebih baik dibandingkan Provinsi (sekitar 23–25%) dan lebih rendah dari rata-rata nasional.

Keberhasilan ini membuktikan komitmen kuat Kota Pariaman dalam percepatan penurunan stunting melalui berbagai program intervensi gizi spesifik dan sensitif, dukungan lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat.

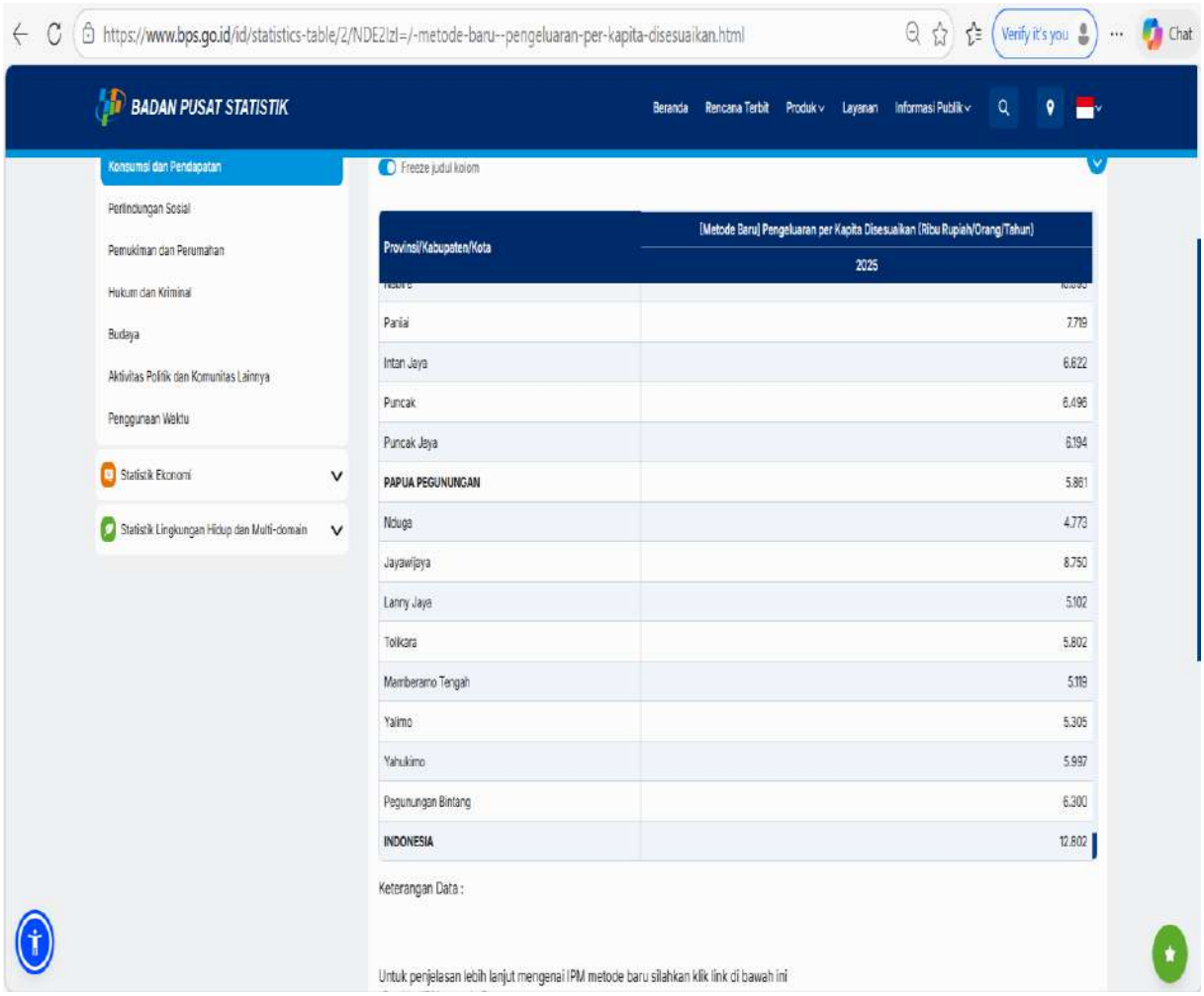
Sementara tren provinsi dan nasional cenderung fluktuatif, Pariaman menunjukkan penurunan yang stabil.

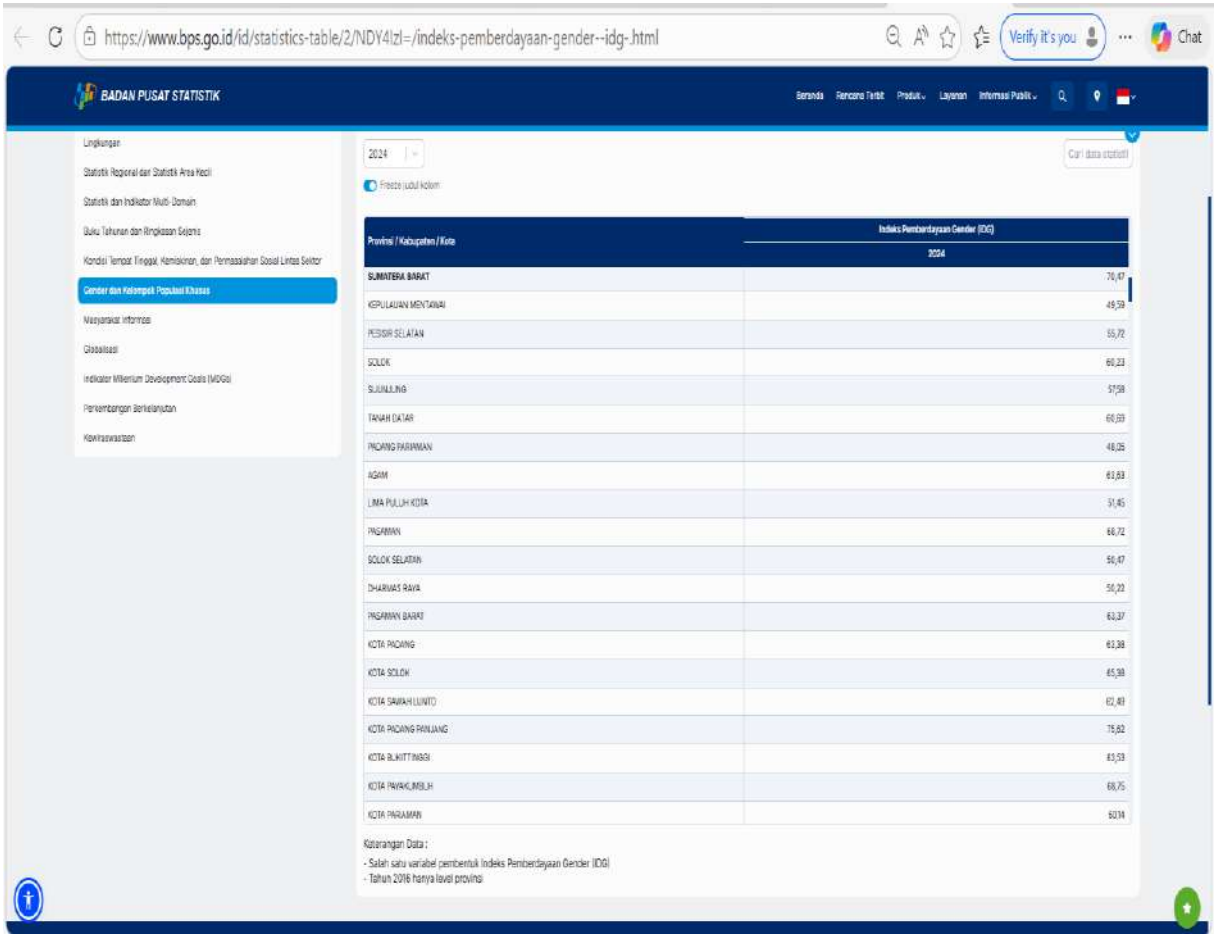
Tabel 13.14 Pengeluaran Per kapita Disesuaikan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota (ribu rupiah/orang/tahun), 2021—2025
Table *Adjusted Expenditure Per Capita by Regency/Municipality in Sumatera Barat Province (thousand rupiahs/person/year), 2021—2025*

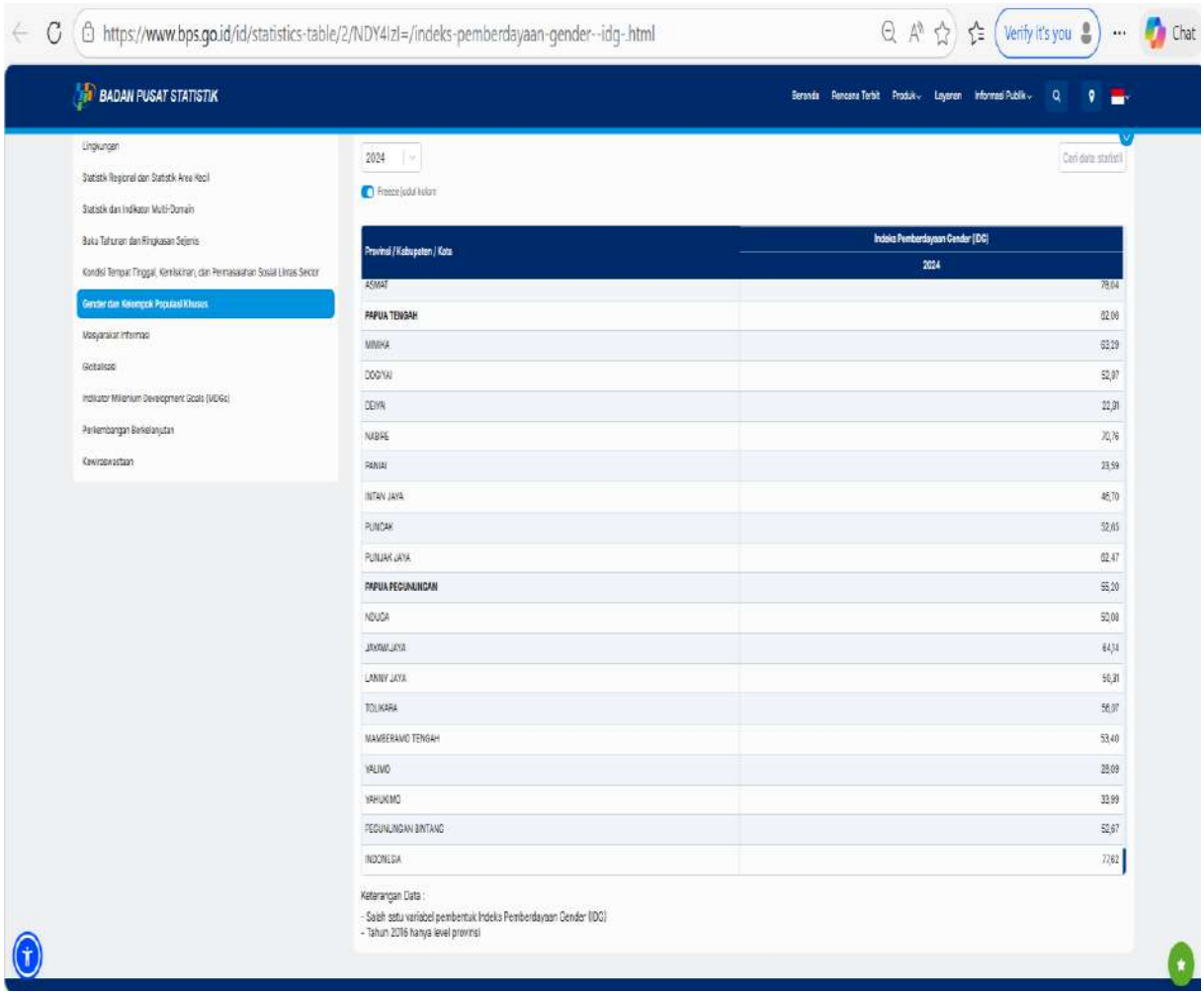
Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*		2021	2022	2023	2024	2025
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kabupaten/*Regency*					
01.	Kepulauan Mentawai	6.321	6.567	6.891	7.192	7.451
02.	Pesisir Selatan	9.270	9.686	9.953	10.211	10.633
03.	Solok	10.215	10.539	10.717	10.988	11.318
04.	Sijunjung	10.389	10.582	11.018	11.395	11.829
05.	Tanah Datar	10.616	10.695	10.905	11.223	11.552
06.	Padang Pariaman	11.050	11.159	11.432	11.756	12.089
07.	Agam	9.662	10.171	10.402	10.686	11.034
08.	Lima Puluh Kota	9.668	10.035	10.285	10.648	10.917
09.	Pasaman	8.440	8.619	8.908	9.194	9.518
10.	Solok Selatan	10.367	10.560	10.884	11.240	11.542
11.	Dharmasraya	11.324	11.650	11.901	12.254	12.604
12.	Pasaman Barat	9.089	9.381	9.538	9.888	10.231
	Kota/*Municipality*					
71.	Padang	14.540	14.889	15.089	15.458	15.957
72.	Solok	12.168	12.515	12.709	12.995	13.504
73.	Sawahlunto	10.195	10.537	10.829	11.187	11.501
74.	Padang Panjang	10.754	11.153	11.310	11.840	12.148
75.	Bukittinggi	13.331	13.633	13.859	14.297	14.579
76.	Payakumbuh	13.317	13.687	13.978	14.260	14.536
77.	Pariaman	12.818	13.150	13.355	13.784	14.261
	Sumatera Barat	**10.790**	**11.130**	**11.380**	**11.718**	**12.041**

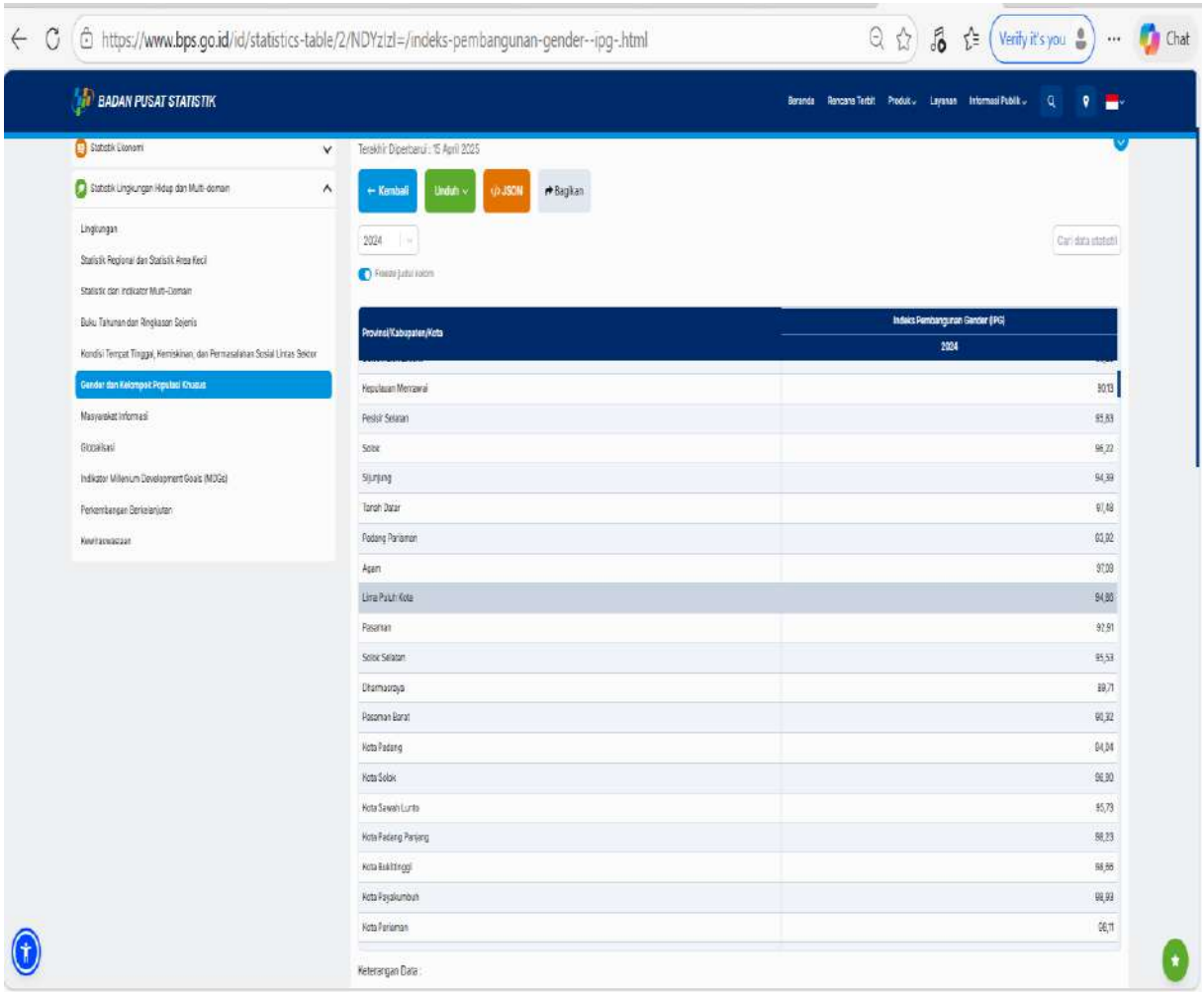
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional
National Socia Economic Survey

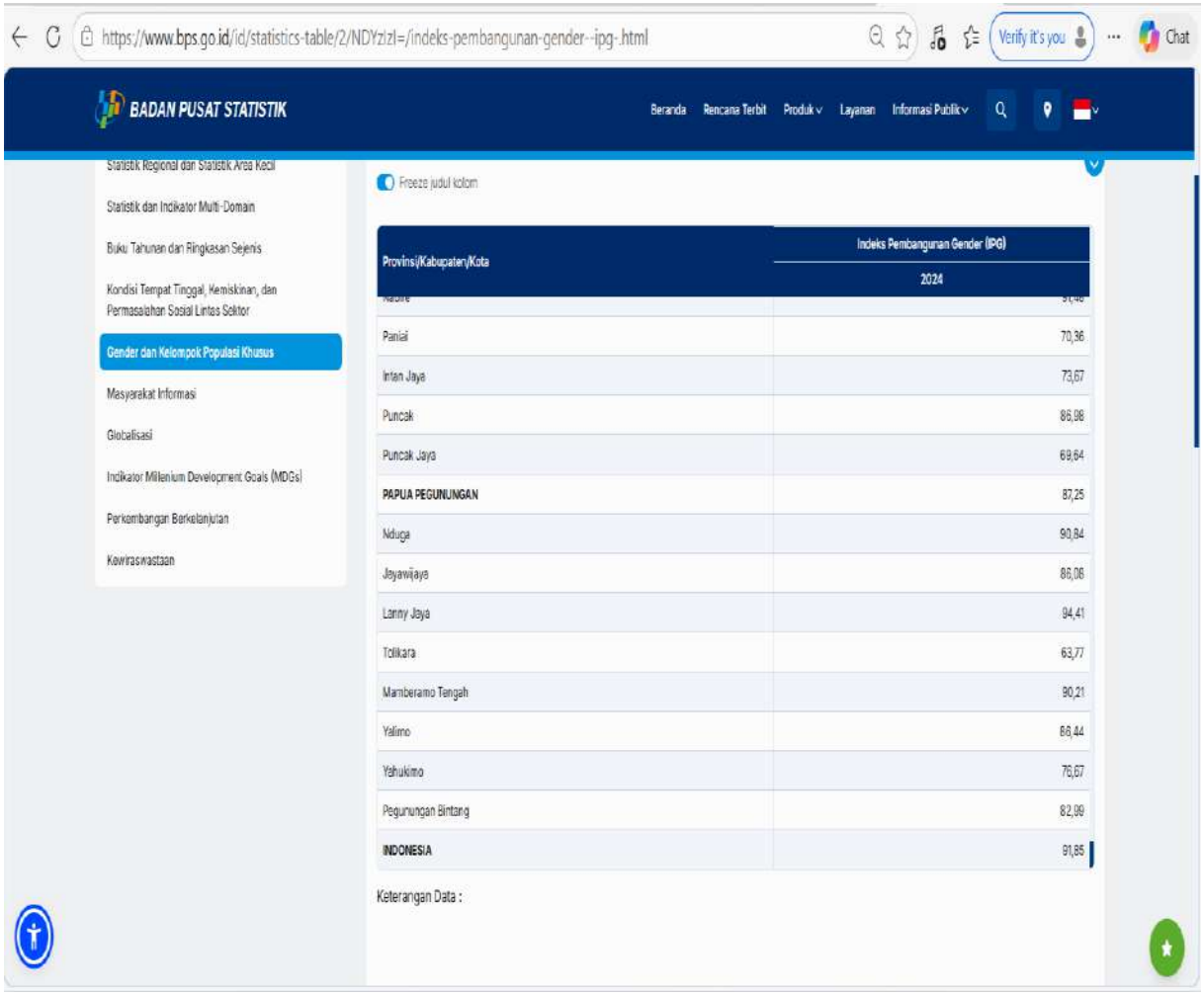
https://pariamankota.bps.go.id


https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE2IzI=/-metode-baru--pengeluaran-per-kapita-disesuaikan.html
Verify it's you
Chat
BADAN PUSAT STATISTIK
Beranda
Rencana Terbit
Produk
Layanan
Informasi Publik
Konsumsi dan Pendapatan
Perlindungan Sosial
Pemukiman dan Perumahan
Hukum dan Kriminal
Budaya
Aktivitas Politik dan Komunitas Lainnya
Penggunaan Waktu
Statistik Ekonomi
Statistik Lingkungan Hidup dan Multi-domain
Freeze judul kolom
Provinsi/Kabupaten/Kota
[Metode Baru] Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)
2025
Panlai 7.719
Intan Jaya 6.622
Puncak 6.496
Puncak Jaya 6.194
PAPUA PEGUNUNGAN 5.861
Nduga 4.773
Jayawijaya 8.750
Lanny Jaya 5.102
Tolikara 5.802
Mamberamo Tengah 5.119
Yalimo 5.305
Yahukimo 5.997
Pegunungan Bintang 6.300
INDONESIA 12.802
Keterangan Data :
Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai IPM metode baru silahkan klik link di bawah ini


https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY4IzI=/indeks-pemberdayaan-gender--idg-.html
Verify it's you
Chat
BADAN PUSAT STATISTIK
Beranda
Rencana Terbit
Produk
Layanan
Informasi Publik
Lingkungan
Statistik Regional dan Statistik Area Kecil
Statistik dan Indikator Multi-Domain
Buku Tahunan dan Ringkasan Sejenis
Kondisi Tempat Tinggal, Kemiskinan, dan Permasalahan Sosial Lintas Sektor
Gender dan Kelompok Populasi Khusus
Masyarakat Informasi
Globalisasi
Indikator Millenium Development Goals (MDGs)
Pembangunan Berkelanjutan
Kewirausahaan
2024
Cari data statistik
Freeze judul kolom
Provinsi / Kabupaten / Kota
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2024
SUMATERA BARAT 70,47
KEPULAUAN MENTAWAI 49,59
PESISIR SELATAN 55,72
SOLOK 60,23
SIJUNJUNG 57,58
TANAH DATAR 66,69
PADANG PARIAMAN 48,05
AGAM 63,83
LIMA PULUH KOTA 57,45
PASAMAN 68,72
SOLOK SELATAN 56,47
DHARMAS RAYA 56,22
PASAMAN BARAT 63,37
KOTA PADANG 63,38
KOTA SOLOK 65,38
KOTA SAWAH LUNTO 62,49
KOTA PADANG PANJANG 75,62
KOTA BUKITTINGGI 63,53
KOTA PAYAKUMBUH 68,75
KOTA PARIAMAN 60,14
Keterangan Data :
- Salah satu variabel pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- Tahun 2016 hanya level provinsi


https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY4IzI=/indeks-pemberdayaan-gender--idg-.html
Verify it's you
Chat
BADAN PUSAT STATISTIK
Beranda
Rencana Terbit
Produk
Layanan
Informasi Publik
Lingkungan
Statistik Regional dan Statistik Area Kecil
Statistik dan Indikator Multi-Domain
Buku Tahunan dan Ringkasan Sejenis
Kondisi Tempat Tinggal, Kemiskinan, dan Permasalahan Sosial Lintas Sector
Gender dan Kelompok Populasi Khusus
Masyarakat Informasi
Globalisasi
Indikator Millenium Development Goals (MDGs)
Pembangunan Berkelanjutan
Kewirausahaan
2024
Cari data statistik
Freeze judul kolom
Provinsi / Kabupaten / Kota
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2024
ASMAT 78,04
PAPUA TENGAH 82,00
MIMIKA 83,29
DOGIYAI 52,97
DEIYAI 22,91
NABIRE 70,76
PANIAI 23,59
INTAN JAYA 46,70
PUNCAK 52,65
PUNJAK JAYA 82,47
PAPUA PEGUNUNGAN 55,20
NDUGA 52,08
JAYAWIJAYA 64,74
LANNY JAYA 56,31
TOLIKARA 56,97
MAMBERAMO TENGAH 53,40
YALIMO 28,09
YAHUKIMO 33,99
PEGUNUNGAN BINTANG 52,67
INDONESIA 77,62
Keterangan Data :
- Salah satu variabel pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- Tahun 2016 hanya level provinsi


https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYzIzI=/indeks-pembangunan-gender--ipg-.html
Verify it's you
Chat
BADAN PUSAT STATISTIK
Beranda
Rencana Terbit
Produk
Layanan
Informasi Publik
Statistik Ekonomi
Statistik Lingkungan Hidup dan Multi-domain
Lingkungan
Statistik Regional dan Statistik Area Kecil
Statistik dan indikator Multi-Domain
Buku Tahunan dan Ringkasan Sejenis
Kondisi Tempat Tinggal, Kemiskinan, dan Permasalahan Sosial Lintas Sektor
Gender dan Kelompok Populasi Khusus
Masyarakat Informasi
Globalisasi
Indikator Millenium Development Goals (MDGs)
Perkembangan Berkelanjutan
Terakhir Diperbarui : 15 April 2025
← Kembali
Unduh
</> JSON
Bagikan
2024
Cari data statistik
Provinsi/Kabupaten/Kota
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2024
Kepulauan Mentawai 90,13
Pesisir Selatan 93,83
Solok 96,22
Sijunjung 94,39
Tanah Datar 97,48
Padang Pariaman 93,92
Agam 97,09
Lima Puluh Kota 94,80
Pasaman 92,91
Solok Selatan 95,53
Dharmasraya 89,71
Pasaman Barat 90,32
Kota Padang 94,04
Kota Solok 96,90
Kota Sawah Lunto 95,79
Kota Padang Panjang 98,23
Kota Bukittinggi 98,86
Kota Payakumbuh 98,99
Kota Pariaman 96,71
Keterangan Data :


https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYzIzI=/indeks-pembangunan-gender--ipg-.html
Verify it's you
Chat
BADAN PUSAT STATISTIK
Beranda
Rencana Terbit
Produk
Layanan
Informasi Publik
Statistik Regional dan Statistik Area Kecil
Statistik dan Indikator Multi-Domain
Buku Tahunan dan Ringkasan Sejenis
Kondisi Tempat Tinggal, Kemiskinan, dan Permasalahan Sosial Lintas Sektor
Gender dan Kelompok Populasi Khusus
Masyarakat Informasi
Globalisasi
Indikator Millenium Development Goals (MDGs)
Perkembangan Berkelanjutan
Kewirausahaan
Freeze judul kolom
Provinsi/Kabupaten/Kota
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2024
Paniai 70,36
Intan Jaya 73,67
Puncak 86,98
Puncak Jaya 69,64
PAPUA PEGUNUNGAN 87,25
Nduga 90,84
Jayawijaya 86,06
Lanny Jaya 94,41
Tolikara 63,77
Mamberamo Tengah 90,21
Yalimo 86,44
Yahukimo 76,67
Pegunungan Bintang 82,09
INDONESIA 91,85
Keterangan Data :

Tabel 12.9 **Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Pariaman Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen), 2021—2025**
Table ***Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product of Pariaman Municipality at Constant Market Prices by Industry (percent), 2021—2025***

	Lapangan Usaha / *Industry*	2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan *Agriculture, Forestry, and Fishing*	16,69	16,67	16,58	16,21	16.05
B	Pertambangan dan Penggalian *Mining and Quarrying*	1,75	1,70	1,69	1,69	1.66
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	7,62	7,50	7,39	7,33	7.49
D	Pengadaan Listrik dan Gas *Electricity and Gas*	0,06	0,06	0,06	0,05	0.05
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang *Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	0,04	0,04	0,04	0,03	0.03
F	Konstruksi/ *Construction*	14,69	14,35	14,45	14,39	13.85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor *Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	16,35	16,41	16,34	16,34	16.50
H	Transportasi dan Pergudangan *Transportation and Storage*	10,34	10,33	10,33	10,27	10.15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	1,85	2,04	2,08	2,12	2.15
J	Informasi dan Komunikasi *Information & Communication*	11,18	11,39	11,73	11,84	11.94

Bersambung / *To be Continued* .....

https://pariamankota.bps.go.id

Tabel 12.9 **Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Pariaman Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen), 2021—2025**
Table ***Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product of Pariaman Municipality at Constant Market Prices by Industry (percent), 2021—2025***

	Lapangan Usaha / *Industry*	2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan *Agriculture, Forestry, and Fishing*	16,69	16,67	16,58	16,21	16.05
B	Pertambangan dan Penggalian *Mining and Quarrying*	1,75	1,70	1,69	1,69	1.66
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	7,62	7,50	7,39	7,33	7.49
D	Pengadaan Listrik dan Gas *Electricity and Gas*	0,06	0,06	0,06	0,05	0.05
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang *Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	0,04	0,04	0,04	0,03	0.03
F	Konstruksi/ *Construction*	14,69	14,35	14,45	14,39	13.85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor *Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	16,35	16,41	16,34	16,34	16.50
H	Transportasi dan Pergudangan *Transportation and Storage*	10,34	10,33	10,33	10,27	10.15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	1,85	2,04	2,08	2,12	2.15
J	Informasi dan Komunikasi *Information & Communication*	11,18	11,39	11,73	11,84	11.94

Bersambung / *To be Continued* .....

https://pariamankota.bps.go.id

Tabel / *Table* 13.1.4 **Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2021–2025**
Growth Rate of Gross Regional Domestic Product of Sumatera Barat Province at 2010 Constant Market Prices by Industry (percent), 2021–2025

Lapangan Usaha/*Industry*	2021	2022	2023*	2024**	2025***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	2,18	3,52	3,54	2,05	4,14
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian/*Agriculture, Livestock, Hunting, and Agriculture Services*	2,80	2,66	2,86	1,81	4,70
a. Tanaman Pangan/*Food Crops*	-7,01	0,99	6,70	0,57	0,85
b. Tanaman Hortikultura/*Horticultural Crops*	7,02	4,99	-1,31	-0,25	4,12
c. Tanaman Perkebunan/*Plantation Crops*	8,75	1,50	2,21	3,84	7,38
d. Peternakan/*Livestock*	6,89	7,77	2,28	2,03	7,12
e. Jasa Pertanian dan Perburuan/*Agriculture Services and Hunting*	1,23	3,87	3,26	1,61	5,78
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu/*Forestry and Logging*	-13,54	0,78	7,66	4,19	0,96
3 Perikanan/*Fishing*	4,51	8,64	5,67	2,60	2,47
B Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	-1,77	1,94	4,65	3,97	0,95
1 Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi/*Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal*	–	–	–	–	–
2 Pertambangan Batubara dan Lignit/*Coal and Lignite Mining*	-46,05	-10,20	5,64	-19,15	-8,21
3 Pertambangan Bijih Logam/*Iron Ore Mining*	-6,15	21,67	1,55	2,02	-1,61
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya/*Other Mining and Quarrying*	2,70	2,58	4,61	5,05	1,29
C Industri Pengolahan/*Manufacturing*	3,72	1,75	3,08	2,60	5,38
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas/*Manufacture of Coal and Refined Petroleum Products*	-29,09	-9,84	-5,98	-12,10	-6,80
2 Industri Makanan dan Minuman/*Manufacture of Food Products and Beverages*	8,90	0,81	1,99	3,56	9,51

Bersambung/*To Be Continued...*

Share 0 Post

1840 DILIHAT 07 NOVEMBER 2025

Sektor Pertanian Sumbang 14,35 Persen PDB Nasional, Tetap Jadi Penggerak Utama Ekonomi Indonesia

Jakarta - Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kembali menegaskan perannya sebagai penopang utama perekonomian nasional, dengan kontribusi mencapai 14,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan III-2025. Angka ini meningkat dari 13,83 persen pada triwulan sebelumnya, menempatkan pertanian sebagai kontributor terbesar kedua setelah industri pengolahan, sekaligus menunjukkan ketahanan sektor ini di tengah tantangan ekonomi global. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 5 November 2025, nilai PDB sektor pertanian pada triwulan III-2025 mencapai Rp869,4 triliun (harga berlaku), naik dari Rp822,6 triliun pada triwulan II-2025. Secara riil, sektor pertanian tumbuh 3,32 persen (q-to-q) dan 4,93 persen (y-on-y), dengan pertumbuhan kumulatif 5,37 persen (c-to-c) dibandingkan periode yang sama tahun lalu Kinerja positif ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian mulai membuahkan hasil. Program modernisasi alat dan mesin pertanian, perbaikan irigasi, serta



Menanam Harapan Di Tompobulu: Sinergi Polri-Kementan Amankan Stok Jagung Nasional

07 Mar 2026 - By

Humas BRMP Serealia



Tonggak Sejarah: Indonesia Ekspor Perdana 2.280 Ton Beras Premium Ke Arab Saudi

04 Mar 2026 - By

Humas BRMP Serealia



JHANA 333, Solusi Jagung Hibrida Unggul Untuk Sistem Agroforestri

03 Mar 2026 - By

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jalan H. Bagindo Dahlan Abdulah, Desa Amplau Kec.Pariaman Utara
Telp.0751-93632 email: disparbudkotapariaman@gmail.com

Persentase Penghitungan Pertumbuhan Spending Of Money Pada Dinas Pariwisata Kota Pariaman

Terkait permintaan Data persentase penghitungan pertumbuhan Spending Of Money untuk tahun 2025, dengan menggunakan rumus :

% Pertumbuhan Spending Of Money : $\frac{\text{Jumlah pengeluaran 2025 - Jumlah Pengeluaran 2024}}{\text{Jumlah pengeluaran tahun 2024}} \times 100\%$

$$= \frac{297.990 - 297.255}{297.255} \times 100\%$$

$$= \frac{735}{297.255} \times 100\%$$

$$= 0{,}025$$

Asumsi Pengeluaran Wisatawan di Lokasi Wisata Tahun 2025 :

No.	Biaya Wisatawan	Rata Rata (Rp.)
1	Biaya Akomodasi	53.275
2	Biaya Transportasi	60.100
3	Biaya Kosumsi	96.800
4	Biaya Sovenir	47.560
5	Biaya Lain-lain	15.700
6	Biaya Permainan	24.555
Tota Biaya Wisatawan		**297.990**

Penghitungan Persentase Pertumbuhan Spending Of Money untuk tahun 2025 ini dibuat atas asumsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman

Pariaman, Maret 2026
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Pariaman

FERIALDI, S.PI.M.SI
NIP. 19690124 199903 1 001

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jln.H.Bgd.Dahlan Abdullah No.01 Ampalu,Kec.Pariaman Utara,Kota Pariaman
E-mail : disparbud@pariamankota.go.id

PERBANDINGAN TARGET RPJMD DAN HASIL AKHIR RPD
% PERTUMBUHAN SPENDING OF MONEY
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN

NO	Target	Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Kerja Akhir Periode
1	RPJMD	2,5 %	3,0 %	3,5 %	4,0 %	4,0 %

% Pertumbuhan Spending Of Money Tahun 2025 :

$$\frac{\text{Pertumbuhan 2025} - \text{Pertumbuhan 2024}}{\text{Pertumbuhan 2024}} \times 100\% = \frac{1.402.869 - 1.606.679}{1.606.679} \times 100\%$$

$$= -12,68\ \%$$

Analisa Capaian Spending Of Money :

1. Dalam RPJMD Kota Pariaman disebutkan bahwa target pertumbuhan spending of money pada tahun 2025 adalah 3,5 % , sedangkan % pertumbuhan spending of money Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman hanya -12,68 %
2. Kurangnya Capaian % Pertumbuhan Spending Of Money Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disebabkan karena Kunjungan yang berkurang akibat bencana alam, jalan Penghu bung yang rusak tidak bisa dilalui kendaraan sehingga menyebabkan wisatawan dari luar propinsi dan luar kota tidak mempunyai akses untuk berkunjung ke Kota Pariaman, selain itu berkurangnya kunjungan wisatawan juga disebabkan karena dermaga ke pulau angso duo yang merupakan daerah destinasi wisata unggulan mengalami kerusakan.
3. Capaian % Pertumbuhan Spending of money di RPJMD merupakan Pertumbuhan Spending of money untuk Kota Pariaman, sehingga seharusnya ada masukan atau perhitungan capalan Spending Of Money dari beberapa OPD terkait, seperti : UPT Parkir, Koperindag, BPKPD dan OPD lainnya yang mempengaruhi Spending Of Money Kota Pariaman.
4. % Pertumbuhan Spending Of Money yang dihitung di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya mencakup Pertumbuhan Spending Of Money di Kawasan / Daerah Destinasi wisata saja.

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA PARIAMAN

FERIALDI, S.Pi, M.Si
NIP. 19690124 199903 1 001

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jalan Syekh Burhanuddin No. 145 Kota Pariaman. Call Center 08116606609
Email : dpmptspnaker@pariamankota.go.id

RINCIAN INVESTASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)
TAHUN 2024 (TAHUN SEBELUMNYA)
KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kecamatan	Jenis Investasi	Kegiatan Investasi	Nilai Investasi (Rp.)	Ket
1	PT Hayati Pratama Mandiri	Jl Sudirman, jawi-jawi I, Pariaman Tengah	Pariaman Tengah	Perdagangan	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	Rp 23.834.000	
2	PT Abro Prima Makmur	Jl. Kayu Belanti Dusun Bungo, Koto Marapak	Pariaman Timur	Perindustrian	Industri Pengolahan Bahan Makanan	Rp 770.000.000	
3	PT Berkat Tamar	Jl. Basuki Rahmat, Karan Aur	Pariaman Tengah	Kesehatan	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	Rp 596.611.200	
4	PT Daya Indah Yasa	Ruko Diponegoro No. 46, Kel. Kampung Pondok, Pariaman Tengah	Pariaman Tengah	Perdagangan	Perdagangan Eceran berbagai macam barang	Rp 185.711.302	
5	PT Cipta Niaga Semesta	Jl. Imam Bonjol No. 97, Pariaman	Pariaman Selatan	Perdagangan	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	Rp -	
6	Perusahaan Perseroan	Stasiun Pariaman, Kota Pariaman	Pariaman Tengah	Pos, Telekomunika	Aktivitas Telekomunikasi	Rp -	

	(Persero) PT. Kereta Api Indonesia			si dan Penyiaran	Khusus Untuk Keperluan Sendiri		
7	CV Fazilla	GRIYA PERMATA BUNDA NOMOR 02 / Pariaman Selatan Kota Pariaman Sumatera Barat	Pariaman Selatan	Perdagangan	Perdagangan Besar	Rp 48.000.000	
8	PT Indogas Multi Perkasa	Jl. H. Agus Salim No 30, Kampung Baru, Pariaman Tengah	Pariaman Tengah	Perdagangan	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Rp 200.000.000	
9	Lanefa Karya Persada	Jl Imam Bonjol, Pertokoan Bumi Asri Kel Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.	Pariaman Tengah	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Rp 3.165.000.000	
10	Dayamitra Telekomunikasi	Jl. M.Yamin, Kota Pariaman	Pariaman Utara	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	Rp 550.488.634	
11	Lautan Sati	Jl. SM Abidin No 99, Pasir, Pariaman	Pariaman Tengah	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Konstruksi Gedung Lainnya	Rp 119.500.000	

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jalan Syekh Burhanuddin No. 145 Kota Pariaman. Call Center 08116606609
Email : dpmptspnaker@pariamankota.go.id

63	Menara Bumi Persada	Jl. SB Alamsyah No 9, Pariaman Tengah	Pariaman Tengah	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Konstruksi Gedung/Bangunan	Rp 15.000.000	
Jumlah						**Rp 50.546.724.286**	

RINCIAN INVESTASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)
TAHUN 2025 (TAHUN PELAPORAN)
KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kecamatan	Jenis Investasi	Kegiatan Investasi	Nilai Investasi (Rp.)	Ket
1	PT Hayati Pratama Mandiri	Jl Sudirman, jawi-jawi I, Pariaman Tengah	Pariaman Tengah	Perdagangan	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	Rp 73.689.000	
2	PT Abro Prima Makmur	Jl. Kayu Belanti Dusun Bungo	Pariaman Timur	Perindustrian	Industri Pengolahan Bahan Makanan	Rp 3.750.000.000	
3	PT Berkat	Jl. Basuki	Pariaman	Kesehatan	Aktivitas Rumah	Rp	

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jalan Syekh Burhanuddin No. 145 Kota Pariaman. Call Center 08116606609
Email : dpmptspnaker@pariamankota.go.id

	Tamar	Rahmat, Karan Aur	Tengah		Sakit Swasta	797.092.121	
4	PT Daya Indah Yasa	Ruko Diponegoro No. 46, Kel. Kampung Pondok, Pariaman Tengah	Pariaman Tengah	Perdagangan	Perdagangan Eceran berbagai macam barang	Rp 18.497.442	
5	PT Cipta Niaga Semesta	Jl. Imam Bonjol No. 97, Pariaman	Pariaman Selatan	Perdagangan	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	Rp 4.180.000	
6	Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia	Stasiun Pariaman, Kota Pariaman	Pariaman Tengah	Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	Rp 1.698.307	
7	CV Fazilla	Sikabu, Pariaman Selatan, Kota Pariaman	Pariaman Selatan	Perdagangan	Perdagangan Besar	Rp 184.000.000	
8	PT Indogas Multi Perkasa	Jl. H. Agus Salim No 30, Kampung Baru, Pariaman Tengah	Pariaman Tengah	Perdagangan	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Rp -	
9	Lanefa Karya	Jl Imam	Pariaman	Pekerjaan Umum	Real Estat Yang	Rp	

		Tengah					
66	PT. Bukit Menara Perkasa	Jl. Soekarno Hatta No. 187, Kampung Panas, Pariaman Timur	Pariaman Timur	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Rp 1.330.000.000	
67	Perorangan Dilla Amelia	Jl. Soekarno Hatta No 169, Toboh Palabah, Pariaman Selatan	Pariaman Selatan	Ekonomi Kreatif	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	Rp 11.000.000	
Jumlah						**Rp 53.845.763.404**	

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jalan Syekh Burhanuddin No. 145 Kota Pariaman. Call Center 08116606609
Email : dpmptspnaker@pariamankota.go.id

Pertumbuhan Nilai Investasi :

$$= \frac{\textit{Realisasi Investasi tahun 2025} - \textit{Realisasi Investasi tahun 2024}}{\textit{Realisasi Investasi tahun 2024}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{53.845.763.404 - 50.546.724.286}{50.546.724.286} \times 100$$

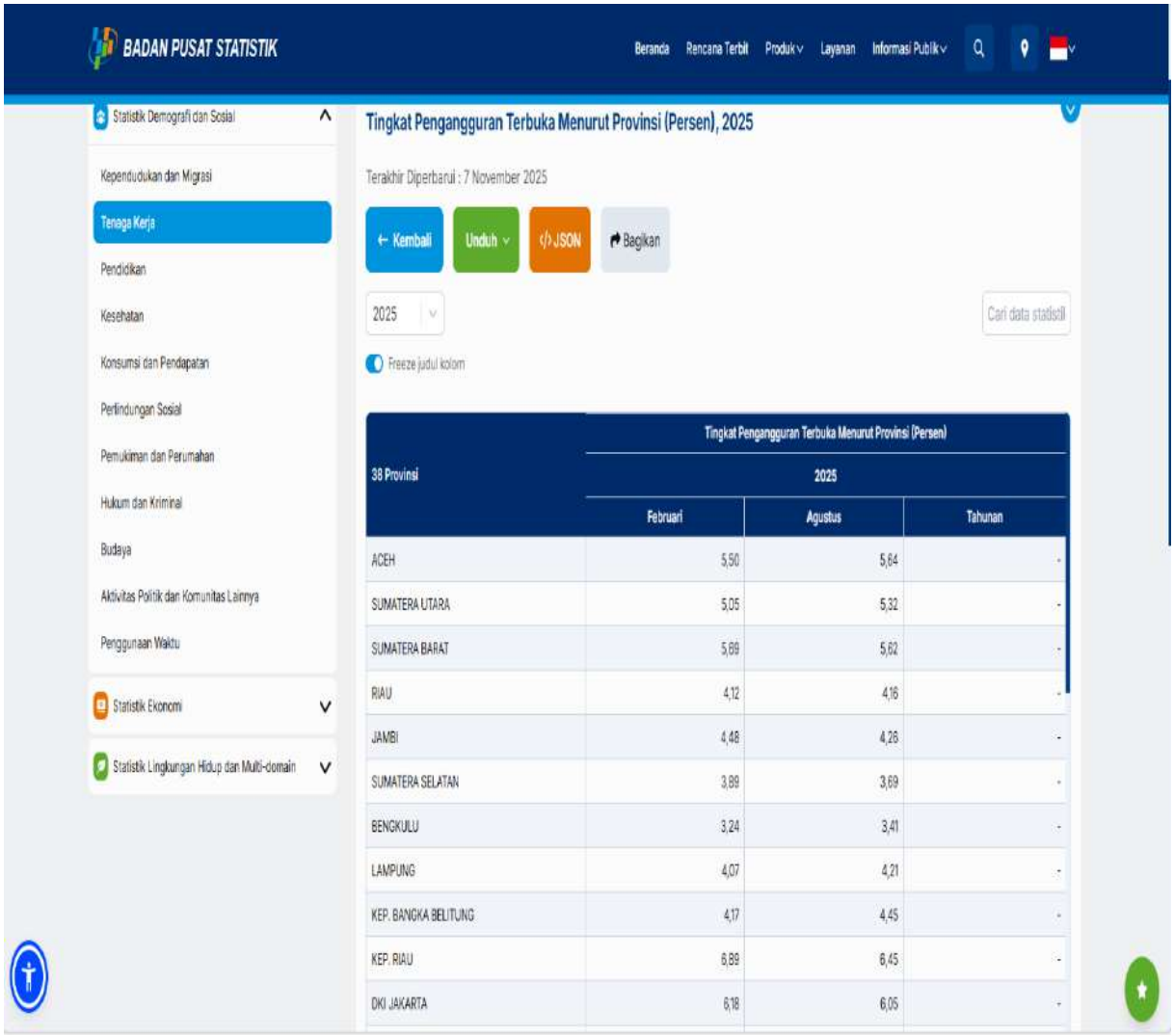
$$= 6.52\ \%$$

Pariaman, 12 Maret 2026

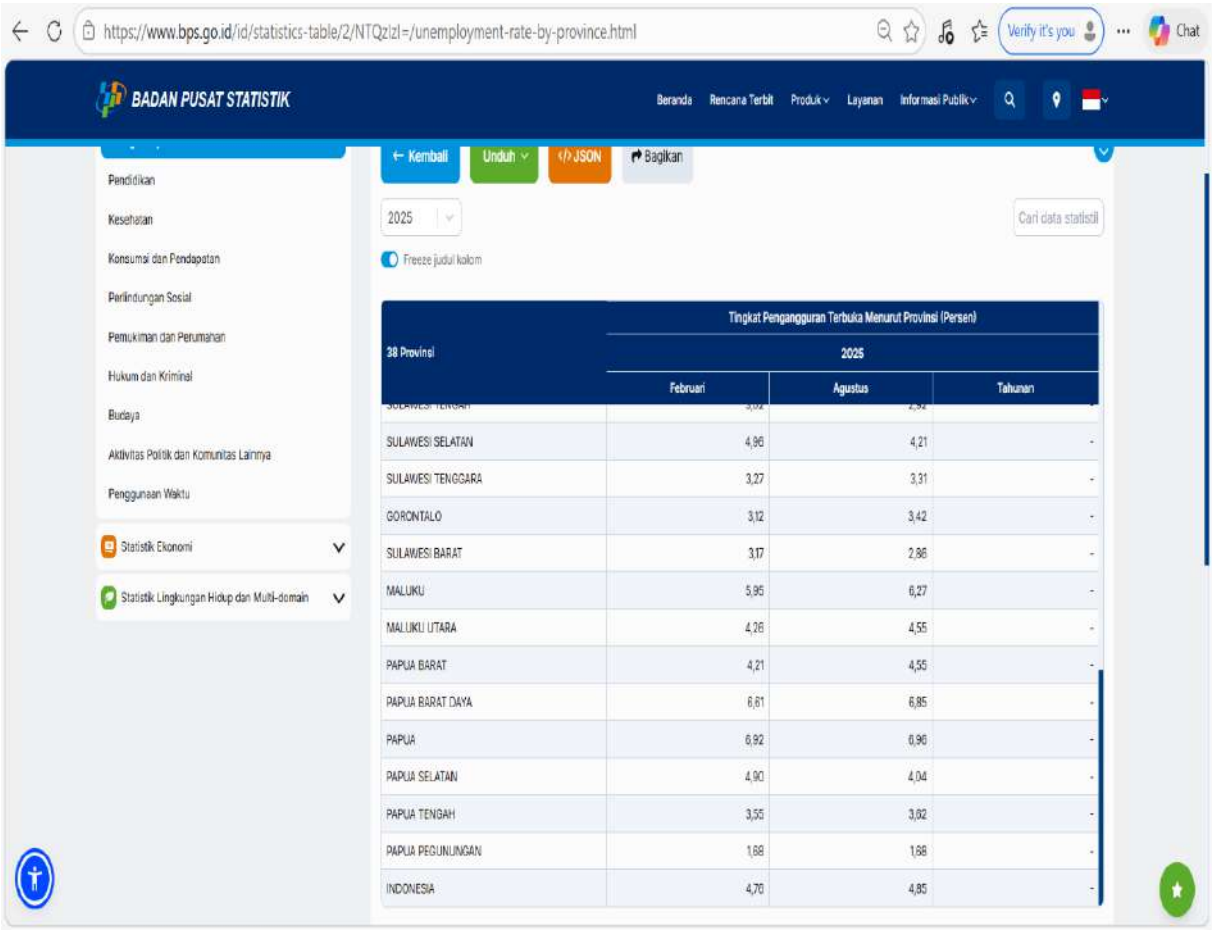
Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pariaman

Gusniyeti Zaunit, S.Kom, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196908181997032001

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Persen)
	2025
SUMATERA BARAT (Provinsi)	5,35
Kepulauan Mentawai	13,22
Pesisir Selatan	6,52
Kab.Solok	6,52
Sijunjung	5,15
Tanah Datar	3,59
Padang Pariaman	5,86
Agam	5,97
Lima Puluh Kota	6,10
Pasaman	6,02
Solok Selatan	6,00
Dharmasraya	4,61
Pasaman Barat	6,30
Padang	3,63
Kota Solok	2,91
Sawahlunto	2,72
Padang Panjang	4,97
Bukittinggi	3,78
Payakumbuh	4,95
Pariaman	3,83



38 Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)		
	2025		
	Februari	Agustus	Tahunan
ACEH	5,50	5,64	-
SUMATERA UTARA	5,05	5,32	-
SUMATERA BARAT	5,69	5,62	-
RIAU	4,12	4,16	-
JAMBI	4,48	4,26	-
SUMATERA SELATAN	3,89	3,69	-
BENGKULU	3,24	3,41	-
LAMPUNG	4,07	4,21	-
KEP. BANGKA BELITUNG	4,17	4,45	-
KEP. RIAU	6,89	6,45	-
DKI JAKARTA	6,18	6,05	-


https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI=/unemployment-rate-by-province.html
Verify it's you
Chat
BADAN PUSAT STATISTIK
Beranda
Rencana Terbit
Produk
Layanan
Informasi Publik
Pendidikan
Kesehatan
Konsumsi dan Pendapatan
Perlindungan Sosial
Pemukiman dan Perumahan
Hukum dan Kriminal
Budaya
Aktivitas Politik dan Komunitas Lainnya
Penggunaan Waktu
Statistik Ekonomi
Statistik Lingkungan Hidup dan Multi-domain
← Kembali
Unduh
JSON
Bagikan
2025
Cari data statistik
Freeze judul kolom
38 Provinsi
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)
2025
Februari
Agustus
Tahunan
SULAWESI SELATAN 4,96 4,21 -
SULAWESI TENGGARA 3,27 3,31 -
GORONTALO 3,12 3,42 -
SULAWESI BARAT 3,17 2,86 -
MALUKU 5,95 6,27 -
MALUKU UTARA 4,26 4,55 -
PAPUA BARAT 4,21 4,55 -
PAPUA BARAT DAYA 6,61 6,85 -
PAPUA 6,92 6,96 -
PAPUA SELATAN 4,90 4,04 -
PAPUA TENGAH 3,55 3,62 -
PAPUA PEGUNUNGAN 1,68 1,68 -
INDONESIA 4,70 4,85 -

Tabel 13.16 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (persen), 2021—2025
Table *Open Unemployment Rate by Regency/Municipality in Sumatera Barat Province (percent), 2021—2025*

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*		2021	2022	2023	2024	2025
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kabupaten/*Regency*					
01.	Kepulauan Mentawai	2,79	1,39	1,33	1,44	1,53
02.	Pesisir Selatan	5,97	4,61	4,75	5,06	5,10
03.	Solok	4,67	5,89	4,99	4,91	4,70
04.	Sijunjung	3,57	4,87	4,71	4,73	4,59
05.	Tanah Datar	4,63	5,91	5,35	5,30	5,26
06.	Padang Pariaman	8,41	6,60	6,69	6,59	6,48
07.	Agam	5,06	4,93	4,96	4,73	4,71
08.	Lima Puluh Kota	2,25	3,72	3,95	3,68	3,78
09.	Pasaman	4,92	5,38	5,09	5,25	5,29
10.	Solok Selatan	4,84	3,71	2,57	2,30	2,13
11.	Dharmasraya	5,00	6,23	6,22	6,02	5,51
12.	Pasaman Barat	5,02	6,33	6,01	6,34	5,95
	Kota/*Municipality*					
71.	Padang	13,37	11,69	10,86	9,88	9,70
72.	Solok	5,15	3,90	3,72	3,62	3.87
73.	Sawahlunto	6,38	5,00	4,98	5,55	4,64
74.	Padang Panjang	4,90	4,84	5,49	4,94	5,07
75.	Bukittinggi	6,09	4,90	4,99	4,72	4,41
76.	Payakumbuh	6,47	5,16	4,84	4,87	4,96
77.	Pariaman	6,09	5,19	5,68	5,32	5,16
Sumatera Barat		**6,52**	**6,28**	**5,94**	**5,75**	**5,62**

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2025
August Labor National Survey

https://pariaman.kota.bps.go.id

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jln. Nasri Nasar No. 1 Pariaman Telp/Fax 0751-91529

BERITA ACARA
PENETAPAN STATUS DESA

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Juli** Tahun **2025** bertempat di:

1. Kota : Pariaman
2. Provinsi : Sumatera Barat

Telah dilakukan Verifikasi dan Validasi di Tingkat Kota hasil dari pendataan Indeks Desa (ID) Tahun 2025 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan melibatkan Tim Verifikasi dan Validasi yang melibatkan :

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman;
3. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinnya.

Disahkan Oleh Tim Verifikasi dan Validasi

Kepala Bappeda Kota Pariaman	Kepala DPMD Kota Pariaman	Koordinator Tenaga Ahli Kota Pariaman
Adi Junaidi, AP	Yalvi Endri, SE.Akt, MM	Yosnofrizal, S.T.P
NIP. 19750622 199501 1 001	NIP. 19770302 200501 1 007	

REKAP PERBANDINGAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2024 DENGAN INDEKS DESA TAHUN 2025

KOTA PARIAMAN

NO	KOTA	KODE KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024	NILAI ID 2025	STATUS ID 2025	SELISIH SKOR ID 2025 DGN IDM 2024	JUMLAH DESA MAJU 2025	JUMLAH DESA MANDIRI 2025	TURUN SCORE 2025	NAIK SCORE 2025	KETERANGAN
1	KOTA PARIAMAN	137701	PARIAMAN TENGAH	1377012017	PAUH BARAT	0.8362	MANDIRI	0.8142	MANDIRI	-0.022		1	1		
2	KOTA PARIAMAN	137701	PARIAMAN TENGAH	1377012018	PAUH TIMUR	0.8156	MANDIRI	0.8016	MANDIRI	-0.014		1	1		
3	KOTA PARIAMAN	137701	PARIAMAN TENGAH	1377012019	RAWANG	0.8198	MANDIRI	0.8205	MANDIRI	0.0007		1		1	
4	KOTA PARIAMAN	137701	PARIAMAN TENGAH	1377012020	KAMPUNG BARU	0.8644	MANDIRI	0.8803	MANDIRI	0.0159		1		1	
5	KOTA PARIAMAN	137701	PARIAMAN TENGAH	1377012021	CIMPARUH	0.8717	MANDIRI	0.8835	MANDIRI	0.0118		1		1	
6	KOTA PARIAMAN	137701	PARIAMAN TENGAH	1377012025	JATI MUDIK	0.799	MAJU	0.7606	MAJU	-0.0384	1		1		
7	KOTA PARIAMAN	137702	PARIAMAN UTARA	1377022005	AMPALU	0.8187	MANDIRI	0.8157	MANDIRI	-0.003		1	1		
8	KOTA PARIAMAN	137702	PARIAMAN UTARA	1377022006	APAR	0.7717	MAJU	0.7638	MAJU	-0.0079	1		1		
9	KOTA PARIAMAN	137702	PARIAMAN UTARA	1377022007	TANJUNG SABAR	0.7663	MAJU	0.7795	MAJU	0.0132	1			1	
10	KOTA PARIAMAN	137702	PARIAMAN UTARA	1377022008	CUBADAK AIR SELATAN	0.817	MANDIRI	0.8016	MANDIRI	-0.0154		1	1		
11	KOTA PARIAMAN	137702	PARIAMAN UTARA	1377022009	SIKAPAK BARAT	0.8398	MANDIRI	0.8268	MANDIRI	-0.013		1	1		
12	KOTA PARIAMAN	137702	PARIAMAN UTARA	1377022010	SIKAPAK TIMUR	0.8544	MANDIRI	0.863	MANDIRI	0.0086		1		1	
13	KOTA PARIAMAN	137702	PARIAMAN UTARA	1377022011	MANGGUNG	0.8206	MANDIRI	0.8126	MANDIRI	-0.008		1	1		
14	KOTA PARIAMAN	137702	PARIAMAN UTARA	1377022012	CUBADAK AIR UTARA	0.8206	MANDIRI	0.8142	MANDIRI	-0.0064		1	1		
15	KOTA PARIAMAN	137702	PARIAMAN UTARA	1377022013	TUNGKAL SELATAN	0.8135	MAJU	0.7921	MAJU	-0.0214	1		1		
16	KOTA PARIAMAN	137702	PARIAMAN UTARA	1377022014	NARAS HILIR	0.7224	MAJU	0.7937	MAJU	0.0713	1			1	
17	KOTA PARIAMAN	137702	PARIAMAN UTARA	1377022015	NARAS 1	0.8637	MANDIRI	0.8362	MANDIRI	-0.0275		1	1		
18	KOTA PARIAMAN	137702	PARIAMAN UTARA	1377022016	BALAI NARAS	0.8748	MANDIRI	0.8504	MANDIRI	-0.0244		1	1		
19	KOTA PARIAMAN	137702	PARIAMAN UTARA	1377022017	PADANG BIRIK BIRIK	0.8356	MANDIRI	0.8205	MANDIRI	-0.0151		1	1		
20	KOTA PARIAMAN	137702	PARIAMAN UTARA	1377022018	SINTUK	0.7778	MAJU	0.7701	MAJU	-0.0077	1		1		
21	KOTA PARIAMAN	137702	PARIAMAN UTARA	1377022019	SUNGAI RAMBAI	0.7737	MAJU	0.7748	MAJU	0.0011	1			1	
22	KOTA PARIAMAN	137702	PARIAMAN UTARA	1377022020	TUNGKAL UTARA	0.8038	MAJU	0.7575	MAJU	-0.0463	1		1		
23	KOTA PARIAMAN	137702	PARIAMAN UTARA	1377022021	CUBADAK AIR	0.8244	MANDIRI	0.8299	MANDIRI	0.0055		1		1	
24	KOTA PARIAMAN	137703	PARIAMAN SELATAN	1377032006	PASIR SUNUR	0.7648	MAJU	0.7953	MAJU	0.0305	1			1	
25	KOTA PARIAMAN	137703	PARIAMAN SELATAN	1377032007	BALAI KURAI TAJI	0.8743	MANDIRI	0.8441	MANDIRI	-0.0302		1	1		
26	KOTA PARIAMAN	137703	PARIAMAN SELATAN	1377032008	PAUH KURAI TAJI	0.8248	MANDIRI	0.8346	MANDIRI	0.0098		1		1	
27	KOTA PARIAMAN	137703	PARIAMAN SELATAN	1377032009	SIMPANG	0.7543	MAJU	0.7622	MAJU	0.0079	1			1	
28	KOTA PARIAMAN	137703	PARIAMAN SELATAN	1377032010	TOBOH PALABAH	0.8843	MANDIRI	0.8752	MANDIRI	-0.0091		1	1		
29	KOTA PARIAMAN	137703	PARIAMAN SELATAN	1377032011	MARABAU	0.7521	MAJU	0.7559	MAJU	0.0038	1			1	
30	KOTA PARIAMAN	137703	PARIAMAN SELATAN	1377032012	BATANG TAJONGKEK	0.7537	MAJU	0.7559	MAJU	0.0022	1			1	
31	KOTA PARIAMAN	137703	PARIAMAN SELATAN	1377032013	SIKABU	0.7651	MAJU	0.7827	MAJU	0.0176	1			1	
32	KOTA PARIAMAN	137703	PARIAMAN SELATAN	1377032014	SUNGAI KASAI	0.7898	MAJU	0.7953	MAJU	0.0055	1			1	
33	KOTA PARIAMAN	137703	PARIAMAN SELATAN	1377032015	PALAK ANEH	0.7517	MAJU	0.7716	MAJU	0.0199	1			1	
34	KOTA PARIAMAN	137703	PARIAMAN SELATAN	1377032016	KAMPUNG APAR	0.7854	MAJU	0.7494	MAJU	-0.036	1		1		
35	KOTA PARIAMAN	137703	PARIAMAN SELATAN	1377032017	MARUNGGI	0.8175	MANDIRI	0.8457	MANDIRI	0.0282		1		1	

36	KOTA PARIAMAN	137703	PARIAMAN SELATAN	1377032018	TALUK	0.8622	MANDIRI	0.8677	MANDIRI	0.0055		1		1	
37	KOTA PARIAMAN	137703	PARIAMAN SELATAN	1377032019	PADANG CAKUR	0.7721	MAJU	0.778	MAJU	0.0059	1			1	
38	KOTA PARIAMAN	137703	PARIAMAN SELATAN	1377032020	PUNGGUNG LADING	0.7746	MAJU	0.8094	MANDIRI	0.0348		1		1	
39	KOTA PARIAMAN	137703	PARIAMAN SELATAN	1377032021	RAMBAI	0.7835	MAJU	0.7669	MAJU	-0.0166	1		1		
40	KOTA PARIAMAN	137704	PARIAMAN TIMUR	1377042001	TALAGO SARIK	0.8025	MAJU	0.7921	MAJU	-0.0104	1		1		
41	KOTA PARIAMAN	137704	PARIAMAN TIMUR	1377042002	PAKASAI	0.8248	MANDIRI	0.8236	MANDIRI	-0.0012		1	1		
42	KOTA PARIAMAN	137704	PARIAMAN TIMUR	1377042003	KAMPUNG BARU PADUSUNAN	0.769	MAJU	0.7905	MAJU	0.0215	1			1	
43	KOTA PARIAMAN	137704	PARIAMAN TIMUR	1377042004	KAMPUNG GADANG	0.8397	MANDIRI	0.8047	MANDIRI	-0.035		1	1		
44	KOTA PARIAMAN	137704	PARIAMAN TIMUR	1377042005	KOTO MARAPAK	0.8319	MANDIRI	0.8205	MANDIRI	-0.0114		1	1		
45	KOTA PARIAMAN	137704	PARIAMAN TIMUR	1377042006	BATANG KABUNG	0.7965	MAJU	0.7496	MAJU	-0.0469	1		1		
46	KOTA PARIAMAN	137704	PARIAMAN TIMUR	1377042007	BATO	0.7614	MAJU	0.7354	MAJU	-0.026	1		1		
47	KOTA PARIAMAN	137704	PARIAMAN TIMUR	1377042008	AIR SANTOK	0.8159	MANDIRI	0.8614	MANDIRI	0.0455		1		1	
48	KOTA PARIAMAN	137704	PARIAMAN TIMUR	1377042009	CUBADAK MENTAWAI	0.8095	MAJU	0.7937	MAJU	-0.0158	1		1		
49	KOTA PARIAMAN	137704	PARIAMAN TIMUR	1377042010	SUNGAI SIRAH	0.7702	MAJU	0.748	MAJU	-0.0222	1		1		
50	KOTA PARIAMAN	137704	PARIAMAN TIMUR	1377042011	SUNGAI PASAK	0.7576	MAJU	0.7528	MAJU	-0.0048	1		1		
51	KOTA PARIAMAN	137704	PARIAMAN TIMUR	1377042012	BUNGO TANJUNG	0.8232	MANDIRI	0.8409	MANDIRI	0.0177		1		1	
52	KOTA PARIAMAN	137704	PARIAMAN TIMUR	1377042013	KAMPUNG TANGAH	0.7859	MAJU	0.7937	MAJU	0.0078	1			1	
53	KOTA PARIAMAN	137704	PARIAMAN TIMUR	1377042014	KAMPUNG KANDANG	0.7944	MAJU	0.7417	MAJU	-0.0527	1		1		
54	KOTA PARIAMAN	137704	PARIAMAN TIMUR	1377042015	KALUAT	0.8022	MAJU	0.7921	MAJU	-0.0101	1		1		
55	KOTA PARIAMAN	137704	PARIAMAN TIMUR	1377042016	KAJAI	0.7833	MAJU	0.7228	MAJU	-0.0605	1		1		
						0.8052		**0.8003**		**0.0049**	**29**	**26**	**31**	**24**	

UNTUK HASIL PENDATAAN INDEKS DESA 2025

	JUMLAH DESA MAJU	29	DESA
	JUMLAH DESA MANDIRI	26	DESA
	MAJU MENJADI MANDIRI	1	DESA
	SKOR ID 2025 TURUN DIBANDING IDM 2024	31	DESA
	SKOR ID 2025 NAIK DIBANDING IDM 2024	24	DESA

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : B/312/AA.05/2025 29 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025**

Yth.
Sekretaris Daerah Kota Pariaman
di
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2025 pada Pemerintah Kota Pariaman, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Pariaman. Pelaksanaan evaluasi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government**). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 251228WTKE
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pariaman menunjukkan bahwa nilai sebesar **61,56** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Secara lengkap rincian hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kota Pariaman dapat diakses melalui portal https://portalrb.menpan.go.id/ dengan menggunakan akun Instansi masing-masing.

Demikian disampaikan laporan hasil evaluasi AKIP sebagai gambaran perkembangan penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Kami juga mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS UJI HANTARA
Plh. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196708051992031001

Tembusan
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Wali Kota Pariaman.

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 251228WTKE
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

panrb

SUMMARY HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2025

Predikat SAKIP 2025	Instansi Pemerintah		
	KL	Prov	Kab/Kota
AA	0	1	2
A	12	5	14
BB	52	13	80
B	30	16	353
CC	0	0	36
C	0	2	22
D	0	1	0
Tidak Dievaluasi	1	0	1
Total	95	38	508
Predikat B ke atas	94	35	449
Persentase predikat SAKIP 'B' ke atas	98,95%	92,11%	88,39%

Perubahan Predikat dari 2024 ke 2025	Jumlah
Naik ke A	2
Naik ke BB	11
Naik ke B	17
Naik ke CC	1
Total IP naik predikat	**31**
Turun ke BB	1
Turun ke B	2
Total IP turun predikat	**3**

Jenis Instansi	Rata-rata Nilai SAKIP	
	2024	2025
Kementerian/Lembaga	72,83	73,61
Provinsi	70,76	69,05
Kabupaten/Kota	63,98	64,89
Nasional	65,55	66,42

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 22 Mei 2025

Nomor : 80/S-HP/XVIII.PDG/05/2025
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024

Kepada Yth.
Wali Kota Pariaman
di
Pariaman

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**

   Wajar Tanpa Pengecualian

2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

   BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

   a. Terdapat pembayaran tambahan penghasilan pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran TPP Pelaksana tugas (Plt.) sebesar Rp70.543.891,00;
   b. Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak pada delapan SKPD tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang senyatanya mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp274.015.642,00;
   c. Terdapat pembayaran belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan dan tidak sesuai kondisi senyatanya yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp598.002.270,00; dan
   d. Penganggaran Pendapatan Asli Daerah tidak terukur secara rasional dan manajemen Kas Daerah tidak tertib yang mengakibatkan risiko terjadinya kekurangan kas dan tidak terlaksananya kegiatan dan prioritas program sesuai ketentuan penggunaan dana *earmark* pada TA 2025.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Kota Pariaman antara lain agar memerintahkan:

a. Lebih cermat dalam memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian;
b. Memproses kelebihan pembayaran Belanja BBM sebesar Rp127.397.020,00 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke RKUD;
c. Memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp364.776.526,00 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke RKUD; dan
d. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk berkoordinasi dengan DPRD, diantaranya supaya menyusun anggaran pendapatan berdasarkan estimasi penerimaan kas yang terukur secara rasional dan anggaran belanja sesuai kemampuan keuangan daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 39.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 dan Nomor 39.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 masing-masing bertanggal 22 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Pariaman, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPK Perwakilan,

Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFrA.

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN



Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, seluruh rangkaian agenda Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan pemantauan ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dalam mendukung target Program Prioritas Pemerintah Digital pada Peraturan Presiden 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan tujuan utama mengukur kemajuan serta meningkatkan kualitas penerapan layanan digital pemerintah baik di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil pemantauan tahun 2025 ini menjadi gambaran nyata atas progres transformasi digital instansi, sekaligus menjadi panduan strategis dalam menyelaraskan penerapan pemerintah digital dengan kebijakan nasional. Semangat keterpaduan ini diharapkan mampu mewujudkan layanan digital yang berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna, sehingga memberikan manfaat konkret bagi pelaksanaan tugas pemerintahan maupun bagi masyarakat luas.

Ke depan, sejalan dengan arah kebijakan nasional yang semakin dinamis, cakupan pemantauan ini akan bertransformasi dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi). Perubahan ini menandakan pergeseran fokus dari sekadar digitalisasi proses bisnis menuju ekosistem digital yang lebih holistik dan berorientasi pada pengguna. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penyesuaian target indeks serta memperkuat komitmen kepemimpinan dalam menyongsong Indonesia Emas, demi percepatan transformasi digital yang berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, Tim Koordinasi SPBE Nasional, serta Tim Asesor Eksternal dari Perguruan Tinggi atas sinergi dan dedikasinya. Semoga kolaborasi yang telah terjalin baik ini terus meningkat demi kemajuan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia.

Jakarta, 6 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah

panrb

CAHYONO TRI BIROWO
NIP. 197907072002121003

PEMANTUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan SPBE. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024

Hasil pelaksanaan pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pemantauan SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Pemantauan SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri dan Penilaian Dokumen.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE





PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025

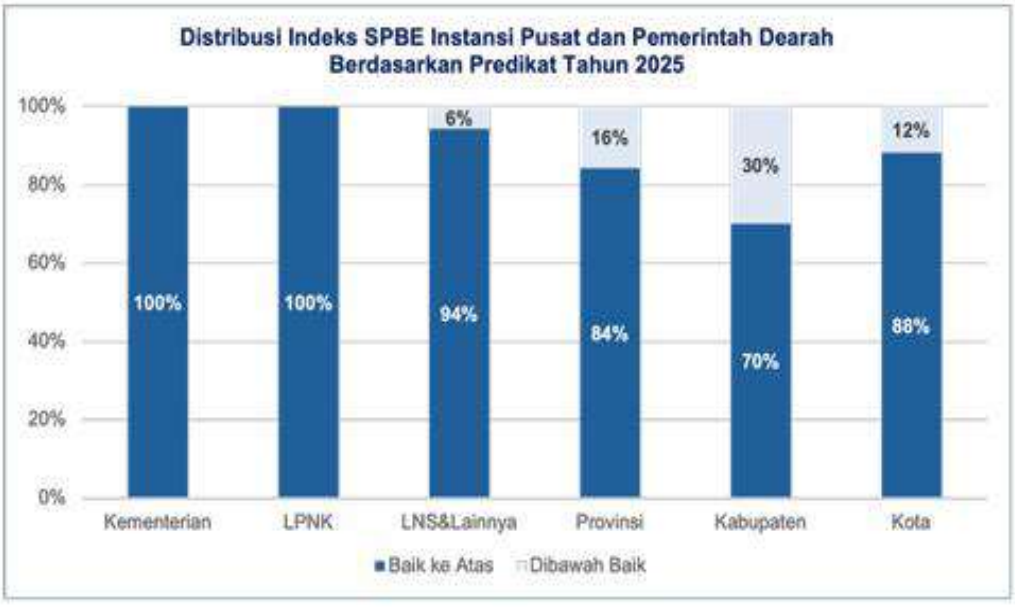
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	**13%**
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	**25%**
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	**16,5%**
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	**45,5%**
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik	18%

Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

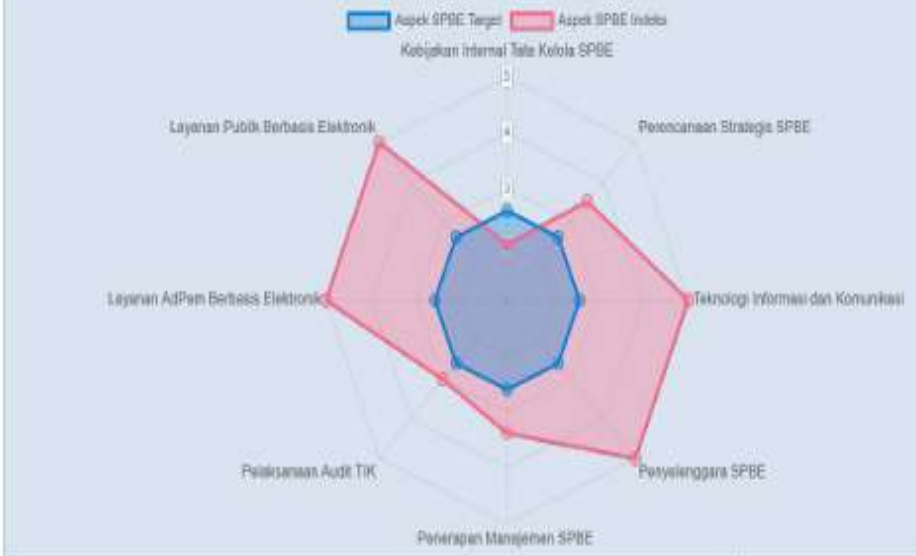
Indeks	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3.23	4.09	3.95	3.34	3.55	2.99	3.52
Kebijakan Tata Kelola	3.48	4.37	4.24	3.54	3.82	3.24	3.73
Kebijakan Tata Kelola	3.48	4.37	4.24	3.54	3.82	3.24	3.73
Tata Kelola	2.76	3.96	3.83	3.08	3.24	2.39	3.13
Perencanaan	2.56	3.84	3.88	2.96	3.11	2.20	2.83
TIK	2.87	4.02	3.85	3.10	3.33	2.51	3.30
Penyelenggara	2.92	4.07	3.70	3.31	3.36	2.55	3.41
Manajemen	2.00	2.91	2.85	2.28	2.38	1.73	2.24
Manajemen	2.06	2.99	2.91	2.37	2.43	1.78	2.32
Audit	1.84	2.70	2.68	2.05	2.22	1.60	2.04
Layanan SPBE	3.87	4.50	4.34	3.81	4.07	3.70	4.13
Layanan Adm. Pemerintahan	3.85	4.42	4.29	3.87	4.02	3.70	4.07
Layanan Publik	3.90	4.63	4.43	3.71	4.16	3.69	4.23



INDEKS SPBE – PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

4,18
(Sangat Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2025
SPBE	**4,18**
Domain Kebijakan SPBE	2,00
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*2,00*
Domain Tata Kelola SPBE	4,40
Perencanaan Strategis SPBE	*3,50*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*5,00*
Penyelenggara SPBE	*5,00*
Domain Manajemen SPBE	3,27
Penerapan Manajemen SPBE	*3,38*
Audit TIK	*3,00*
Domain Layanan SPBE	5,00
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*5,00*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*5,00*

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2025
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	2
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	5
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	5
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5

18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	5
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	4
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	4
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	3
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	3
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	4
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	5
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	5
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	5
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5

38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	5
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	5
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL XII
Jalan Hangtuah Ujung Nomor 148 Sialang Sakti, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau 28285
Telepon (0761) 7870006; Faksimile (0761) 46104
Laman: https://pekanbaru.bkn.go.id; Pos-el: kanreg12.pekanbaru@bkn.go.id

Nomor : 120/B-BM/SD/KR.XII/2026 Pekanbaru, 09 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024
Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Yth. Kepala BKD/BKPSDM/BKPP
(Daftar Instansi Terlampir)
di
Pekanbaru

Menindaklanjuti surat Plh. Sekretaris Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Nomor 1253/B-BM.02.01/SD/C.VII/2026 tanggal 06 Maret 2026 perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, bersama ini kami sampaikan laporan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 per tanggal 18 Desember 2025 di Instansi Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Regional XII BKN,

Ditandatangani Secara Elektronik
Purjiyanta

Tembusan :
1. Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN;
2. Direktur Pengembangan Talenta dan Karier ASN.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Lampiran I Surat Kepala Kantor Regional XII BKN
Nomor : 120/B-BM/SD/KR.XII/2026
Tanggal : 9 Maret 2026

DAFTAR INSTANSI

No	Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2	Pemerintah Provinsi Riau
3	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
4	Pemerintah Kab. Siak
5	Pemerintah Kab. Kampar
6	Pemerintah Kota Pekanbaru
7	Pemerintah Kab. Bengkalis
8	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
9	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
10	Pemerintah Kab. Rokan Hilir
11	Pemerintah Kab. Rokan Hulu
12	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
13	Pemerintah Kab. Pelalawan
14	Pemerintah Kota Dumai
15	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
16	Pemerintah Kota Batam
17	Pemerintah Kota Tanjungpinang
18	Pemerintah Kab. Natuna
19	Pemerintah Kab. Lingga
20	Pemerintah Kab. Bintan
21	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
22	Pemerintah Kab. Karimun
23	Pemerintah Kota Padang
24	Pemerintah Kab. Tanah Datar
25	Pemerintah Kab. Solok
26	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
27	Pemerintah Kab. Agam
28	Pemerintah Kab. Sijunjung
29	Pemerintah Kab. Solok Selatan
30	Pemerintah Kota Bukittinggi
31	Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota
32	Pemerintah Kab. Padang Pariaman
33	Pemerintah Kota Padang Panjang
34	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
35	Pemerintah Kota Pariaman
36	Pemerintah Kab. Dharmasraya
37	Pemerintah Kab. Pasaman
38	Pemerintah Kab. Pasaman Barat
39	Pemerintah Kota Solok
40	Pemerintah Kota Payakumbuh
41	Pemerintah Kota Sawahlunto

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Lampiran II Surat Kepala Kantor Regional XII BKN
Nomor : 120/B-BM/SD/KR.XII/2026
Tanggal : 9 Maret 2026

HASIL PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN TAHUN 2024

Nilai Rata-Rata Per Dimensi di Instansi Daerah Wilayah Kerja
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

JENIS PEGAWAI	JUMLAH PNS YANG DIUKUR	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI INDEKS	KATEGORI
PNS	175.798	21,26	29,33	25,26	5,00	80,84	sedang
PPPK	46.267	20,00	30,00	25,48	5,00	80,48	sedang
ASN	222.065	21,02	29,45	25,30	5,00	80,77	sedang

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Instansi Daerah
di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

NAMA INSTANSI	JENIS PEGAWAI	JUMLAH PNS YANG DIUKUR	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI	KATEGORI
Pemerintah Kota Batam	PNS	5.281	21,74	33,63	25,22	5,00	85,59	tinggi
	PPPK	3.174	20,00	35,26	25,27	5,00	85,54	tinggi
	ASN	8.455	21,09	34,24	25,24	5,00	85,57	tinggi
Pemerintah Kota Pariaman	PNS	2.278	21,88	33,65	25,02	5,00	85,54	tinggi
	PPPK	84	20,00	30,98	25,71	5,00	81,69	tinggi
	ASN	2.362	21,81	33,56	25,04	5,00	85,40	tinggi
Pemerintah Kab. Sijunjung	PNS	2.993	20,97	34,63	25,98	5,00	86,57	tinggi
	PPPK	1.127	20,00	29,62	25,61	5,00	80,23	sedang
	ASN	4.120	20,70	33,26	25,88	5,00	84,84	tinggi
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	PNS	14.548	21,56	32,27	26,28	5,00	85,10	tinggi
	PPPK	3.204	20,00	32,03	26,01	5,00	83,04	tinggi
	ASN	17.752	21,28	32,23	26,23	5,00	84,73	tinggi
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	PNS	4.697	21,90	31,80	25,72	4,99	84,42	tinggi
	PPPK	1.454	20,00	32,09	26,24	5,00	83,33	tinggi
	ASN	6.151	21,45	31,87	25,84	4,99	84,16	tinggi
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	PNS	4.506	21,14	30,54	26,81	5,00	83,49	tinggi
	PPPK	607	20,00	32,41	27,47	5,00	84,88	tinggi
	ASN	5.113	21,00	30,76	26,89	5,00	83,66	tinggi

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

NAMA INSTANSI	JENIS PEGAWAI	JUMLAH PNS YANG DIUKUR	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI	KATEGORI
Pemerintah Kab. Tanah Datar	PNS	3.825	20,92	32,47	25,61	5,00	83,99	tinggi
	PPPK	960	20,00	31,39	25,64	5,00	82,03	tinggi
	ASN	4.785	20,74	32,25	25,62	5,00	83,60	tinggi
Pemerintah Kota Dumai	PNS	3.584	21,50	30,54	26,39	5,00	83,42	tinggi
	PPPK	691	20,00	32,19	26,20	5,00	83,39	tinggi
	ASN	4.275	21,26	30,81	26,36	5,00	83,42	tinggi
Pemerintah Kab. Dharmasraya	PNS	2.861	20,93	31,43	25,53	5,00	82,89	tinggi
	PPPK	1.095	20,00	32,60	25,26	5,00	82,87	tinggi
	ASN	3.956	20,67	31,75	25,46	5,00	82,88	tinggi
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	PNS	4.911	20,76	30,74	25,90	5,00	82,41	tinggi
	PPPK	1.695	20,00	32,49	26,24	5,00	83,73	tinggi
	ASN	6.606	20,56	31,19	25,99	5,00	82,75	tinggi
Pemerintah Kota Padang	PNS	6.553	21,31	30,17	25,86	5,00	82,34	tinggi
	PPPK	532	20,00	34,29	26,54	5,00	85,84	tinggi
	ASN	7.085	21,21	30,48	25,91	5,00	82,60	tinggi
Pemerintah Kab. Pasaman	PNS	3.248	20,88	30,20	26,05	5,00	82,14	tinggi
	PPPK	957	20,00	31,22	25,83	5,00	82,05	tinggi
	ASN	4.205	20,68	30,43	26,00	5,00	82,12	tinggi
Pemerintah Provinsi Riau	PNS	12.904	22,06	29,66	25,45	5,00	82,18	tinggi
	PPPK	6.305	20,00	30,71	26,02	5,00	81,73	tinggi
	ASN	19.209	21,38	30,00	25,64	5,00	82,03	tinggi

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

NAMA INSTANSI	JENIS PEGAWAI	JUMLAH PNS YANG DIUKUR	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI	KATEGORI
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	PNS	6.097	20,71	30,14	25,07	5,00	80,92	sedang
	PPPK	659	20,00	31,55	26,15	5,00	82,70	tinggi
	ASN	6.756	20,64	30,28	25,18	5,00	81,09	tinggi
Pemerintah Kota Solok	PNS	1.803	22,28	28,48	25,10	5,00	80,86	sedang
	PPPK	122	20,00	31,12	25,04	5,00	81,16	tinggi
	ASN	1.925	22,14	28,65	25,10	5,00	80,88	sedang
Pemerintah Kab. Solok Selatan	PNS	3.038	21,21	29,21	25,39	5,00	80,81	sedang
	PPPK	237	20,00	31,37	25,21	5,00	81,58	tinggi
	ASN	3.275	21,12	29,37	25,38	5,00	80,87	sedang
Pemerintah Kota Padang Panjang	PNS	1.694	21,84	29,40	25,20	4,99	81,43	tinggi
	PPPK	207	20,00	24,22	25,07	5,00	74,30	sedang
	ASN	1.901	21,64	28,84	25,19	4,99	80,65	sedang
Pemerintah Kota Bukittinggi	PNS	2.182	21,77	28,82	25,54	5,00	81,13	tinggi
	PPPK	331	20,00	26,37	25,91	5,00	77,28	sedang
	ASN	2.513	21,54	28,50	25,59	5,00	80,62	sedang
Pemerintah Kota Payakumbuh	PNS	2.401	21,69	28,47	25,70	4,99	80,86	sedang
	PPPK	455	20,00	28,23	26,11	5,00	79,34	sedang
	ASN	2.856	21,42	28,43	25,77	4,99	80,62	sedang
Pemerintah Kab. Solok	PNS	4.037	20,76	29,24	25,54	5,00	80,54	sedang
	PPPK	566	20,00	30,41	25,11	5,00	80,52	sedang
	ASN	4.603	20,67	29,38	25,49	5,00	80,54	sedang

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

NAMA INSTANSI	JENIS PEGAWAI	JUMLAH PNS YANG DIUKUR	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI	KATEGORI
Pemerintah Kab. Bengkalis	PNS	5.669	21,35	28,03	25,63	5,00	80,01	sedang
	PPPK	2.387	20,00	30,78	25,93	5,00	81,72	tinggi
	ASN	8.056	20,95	28,84	25,72	5,00	80,52	sedang
Pemerintah Kab. Pelalawan	PNS	4.062	21,03	28,87	25,01	5,00	79,92	sedang
	PPPK	1.088	20,00	31,16	26,09	5,00	82,25	tinggi
	ASN	5.150	20,81	29,35	25,24	5,00	80,41	sedang
Pemerintah Kota Pekanbaru	PNS	5.705	21,60	28,62	24,92	5,00	80,14	sedang
	PPPK	749	20,00	30,01	26,00	5,00	81,01	tinggi
	ASN	6.454	21,41	28,78	25,05	5,00	80,24	sedang
Pemerintah Kab. Natuna	PNS	2.713	21,13	29,51	24,91	5,00	80,55	sedang
	PPPK	693	20,00	28,83	25,04	5,00	78,87	sedang
	ASN	3.406	20,90	29,37	24,94	5,00	80,21	sedang
Pemerintah Kota Tanjungpinang	PNS	2.749	21,75	28,66	25,17	5,00	80,57	sedang
	PPPK	594	20,00	28,28	25,19	5,00	78,47	sedang
	ASN	3.343	21,44	28,59	25,17	5,00	80,20	sedang
Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	PNS	4.231	20,69	28,32	25,60	5,00	79,61	sedang
	PPPK	722	20,00	30,85	25,88	5,00	81,73	tinggi
	ASN	4.953	20,59	28,69	25,64	5,00	79,92	sedang
Pemerintah Kab. Siak	PNS	4.990	21,16	28,24	25,67	5,00	80,07	sedang
	PPPK	2.193	20,00	28,58	25,75	5,00	79,33	sedang
	ASN	7.183	20,81	28,34	25,69	5,00	79,84	sedang
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	PNS	1.655	21,56	28,42	25,34	5,00	80,31	sedang
	PPPK	518	20,00	27,21	25,71	5,00	77,92	sedang
	ASN	2.173	21,19	28,13	25,43	5,00	79,74	sedang

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

NAMA INSTANSI	JENIS PEGAWAI	JUMLAH PNS YANG DIUKUR	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI	KATEGORI
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	PNS	1.655	21,56	28,42	25,34	5,00	80,31	sedang
	PPPK	518	20,00	27,21	25,71	5,00	77,92	sedang
	ASN	2.173	21,19	28,13	25,43	5,00	79,74	sedang
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	PNS	2.475	21,21	28,40	25,53	5,00	80,14	sedang
	PPPK	853	20,00	27,34	25,43	5,00	77,77	sedang
	ASN	3.328	20,90	28,13	25,50	5,00	79,53	sedang
Pemerintah Kab. Agam	PNS	4.656	20,80	28,42	25,19	5,00	79,41	sedang
	PPPK	1.241	20,00	29,01	25,69	5,00	79,70	sedang
	ASN	5.897	20,63	28,54	25,30	5,00	79,47	sedang
Pemerintah Kab. Kampar	PNS	6.159	20,76	28,51	24,89	5,00	79,15	sedang
	PPPK	277	20,00	30,29	25,14	5,00	80,43	sedang
	ASN	6.436	20,73	28,59	24,90	5,00	79,21	sedang
Pemerintah Kab. Lingga	PNS	2.567	20,94	28,13	24,85	5,00	78,92	sedang
	PPPK	255	20,00	30,39	25,39	5,00	80,79	sedang
	ASN	2.822	20,86	28,33	24,90	5,00	79,09	sedang
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	PNS	4.068	21,12	27,92	24,69	5,00	78,73	sedang
	PPPK	1.522	20,00	29,87	24,97	5,00	79,84	sedang
	ASN	5.590	20,82	28,45	24,77	5,00	79,03	sedang
Pemerintah Kab. Karimun	PNS	3.451	21,16	27,45	25,06	5,00	78,67	sedang
	PPPK	1.133	20,00	29,92	25,15	5,00	80,07	sedang
	ASN	4.584	20,87	28,06	25,08	5,00	79,02	sedang
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	PNS	4.843	20,67	27,83	24,45	5,00	77,95	sedang
	PPPK	1.633	20,00	30,66	26,21	5,00	81,87	tinggi
	ASN	6.476	20,50	28,54	24,89	5,00	78,94	Sedang

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

NAMA INSTANSI	JENIS PEGAWAI	JUMLAH PNS YANG DIUKUR	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI	KATEGORI
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	PNS	5.013	20,60	28,47	24,81	5,00	78,88	sedang
	PPPK	1.359	20,00	29,02	25,03	5,00	79,05	sedang
	ASN	6.372	20,47	28,59	24,86	5,00	78,92	sedang
Pemerintah Kab. Rokan Hilir	PNS	5.470	21,12	27,33	24,60	5,00	78,05	sedang
	PPPK	2.305	20,00	29,89	25,09	5,00	79,99	sedang
	ASN	7.775	20,79	28,09	24,75	5,00	78,63	sedang
Pemerintah Kota Sawahlunto	PNS	1.777	21,65	27,37	25,32	5,00	79,34	sedang
	PPPK	461	20,00	24,06	25,34	5,00	74,39	sedang
	ASN	2.238	21,31	26,69	25,32	5,00	78,32	sedang
Pemerintah Kab. Rokan Hulu	PNS	4.838	20,96	26,94	24,18	5,00	77,09	sedang
	PPPK	874	20,00	29,35	25,18	5,00	79,54	sedang
	ASN	5.712	20,81	27,31	24,33	5,00	77,46	sedang
Pemerintah Kab. Bintan	PNS	2.989	21,20	26,12	24,27	5,00	76,60	sedang
	PPPK	531	20,00	28,32	23,47	5,00	76,80	sedang
	ASN	3.520	21,02	26,45	24,15	5,00	76,63	sedang
Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	PNS	2.277	21,29	25,31	22,18	5,00	73,77	sedang
	PPPK	417	20,00	25,52	20,30	5,00	70,82	rendah
	ASN	2.694	21,09	25,34	21,89	5,00	73,31	sedang

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 7 ayat 4 huruf a, maka telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik pada unit telah dilaksanakan proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir hasil penilaian; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66); dan
6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 9 Januari 2026

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

RINI WIDYANTINI

No	Instansi	Indeks	Kategori
48	Pemerintah Kota Bandar Lampung	4.31	A-
49	Pemerintah Kota Tegal	4.28	A-
50	Pemerintah Kota Magelang	4.28	A-
51	Pemerintah Kota Palu	4.23	A-
52	Pemerintah Kota Banda Aceh	4.21	A-
53	Pemerintah Kota Cilegon	4.21	A-
54	Pemerintah Kota Tomohon	4.20	A-
55	Pemerintah Kota Pekanbaru	4.18	A-
56	Pemerintah Kota Bengkulu	4.17	A-
57	Pemerintah Kota Serang	4.16	A-
58	Pemerintah Kota Sabang	4.12	A-
59	Pemerintah Kota Padang Sidempuan	4.10	A-
60	Pemerintah Kota Bitung	4.08	A-
61	Pemerintah Kota Ambon	4.06	A-
62	Pemerintah Kota Kupang	4.02	A-
63	Pemerintah Kota Jambi	4.00	B
64	Pemerintah Kota Sibolga	4.00	B
65	Pemerintah Kota Dumai	3.92	B
66	Pemerintah Kota Tangerang	3.90	B
67	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	3.90	B
68	Pemerintah Kota Bima	3.84	B
69	Pemerintah Kota Bau Bau	3.83	B
70	Pemerintah Kota Langsa	3.76	B
71	Pemerintah Kota Banjarbaru	3.75	B
72	Pemerintah Kota Tanjung Balai	3.72	B
73	Pemerintah Kota Kotamobagu	3.71	B
74	Pemerintah Kota Manado	3.67	B
75	Pemerintah Kota Gunungsitoli	3.66	B
76	Pemerintah Kota Makassar	3.44	B-
77	Pemerintah Kota Subulussalam	3.39	B-
78	Pemerintah Kota Padang	3.38	B-
79	Pemerintah Kota Parepare	3.33	B-
80	Pemerintah Kota Binjai	3.32	B-
81	Pemerintah Kota Gorontalo	3.19	B-
82	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	3.11	B-
83	Pemerintah Kota Pariaman	3.10	B-
84	Pemerintah Kota Bukittinggi	3.05	B-
85	Pemerintah Kota Kendari	3.04	B-
86	Pemerintah Kota Sawahlunto	3.04	B-
87	Pemerintah Kota Jayapura	2.97	C
88	Pemerintah Kota Solok	2.93	C
89	Pemerintah Kota Ternate	2.72	C
90	Pemerintah Kota Sungai Penuh	2.66	C
91	Pemerintah Kota Tual	2.45	C-
92	Pemerintah Kota Palopo	N/A	N/A
93	Pemerintah Kota Sorong	N/A	N/A

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

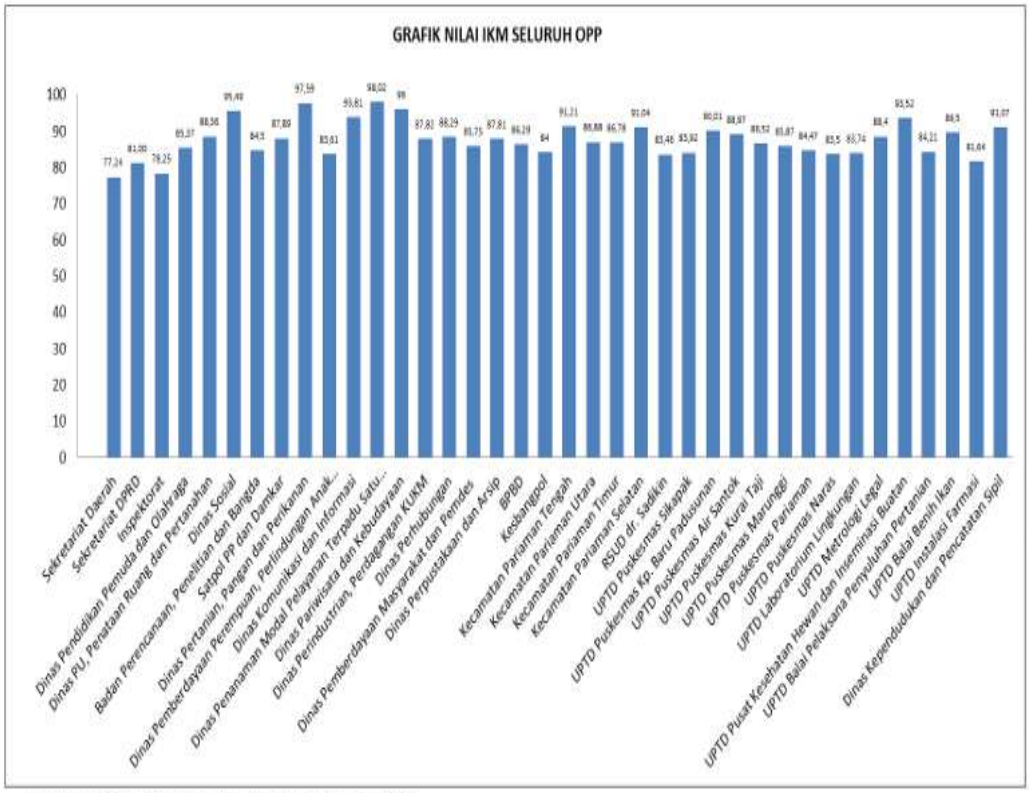
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

LAPORAN

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

Grafik II.5 Indeks Kepuasan Masyarakat per OPP Tahun 2025



Sumber : Hasil Pengolahan dan Analisis Data (Bagian Organisasi, 2025)

BAB III
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh organisasi penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman selama satu periode mulai Januari hingga Desember 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025 merupakan potret kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, dimana secara umum mencerminkan tingkat kualitas dengan kategori Sangat Baik, terindikasi melalui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata yaitu sebesar 89,55 atau predikat A. Artinya, nilai IKM Pemerintah Kota Pariaman menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2025.
2. Nilai IKM Kota Pariaman Tahun 2025 sebesar 89,55 kategori Sangat Baik atau predikat A, diperoleh berdasarkan angka rata-rata hasil rekapitulasi laporan SKM yang disampaikan 38 (tiga puluh delapan) OPP yang menunjukkan sebesar 82,61% OPP yang patuh terhadap ketentuan dalam pelaksanaan SKM, dan sisanya terdapat 8 (delapan) atau 17,39 % OPP yang belum patuh terhadap ketentuan dalam pelaksanaan SKM pada tahun 2025.
3. Berdasarkan rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan SKM, telah dilakukan upaya tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan, melalui berbagai bentuk perbaikan, antara lain Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

Pariaman, Desember 2025
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Drs. AFRIZAL AZHAR,M.Si

Tabel 8.1.2 Panjang Jalan Menurut Status Jalan dan Jenis Permukaan Jalan di Kota Pariaman (m), 2021–2025
Table *Length of Road by Status and Surface Type in Pariaman Municipality (m), 2021–2025*

Status Jalan/ *Road Status*		Jenis Permukaan Jalan (m) *Type of Surface (m)*						Jumlah *Total*
		Aspal *Paved Road*	Kerikil *Gravel*	Tanah *Clay*	Beton *Concrete*	Paving Blok *Paving Block*	Lapen *Penetration Layer*	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jalan Negara/ *National Road*	12.600	–	–	–	–	–	12.600
2	Jalan Provinsi/ *Provinci Road*	2.620	–	–	–	–	–	2.620
3	Jalan Kota/ *Municipality Road*	244.916	5.087	25.164	17.788	–	–	292.955
Jumlah/ *Total*	2025	260.136	5.087	25.164	17.788	–	–	308.175
	2024	228.936	8.530	28.235	34.207	–	3.247	303.155
	2023	249.819	18.475	65.462	92.199	296	21.926	448.177
	2022	253.281	9.404	55.587	88.073	296	21.806	428.447
	2021	25. 281	10.084	56.039	87.490	296	21.203	428.393

Sumber/*Source* : 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman/*Public Work and Spatial Planning Service of Pariaman Municipality*
2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman/*Department of Housing, Settlement Region, and Land of Pariaman Municipality*

https://pariamankota.bps.go.id

Tabel 8.1.3 Panjang Jalan Menurut Status Jalan dan Kondisi Permukaan Jalan di Kota Pariaman (m), 2021–2025
Table *Length of Road by Status and Condition in Pariaman Municipality (m), 2021–2025*

	Status Jalan/ *Road Status*	Kondisi Permukaan Jalan (m) *Lenght of Surface Condition(m)*				Jumlah *Total*
		Baik *Well*	Sedang *Middling*	Rusak *Damage*	Rusak Berat *Heavily Damaged*	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jalan Negara/*National Road*	12.600	–	–	–	12.600
2	Jalan Provinsi/*Provinci Road*	2.620	–	–	–	2.620
3	Jalan Kota/*Municipality Road*	170.111	22.724	48.314	51.806	292.955
Jumlah/ *Total*	2025	185.331	22.724	48.314	51.806	308.175
	2024	173.104	26.526	66.875	36.650	303.155
	2023	269.715	29.295	104.911	44.256	448.177
	2022	138.255	117.777	128.442	43.919	428.393
	2021	133.835	117.777	130.712	40.069	428.393

Sumber/*Source* : 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman/*Public Work and Spatial Planning Service of Pariaman Municipality*
2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman/*Department of Housing, Settlement Region, and Land of Pariaman Municipality*

https://pariamankota.bps.go.id

Tabel 8.1.4 Panjang Jalan Kota Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kecamatan di Kota Pariaman (m), 2021–2025
Table *Length of Municipal Road by Surface Type and District in Pariaman Municipality (m), 2021–2025*

Kecamatan/ *District*		Jenis Permukaan Jalan (m) *Type of Surface (m)*						Jumlah *Total*
		Aspal *Paved Road*	Kerikil *Gravel*	Tanah *Clay*	Beton *Concrete*	Paving Blok *Paving Block*	Lapen *Penetration Layer*	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pariaman Selatan	61.518	252	12.241	6.098	–	–	80.109
2	Pariaman Tengah	64.148	968	4.339	5.350	–	–	74.805
3	Pariaman Timur	58.725	427	3.266	2.954	–	–	65.372
4	Pariaman Utara	60.525	3.440	5.318	3.386	–	–	72.669
Jumlah/ *Total*	2025*	244.916	5.087	25.164	17.788	–	–	292.955
	2024*	230 102	6.657	35.710	16.855	780	21.806	145.565
	2023	7.652	5.163	35.234	74.460	296	21.806	144.611
	2022	237.732	9.404	55.587	88.073	296	21.806	412.898
	2021	237.732	10.084	56.039	87.490	296	21.203	412.844

Sumber/*Source* : 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman/*Public Work and Spatial Planning Service of Pariaman Municipality*
2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman/*Department of Housing, Settlement Region, and Land of Pariaman Municipality*

Tabel 8.1.5 Panjang dan Klasifikasi Jalan Menurut Status di Kota Pariaman, 2025
Table ***Length of Road and Road Classification by Status in Pariaman Municipality, 2025***

	Status Jalan/ *Road Status*	Kelas Jalan *Roads Class*	Panjang Jalan (m) *Length of Roads*	Keterangan *Note*
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jalan Negara/*National Road*	–	12.600	Jalan Nasional
2	Jalan Provinsi/*Province Road*	–	2.620	Jalan Provinsi
3	Jalan Provinsi Tidak Dirinci/ *Undetailed Province Road*	–	–	–
4	Jalan Kota/*Municipal Road*	IIIS 3	292.955	Jalan Kota (KT)
5	Jalan Kota/*Municipal Road*	–	–	–
6	Jalan Kota Tidak Dirinci/ *Undetailed Municipal Road*	–	–	–
Jumlah/ *Total*	2025	–	308.175	KT saja
	2024	–	448.177	–
	2023	–	428.447	–
	2022	–	428.393	–
	2021	–	427.445	–

Sumber/*Source* : 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman/*Public Work and Spatial Planning Service of Pariaman Municipality*
2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman/*Department of Housing, Settlement Region, and Land of Pariaman Municipality*

Tabel 5.3.5 **Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan (ha) di Kota Pariaman, 2025**
Table ***Planted Area of Wet Land Paddy by District and Kind of Irrigation (ha) in Pariaman Municipality, 2025***

Kecamatan *District*		Irigasi / *Irrigation*			Sawah Lainnya (Lahan Terlantar) *Displaced*	Non Irigasi *Non Irrigation*	Jumlah *Total*
		Irigasi Teknis *Technics*	Irigasi 1/2 Teknis *Half Technics*	Sederhana *Simple Irrigation**			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pariaman Selatan	150	–	–	–	354	504
2	Pariaman Tengah	210	98	–	–	–	308
3	Pariaman Timur	245	147	14	–	–	406
4	Pariaman Utara	409	–	–	–	–	409
Jumlah *Total*	2025	1.014	245	14	–	354	1.627
	2024	1.014	245	14	–	354	1.627
	2023	588	625	41	–	373	1.627
	2022	716	584	85	–	482	1.785
	2021	676	495	150	–	464	1.785

Sumber/*Source* : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman / *Agriculture, Food and Fisheries Service of Pariaman Municipality*

https://pariamankota.bps.go.id

PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kota Pariaman

Provinsi Sumatera Barat

2025

Kepala Daerah :
Luas Wilayah : Km²
Populasi : Jiwa

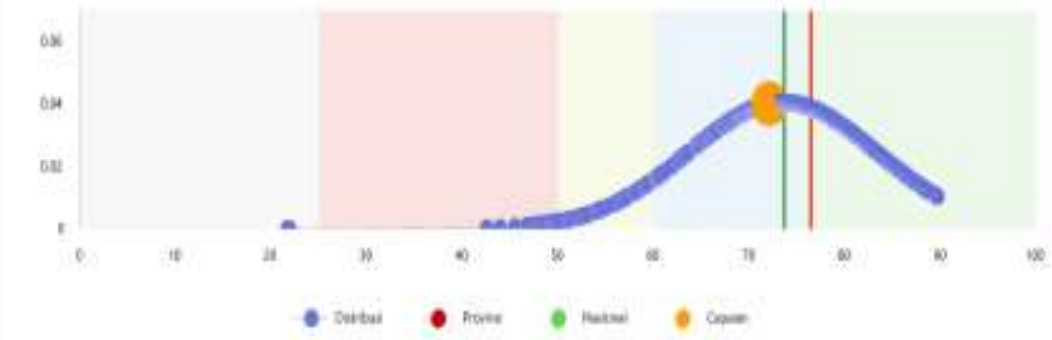
Kepala DPRD :
Kategori Daerah :
Pendapatan Per Kapita :

IKLH
72.07
SEDANG

Indeks Respon
49.73

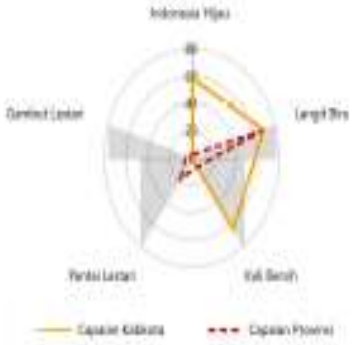
Peringkat
Nasional : 286 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 16 dari 19 Kabupaten/Kota

Posisi IKLH



Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
UDARA	11	8	8
AIR	24	36	34
LAHAN	0	1	1
TOTAL	35	45	43

Indeks Respon



Sebaran Titik Pemantauan

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Diponegoro no. 48 Pariaman. Telp. (0751) 7682086

REKAP BANTUAN REHAB RUMAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN		DESA/ KELURAHAN	JUMLAH (UNIT)	Keterangan
I	PARIAMAN SELATAN			3	
		1	MARUNGGI	1	BAZNAS
		2	TOBOH PALABAH	1	BAZNAS
		3	TALUK	1	BAZNAS
II	PARIAMAN TENGAH			4	
		1	ALAI GELOMBANG	1	BAZNAS
		2	PAUH TIMUR	1	BAZNAS
		3	KARAN AUR	1	PT. INDAH GRUP
		4	JALAN KERETA API	1	BAZNAS
III	PARIAMAN TIMUR			3	
		1	KAMPUNG GADANG	1	BAZNAS
		2	KAMPUNG KANDANG	1	BAZNAS
		3	BATO	1	BAZNAS
IV	PARIAMAN UTARA			5	
		1	CUBADAK AIR UTARA	1	BAZNAS
		2	APAR	2	BAZNAS
		3	MANGGUNG	1	BAZNAS
		4	NARAS I	1	BAZNAS

Kepala Dinas,

FERI ANDRI, ST, MT
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.19660225 199403 1 006

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Jln. Diponegoro No. 48 Pariaman Telp. (0751) 93844 Kode Pos 25538

BERITA ACARA
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PENGURANGAN LUASAN KUMUH KOTA PARIAMAN

Nomor : 660/(01 /DISPERKIM-LH/2026

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** di Kota Pariaman, telah dilaksanakan Perhitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Tingkat Kota Pariaman untuk tahun 2025 sebesar 0,16 Ha dan total pengurangan sampai dengan tahun 2025 sebesar 51,63 Ha (28,00%) dari luasan kumuh berdasarkan SK No. 38/050/2022 dengan total luas kumuh 184,36 Ha.

Hasil perhitungan pengurangan luasan kumuh tahun 2026 Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat menetapkan hasil sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Kelurahan	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2020 (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2021 (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2022 (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2023 (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2024 (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2025 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh (Ha)
1	Pariaman Utara	Tungkal Selatan	Tungkal Selatan	6,79	0	0	0	0	0	0	6,79
2	Pariaman Utara	Sikapak Barat	Sikapak Barat	4,05	0	0	0	0	0	0	4,05
3	Pariaman Utara	Manggung	Manggung	13,4	0	0	0	3,61	0	0,04	9,75
4	Pariaman Utara	Ampalu	Pauh Barat Ampalu	9,82	0	0	0	0	0	0	9,82
	Pariaman Utara	Apar		2,01	0	0	0	0	0	0	2,01
	Pariaman Tengah	Pauh Barat		13,22	0	0	0	0	1,79	0,05	11,38
5	Pariaman Tengah	Cimparuh	Cimparuh	19,62	0	0	0	0	0	0	19,62
6	Pariaman Tengah	Jati Hilir	Jati	6,51	0	0	3,63	0	0	0	2,88
7	Pariaman Tengah	Kampung Pondok	Kampung Pondok	3,63	0	0	1,6	0	0	0,07	1,96
8	Pariaman Tengah	Jawi-jawi I	Jawi-jawi I	6,16	0	1,92	2,34	0	0	0	1,9
9	Pariaman Tengah	Jawi-jawi II	Jawi-jawi II	7,99	0	0	3,62	0	0	0	4,37
10	Pariaman Tengah	Karan Aur	Karan Aur	8,06	0	8,06	0	0	0	0	0
11	Pariaman Tengah	Kampung Perak	Kampung Perak Lohong Pasir	5,77	0	5,77	0	0	0	0	0
	Pariaman Tengah	Lohong		8,01	0	8,01	0	0	0	0	0
	Pariaman Tengah	Pasir		2,84	0	2,84	0	0	0	0	0
12	Pariaman Tengah	Pondok II	Pondok II	1,68	0	1,68	0	0	0	0	0
13	Pariaman Selatan	Pauh Kurai Taji	Kurai Taji	7,08	0	0	0	0	0	0	7,08
14	Pariaman Selatan	Punggung Lading	Sampan Punggung Lading	19,73	0	0	0	0	0	0	19,73
15	Pariaman Selatan	Punggung Lading	Parit Punggung Lading		0	0	0	0	0	0	0
16	Pariaman Timur	Kampung Baru Padusunan	Padusunan	12,02	0	0	0	0	0	0	12,02
	Pariaman Utara	Cubadak Air Selatan			0	0	0	0	0	0	0
17	Pariaman Utara	Balai Nareh	Balai Nareh	6,6	6,6	0	0	0	0	0	0
18	Pariaman Timur	Sungai Sirah	Sungai Sirah	6,56	0	0	0	0	0	0	6,56
19	Pariaman Selatan	Palak Aneh	Palak Aneh	12,81	0	0	0	0	0	0	12,81
Total Luas Kawasan Kumuh				**184,36**	**6,60**	**28,28**	**11,19**	**3,61**	**1,79**	**0,16**	**132,73**

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini disusun dan disepakati para pihak dengan penuh kesadaran. Berita Acara ini akan dijadikan acuan penetapan luasan kumuh Kota Pariaman tahun 2026.

Kepala Bidang Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kepala Dinas
RITA OKTAFIANTI, ST, MT NIP. 19811003 200604 2 028	**FERI ANDRI, ST, MT** NIP. 19660225 199403 1 006

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200
Situs: *http://www.bnpb.go.id*

Nomor : B-32/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 30 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Sumatera Barat

Yth. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

BNPB telah melakukan verifikasi dan finalisasi data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2025 untuk penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 di tingkat kabupaten/kota melalui portal https://inarisk.bnpb.go.id/admin.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BNPB memberikan apresiasi kepada Provinsi Sumatera Barat atas konsistensinya dalam mendorong serta melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota dalam pelaksanaan penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) setiap tahun;
2. BNPB juga menyampaikan apresiasi kepada BPBD kabupaten/kota yang telah melaksanakan penilaian IKD Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran;
3. Sehubungan dengan pemenuhan bukti verifikasi, BNPB telah menyampaikan Surat Nomor B-373/BNPB/D-I/SS.01.03/12/2025 yang memberikan kesempatan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melengkapinya;
4. BNPB telah melakukan finalisasi hasil IKD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlampir. File final IKD Tahun 2025 dapat diakses melalui tautan: https://bit.ly/IKD_Provinsi_Sumatera_Barat_2025_Final;
5. Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 dihitung dengan menggunakan salah satu input berupa nilai IKD Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, nilai IRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar **176,82** dan Nilai IKD rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sebesar **0,38**;
6. Nilai IRB pada tahun 2025 dihitung menggunakan *baseline* yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga tidak untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB pada periode tahun 2015-2024;
7. Selanjutnya, BNPB menghimbau Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk mengoordinasikan pengumpulan IKD kabupaten/kota serta melaksanakan pendampingan pada tahun 2026.

Demikian . . .

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi,



Raditya Jati

Tembusan:

1. Kepala BNPB (sebagai laporan);
2. Sekretaris Utama BNPB;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
8. Plt. Kepala Biro Perencanaan, BNPB;
9. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Lampiran Surat
Nomor : B-32/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026
Tanggal : 30 Januari 2026

Nilai IKD 2025 dan IRB 2025 Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	IKD 2025	IRB 2025
Agam	0,34	240,30
Dharmasraya	0,40	150,61
Kepulauan Mentawai	0,24	201,41
Kota Bukittinggi	0,26	137,20
Kota Padang	0,52	185,53
Kota Padang Panjang	0,37	117,32
Kota Pariaman	0,50	146,48
Kota Payakumbuh	0,25	130,13
Kota Sawahlunto	0,40	162,90
Kota Solok	0,36	159,11
Lima Puluh Kota	0,34	197,52
Padang Pariaman	0,52	163,66
Pasaman	0,36	213,87
Pasaman Barat	0,40	254,24
Pesisir Selatan	0,52	158,29
Sijunjung	0,37	166,03
Solok	0,39	183,21
Solok Selatan	0,42	172,25
Tanah Datar	0,25	219,49

Deputi Bidang Sistem dan Strategi,

Raditya Jati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORANPELAKSANAANTUGAS

Izin Pimpinan, menyampaikan laporan hasil kegiatan Patroli Pengawasan, Pembinaan dan Penindakan guna Mengantisipasi, dan Mencegah Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat serta Penyakit Masyarakat, Tanggal 17 Januari 2025 oleh Team Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman.

Kepada Yth :
1. Kasat Pol PP Kota pariaman
Hari/Tanggal : Jum at, 17 Januari 2025 Waktu Kegiatan
: 09:00 WIB s/d selesai

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

B. TUJUAN PELAKSANAAN

1. Melakukan Deteksi dan Pencegahan Dini terhadap Aktifitas pelajar yang Berpotensi Menimbulkan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
2. Memberikan Himbauan dan Melaksanakan Penegakan Perda/Perkada Guna Menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Memberikan Perlindungan kepada Masyarakat;
3. Menciptakan Kondisi Wilayah Agar Tertib, Aman dan Terkendal.

C. SASARAN / LOKASI

Patroli Pengawasan dilaksanakan pada wilayah kota Pariaman. diantaranya :
1. Penertiban Perda Pekat No 10 tahun 2013/ Lokasi Sekitaran Kota Pariaman
2 Penertiban Perda Trantibum no 10 Tahu 2018/ L Lokasi Sekitaran Kota Pariaman

D. PERSONIL

Nama Personil yang terlibat adalah Anggota Tim Perda Satpol PP Kota Pariaman, sebagai berikut :
Pengawas : Roni Kardinal,SE
Korlap : Arisman, SH
Danlap : Dhoni Saputra, S.E, SE
PPNS : 1. Yudi Oktavio,S,sos, 2.Romi Riyanto,S.Sos
Anggota: Tim Penegak Perda Kota Pariaman, Sesuai SPT sebagai file

E. HASIL KEGIATAN

Patroli pada hari ini dilaksakan setelah atasan melakukan pengecakan langsung personil sebelum berangkat kegiatan operasi tindakan non yustisi razia pelajar di kecamatan Pariaman Utara, tim patroli langsung bergerak ke arah pariaman utara dalam perjalanan kami menemukan pelajar yang lagi nongrong di warung di daerah padusunan kami langsung melakukan penertipan, kami memberikan teguran pelajar agar tidak lagi berkeliaran dalam jam belajar, tim kami langsung melanjutkan patroli ke arah Desa sungai rambai di sana kami tidak menemukan pelajar yang berkelian.tim patroli kembali ke Mako satpol PP dan Damkar dalam keadahan aman dan lengkap

F. DOKUMENTASI



G. PENUTUP

Demikian Laporan Disampaikan Untuk Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya. Izin Pimpinan, menyampaikan laporan hasil kegiatan Patroli Pengawasan, Pembinaan dan Penindakan guna Menganttsipasi, dan Mencegah Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat serta Penyakit Masyarakat, Tanggal 17 Januari 2025 oleh Team Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman.

Korlap
Plt.KasiOperasional

Arisman, SH
NIP.198004212009011004

LAPORANPELAKSANAANTUGAS

Izin Pimpinan, menyampaikan laporan hasil kegiatan Melakukan penertiban Terhadap Perda No.10 Tahun 2014 Tentang IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Tanggal 3 Januari 2025 oleh Team Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman.

Kepada Yth :
1. Kasat Pol PP Kota pariaman
Hari/Tanggal : Jum at, 3 Januari 2025
Waktu Kegiatan : 09:00 WIB s/d selesai

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman 6 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dalam Kota Pariaman;

B. TUJUAN PELAKSANAAN

1. Mengamati dan melakukan pencatatan pada pelanggaran yang ditemukan dilapangan saat dilaksanakan patroli;
2. Memberikan Himbauan dan Melaksanakan Penegakan Perda/Perkada Guna Menjaga K3 di Kota Pariaman;
3. Menciptakan Kondisi Wilayah Agar Tertib, Aman dan Asri;

C. SASARAN / LOKASI

Patroli Pengawasan IMB dilaksanakan pada wilayah kota Pariaman. diantaranya :
Melakukan penertiban Terhadap Perda No.10 Tahun 2014 Tentang IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di 4 Kecamatan di Kota Pariaman;

D. PERSONIL

Nama Personil yang terlibat adalah Anggota Tim Perda Satpol PP Kota Pariaman, sebagai berikut :
Pengawas : Roni Kardinal,SE
Korlap : Arisman, SH
Danlap : Dhoni Saputra, S.E, SE
PPNS : 1. Yudi Oktavio,S,sos, 2. Romi Riyanto,S.Sos
Anggota: Tim Penegak Perda Kota Pariaman, Sesuai SPT sebagai file terlampir

E. HASIL KEGIATAN

Hari ini kami melaksanakan patroli ke kawasan Simpang Jagung, disana kami melaksanakan patroli wilayah terkait adanya pelanggaran Perda IMB yang terjadi, lalu kami melanjutkan patroli ke kawasan Desa Punggung Ladiang, disana kami juga melaksanakan patroli wilayah tersebut, ternyata dari hasil penelusuran kami tidak menemukan pelanggaran Perda IMB yang terjadi, lalu kami terus melanjukan patroli pelanggaran Perda ke Daerah Sampan, disana kami menemui sebuah rumah dalam proses pembangunan, kami singgah untuk menanyai IMB bangunan

tersebut, berdasarkan hasil laporan dari tuan rumah ternyata IMB dalam proses pengurusan di Kantor Desa, pemilik berjanji akan segera menyelesaikan proses IMB, kami memberikan surat perjanjian kepada pemilik toko sebagai bentuk tanggung jawab atas permohonan pemilik toko itu, lalu kami terus melanjutkan patroli ke Rambai disana kami tidak menemukan pelanggaran Perda IMB, lalu kami kembali ke Mako dalam keadaan aman dan terkendali.

F. DOKUMENTASI



G. PENUTUP

Demikian Laporan Disampaikan UNTUK Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya. Izin Pimpinan, menyampaikan laporan hasil kegiatan Melakukan penertiban Terhadap Perda No.10 Tahun 2014 Tentang IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Tanggal 3 Januari 2025 oleh Team Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman.

Korlap
Plt.KasiOperasional

Arisman, SH
NIP.198004212009011004

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 OLEH WALI KOTA PARIAMAN DAN SELURUH PIMPINAN PERANGKAT DAERAH







MATRIKS TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025

No.	Komponen Penilaian LHE		Kondisi Terkini	Rencana Aksi	Indikator	Target	Kegiatan/Subkegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab (PIC/Support)	Status/Progres Penyelesaian	Bukti Dukung	Link Bukti Dukung	Ket.
	Temuan/Catatan	Rekomendasi											
A.	PERENCANAAN KINERJA												
1.	Terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Timebound) dan belum berorientasi hasil pada levelnya.	1. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah dengan memastikan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound serta cukup untuk mengawal pencapaian kinerja	Telah dilakukan revisi/perbaikan menyeluruh terhadap dokumen Perencanaan Tingkat Daerah (RPJMD)	Melakukan revisi / perbaikan menyeluruh terhadap dokumen Perencanaan Tingkat Daerah (RPJMD) untuk memastikan keterkaitan tujuan, sasaran, dan indikator berbasis outcome serta melakukan perbaikan indikator yang masih berorientasi output menjadi outcome	Jumlah dokumen Perencanaan Tingkat Daerah (RPJMD) yang telah diperbaiki/direvisi	1 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	TW I	Bappeda	Selesai	RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029	https://drive.google.com/file/d/1CjXU8T_fskFUapXHkCl-0ADACbve45ro/view?usp=drive_link	
			Telah dilakukan revisi/perbaikan menyeluruh terhadap dokumen Perencanaan Tingkat Perangkat Daerah (Renstra PD 2025-2029)	Melakukan revisi/ perbaikan menyeluruh terhadap dokumen Perencanaan Tingkat Perangkat Daerah (Renstra) untuk memastikan keterkaitan tujuan, sasaran, dan indikator berbasis outcome serta melakukan perbaikan indikator yang masih berorientasi output menjadi outcome	Jumlah dokumen Perencanaan Tingkat Perangkat Daerah (Renstra) yang telah diperbaiki/direvisi	28 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah (RENSTRA-PD)	TW I	Bappeda	Selesai	Renstra PD yang telah diperbaiki	https://drive.google.com/drive/folders/11iFyJOcLJu51CltS-j0-gku2ClvsXJQz?usp=drive_link	
			Telah dibuat tabel persandingan untuk memastikan keselarasan dokumen Renstra PD dengan dokumen Renja PD	Memastikan dokumen perencanaan tingkat perangkat daerah (Renja) selaras dengan dokumen perencanaan jangka Menengah tingkat perangkat Daerah (Renstra)	Jumlah dokumen perencanaan tahunan tingkat perangkat daerah (Renja) selaras dengan dokumen perencanaan Jangka Menengah tingkat perangkat Daerah (Renstra)	28 Dokumen	Verifikasi dan Validasi Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	TW II	Bappeda	Selesai		https://drive.google.com/file/d/1EQzY3vrmcMcEe0_gU2d1RuMwazRTMOlF/view?usp=sharing	
			Telah dibuat tabel persandingan untuk memastikan keselarasan dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD	Memastikan dokumen perencanaan tingkat daerah (RKPD) selaras dengan dokumen perencanaan jangka Menengah Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan tingkat daerah selaras dengan dokumen perencanaan Jangka Menengah Daerah	1 Dokumen	Verifikasi dan Validasi Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah (RKPD dan RPJMD)	TW II	Bappeda	Selesai		https://drive.google.com/file/d/1Dwkwp-2pKrUKH4PmFzafWC5-QLVQM4TJ/view?usp=drive_link	
			Telah dilakukan reviu menyeluruh terhadap dokumen Perencanaan Tingkat Daerah (RPJMD)	Melakukan reviu menyeluruh terhadap dokumen Perencanaan Tingkat Daerah (RPJMD)	Jumlah dokumen Perencanaan Tingkat Daerah (RPJMD) yang telah direviu	1 Dokumen	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	TW I	Inspektorat	Selesai	Laporan Hasil Reviu RPJMD	https://drive.google.com/file/d/1qQSFVoKoyTOf1Xx9RHWsd6XWcnphod6E/view?usp=drive_link	
			Telah dilakukan reviu menyeluruh terhadap dokumen Perencanaan Tingkat Perangkat Daerah (Renstra)	Melakukan reviu menyeluruh terhadap dokumen Perencanaan Tingkat Perangkat Daerah (Renstra)	Jumlah dokumen Perencanaan Tingkat Perangkat Daerah (Renstra) yang telah direviu	28 Dokumen	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	TW I	Inspektorat	Selesai	Laporan Hasil Reviu Renstra	https://drive.google.com/drive/folders/1mJTjXedbbt3DozQkD2dJ5v3uCNPf3YNF?usp=drive_link	
			Sedang melakukan reviu terhadap RKPD tahun 2027 melalui e reviu pada aplikasi SIPD	Melakukan reviu menyeluruh dokumen perencanaan tingkat daerah (RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan tahunan tingkat daerah (RKPD)	1 Dokumen	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	TW II	Inspektorat	Dalam Proses	Laporan Hasil Reviu RKPD		
			Telah difasilitasi pelaksanaan dialog kinerja bersama Pimpinan dalam rangka penyepakatan dan penetapan indikator dan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Memfasilitasi pelaksanaan dialog kinerja bersama pimpinan dalam rangka penyepakatan dan penetapan indikator dan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah agar memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound serta selaras dengan sasaran strategis	Jumlah Perangkat Daerah yang telah difasilitasi dalam pelaksanaan dialog kinerja untuk penyepakatan indikator dan target kinerja	28 Perangkat Daerah	Dialog Kinerja	TW I	Bagian Organisasi	Selesai	Berita acara hasil dialog kinerja PK Perangkat Daerah		

			Telah difasilitasi pelaksanaan dialog kinerja bersama Pimpinan dalam rangka penyepakatan dan penetapan indikator dan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman	Memfasilitasi pelaksanaan dialog kinerja bersama pimpinan dalam rangka penyepakatan dan penetapan indikator dan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman agar memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound serta selaras dengan sasaran strategis	Jumlah Indikator Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman yang telah melaksanakan dialog kinerja dalam penyepakatan indikator dan target kinerja	29 Indikator	Dialog Kinerja	TW I	Bagian Organisasi	Selesai	Berita acara hasil dialog kinerja PK Pemerintah Kota		
			Telah dilakukan validasi dan penetapan indikator dan target kinerja pada perjanjian kinerja melalui finalisasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Melakukan validasi dan penetapan indikator dan target kinerja pada perjanjian kinerja melalui finalisasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah untuk memastikan keselarasan dan keterukuran indikator	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang telah divalidasi dan ditetapkan	28 Dokumen	Validasi dan penetapan indikator dan target kinerja	TW I	Bagian Organisasi	Selesai	Dokumen validasi PK PD		
			Telah dilakukan validasi dan penetapan indikator dan target kinerja pada perjanjian kinerja melalui finalisasi Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota	Melakukan validasi dan penetapan indikator dan target kinerja pada perjanjian kinerja melalui finalisasi Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota untuk memastikan keselarasan dan keterukuran indikator	Jumlah Indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman yang telah divalidasi dan ditetapkan	29 Indikator	Validasi dan penetapan indikator dan target kinerja	TW I	Bagian Organisasi	Selesai	Dokumen validasi PK Kota		
			Pejabat Manajerial belum memahami sepenuhnya terkait penyusunan Perjanjian Kinerja secara berjenjang	Melaksanakan Bimbingan Teknis/Workshop Penyusunan Perjanjian Kinerja secara berjenjang kepada Pejabat Manajerial di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Jumlah Pejabat Manajerial yang mengikuti Bimtek/Workshop	280 Orang	Peningkatan Kinerja dan RB	TW II	Bagian Organisasi	Proses	Telaah Staf dan KAK		
			Perangkat Daerah (Pejabat Manajerial, Fungsional dan Pelaksana) belum sepenuhnya memahami terkait penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sampai ke level pelaksana	Melakukan Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sampai ke level pelaksana	Jumlah Perangkat Daerah yang diberikan pendampingan	12 Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja dan RB	TW I, II, III, IV	Bagian Organisasi	Proses	Berita acara hasil pendampingan		
2.	Penetapan rencana aksi pada sebagian PD masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK.	2. Menyempurnakan rencana aksi pada level Perangkat Daerah dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut	Telah disusun Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Rencana Aksi Perangkat Daerah	Menyusun pedoman penyusunan rencana aksi yang memuat indikator output, target waktu, pelaksana, penanggung jawab, dan keterkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja	Jumlah dokumen pedoman yang disusun	1 Dokumen	1. Penyusunan surat edaran tentang rencana aksi 2. Permintaan penyusunan rencana aksi 3. Pendampingan penyusunan rencana aksi	TW II	Bappeda	Selesai		https://drive.google.com/drive/folders/1F_NQBwDwgAoca_u85J6PdQnoiYXaJ54G?usp=sharing	
			Telah dilakukan Workshop/Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Perangkat Daerah	Melakukan Workshop/Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Perangkat Daerah	Jumlah PD yang dilakukan Workhshop/Pendampingan	28 Perangkat Daerah	Pelaksanaan workshop penyusunan rencana aksi perangkat daerah bagi Kasubag Program masing-masing perangkat daerah	TW II	Bappeda	Selesai		https://drive.google.com/drive/folders/1F_NQBwDwgAoca_u85J6PdQnoiYXaJ54G?usp=sharing	
			Telah dilakukan verifikasi rencana aksi Perangkat Daerah	Melakukan verifikasi rencana aksi Perangkat Daerah	Jumlah rencana aksi PD yang diverifikasi	1 Berita Acara	Validasi dan verifikasi terhadap rencana aksi yang telah disusun oleh perangkat daerah	TW I	Bappeda	Selesai		https://drive.google.com/drive/folders/1F_NQBwDwgAoca_u85J6PdQnoiYXaJ54G?usp=sharing	

3.	Penjenjangan kinerja pada tingkat Pemda dan PD belum sepenuhnya mempertimbangkan keterkaitan proses kinerja antar level jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja. Penjenjangan kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/ kegiatan existing, serta belum sepenuhnya mengidentifikasi Critical Success Factor (CSF) yang seharusnya dan kerangka logis yang menggambarkan hubungan sebab-akibat.	3. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan Critical Success Factor dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah	Telah dilakukan perbaikan Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja (Level Daerah dan Level Perangkat Daerah) dengan melibat Tim Ahli dari Smartd Id	Melakukan reviu dan perbaikan pohon kinerja (Tingkat Daerah dan Perangkat Daerah) dan melakukan cascading (Tingkat Daerah dan Perangkat Daerah) kinerja dari level pemerintah daerah hingga ke level Perangkat Daerah	Jumlah Pohon Kinerja dan cascading kinerja yang telah di reviu atau direvisi	29 Dokumen	Pendampingan penyusunan Pohon Kinerja (Tingkat daerah dan perangkat daerah)	TW I	Bappeda	Selesai		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_VVgY1mKD8mfs3n2vSCW2a2ZZqtY-BRa/edit?usp=drivesdk&ouid=109420350339124129753&rtpof=true&sd=true	
			Dalam menyusun atau merumuskan Pohon kinerja telah mempertimbangkan CSF dari Outcome atau Tujuan Utama yang ingin dicapai	Menyusun Critical Success Factor untuk setiap sasaran strategis pemerintah daerah	Jumlah sasaran strategis yang memiliki Critical Success Factor	1 Dokumen	FGD tentang Penyusunan CSF Pohon kinerja perangkat daerah	TW I	Bappeda	Selesai		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_VVgY1mKD8mfs3n2vSCW2a2ZZqtY-BRa/edit?usp=drivesdk&ouid=109420350339124129753&rtpof=true&sd=true	
			Telah dilakukan Workshop atau Pendampingan penyusunan Rencana Aksi Perangkat Daerah	Melakukan Pendampingan dalam pelaksanaan Reviu dan perbaikan Pohon Kinerja dan Cascading kinerja Perangkat Daerah	Jumlah PD yang dilakukan Pendampingan dalam pelaksanaan Reviu dan perbaikan Pohon Kinerja dan Cascading kinerja Perangkat Daerah	1 PD	Pendampingan dalam pelaksanaan reviu dan perbaikan Pohon Kinerja (Tingkat daerah dan perangkat daerah)	TW I	Bappeda	Selesai		https://drive.google.com/drive/folders/1btLAqYGAkxcMQi9K5kYlpD8nrJh345k5	
												https://docs.google.com/document/d/1hX7HrmS4RqpYpV1y1-BtCQVdb6N3klUpLgHtcZulHrA/edit?usp=sharing	
			SKP belum sepenuhnya selaras dengan perjanjian kinerja	Menjabarkan kinerja hingga level individu melalui penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai yang selaras dengan kinerja organisasi pada 4 PD Sampel	Persentase Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sasaran Kinerja Pegawai selaras pada 4 PD Sampel	90%	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	TW II	BKPSDM	Proses	Instrumen validasi keselarasan kinerja		
			PD belum dilakukan pendampingan keselarasan kinerja	Melakukan Pendampingan dalam memastikan keselarasan Sasaran Kinerja Pegawai dengan kinerja organisasi	Jumlah Perangkat Daerah yang diberikan pendampingan	28 Perangkat Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	TW II, III, IV	BKPSDM	Proses	Laporan hasil pendampingan		
4.	Belum menyusun identifikasi dan pemetaan atas potensi terjadinya crosscutting antar PD dan pihak-pihak terkait dalam mencapai kinerja organisasi.	4. Menyusun identifikasi dan pemetaan atas cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja	Telah dilakukan identifikasi atau program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dalam pencapaian kinerja	Melakukan identifikasi dan pemetaan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dalam pencapaian kinerja	Jumlah dokumen yang telah dilakukan identifikasi dan pemetaan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dalam pencapaian kinerja	1 Dokumen	Penyusunan tabel pemetaan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dalam pencapaian kinerja	TW I	Bappeda	Selesai		https://drive.google.com/file/d/1i88zkfkEsukl9UNvPGwonK0y8TDgZ2_N/view?usp=sharing	
			Telah dilakukan rapat koordinasi per triwulan berdasarkan 3 (tiga) bidang Koordinasi Bapppeda	Melaksanakan forum koordinasi lintas Perangkat Daerah secara berkala untuk memastikan sinergi pencapaian kinerja	Jumlah forum koordinasi lintas Perangkat Daerah	4 Kegiatan	Pelaksanaan rapat koordinasi per tri wulan oleh masing-masing Bidang Bappeda	TW I, II, III, IV	Bappeda	Proses		https://drive.google.com/drive/folders/1ZQLsRusZ9Pnlu-2GqMTWP_i9INKeenC2?usp=sharing	
B.	PENGUKURAN KINERJA												
1.	Terdapat IKU PD yang belum dilengkapi dengan sumber perolehan data yang sesuai	5. Menyempurnakan Indikator Kinerja Utama dengan definisi operasional dan formulasi penghitungan serta sumber data yang relevan untuk setiap indikator kinerja	Telah dilakukan perumusan dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Menyusun dan menyempurnakan Indikator Kinerja Utama dengan melengkapi definisi operasional, rumus penghitungan, dan sumber data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan	Persentase indikator kinerja utama yang lengkap	100%	1. Sosialisasi tentang penyusunan IKU Kota dan Perangkat Daerah 2. Surat edaran tentang permintaan IKU	TW I	Bappeda	Selesai		https://drive.google.com/drive/folders/1le7YpzYzFAjvG9ng-fAW7JOzDZIMvRn0?usp=sharing	
				Melakukan validasi sumber data indikator kinerja dengan Perangkat Daerah pengampu data	Persentase indikator yang memiliki sumber data valid	100%	Validasi IKU oleh tim Bappeda	TW I, II	Bappeda	Selesai		https://drive.google.com/drive/folders/1le7YpzYzFAjvG9ng-fAW7JOzDZIMvRn0?usp=sharing	

				Melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja utama yang dinilai tidak lagi relevan dengan pengukuran kinerja	Jumlah laporan hasil evaluasi indikator kinerja utama	1 Laporan	Penyusunan laporan hasil evaluasi IKU	TW II	Bappeda	Selesai		https://drive.google.com/drive/folders/1Ie7YpzYzFAjvG9ng-fAW7JOzDZIMvRn0?usp=sharing	
2.	Aplikasi E-Sakip Kota Pariaman belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja PD. Hal ini ditunjukkan dengan data yang belum lengkap pada aplikasi tersebut	6. Menyempurnakan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja yang bisa mengukur kinerja dari organisasi sampai individu serta melakukan pemantauan kinerja secara real time	Menunggu tanggapan terhadap surat permohonan replikasi aplikasi	Menyampaikan permohonan untuk replikasi aplikasi SAKINAH kepada Pemprov Sumbar	Jumlah surat permohonan replikasi aplikasi SAKINAH kepada Pemprov Sumbar	1 Surat	Peningkatan Kinerja dan RB	TW II	Bagian Organisasi	Selesai	Surat Permohonan	https://drive.google.com/file/d/1yqpE8bCwkexk66kB8BUYamP_T0SO7CCU/view?usp=drive_link	
			Saat ini dalam proses untuk perjanjian kerja sama	Tim SAKIP Kota Pariaman melakukan perjanjian kerja sama dengan Tim SAKIP Provinsi Sumatera Barat terkait replika aplikasi SAKINAH Provinsi Sumatera Barat	Jumlah dokumen perjanjian kerja sama replikasi aplikasi SAKINAH Provinsi Sumatera Barat	1 Perjanjian Kerja Sama	Perjanjian kerja sama	TW II	Tim SAKIP	Proses	Dokumen Perjanjian Kerjasama		
			Data kinerja perangkat daerah belum terintegrasi dalam satu aplikasi	Mengintegrasikan seluruh data kinerja Perangkat Daerah ke dalam sistem aplikasi	Persentase Data Kinerja Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam sistem	100%	Koordinasi manajemen SPBE	TW II, III, IV	Diskominfo	Belum	Aplikasi Sakinah		
			Belum dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi	Melaksanakan pelatihan penggunaan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja kepada seluruh Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah ang diberi pelatihan	28 Perangkat Daerah	Koordinasi manajemen SPBE	TW IV	Diskominfo	Belum	Laporan pelaksanaan pelatihan aplikasi SAKINAH		
3.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi sudah disusun, namun belum mengidentifikasi terkait aksi-aksi yang dilakukan dalam mendukung ketercapaian output	7. Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi serta mengidentifikasi keterkaitan aksi-aksi yang dilakukan dan melaporkannya secara berkala untuk memastikan ketercapaian kinerja	Belum tersedia pedoman monitoring dan evaluasi rencana aksi berbasis keterkaitan antara aksi dan hasil kinerja	Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi rencana aksi berbasis keterkaitan antara aksi dan hasil kinerja	Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi	1 Dokumen		TW III	Tim SAKIP	Belum	Pedoman monev rencana aksi		
			Belum tersedia kebijakan terkait pelaksanaan monitoring evaluasi rencana aksi internal perangkat daerah	Membuat Instruksi Wali Kota terkait pelaksanaan monitoring evaluasi rencana aksi internal perangkat daerah	Jumlah dokumen Intruksi Wali Kota	1 Dokumen		TW III	Tim SAKIP	Belum	Instruksi Wali Kota		
			Belum terlaksanana monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dengan analisis ketercapaian kinerja	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dengan analisis ketercapaian kinerja	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja	2 Laporan		TW III, IV	Tim SAKIP	Belum	Laporan Monev		
			Rencana aksi Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah belum dilakukan monev secara optimal	Melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi	3 Laporan	Kegiatan Monev	TW II, III, IV	Bagian Organisasi	Belum	Laporan Monev		
4.	Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi.	8. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai	Telah dilsusun atau dianalisa rekomendasi kebijakan berbasis hasil pengukuran kinerja	Menyusun rekomendasi kebijakan berbasis hasil pengukuran kinerja	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan	4 Dokumen	Menyusun rekomendasi kebijakan berbasis pengukuran kinerja	TW I, II, III, IV	Bappeda	Selesai TW I dan Proses utk TW II, III dan IV		https://drive.google.com/file/d/1BUd8mgv_G-gkZnclvcCxm8lclxoZ1CSv/view?usp=sharing	
			Telah dirumuskan target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota tahun 2026 berdasarkan realisasi tahun 2025	Merumuskan penetapan target pada perjanjian kinerja Pemerintah Kota tahun 2026 berdasarkan realisasi tahun 2025	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota tahun2026 berdasarkan realisasi tahun 2025	1 Dokumen	Perumusan penetapan target Perjanjian Kinerja Kota tahun 2026	TW I	Bagian Organisasi	Selesai	Dokumen Perjanjian Kinerja Kota tahun 2026	https://drive.google.com/file/d/1i-MIbtn14WGKWY-RSbByreiXHIS13Oto/view?usp=drive_link	
			Telah dirumuskan target Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2026 berdasarkan realisasi tahun 2025	Merumuskan penetapan target pada perjanjian kinerja Perangkat Daerah tahun 2026 berdasarkan realisasi tahun 2025	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dengan terget berdasarkan Realisasi Tahun 2025	28 Dokumen	Perumusan penetapan target Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2026	TW I	Bagian Organisasi	Selesai	Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2026		

			Telah di integrasikan hasil pengukuran kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD)	Mengintegrasikan hasil pengukuran kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan Tahunan Daerah yang menggunakan data hasil pengukuran kinerja	1 Dokumen	Penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah kabupaten/Kota	TW II	Bappeda	Selesai		https://drive.google.com/file/d/1nRDdJIWdSorSx95dpI9fWfBWcqHeh_li/view?usp=sharing	
			Belum tersedianya kebijakan pengembangan kompetensi berdasarkan manajemen talenta	Membuat SK Wali Kota terkait Pengembangan Kompetensi dan mutasi rotasi pegawai	Jumlah SK yang ditetapkan	1 SK	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	TW I	BKPSDM	Selesai	SK Penetapan Penilaian Manajemen Talenta	https://drive.google.com/file/d/17cwR7CbAXAot7aGWYCOJKzOK5qPQXTIW/view?usp=drive_link	
			Belum terdapatnya persetujuan penggunaan aplikasi manajemen talenta	Mengajukan persetujuan penerapan manajemen talenta menggunakan aplikasi SIMATA BKN dalam pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai	Jumlah dokumen pengajuan persetujuan penerapan manajemen talenta	1 Dokumen	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	TW II	BKPSDM	Selesai	Dokumen pengajuan penerapan manajemen talenta dan SK BKN tentang PERSETUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	https://drive.google.com/drive/folders/13GwH5QI9nyb2GthPWYgyRGRhKeJ0xc7-?usp=drive_link	
			Belum terdapatnya jabatan yang diisi menggunakan manajemen talenta	Implementasi aplikasi SIMATA BKN dalam pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai	Jumlah jabatan yang diisi menggunakan manajemen talenta	1 Jabatan	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	TW IV	BKPSDM	Belum	Pertimbangan teknis BKN terhadap jabatan yang diisi menggunakan SIMATA BKN		
			Pemberian TPP sebelumnya tidak didasarkan kepada hasil pengukuran kinerja	Merumuskan kebijakan kriteria penilaian/pengukuran kinerja (individu dan instansi) sebagai dasar penilaian pemberian TPP ASN	jumlah kriteria penilaian/pengkuran kinerja	9 kriteria	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	TW I	Bagian Organisasi	Selesai	Telaah/ Rumusan Kebijakan		
C.	PELAPORAN KINERJA												
1.	Laporan kinerja PD tahun 2024 belum seluruhnya dipublikasikan secara lengkap melalui laman resmi website.	9. Memastikan Laporan Kinerja dipublikasikan secara umum kepada masyarakat melalui website resmi sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik	SOP sudah dipublikasikan di website PPID	Mempublikasikan Standar Operasional Prosedur publikasi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melalui website resmi sebagai pedoman pelaksanaan keterbukaan informasi kinerja kepada masyarakat	Jumlah media publikasi SOP	3 Media	Pelayanan informasi publik	TW II	Diskominfo	Proses	Surat ke PD, website, media sosial	https://drive.google.com/drive/folders/17gEmABIulvzT47UR2aZuKr3nisEXDhZI?usp=drive_link	
			Hingga saat ini terdapat 15 PD yang telah mempublikasikan dokumen LAKIP pada website kota	Menintruksikan kepada Perangkat Daerah untuk melakukan publikasi dokumen Lakip pada Website resmi Kota Pariaman	Persentase Perangkat Daerah yang mempublikasikan laporan kinerja	100%	Pelayanan informasi publik	TW II	Diskominfo	Proses	Surat ke PD, Screenshoot publikasi dokumen LAKIP pada website kota	https://drive.google.com/drive/folders/11EMhtm5iwk4ZV4rLinI4QVv9PJ2mhG0W?usp=drive_link	
			Telah dilakukan monitoring publikasi laporan kinerja	Melaksanakan monitoring publikasi laporan kinerja kepada publik secara berkala	Jumlah laporan monitoring publikasi laporan kinerja	3 Laporan	Pelayanan informasi publik	TW II, III, IV	Diskominfo	Proses	Laporan Monev	https://drive.google.com/drive/folders/16IrvSFeVVanIk5zGqLxS8zh6eDU6IMLm?usp=drive_link	
2.	Sebagian laporan kinerja pada level PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai yaitu belum sepenuhnya menjelaskan analisis terkait pencapaian kinerja disertai faktor keberhasilan atau hambatan yang spesifik dan lengkap dalam mencapai sasaran strategis.	10. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja serta menyajikan analisis secara mendalam atas ketercapaian kinerja	Telah disusun pedoman penyusunan LAKIP	Menyusun pedoman penyusunan laporan kinerja berbasis analisis capaian, faktor keberhasilan, dan hambatan	Tersedianya pedoman penyusunan laporan kinerja	1 Dokumen	Menyusun pedoman penyusunan LAKIP	TW I	Bagian Organisasi	Selesai	Dokumen pedoman penyusunan Laporan Kinerja	https://drive.google.com/file/d/1e1vUVGvBjz7inTILd018zNazbuveqYUp/view?usp=sharing	
			Pemahaman Perangkat Daerah terkait penyusunan LAKIP belum optimal	Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja kepada seluruh Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti bimbingan teknis	100%	Bimtek penyusunan LAKIP	TW III	Bagian Organisasi	Belum	Laporan Bimtek		

			Terdapat 7 PD sampel yang belum memenuhi kualitas minimal laporan kinerja	Melakukan reviu kualitas laporan kinerja Perangkat Daerah terhadap 7 PD sampel sebelum diformalkan	Jumlah catatan hasil reviu yang dihasilkan	7 Catatan Hasil Reviu	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	TW II	Inspektorat	Proses	Catatan Hasil Reviu		
			Telah dilakukan proses reviu kualitas kinerja Perangkat Daerah	Melakukan reviu kualitas laporan kinerja seluruh Perangkat Daerah sebelum diformalkan	Jumlah Laporan Kinerja PD yang direviu	28 PD	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	TW II	Inspektorat	Proses	Laporan Hasil Reviu		
3.	Informasi dalam laporan kinerja sudah digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya, namun Laporan Kinerja sebagian PD belum menyajikan upaya/rencana perbaikan yang perlu dilakukan serta belum mengaitkan dengan analisa kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai kinerja.	11. Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya	Sedang dilakukan monev	Melaksanakan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan memastikan bahwa target kinerja yang ditetapkan tidak lebih rendah dari realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta tetap memperhatikan potensi peningkatan kinerja	Jumlah monev yang dilakukan	2 Kegiatan	Kegiatan Monev	TW II, IV	Bagian Organisasi	Proses	Laporan Monev		
		12. Memastikan Laporan Kinerja yang disusun Perangkat Daerah telah memuat strategi ke depan dan dimanfaatkan dalam perencanaan tahun berikutnya	Belum menyusun rencana tindak lanjut dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Menyusun rencana tindak lanjut dalam laporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja yang memuat rencana tindak lanjut	100%	Menyusun rencana tindak lanjut	TW II	Bagian Organisasi	Proses	Laporan		
			Belum tersedia template analisis kienrja, sehingga penyajian informasi dan analisa tidak seragam	Penyediaan contoh dan template analisis kinerja yang baku, sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas dan seragam	Jumlah format/template yang disediakan	1 format	Penyusunan Laporan Kinerja	TW I	Bagian Organisasi	Selesai	Template Analisis Kinerja		
D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL												
1.	Laporan hasil evaluasi belum memberikan catatan dan rekomendasi yang lengkap, mendalam, dan menyasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh PD dalam mengimplementasikan SAKIP.	13. Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh aspek untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap Perangkat Daerah	Pedoman evaluasi internal di atur dalam Perwako Nomor 36 tahun 2022 namun belum secara detail	Menyusun pedoman evaluasi internal yang menekankan analisis akar masalah, penyebab, dan solusi perbaikan	Tersedianya pedoman evaluasi internal	1 Dokumen	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	TW II	Inspektorat	Dalam Proses	Keputusan Inspektur		
			Reviu berjenjang belum optimal	Meningkatkan intensitas reviu berjenjang mulai dari ketua tim, pengendali teknis dan wakil penanggungjawab	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi	28 Dokumen	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	TW II	Inspektorat	Dalam Proses	Lembaran hasil reviu		
			Pelaksanaan panel tidak terfokus pada PD yang bernilai rendah	Melaksanakan panel internal dan eksternal untuk 5 PD tertinggi dan 5 PD terendah	Jumlah PD yang di panelkan	10 Dokumen	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	TW II	Inspektorat	Belum	Berita Acara Panel		
2.	PD belum sepenuhnya memanfaatkan secara maksimal hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang disampaikan oleh Inspektorat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja PD	14. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang dilakukan Perangkat Daerah dan memastikan ketepatannya	Belum dilaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi	Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi secara berkala dan memastikan implementasinya	Jumlah monev yang dilakukan	2 Kali	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	TW III, TW IV	Inspektorat	Belum	Laporan Monev		
3.	Telah memiliki kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi AKIP internal, namun belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di beberapa PD.	15. Membuat kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di level Perangkat Daerah	Telah disusun kebijakan reward dan punishment berbasis hasil evaluasi kinerja	Menyusun kebijakan reward dan punishment berbasis hasil evaluasi kinerja	Tersedianya kebijakan reward dan punishment	1 Dokumen	Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	TW I	Bagian Organisasi	Selesai	Perwako TPP	https://drive.google.com/file/d/1ok3YXf7ZEmUX11wjSMH6gtohgtcoajLV/view?usp=sharing	
			Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebelumnya tidak didasarkan kepada hasil pengukuran kinerja instansi	Melaksanakan pemberian reward dan punishment kepada Perangkat Daerah berdasarkan capaian hasil penilaian kinerja instansi terkait Pemberian TPP ASN	Persentase Perangkat Daerah yang diberikan penilaian kinerja instansi	28 PD	Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	TW I, II, III, IV	Bappeda, BPKPD, BKPSDM, Inspektorat, Bagian Organisasi	Selesai (TW i), Masih berjalan (TW II, III, IV)	Berita Acara Penilaian per kriteria		
			Sebelumnya tidak tersedia kebijakan terkait penilaian TPP ASN yang didasarkan kepada hasil penilaian kinerja	Merumuskan kebijakan kriteria penilaian/pengukuran kinerja (individu dan instansi) sebagai dasar penilaian pemberian TPP ASN	jumlah kriteria penilaian/pengkuran kinerja	9 kriteria		TW I	Bagian Organisasi	Selesai	Telaah/ Rumsuan Kebijakan		

			Pelaksanaan pemberian reward belum efektif	Penganugrahan Plakat SAKIP Award berdasarkan penilaian SAKIP Internal	Jumlah PD penerima SAKIP Award	3 PD	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	TW III	Inspektorat	Dalam Proses	Bukti Pelaksanaan SAKIP Award		
			Pelaksanaan pemberian punishment belum efektif	Melakukan penyesuaian bobot punishment pada penilaian kinerja instansi dalam kebijakan pemberian TPP ASN	Analisa penyesuaian bobot punishment	1 Telaah Staf	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	TW III	Inspektorat	Belum	Telaah Staf		
		16. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal dan profesional	Belum dilakukan bimtek bagi evaluator	Melaksanakan bimbingan teknis evaluator SAKIP di lingkungan pemerintah daerah	Persentase evaluator yang mengikuti bimbingan teknis	100%	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	TW II	Inspektorat	Selesai	Bukti Pelaksanaan Bimtek	https://drive.google.com/file/d/1LvoPwadEjieFGS3QB-BVLXp4W_X_fdJU/view?usp=sharing	
			Belum dilakukan diklat bagi evaluator	Mengusulkan diklat bagi tim evaluator	Jumlah evaluator yang mengikuti diklat	20 Orang	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	TW III, IV	Inspektorat	Dalam Proses	Surat usulan Diklat		

Pariaman, 01 Mei 2026

Sekretaris Daerah,



Afrizal Azhar

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PARIAMAN